

POLITIK AMBIVALENSI: NALAR ELITE DI BALIK PEMENANGAN PILKADA

Kata Pengantar:

Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra, M.A.

Dr. Asep Nurjaman, M.Si.

Dr. Guno Tri Tjahjoko



Politik Ambivalensi: Nalar Elite di Balik Pemenangan Pilkada

Hak cipta © Penerbit PolGov, 2015

All rights reserved

Penulis: **Dr. Guno Tri Tjahjoko**

Editor: **Umi Nurun Ni'mah**

Pemeriksa Aksara: **Cucuk Radosha**

Tata Letak Isi: **M. Baihaqi Lathif**

Cetakan I, **Desember 2015**

Diterbitkan oleh Penerbit PolGov

Penerbit PolGov khusus menerbitkan buku-buku politik dan pemerintahan, berada di bawah payung *Research Centre of Politics and Government (PolGov)*.

Research Centre for Politics and Government (PolGov) adalah lembaga riset dan publikasi dari Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) Fisipol UGM. Saat ini *PolGov* berfokus pada empat tema kunci sesuai dengan kurikulum JPP, yaitu: 1) politik lokal dan otonomi daerah, 2) partai politik, pemilu, dan parlemen, 3) HAM dan demokrasi, 4) reformasi tata kelola pemerintahan dan pengembangan sistem integritas.

Gedung BA Lt. 4 Fisipol UGM

Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

<http://jpp.fisipol.ugm.ac.id>

Telp./Fax:

Surel: polgov.ugm@gmail.com

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Dr. Guno Tri Tjahjoko

Politik Ambivalensi: Nalar Elite di Balik Pemenangan Pilkada

Penulis: Dr. Guno Tri Tjahjoko; Editor: Umi Nurun Ni'mah

Cet.1 — Yogyakarta: Penerbit PolGov, **Desember 2015**

lxxii + 236 hlm. 15 x 23 cm

ISBN

1. Sosial /Politik

I. Judul

SEPATAH KATA

PERSPEKTIF BARU TERHADAP FENOMENA PATRONASE DI INDONESIA

Puji syukur kepada Tuhan atas terbitnya buku “POLITIK AMBIVALENSI: Nalar Elite di Balik Pemenangan Pilkada”, sehingga buku ini ada di tangan pembaca. Sesungguhnya, buku ini merupakan disertasi penulis yang telah diedit dengan bahasa populer, agar mudah dipahami isinya dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Naskah disertasi secara lengkap penulis ajukan pada Program Studi Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (April 2015). Buku yang bermula dari disertasi memiliki kelebihan dibanding buku yang lain, karena ia berfokus pada kebaruan.¹ Dalam buku ini, penulis menawarkan cara pandang baru berkaitan dengan penalaran elite di balik kemenangan Pilkada. Penulis mengungkap penalaran makna yang tersembunyi di balik strategi ofensif dan defensif yang diterapkan oleh elite dalam kontestasi Pilkada.

Penulisan disertasi ini memerlukan waktu tiga tahun, sedangkan seluruh proses studi dilakukan dengan durasi waktu sembilan tahun. Lamanya studi dan riset disebabkan

1 Kata “kebaruan” di sini mengacu pada sebuah pengertian dalam dunia akademis, yang dalam bahasa Inggris umumnya diistilahkan dengan *novelty*.

banyak faktor. Di antaranya, kesulitan penulis menemukan kebaruan dalam ilmu politik (patronase), budaya, dan bahasa serta minimnya literatur tentang nalar elite di Indonesia. Proses riset buku ini dilakukan di Kalimantan Timur (Agustus 2009).

Untuk mengetahui bekerjanya nalar elite lokal, penulis melacak budaya Kutai yang merupakan salah satu etnis berpengaruh pada era Orde Lama dan Orde Baru. Dalam masa pencarian data tentang nalar elite lokal tersebut, penulis menemukan adanya tradisi *erau*. Pada mulanya *erau* merupakan tradisi untuk penobatan raja Kutai, tetapi ketika Kesultanan Kutai menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia, statusnya sebagai daerah kesultanan secara bertahap melebur hilang dan digantikan kabupaten. Peleburan Kesultanan Kutai menjadi bagian dari Republik Indonesia memerlukan pergulatan panjang; terjadi konflik horisontal antara front pendukung Kutai dan front Nasional yang memakan korban masyarakat di Sangatta. Intinya, kalangan elite keberatan apabila Kesultanan Kutai bergabung ke Republik Indonesia, karena hal ini berdampak hilangnya royalti yang diterima dari Belanda setiap bulan atas sumber daya alam di Kalimantan Timur.

Ketika rezim Orde Baru berkuasa, tradisi *erau* dibangkitkan kembali. Namun, fungsinya berubah menjadi festival budaya karena tidak ada lagi penobatan raja Kutai. Festival *erau* diselenggarakan setiap tahun bersamaan dengan hari jadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Tenggarong) dan dibiayai melalui APBD. Adanya festival *erau* tersebut menjadi pintu masuk bagi penulis untuk melacak nalar elite lokal, khususnya dalam transformasi nilai-nilai budaya ke ranah politik. Salah satu acara penting dalam *erau* ialah pemberian gelar bangsawan kepada tokoh masyarakat, politik, dan agama yang berjasa terhadap Kesultanan Kutai. Di antara mereka, terdapat

elite politik lokal dan nasional. Pemberian gelar bangsawan tersebut merupakan investasi politik yang kelak ada imbal baliknya, khususnya bagi kepentingan elite Kutai. Imbal balik ini sangat sulit mereka hindarkan karena dalam proses penerimaan gelar bangsawan Kutai, mereka disumpah untuk setia dan mendukung eksistensi Kesultanan Kutai.

Selain ritual pemberian gelar bangsawan, dalam tradisi *erau* juga dilakukan persembahan hasil panen kepada raja; masyarakat dari pedalaman dan tokoh masyarakat (*abdi dalem*) membawa hasil bumi untuk dipersembahkan kepada raja sebagai ungkapan syukur atas panen raya. Sebagai respons raja terhadap persembahan tersebut, dia menerima dan mengundang mereka dalam acara jamuan makan bersama.

Memperhatikan tradisi *erau* dengan adanya budaya pemberian-penerimaan tersebut, penulis mendapatkan pencerahan untuk melacak nalar elite lokal melalui relasi patronase. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai patron ialah elite Kutai, dan sebagai klien ialah elite politik yang menerima gelar bangsawan. Gelar tersebut diperlukan oleh elite lokal dalam rangka mendapatkan legitimasi masyarakat. Dengan demikian, elite lokal niscaya memahami dan mempraktikkan budaya pemberian-penerimaan sebagai suatu anugerah raja. Dengan status bangsawan, dia memiliki modal lebih untuk memengaruhi dan mengikat relasi terhadap tokoh adat, agama, dan masyarakat yang masih loyal terhadap Kesultanan Kutai. Di sisi lain, sebagai bangsawan, dia harus banyak memberi kepada masyarakat, sebab mereka berpandangan kharisma kebangsawanan ditentukan oleh besar kecilnya pemberian, baik barang maupun jasa. Semakin besar pemberian, ikatan patronase yang dirajut dalam masyarakat semakin kuat. Nalar pemberian-penerimaan sebagai kharisma inilah yang

penulis maknai sebagai bentuk politik kontekstualisasi. Penulis menyebut nalar seperti ini dengan istilah nalar politisi.

Namun, menggunakan nalar politisi yang kontekstual saja tidaklah cukup bagi elite untuk memenangkan kontestasi dalam Pilkada. Elite dihadapkan dengan regulasi dalam kontestasi. Alhasil, dia dituntut untuk mencitrakan diri sebagai figur yang demokrat, taat hukum, anti korupsi, tidak melanggar HAM, dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dia niscaya menginstrumentasi nalar demokratis/aktivis agar diterima oleh masyarakat perkotaan. Dia dihadapkan pada dua domain yang simultan sehingga tak pelak lagi, dia menginstrumentasi dua nalar secara terpisah atau simultan.

Buku ini menawarkan sebuah cara pandang baru tentang patronase dalam konteks Indonesia. Cara pandang ini bisa diterapkan di seluruh daerah Indonesia yang berlatar belakang monarkhi ataupun non-monarkhi. Selain itu, cara pandang ini juga relevan untuk diterapkan di negara lain. Hal itu penulis simpulkan setelah mengadakan studi banding terhadap hasil riset patronase di Yunani, Afrika, Italia, Amerika Latin, India, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia, dengan tujuan untuk menguji apakah cara pandang baru tentang patronase itu dapat diterapkan di luar Indonesia. Inilah inti temuan baru yang penulis tawarkan dalam studi ini. Temuan ini menunjukkan bahwa teori patronase tidak hanya berlaku dalam masyarakat agraris seperti yang dipersepsi Scott (1972). Hasil studi ini memberikan cara pandang baru yang mampu mengakomodasi penerapan teori patronase baik dalam masyarakat agraris, urban, dan metropolitan.

Temuan baru dalam buku ini tidak bisa terlepas dari masukan dan bimbingan Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra, M.A., M.Phil. dan Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A.

Selain itu, penulis juga mendapatkan pencerahan ide dan pendalaman materi dari Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. dan Dr. Aris Mundayat, M.A. Pendalaman teori dan kritik tajam juga diperoleh dari Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.P.A.; Prof. Dr. Buhan Djabir Magenda, M.A.; Dr. Suharko, M.Si.; dan Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si. Kepada mereka, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Penulis juga harus akui bahwa tanpa dukungan keluarga, buku ini tidak akan bisa terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada isteri penulis, Oneng Wardani, yang setia menemani dan sabar menunggu; juga, kepada kedua anak penulis, Ebedia Hilda Am dan Justitia Millevania, yang senantiasa menjadi penyemangat, semoga mereka menjadi lebih bermakna bagi orang lain. Sudah sepantasnya hasil pencapaian tertinggi studi ini dipersembahkan kepada Tuhan, isteri penulis, dan kedua anaknya.

Selain dukungan para pakar dan keluarga tersebut, penulis juga dibantu oleh para dosen dan peneliti. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada Dr. Nanang Mugasejati, M.A. yang membantu penulis dalam proses diskusi kelompok dan fasilitasi terhadap para pakar, juga kepada rekan-rekan diskusi kelompok S3 yang mempertajam pikiran. Penulis juga berterima kasih kepada Dr. Haryanto, M.A.; Cornelis Lay, M.A.; Ratnawati, M.A.; Dr. Mada Sukmajati, M.A.; Dr. Asep Nurjaman, M.A.; Bambang, M.A.; Gus Tommy; mas Hanif; Utan Parlindungan; dan Joash Tapiheru, M.A.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Awang Faroek Ishak, M.Si. yang bersedia memberikan data dan wawancara. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rudy Koesnendar selaku Ketua KAGAMA Kaltim yang membantu dalam proses penelitian di lapangan. Demikian juga penulis berterima kasih kepada Muhammad

Arifin, M.Hum. yang membantu dalam pengumpulan data. Selain itu, banyak kolega penulis di dunia virtual dan para mahasiswa Kaltim yang tidak bisa disebutkan satu per satu, kiranya kebaikan mereka dibalas oleh Tuhan yang Maha Baik.

Untuk mengumpulkan data disertasi ini penulis banyak dibantu oleh staf perpustakaan dan karyawan JPP-Fisipol UGM. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada bu Ambar, bu Andri, mas Ali, mas Alwan, mbak Ana, mas Rangga, *lik* Yadi (alm.), *lik* Megeng dan staf lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Kiranya, kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan yang Maha Baik.

Penulis juga memberikan apresiasi kepada kepada Prof. Gerrit Singgih, Ph.D. dan Pdt. Djaka Soetapa, Th.D (alm.) yang merekomendasikan penulis sebagai mahasiswa S3, Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Penulis juga memberikan apresiasi kepada Prof. Dr. Warsito Utomo, M.A. yang menyemangati dan memotivasi untuk menyelesaikan riset ini. Apresiasi juga penulis berikan kepada Sigit Dwi Kusrahmadi, M.Hum., Pdt. Tommy Dumgair, M.Th.; Julio Kristano Andrea Putra, M.Div.; Soeseno Adi; Iranta Bona Sinaga; Edy Santoso; Yussac Djoko Utomo; Agus Dwi Haryanto; dan Dr. Kharisma Nugroho, M.Si; karena doa dan bantuan finansialnya. Penulis memberikan apresiasi kepada Pdt. Dr. Johanis Siahaya, M.Th. yang memberikan surat keterangan yang dibutuhkan sebagai syarat masuk Universitas Gadjah Mada. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pdt. Cornelius Sianturi, M.Div.; Dr. Sarwono, M.Pd. dan Paguyuban Warga Kalasan GKJ Tanjungtirto yang mendoakan secara kontinu proses penyelesaian riset ini.

Akhirnya, penulis berterima kasih kepada Penerbit PolGov, Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM yang

telah menerbitkan buku ini. Tidak lupa apresiasi terhadap rekan kerja penulis di KPU DIY: Hamdan Kurniawan, S.I.P., M.A.; Nur Huri Mustofa, S.Ag., M.S.I.; Drs. Farid Bambang Siswantoro; dan Siti Ghoniyatun, S.H. yang memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan buku ini.

“Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan, dan oleh Tuhan, dan kepada Tuhan: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!” (Roma 11:36)

Kaki Merapi, Desember 2015

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

KATA PENGANTAR

DARI PRAKTIK POLITIK KE NALAR POLITIK

Oleh:

Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra, M.A.

Antropologi Budaya

Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Gadjah Mada

Pendahuluan

Buku yang berasal dari disertasi yang dipertahankan penulisnya, Guno Tri Tjahjoko (selanjutnya ditulis Dr. Guno), di depan tim penguji program Doktor Ilmu Politik, UGM, ini pada dasarnya menampilkan sebuah kajian mengenai praktik-praktik politik yang terlihat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sebuah provinsi di Indonesia, dan nalar politik yang ada di balik praktik politik tersebut. Kasusnya diambil dari Provinsi Kalimantan Timur—salah satu provinsi yang kaya dengan sumber daya alam minyak, gas, dan batubara.

Sebagaimana provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, daerah Kalimantan Timur telah mengalami perubahan yang sangat mencolok setelah era pemerintahan Orde Baru. Kebijakan dan proses desentralisasi di era Orde Reformasi telah memungkinkan pemerintah daerah memperoleh jatah dana pembangunan daerah yang sangat besar, dan kemudian mendorong pembangunan fisik dan infrastruktur di daerah-daerah yang lebih terpencil di provinsi tersebut. Meskipun demikian, pembangunan fisik tersebut bukanlah satu-satunya dampak yang terpenting dari kebijakan desentralisasi. Tidak kalah pentingnya adalah perubahan sistem politik dan praktik berpolitik di daerah-daerah, yang kemudian sangat menentukan arah pembangunan sarana dan prasarana.

Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia kini pengelolaan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, sebagian berada di tangan pemerintah pusat dan sebagian lagi berada di tangan pemerintah daerah, yang dalam hal ini bisa pemerintah daerah tingkat provinsi, bisa pula tingkat kabupaten. Kebijakan mana yang lebih menentukan arah perkembangan di sebuah daerah tampaknya tergantung pada tingkat keeratn hubungan antara pemerintah daerah kabupaten (Pemkab) dengan pemerintah tingkat provinsi (Pemprov). Daerah-daerah dengan gubernur yang memiliki popularitas tinggi, jaringan sosial luas, dan menerapkan kebijakan yang tepat, akan merasakan pengaruh Pemprov yang kuat di tingkat kabupaten hingga tingkat pedesaan. Sedangkan daerah dengan gubernur yang memiliki jaringan sosial kurang luas dan tingkat popularitas rendah, tidak akan banyak merasakan dampak dari berbagai kebijakan Pemprov. Dalam situasi ini, pengaruh kebijakan Pemkab biasanya akan terasa lebih kuat daripada pengaruh Pemprov. Di Kalimantan Timur—sebagaimana terlihat dalam buku ini, situasi yang pertama rupanya yang

lebih dirasakan. Meskipun hal ini bisa juga lebih disebabkan oleh pemilihan unit analisis dalam kajian ini, yaitu pemerintah tingkat provinsi, daripada gambar realitas yang sebenarnya. Jika saja unit analisis kajian di sini bukan politik tingkat provinsi, sangat mungkin pengaruh pemerintah kabupaten akan terlihat lebih kuat daripada pengaruh pemerintahan tingkat provinsi.

Membaca buku ini memerlukan kesabaran dan ketelitian sendiri karena datanya yang rinci. Sebagai ko-promotor yang kemudian harus menggantikan kedudukan promotor, saya turut merasakan kesulitan yang dihadapi oleh penulis untuk menyusun dan menyajikan berbagai data politik dari lapangan, yang begitu banyak dan rumit. Pada awalnya, penulis memusatkan perhatiannya pada peristiwa pilkada dan hasilnya di Kalimantan Timur, yang menurutnya memperlihatkan gejala menarik, karena keterkaitannya dengan berbagai hal yang tidak selalu terlihat bersifat “politis”. Salah satunya adalah sebuah ritual yang dianggap penting oleh sebagian masyarakat di Kalimantan Timur, terutama oleh penduduk “aslinya”, yaitu *erau*.

Erau adalah sebuah ritual penobatan raja yang berasal dari masa Kesultanan Kutai di masa lampau, yang pergelarannya selalu disaksikan oleh ribuan penduduk Kalimantan Timur. Di masa kini, *erau* tidak semakin surut, tetapi justru semakin kuat posisinya dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Timur karena dianggap telah pantas menjadi salah satu ikon budaya penting yang mereka miliki. Ritual ini telah menjadi salah satu elemen dari perangkat simbol yang merepresentasikan jati diri masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena penyelenggaraan ritual ini selalu terkait dengan Kesultanan Kutai, maka posisi keluarga kerajaan juga semakin menguat dalam alam imajinasi masyarakat Kalimantan Timur.

Keterkaitan sebuah fenomena keagamaan (budaya)—seperti ritual—dengan aktivitas dan kemenangan politik sama sekali bukan hal yang baru dalam kajian-kajian antropologi politik dalam skala global. Berbagai penelitian antropologi politik sangat jelas memperlihatkan keterkaitan “agama” dan “politik” tersebut (lihat, misalnya, Blok, 1969b; Boissevain, 1977; Errington, 1974; Geertz, 1980; Gluckman, 1965; Turner, 1968; Worsley, 1968). Namun, tidak demikian tampaknya dengan kajian-kajian politik maupun antropologi politik di Indonesia. Sangat jarang penelitian mengenai suatu peristiwa keagamaan (budaya) dihubungkan dengan aktivitas politik. Demikian juga sebaliknya. Sangat sedikit penelitian mengenai suatu peristiwa politik yang dihubungkan dengan peristiwa keagamaan (budaya). Oleh karena itu, kajian Dr. Guno ini merupakan sebuah kajian fenomena politik yang belum begitu lazim di Indonesia, baik pada obyek material atau kasusnya, maupun pada perspektifnya.

Dalam proses pembimbingan penulisan disertasi Dr. Guno, saya banyak mendengarkan kisah-kisah tentang para politisi dan aktivitas mereka untuk pemenangan pilkada. Data yang dimilikinya sangat banyak dan rinci. Di satu sisi, hal ini merupakan sebuah keuntungan atau kelebihan karena Dr. Guno tidak perlu terlalu bersusah-payah mengumpulkan data lagi, tetapi di sisi lain hal itu menimbulkan kesulitan dalam menganalisisnya. Tidak mudah merangkum keseluruhan data dalam sebuah kerangka pemikiran yang utuh, yang akan membuat orang dapat memahami sistem dan aktivitas politik di Kalimantan Timur. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: paradigma apa yang sebaiknya digunakan untuk menganalisis data fenomena perpolitikan di Kalimantan Timur dan memahami berbagai praktik politik sebagaimana yang telah disaksikan dan dialami oleh Dr. Guno?

Setelah melalui proses diskusi dan perenungan yang lama, Dr. Guno akhirnya dapat menemukan sebuah paradigma yang tepat untuk memahami, menjelaskan, dan menampilkan fenomena perpolitikan tersebut, yaitu paradigma aktor dengan fokus pada hubungan patronase (*patronage*) atau hubungan patron-klien (*patron-client relationship*). Hubungan patronase sebagai sebuah relasi sosial di antara dua individu yang berbasis pada proses pertukaran di antara keduanya merupakan sebuah gejala sosial yang banyak kita temukan di berbagai tempat di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat atau suku bangsa dengan corak sistem kekerabatan tertentu, yaitu bilateral, misalnya masyarakat Jawa, Bugis, Makassar, Melayu, Sunda, dan biasanya sangat terkait dengan aktivitas perpolitikan.

Anehnya, meskipun gejala ini cukup umum di Indonesia, sangat sedikit ilmuwan sosial dan politik yang tertarik untuk meneliti gejala ini secara serius. Ketika saya melakukan penelitian mengenai fenomena sosial ini di akhir 1970an, tidak ada tulisan dari ilmuwan sosial Indonesia yang membahas gejala tersebut. Sementara itu, wacana mengenai gejala tersebut merupakan salah satu wacana yang paling populer di kalangan ahli antropologi dan ilmuwan politik di Barat. Oleh karena itu, studi Dr. Guno mengenai politik patronase di sini dapat dilihat sebagai upaya untuk menghentikan kejanggalan tersebut.

Berkenaan dengan studi mengenai patronase tersebut, buku ini menurut hemat saya telah memberikan dua sumbangan penting. *Pertama*, mencoba menunjukkan perbedaan gejala patronase dengan sebuah gejala lain yang mirip dan dipandang negatif, yang hampir selalu muncul dalam setiap pilkada di Indonesia, yaitu politik uang. *Kedua*, mencoba menguak nalar di balik proses pilkada tersebut, yang memanfaatkan relasi patronase sebagai salah satu siasat utama untuk memenangkan kontestasi politik.

Patron dan Patronase

Istilah patronase berasal dari kata Inggris '*patronage*', yang merupakan bentuk lebih lanjut dari kata '*patron*'. Kamus Oxford¹ menyebutkan bahwa kata '*patron*' berasal dari bahasa Latin '*patronus*' yang berarti '*protector of clients*', '*advocate*', '*defender*'; (a) '*one who stands to another or others in relations analogous to those of a father; a lord or master; a protector*'; (b) '*a person of distinction who protected a client in return for certain services*'; (c) '*one who lends his influential support to advance the interests of a person, cause, art, etc.*'. Dengan demikian, patronage diartikan sebagai a) '*the office or action of a patron*'; 1) '*the right of presentation to eccl. benefice; advowson*'; 2) '*guardianship, tutelary care as of a divinity or saint*'; 3) '*the action of a patron in supporting, encouraging, or countenancing a person, institution, a work of art etc.*'; b) '*protection, defence, protectorship*'.

Dalam bahasa Inggris, istilah patron terkait dengan istilah lain sebagai pasangannya, yaitu '*client*', yang maknanya antara lain adalah '*one who is at another's call*'. Pada masa Romawi Kuno, *client* berarti '*a plebeian under the protection of a patrician, in this relation called a patron (patronus)*'. *Client* juga berarti '*one who is under the protection or patronage of another*'; '*a dependant*'. Dari sini terbentuk kata '*clientage*' yang maknanya '*a body of clients*'; '*the relation of client to patron*'; kata '*clientship*' yang bermakna '*state or relation of a client*'; kata '*clientele*' yang artinya adalah 1) '*the relation or status of a client*'; '*clientship*'; '*patronage*'; 2) '*a body of clients of dependants*'; '*a body of adherents*'; '*a following*'.

1 *The Shorter Oxford English Dictionary On Historical Principles*, 1973.

Dari makna *patron* dan *client* di atas, terlihat bahwa *patronage* tidak berbeda makna denotatif dengan *clientage* atau *clientelism*, tetapi memiliki perbedaan makna konotatif yang bermuara pada penekanan dan pengambilan sudut pandang. Dalam analisis politik, fenomena patronase juga sering disebut dengan istilah-istilah lain yang maknanya kurang lebih sama, misalnya hubungan patron-klien (*patron-client relationship*), *clientelism*, dan *clientage*. Ketika seorang peneliti menggunakan istilah 'hubungan patron-klien', apa yang ingin ditekankan di sini adalah unsur timbal balik antara seorang patron dengan kliennya, sebagaimana yang dipersepsi oleh James C.Scott (1972a). Jika peneliti menggunakan istilah patronase (*patronage*), maka dia mengambil sudut pandang patron dan ingin menekankan aspek pemberian yang berasal dari patron, sebagaimana yang terlihat pada pembahasan Ernest Gellner (1977). Jika peneliti menggunakan istilah *clientelism*, *clientship* atau *clientage*, maka dia sebenarnya mengambil sudut pandang klien (*client*) sebagai titik tolaknya, sebagaimana yang terlihat pada kajian Lucy Mair (1969) dan Steffen W. Schmidt dkk. (1977).

Sejarah makna istilah patronase dan *clientship* menunjukkan bahwa fenomena tersebut sudah lama dikenal dalam kehidupan manusia, dan merupakan bagian dari fenomena perpolitikan. Meskipun demikian, kepopuleran patronase sebagai sebuah perangkat konsep analitis dalam ilmu politik ternyata terjadi belum begitu lama. Kajian-kajian mengenai patronase dalam ilmu sosial diawali dari beberapa etnografi yang ditulis oleh beberapa ahli antropologi yang melakukan penelitian di era 1960-1970an mengenai hubungan antarindividu yang berpola, dan tidak berbasis pada sistem kekerabatan di kawasan Amerika Selatan (Foster, 1961; 1963; Heath, 1973), Eropa Selatan, dan Laut Tengah (Blok,

1969b; Boissevain, 1964; 1966b; Campbell, 1964; Graziano, 1973; Kenny, 1960; Pitt-Rivers, 1961; Weingrod, 1968), Afrika (Buxton, 1967; Cohen, 1966; Lemarchand, 1971; Mair, 1969), Asia Selatan (Barth, 1959), dan Asia Tenggara (Hollnsteiner, 1961; Scott, 1972a; 1972b). Konsep patronase memungkinkan mereka memahami peristiwa-peristiwa politik dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya lebih lanjut konsep ini dianggap strategis untuk memahami dan mendeskripsikan hubungan-hubungan di antara kelompok, organisasi, dan bahkan juga negara (Eisenstadt dan Roniger, 1980; Kaufmann, 1974; Landé, 1977a; 1977b; Powell, 1970) sehingga patronase kini tidak hanya merupakan sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku tertentu pada tataran individual, tetapi juga mengacu pada pola hubungan yang ada di antara dua entitas sosial politik pada tingkat nasional (Shirley, 1972), maupun internasional (Gonzalez, 1972).

Konsep patron-klien memang telah mengalami beberapa tahap metamorfose. Berawal dari realitas sehari-hari yang menarik perhatian para ahli antropologi, pola interaksi antara sang patron dan kliennya kemudian diangkat menjadi fakta etnografi dan akhirnya menjadi model untuk memahami realitas sosial yang lebih kompleks. Nama yang digunakan untuk menyebut gejala sosial ini pun bervariasi. Ada istilah hubungan patron-klien; ada patronase; ada *clientelism*; ada pula *clientage*. Kini, wacana tentang hubungan patron-klien itu telah menjadi sebuah fenomena sosial tersendiri dalam jagat ilmu sosial dan politik.

Popularitas model patron-klien dalam wacana ilmu politik semakin meningkat ketika sejumlah ahli memanfaatkan model tersebut untuk memahami berbagai gejala dan peristiwa politik yang sebelumnya sulit dipahami dengan menggunakan model-model yang biasa digunakan dalam ilmu politik. Hal

ini terjadi ketika mereka meneliti fenomena politik di negara-negara berkembang, yang menampilkan partai politik dan birokrasi pemerintahan sebagai gejala-gejala sosial baru dalam masyarakat. Di negara-negara tersebut partai politik dan birokrasi memang sudah ada, akan tetapi kinerjanya ternyata tidak sepenuhnya sama dengan di negara-negara Barat, sebagaimana yang biasa dikenal dan diteliti oleh para ilmuwan politik Barat. Hal ini membuat berbagai “teori” ilmu politik yang selama ini manjur untuk menjelaskan gejala dan peristiwa politik di Barat, ternyata mengalami kemandulan ketika diterapkan di negara-negara berkembang atau negara-negara yang baru merdeka di tahun 1950an (lihat Scott, 1972a; Landé, 1977b).

Indonesia termasuk di antara salah satu negara yang sedang berkembang, dan fenomena patron-klien lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama pada masyarakat dengan sistem kekerabatan bilateral (cf. Landé, 1977b). Meskipun demikian, kajian mengenai hubungan patron-klien masih belum cukup populer di kalangan ilmuwan sosial, politik, dan budaya di Indonesia, bahkan hingga saat ini. Ini terlihat dari masih sedikitnya tulisan-tulisan mengenai hubungan semacam itu dalam jurnal-jurnal ilmu sosial-budaya di Indonesia. Disertasi dan tesis ilmu-ilmu sosial-politik Indonesia yang membahas gejala tersebut juga masih belum banyak. Memang, ada beberapa tulisan tentang fenomena ini, tetapi masih kurang mendalam dan kurang teoretis (lihat Jackson, 1980; Suparlan, 1978). Juga ada sebuah buku kecil berwarna kuning—sebuah buku terjemahan—yang membicarakan gejala tersebut. Buku yang dalam versi terjemahan berjudul *Tuan, Hamba dan Politisi* itu ditulis oleh K. Legg. Namun, itu semua masih terlalu sedikit

jika dibandingkan dengan maraknya gejala itu sendiri dalam masyarakat Indonesia.

Kajian Patronase: Dari Fungsional-Struktural ke *Actor Oriented*²

Sebagai suatu gejala sosial-budaya, hubungan patron-klien selalu dapat dilihat dari berbagai macam perspektif atau paradigma. Ada beberapa perspektif yang telah digunakan para ilmuwan untuk memahami gejala ini, tetapi di sini saya hanya akan mengemukakan dua saja sebagai contoh, yakni paradigma fungsionalisme-struktural dan paradigma pelaku (*actor-oriented approach*). Kebetulan, dua paradigma ini cukup berseberangan karena paradigma *actor-oriented* muncul sebagai reaksi terhadap kelemahan-kelemahan dari paradigma struktural-fungsional (lihat Vincent, 1986). Meskipun demikian, keduanya pada dasarnya bersifat saling melengkapi.

1. Kajian Fungsional-Struktural

Kajian fungsional-struktural atas hubungan patron-klien terlihat pada upaya untuk mengungkapkan kondisi-kondisi yang mendukung kehadiran gejala patron-klien dalam suatu masyarakat, misalnya yang dilakukan oleh Scott (1972a) di Asia Tenggara dan Cohen (1966) di Bornu, Afrika. Mengapa kajian mereka dikatakan fungsional-struktural? Padahal, para penulisnya tidak mengatakan secara eksplisit bahwa mereka menggunakan pendekatan tersebut.

Salah satu kunci dalam paradigma fungsional-struktural adalah konsep fungsi. Penerapan konsep ini dalam kajian gejala

2 Uraian di bagian ini sebagian besar diambil dari tulisan saya "Kajian Patron-Klien dan Paradigma Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia: Sebuah Refleksi" dalam *Patron-Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural* (2007).

sosial-budaya didasarkan pada analogi atau model organisme. Di sini, peneliti beranggapan bahwa masyarakat itu seperti organisme atau makhluk hidup. Suatu masyarakat adalah sebuah tubuh sosial (*social body*). Sebagaimana dikatakan oleh Émile Durkheim (1938), ahli sosiologi dari Perancis, dalam suatu masyarakat terdapat berbagai macam institusi sosial. Institusi-institusi ini, seperti halnya bagian-bagian tubuh suatu makhluk hidup, memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi institusi sosial ini adalah kesesuaiannya (*correspondence*) dengan “kebutuhan” (*needs*) organisme sosial. Di sini muncul konsep baru yang penting, yakni “kebutuhan”. Sayangnya, konsep ini menimbulkan masalah ketika digunakan dalam analisis sosial, karena membuat penalaran fungsionalisme menjadi terlihat teleologis.

Untuk menghindari kritik tersebut, A. R. Radcliffe-Brown, seorang ahli antropologi Inggris, mencoba mengembangkan konsep lain. Konsep “kebutuhan” digantinya dengan *conditions of existence* (kondisi-kondisi keberadaan), yaitu kondisi-kondisi yang diperlukan untuk adanya atau eksistensinya sesuatu. Radcliffe-Brown (1952: 178) berpendapat bahwa menggunakan konsep tersebut berarti pula menerima anggapan (*assumption*) bahwa untuk adanya masyarakat manusia atau suatu gejala sosial-budaya tertentu diperlukan pula adanya kondisi-kondisi tertentu (*necessary conditions*) yang mendukungnya, seperti halnya kehidupan pada makhluk hidup lainnya.

Konsep *necessary conditions* inilah yang secara implisit ada di balik sejumlah kajian mengenai hubungan patron-klien yang dilakukan oleh para ahli antropologi dan ilmuwan politik. Dalam hal ini masing-masing menemukan kondisi berbeda, yang mendukung kehadiran hubungan tersebut. Penelitian Campbell di kalangan orang Sarakatsan (1964) di Yunani

misalnya, menemukan bahwa hubungan patron-klien antara kepala desa dan pemilik ternak di situ didukung oleh kondisi kelangkaan sumber daya alam berupa tanah penggembalaan yang baik, serta besarnya kekuasaan yang diberikan kepada kepala desa.

Hasil penelitian Cohen di kalangan orang Bornu di Afrika (1966) memperlihatkan kondisi yang berbeda lagi. Di sini, ketidakamanan dan kelangkaan akan alat tukar berupa uang telah menjadi faktor pendukung utama hubungan-hubungan patron-klien. Situasi yang tidak aman telah mendorong banyak orang mencari orang-orang kuat yang dapat melindungi mereka dari ketidakamanan berupa perampokan, penganiayaan, dan peperangan, sedang langkanya alat tukar uang telah membuat perdagangan ataupun transaksi lainnya dilakukan dengan tukar-menukar barang langsung yang ditukar dengan tenaga. Kondisi-kondisi inilah yang membuat hubungan patron-klien menjadi hal yang sangat umum di Afrika.

Di Italia, hasil penelitian Boissevain (1966b) menunjukkan bahwa pendukung penting hubungan patron-klien adalah pandangan keagamaan. Agama Katholik telah memberikan landasan ideologis bagi berlangsungnya hubungan patron-klien di kalangan orang Sicilia. Dalam agama Katholik, dikenal adanya santo-santo yang menjadi perantara dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Para santo ini juga menjadi patron dalam kehidupan sehari-hari. Patronase tokoh-tokoh suci ini telah menjadi model bagi hubungan antara individu yang lebih lemah atau rendah status sosial-ekonominya dengan mereka yang lebih kuat dan lebih tinggi status sosial-ekonominya. Hal sama juga terlihat pada hasil penelitian Foster (1963) di kalangan orang Indian Tzintzuntzan, yang dilakukan beberapa tahun sebelum penelitian Boissevain.

Kalau para peneliti di atas tidak secara eksplisit menyatakan bahwa mereka bertujuan mengungkap kondisi-kondisi pendukung hubungan patron-klien, tidak demikian halnya dengan James C. Scott yang melakukan penelitian di Asia Tenggara. Dengan tegas Scott mengatakan bahwa hubungan patron-klien didukung oleh kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat (1972a). Kondisi-kondisi inilah yang dicoba diungkapkannya. Hal ini menunjukkan bahwa Scott dengan sangat sadar menggunakan pendekatan fungsionalisme-struktural untuk memahami gejala patronase di Asia Tenggara.

Pendekatan fungsional-struktural ini pula yang saya gunakan dalam kajian mengenai hubungan patron-klien di Sulawesi Selatan, karena saya ingin menguji kebenaran pendapat Scott mengenai kondisi-kondisi pendukung hubungan patron-klien di Asia Tenggara. Pendapat Scott memang agak saya ragukan karena data-datanya hanya sedikit yang berasal dari Indonesia, dan tidak berasal dari kajian-kajian yang khusus mengenai hubungan patron-klien. Saya menggunakan data dari Sulawesi Selatan, karena gejala patron-klien di sini telah diungkapkan oleh sejumlah peneliti.

Meskipun kajian fungsional-struktural telah memberikan sumbangan penting terhadap pemahaman para ilmuwan sosial atas fenomena patronase, akan tetapi kajian ini tidak dapat mengungkapkan dinamika dalam hubungan antara patron dan klien, yang tidak selamanya harmonis. Bagaimana patron dan klien berusaha memanfaatkan relasi di antara mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, bagaimana hubungan ini kadang-kadang sangat erat dan kadang-kadang melemah, bagaimana hubungan ini dimanfaatkan untuk mencapai tujuan politis tertentu, adalah hal-hal yang umumnya tidak bisa diketahui jika peneliti menggunakan paradigma fungsionalisme-struktural. Kelemahan inilah yang mendorong

para peneliti gejala patronase kemudian mencari paradigma lain yang dapat memenuhi keinginan mereka. Di kalangan ahli antropologi politik, paradigma ini dikenal sebagai paradigma *actor-oriented* atau paradigma aktor.

2. Kajian *Actor-Oriented*

Kajian ini berkembang terutama di kalangan ahli antropologi politik yang lebih menyukai perspektif mikro daripada makro dalam penelitian mereka. Dalam pendekatan ini, seorang peneliti lebih mengarahkan perhatiannya pada apa yang dikerjakan oleh para pelaku dalam sebuah sistem politik. Untuk itu, peneliti memandang politik sebagai sebuah permainan (*game*) atau pertandingan yang menjadi ajang bagi individu-individu atau kelompok yang bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Sebuah pertandingan pada dasarnya adalah seperangkat aturan, karena aturan merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah pertandingan. Setiap pertandingan pasti memiliki aturan ini, baik tertulis maupun tidak. Yang penting adalah bahwa aturan ini disepakati bersama. Tanpa ada kesepakatan atas aturan, pertandingan tidak akan dapat dilaksanakan. Jika demikian, maka sebuah struktur politik juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan juga, yang digunakan untuk mengatur persaingan atau perebutan hal-hal tertentu dalam kehidupan (Bailey, 1977).

Dengan perspektif ini, perhatian peneliti akan diarahkan pada keputusan-keputusan yang diambil oleh para pelaku serta perilaku dan tindakan mereka. Di sini, para pelaku akan dilihat sebagai “*game players seeking personal goals within analyzable social, cultural and situational fields*”. Asumsinya di sini adalah bahwa “*individuals operating in social situations seek to maximize their chances of achieving some set of specific goals*” (Strickon dan Greenfield, 1972: 13). Adanya asumsi mengenai tujuan pelaku ini tidak berarti bahwa di situ ada

asumsi berkenaan dengan isinya. Isi dari tujuan para pelaku dalam permainan tersebut masih harus ditentukan melalui penelitian empiris. Peneliti tidak berhak menentukan terlebih dahulu apa tujuan para pelaku di situ, karena tujuan mereka memang bisa berbeda-beda.

Implikasi pandangan ini terhadap penelitiannya adalah bahwa peneliti harus memperhatikan pandangan aktor, pandangan pelaku, bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan pihak-pihak lain. Pandangan pelakulah yang penting. *“The actor’s goals and strategies and tactics for attaining them, inappropriate though they may be when judged with respect to conditions as determined by an “objective” third party...are what we want..”* Oleh karena itulah, di sini peneliti sangat berkepentingan untuk mengungkap *“his [actor’s] view of the world”*. Melalui penelitian semacam ini diharapkan *“the processes through which negotiated relationships are established and the variety of strategies employed by actors in attaining ends, along with the factors relevant to their formation”* (Strickon and Greenfiled, 1972: 14).

Dengan menggunakan asumsi-asumsi di atas, beberapa penelitian mengenai gejala patron-klien telah dilakukan. Strickon (1972), misalnya, meneliti dengan seksama gerak-gerik dan sepak-terjang seorang patron yang bernama Carlos Felipe di Buenos Aires, Argentina. Strickon menempatkan Carlos Felipe sebagai pusat pembicaraan. Apa yang dipaparkannya tidak lain adalah perjalanan hidup Carlos dari seorang anak bungsu dalam sebuah keluarga pengusaha, yang pada awalnya tidak banyak berperan dalam kehidupan keluarga hingga menjadi seorang pejabat penting di daerahnya. Itu semua berhasil dicapainya bukan karena dia menjadi anggota sebuah partai politik, tetapi karena relasi-relasi yang dimilikinya. Selain relasi kekerabatan yang juga dimiliki setiap orang, Carlos Felipe juga merupakan seorang patron, dan

juga seorang sahabat. Dari relasi persahabatan dan patron-klien itu, Carlos dapat mencapai tujuan-tujuannya, terutama dalam bidang ekonomi. Dengan memanfaatkan jaringan sosial yang dimilikinya, Carlos akhirnya berhasil menjadi pejabat di daerah. Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan juga dari berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat Argentina yang kemudian berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Carlos, dan akhirnya membawa keberuntungan bagi dirinya.

Perspektif *actor-oriented* seperti itu juga digunakan oleh Greenfield dalam penelitiannya mengenai tiga peristiwa yang terjadi di sebuah daerah bernama Zona da Mata, di Minas Gerais, Brazil. Ada tiga peristiwa yang dianalisis, yakni pengangkatan seorang wanita menjadi petugas kebersihan sebuah sekolah, kolam kumuh yang tidak segera dibersihkan, dan pembangunan sebuah jalan raya yang tidak kunjung selesai. Untuk memahami tiga peristiwa ini, Greenfield memaparkan terlebih dulu keadaan masyarakat Brazil dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Kemudian, dipaparkannya pelaku-pelaku yang ada di sekitar tokoh-tokoh yang menjadi pusat perhatiannya, yakni karyawan wanita yang baru diangkat, walikota yang ingin membersihkan kolam kumuh, dan seorang tokoh masyarakat yang menginginkan jalan raya yang sudah bertahun-tahun terbengkelai segera diselesaikan pembangunannya. Greenfield bermaksud memahami mengapa pengangkatan karyawan wanita menjadi masalah, tetapi pengangkatan tetap terjadi; mengapa kolam kumuh tetap dibiarkan selama beberapa tahun walaupun sudah sangat jelas bahwa hal itu sangat mengganggu ketenangan warga masyarakat; dan mengapa sebuah jalan raya yang sudah hampir selesai dan sangat diperlukan warga masyarakat tidak segera diselesaikan juga.

Ketiga peristiwa tersebut tampaknya tidak akan dapat dipahami dan dijelaskan dengan baik tanpa memperhatikan

hubungan-hubungan sosial yang dimiliki oleh para pelaku utama yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa tersebut, yakni karyawan wanita, walikota, dan seorang tokoh masyarakat. Oleh karena itu, Greenfield kemudian mencoba mengungkapkan jaringan-jaringan sosial yang dimiliki oleh individu-individu ini dengan orang-orang lain, dan lewat bantuan mereka ini, individu tersebut kemudian berhasil mencapai tujuannya sendiri atau justru dipersulit dan akhirnya gagal mencapai tujuannya. Selanjutnya, berbagai peristiwa ini ternyata juga tidak akan dapat dipahami dengan baik, jika latar belakang sosio-kultural dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat Brazil tidak diketahui.

Pengetahuan mengenai dua paradigma yang telah digunakan para ahli antropologi untuk menempatkan dan menjelaskan gejala patronase dalam berbagai peristiwa dan sistem politik tersebut diperlukan untuk memahami uraian Dr. Guno Tri Tjahjoko mengenai politik patronase dan hubungannya dengan peristiwa pilkada. Secara teoretis, pilihan Dr. Guno menggunakan paradigma aktor hanya dapat dimengerti jika dihubungkan dengan kelemahan dari pendekatan fungsional-struktural ketika digunakan untuk menjelaskan berbagai peristiwa politik. Sedangkan secara metodologis, pilihan tersebut hanya dapat dimengerti jika diketahui juga data seperti apa yang telah berhasil dikumpulkannya berkenaan dengan pilkada yang ditelitinya.

Praktik Politik: Politik Patronase dan Politik Uang

Berkenaan dengan wacana patronase, Dr. Guno dalam pandangan saya telah membuka wacana baru yang relevan dengan situasi perpolitikan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, di mata para pemikir dan penggerak demokrasi di Indonesia, salah satu hal yang dirasa sangat mengganggu dan

menghambat proses pembangunan demokrasi di Indonesia adalah “politik uang”, yaitu upaya yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah atau calon legislatif untuk mendapatkan suara dengan memberikan sejumlah uang kepada sejumlah orang dan suatu kelompok atau suatu komunitas. Gejala ini cukup banyak ditemui di Indonesia, dan sepiantas lalu, hal itu terlihat mirip dengan apa yang terdapat dalam hubungan patronase. Jika demikian, kalau patronase memang dianggap salah satu bentuk “politik uang”, maka patronase adalah salah satu penghambat atau perusak proses demokrasi sehingga perlu dihindari atau dibasmi. Pertanyaannya adalah: betulkah politik patronase termasuk kategori “politik uang”?

1. Politik Patronase

Dr. Guno menunjukkan dengan jelas bahwa politik uang berbeda dengan politik patronase. Patronase atau hubungan patron-klien, sebagaimana didefinisikan oleh James Scott (1972a) adalah relasi pertukaran yang bersifat tatap muka: antara seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya dengan seseorang yang lebih rendah kedudukannya, dan pihak yang lebih tinggi lebih banyak memberikan bantuan material atau ekonomi, sedangkan yang lebih rendah kedudukannya banyak memberikan bantuan berupa jasa. Dalam relasi ini, ketimpangan dalam pertukaran selalu ada, bahkan selalu dijaga, sebab keseimbangan pertukaran akan dapat membuat hubungan pertukaran ini malah berhenti (Ahimsa-Putra, 2008).

Hubungan pertukaran yang tidak pernah mencapai keseimbangan ini kadang lebih berat di pihak patron, kadang lebih berat di pihak klien, juga bersifat pribadi dan melibatkan banyak hal. Sifat pribadi dan tatap-muka dari relasi ini membuat patron tidak dapat mengembangkan relasi ini

dengan banyak individu, di samping juga karena sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan relasi akan semakin membesar dan waktu yang diperlukan untuk melestarikan juga akan semakin banyak. Dalam politik, unsur uang tentu tidak akan pernah absen karena inilah salah satu sarana utama bagi patron untuk melakukan pertukaran dengan kliennya. Sementara itu, faktor jasa—termasuk di dalamnya dukungan atau “suara”—adalah salah satu sarana utama bagi si klien.

Meskipun demikian, uang dan suara bukanlah segala-galanya dalam relasi tersebut karena relasi patronase juga melibatkan emosi. Di situ ada rasa utang budi. Baik patron maupun klien merasa telah berutang budi pada pihak yang lain karena telah dibantu. Si klien, karena kedudukan ekonominya yang lebih rendah, biasanya merasa berutang budi kepada patron karena telah mendapatkan banyak bantuan ekonomi. Di sisi lain, sang patron juga merasa berutang budi pada si klien karena telah mendapatkan berbagai layanan serta dukungan sosial darinya. Relasi patron-klien merupakan relasi sosial yang didasarkan pada rasa saling percaya karena kedua belah pihak saling mengenal dengan baik, dan relasi semacam ini hanya dapat tumbuh dalam kurun waktu yang cukup lama.

Relasi patron-klien merupakan relasi yang dibangun melalui proses tukar-menukar yang terus-menerus dan sengaja dibuat untuk selalu timpang, tetapi tidak sampai terlalu merugikan pihak yang lain karena kedua belah pihak merasa saling membutuhkan. Ketimpangan ini merupakan semacam investasi atau simpanan yang dapat diambil ketika diperlukan, seperti halnya orang yang menyimpan tabungan di bank. Dengan kata lain, patron dan klien di sini sama-sama merasa dapat mengandalkan bantuan pihak yang lain, ketika mereka membutuhkannya. Oleh karena itu, patronase tidak harus selalu dihubungkan dengan upaya memperoleh

kemenangan dalam sebuah persaingan politik karena banyak sekali hubungan patron-klien yang dibangun tidak dengan tujuan politik tersebut. Lain halnya dengan politik uang.

2. Politik Uang

Ciri-ciri relasi patron-klien seperti di atas berbeda dengan “politik uang”. Politik uang mempunyai ciri-ciri yang hampir seluruhnya berlawanan dengan ciri-ciri hubungan patronase. Salah satu keberatan para pendukung proses demokrasi terhadap politik uang adalah kemiripannya dengan praktik dagang atau jual beli, atau bahkan lebih buruk daripada itu. Dalam proses jual beli, pihak pembeli masih dapat menawar dan meneliti barang yang akan dibelinya dengan seksama. Pembeli dapat menolak membeli jika dia merasa barang yang akan dibelinya tidak sesuai dengan keinginan atau selernya. Sampai di sini, kesamaan dengan politik uang masih dapat diterima karena dalam proses pilkada, seorang pemilih juga dapat meneliti calon yang akan dipilihnya. Dia dapat menolak memilih si calon kalau calon tidak sesuai dengan keinginan atau selernya.

Akan tetapi, politik uang bisa lebih buruk daripada praktik jual beli, karena akibat dari politik uang seorang pemilih dapat saja menjatuhkan pilihannya tanpa mau bersusah payah melihat kualitas calon yang akan dipilihnya. Ibarat seorang pembeli yang tidak mau meneliti lebih lanjut kualitas barang yang akan dibelinya karena dia tidak akan sering menggunakan barang tersebut walaupun orang lain mungkin sekali akan dirugikan oleh hasil pilihannya tersebut. Oleh karena itu, seorang pemilih yang memberikan suaranya pada patronnya tidak sama dengan seorang pemilih yang memberikan suaranya pada seorang calon yang telah memberinya sejumlah uang,

meskipun calon tersebut tidak begitu dikenalnya atau bahkan tidak dikenalnya sama sekali.

Perbedaan ciri pertukaran dalam hubungan patronase dan politik uang membuat keduanya berbeda ketika diterapkan dalam aktivitas politik. Dalam politik patronase, pemilih sangat mengenal dan memiliki hubungan yang dekat dengan calon yang dipilihnya. Pilihan dijatuhkan dengan sangat sadar dan didasarkan pada pengetahuan yang mendalam, karena pemilih mengenal orang yang dipilih. Pemilih juga sangat sadar akan konsekuensi lebih lanjut dari pilihannya. Dia juga sadar bahwa jika calon yang dipilihnya menang, maka dia akan banyak mendapatkan manfaat dari kemenangan tersebut. Dalam politik uang, besar kemungkinan pemilih tidak begitu mengenal calon yang dipilihnya. Bisa juga dia mengenal calon tersebut bahkan hingga sisi negatifnya. Namun, karena dia telah menerima sejumlah uang, maka sisi negatif ini bisa saja lantas diabaikan atau tidak menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pilihan. Keinginan dan selera pribadi juga diabaikan, karena pemilih ingin membalas budi calon yang telah memberinya uang. Pemilih juga tidak begitu peduli terhadap akibat lebih lanjut dari pilihannya: apakah pilihan tersebut akan menguntungkan atau merugikannya secara pribadi atau akan menguntungkan atau merugikan kelompoknya—itu semua tidak lagi penting baginya. Yang paling penting adalah bahwa dia telah mendapat sejumlah uang yang diperlukannya, dan dia perlu membalas pemberian tersebut dengan cara memberikan suaranya.

Dengan demikian, upaya memenangkan sebuah proses pilkada melalui pemanfaatan hubungan patronase bukanlah sebuah siasat politik yang mudah dan murah. Dibandingkan dengan politik uang, politik patronase tampaknya lebih mahal, karena memerlukan waktu yang lebih lama serta biaya yang

lebih besar. Diperlukan waktu berbulan-bulan atau bahkan beberapa tahun untuk membangun hubungan-hubungan patronase dengan berbagai pihak. Interaksi tatap muka dan bersifat pribadi juga harus lebih banyak dilakukan dengan klien-klien. Itu semua memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, hasil dari politik patronase ini lebih dapat diandalkan. Seorang patron hampir selalu yakin bahwa klien-kliennya akan memilihnya daripada memilih pesaingnya.

Upaya Dr. Guno untuk mengangkat isu mengenai patronase dan politik uang ini merupakan langkah yang penting dalam studi politik. Para pengamat dan peneliti politik kini perlu lebih berhati-hati dan lebih teliti jika berbicara mengenai “politik uang”, karena sangat mungkin yang mereka maksud adalah politik patronase yang pada hakekatnya berbeda dengan politik uang. Pemahaman Dr. Guno yang mendalam mengenai fenomena patronase membuatnya berani mengajak para pendukung proses demokrasi di Indonesia untuk merenungkan kembali beberapa hal yang selama ini dianggap sudah sewajarnya dalam proses dan kegiatan politik, misalnya kehadiran partai politik yang tanpa ideologi yang jelas, demokrasi yang hanya ada di permukaan saja, serta proses-proses politik di tingkat lokal yang cenderung dipandang sebagai penghalang proses demokratisasi.

Nalar Politik: Nalar Aktivistis dan Nalar Politisi

Dalam studi fenomena politik, perhatian peneliti biasanya diarahkan pada perilaku dan siasat politik para aktor, atau pada berbagai aturan yang ada dalam arena politik. Seorang peneliti yang menekankan pada pentingnya realitas empiris akan memberikan perhatian yang lebih besar pada perilaku dan siasat para aktor, sedangkan peneliti yang menekankan pada pentingnya aturan akan lebih memperhatikan berbagai

aturan yang harus ditaati oleh para aktor politik. Dr. Guno tidak tertarik pada keduanya. Dia lebih tertarik pada nalar yang mengendalikan perilaku dan siasat para aktor. Dalam hal ini, dia berasumsi bahwa berbagai perilaku dan siasat aktor politik pada dasarnya dikendalikan oleh nalar yang mereka miliki. Menurutnya, nalar adalah "cara berpikir sistematis atau kondisi mental yang diwujudkan dalam prinsip-prinsip".

Sumbangan kedua buku ini terletak pada wacana tentang nalar politik yang ditampilkannya. Dr. Guno menemukan dua macam nalar politik di balik berbagai siasat dan perilaku aktor untuk memenangkan kontestasi politik dalam pilkada dan merengkuh jabatan sebagai kepala daerah. Nalar tersebut adalah nalar aktivis dan nalar politisi. Menurut saya, temuan ini merupakan sumbangan pemikiran terpenting dari Dr. Guno untuk studi politik di Indonesia. Sayangnya, Dr. Guno kurang mengkaji dua nalar tersebut dan menjelaskannya secara mendalam sehingga konsep tentang kedua nalar tersebut kehilangan kekuatannya sebagai perangkat konseptual untuk menganalisis fenomena politik pada umumnya.

1. Nalar Aktivis

Dr. Guno kurang ketat mendefinisikan apa yang dimaksudnya sebagai nalar aktivis. Dia hanya mengatakan bahwa para aktivis "tegas menolak praktik pemberian materi dan non-materi yang diidentikkan dengan praktik *money politics* dalam pemilu/pilkada". Menurut nalar aktivis, elite "yang melakukan praktik pemberian materi dan non-materi tidak pantas dipilih oleh rakyat karena dianggap telah mengkhianati penegakan nilai-nilai demokrasi". Elite yang melakukan hal tersebut juga "dianggap telah melanggar undang-undang dan patut dijatuhi sanksi pidana". Selain itu, elite seperti itu juga "layak dibatalkan pencalonannya sesuai undang-undang

yang berlaku”. Pernyataan-pernyataan ini tidak dapat disebut sebagai definisi karena tidak membentuk sebuah kesatuan. Seandainya saja Dr. Guno bersedia menelaah makna nalar sebagaimana yang dikatakannya dengan lebih mendalam, sangat mungkin dia akan dapat merumuskan dengan lebih ketat dan jelas nalar aktivis tersebut.

Pernyataan tentang nalar tersebut juga menyimpan masalah karena tidak begitu jelas perbedaannya dengan nilai-nilai, norma, dan aturan. Apakah yang dimaksud Dr. Guno adalah perangkat nilai dan norma tersebut, atau yang lain lagi? Karena nalar berbeda dengan nilai-nilai dan norma-norma. Pernyataan tersebut memang tajam, karena berfokus pada persoalan *money politics*, tetapi pada saat yang sama ketajaman tersebut juga membuat makna nalar aktivis menjadi terlalu sempit. Apakah nalar aktivis dalam perpolitikan hanya mengenai *money politics*? Tentunya tidak. Di sinilah terletak tantangan bagi Dr. Guno di masa yang akan datang. Dia masih perlu membuat rumusan “nalar aktivis” yang lebih cocok, serta lebih dapat mencakup dan menjelaskan berbagai perilaku serta aktivitas politik dari para aktor, daripada hanya tentang *money politics*.

Dari pernyataan-pernyataan mengenai nalar aktivis di atas, sedikit banyak kita dapat merumuskan nalar aktivis yang dimaksud oleh Dr. Guno sebagai “cara berpikir sistematis, yang di dalamnya terkandung sejumlah prinsip berpolitik sebagai berikut: a) menolak tegas segala macam bentuk pemberian materi dan non-materi yang dapat disamakan dengan praktik *money politics* dalam pemilu/pilkada; b) menganggap praktik *money politics* sebagai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan melanggar undang-undang; dan c) menganggap pelaku praktik tersebut patut dijatuhi sanksi pidana dan layak dibatalkan pencalonannya sesuai undang-undang yang

berlaku”. Saya tidak tahu apakah rumusan yang saya sodorkan ini dapat diterima oleh Dr. Guno. Yang jelas, rumusan ini tidak terlalu jauh maknanya dari apa yang dimaksudkannya. Seandainya saja Dr. Guno dapat merumuskan nalar aktivis seperti itu, dia tentu akan dapat melakukan analisis yang lebih tajam atas nalar aktivis tersebut serta menerapkannya sebagai alat analisis atas fenomena pemilihan kepala daerah yang ditelitinya. Meskipun demikian, rumusan seperti itu juga tetap belum dapat menyelesaikan masalah-masalah konseptual yang telah saya sebutkan sebelumnya karena isinya masih sama.

2. Nalar Politisi

Sebagaimana yang dilakukannya pada nalar aktivis, Dr. Guno juga tidak mendefinisikan secara eksplisit nalar politisi yang dikemukakannya. Dia katakan bahwa “nalar politisi cenderung pragmatis dan kontekstual, khususnya dalam hal pemberian materi dan non-materi”. Dalam nalar ini, seorang politisi diasumsikan “memberikan materi kepada masyarakat yang miskin dan menyejahterakan, tidak bertentangan dengan hukum, apalagi bagi seorang bangsawan yang memiliki amanah untuk menyejahterakan masyarakat miskin”. Dalam nalar tersebut, diasumsikan bahwa masyarakat “menganggap pemberian seorang bangsawan merupakan suatu kehormatan atau anugerah” sehingga “mereka tidak mempermasalahkan pemberian elite tersebut sebagai tindakan *money politics*”.

Dibandingkan dengan rumusannya mengenai nalar aktivis, pernyataan-pernyataan Dr. Guno mengenai nalar politisi ini menyimpan lebih banyak masalah. *Pertama*, prinsip-prinsip yang dianut dalam nalar tersebut belum dinyatakan secara tegas sehingga makna nalar di situ lebih dekat dengan pandangan-pandangan filosofis, karena berupa sejumlah asumsi mengenai pola perilaku tertentu dalam perpolitikan.

Kedua, nalar tersebut sudah dibatasi berlakunya untuk lapisan sosial tertentu, yaitu lapisan bangsawan karena bangsawanlah yang dikatakan memiliki amanah untuk menyejahterakan masyarakat miskin. Dengan begitu, mereka dapat terhindar dari tuduhan *money politics*. Tidak demikian halnya dengan orang biasa. *Ketiga*, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya belum tersusun secara sistematis sehingga pernyataan-pernyataan tersebut agak membingungkan. Lagi-lagi, tantangan bagi Dr. Guno adalah merumuskan lebih tepat dan jelas apa yang dimaksudnya dengan “nalar politisi”.

Meskipun demikian, atas dasar pernyataan-pernyataan tersebut, kita dapat merumuskan nalar politisi sebagai “cara berpikir sistematis yang di dalamnya terkandung sejumlah prinsip berpolitik sebagai berikut: a) memberikan materi kepada masyarakat miskin dengan tujuan untuk menyejahterakan mereka bukanlah tindakan yang melanggar hukum, apalagi jika yang melakukannya adalah mereka yang tergolong dalam kelas bangsawan; b) pemberian materi dari kalangan bangsawan adalah sebuah anugerah atau kehormatan bagi pihak yang menerimanya, dan karena itu c) pemberian materi tersebut tidak dapat digolongkan sebagai praktik *money politics*”. Apakah definisi yang saya rumuskan ini akan dapat diterima oleh Dr. Guno? Saya tidak tahu, tetapi rumusan itu tidak terlalu menyimpang dari pernyataan-pernyataannya tentang nalar politisi.

Adanya dua nalar yang saling berlawanan itu dalam diri aktor politik telah membawa Dr. Guno pada kesimpulan bahwa para aktor politik yang ditelitinya bersifat ambivalen sehingga politik yang mereka wujudkan adalah politik ambivalensi, yaitu politik yang mencampuradukkan dua nalar tersebut dalam suatu aktivitas politik. Masalahnya adalah, apakah memang tidak demikian sifat dari setiap fenomena politik? Apakah

politik tidak selalu mengandung hal-hal yang berlawanan satu sama lain? Bukankah “hakikat” dari politik adalah persaingan dari dua atau lebih hal yang tidak dapat disatukan? Selain itu, apakah ambivalensi itu sendiri merupakan masalah? Dari sudut pandang tertentu mungkin memang demikian, tetapi dari sudut pandang lain mungkin tidak.

3. Nalar atau Aturan

Bagi mereka yang memandang politik sebagai sebuah pertandingan (*competitive game*) atau permainan yang kompetitif, kehadiran dua nalar tersebut ternyata tidak harus dimaknai sebagai suatu ambivalensi atau pencampuran. Sebagaimana dikatakan oleh Frederick G. Bailey dalam buku antropologi politiknya yang sangat terkenal, *Stratagems and Spoils: A Social Anthropology of Politics* (1977), sebuah *competitive game* atau pertandingan selalu dua macam *rules* (aturan-aturan) yang sepintas lalu terlihat saling berlawanan, tetapi sebenarnya saling mengisi, yaitu *normative rules* dan *pragmatic rules*.

Normative rules adalah aturan-aturan (*rules*) yang mewujudkan nilai-nilai paling utama dan yang dapat diterima oleh umum (“*express such ultimate and publicly acceptable values*”). Aturan-aturan tersebut “*are very general guides to conduct; they are used to judge particular actions ethically right or wrong; and within a particular political structure they can be used to justify publicly a course of conduct*” (1977: 5). Aturan-aturan normatif ini tidak menentukan atau menetapkan suatu tindakan tertentu, tetapi menetapkan batas-batas atau rambu-rambu untuk berbagai tindakan yang mungkin dilakukan. Dalam kasus yang diteliti oleh Dr. Guno, aturan normatif ini membuka kemungkinan bagi para aktor politik untuk melakukan berbagai upaya pemenangan pilkada, kecuali

misalnya *money politics*. *Money politics* menjadi salah satu batas yang tidak boleh dilanggar.

Berbeda halnya dengan *pragmatic rules*, yaitu tuntunan-tuntunan atau petunjuk-petunjuk praktis untuk memenangkan pertandingan (“*practical instructions about how to win*”). Petunjuk-petunjuk ini muncul untuk mengisi ruang-ruang kosong di antara norma-norma (“*to fill the empty spaces left by norms*”) (1977: 5). *Pragmatic rules*, kata Bailey, “*are statements not about whether a particular line of conduct is just or unjust, but about whether or not it will be effective. They are normatively neutral. They may operate within the limits set by the rules of the game: or they may not. They range from rules of ‘gamesmanship’ (how to win without actually cheating) to rules which advise on how to win by cheating without being disqualified*” (1977: 6).

Perbedaan nalar aktivis dan nalar politisi sebagaimana dimaksud oleh Dr. Guno menurut saya tidak terletak pada kualitas nalarnya, tetapi jenis aturan yang dimanfaatkan oleh nalar tersebut untuk memenangkan kontestasi politik. Nalar aktivis adalah nalar yang mengikuti aturan-aturan normatif dalam sebuah persaingan politik, sedang nalar politisi adalah nalar yang menggunakan aturan-aturan pragmatis dalam persaingan tersebut. Oleh karena setiap kontestasi politik selalu memiliki aturan-aturan normatif dan aturan-aturan pragmatis, maka dengan sendirinya di situ tidak terdapat “pencampuradukan” aturan, dan karena itu tidak ada yang bersifat ambivalen. Akan tetapi kalau kehadiran dua jenis aturan tersebut dianggap sebagai sebuah ambivalensi, maka dengan sendirinya semua persaingan politik bersifat ambivalensi. Semua sistem politik ambivalen, karena selalu terdapat di dalamnya dua macam aturan: normatif dan pragmatis. Akan tetapi, jika demikian maka konsep ambivalensi kehilangan makna analitisnya. Di sinilah terletak dilema teori

yang dikemukakan oleh Dr. Guno dan perlunya penelitian lanjutan.

Penutup

Terlepas dari sejumlah kekurangan di atas, bagaimanapun juga Dr. Guno telah membuka sebuah arah baru dalam kajian politik di Indonesia, yaitu kajian mengenai nalar politik. Untuk Indonesia, arah kajian ini sangat penting karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat majemuk dalam budayanya. Apakah di Indonesia hanya ada dua nalar politik seperti yang diidentifikasi oleh Dr. Guno, atau masih ada nalar-nalar politik yang lain? Apakah nalar politik tersebut terkait dengan unsur-unsur budaya tertentu atau corak (konfigurasi) budaya masyarakatnya? Hanya penelitian-penelitian yang lebih mendalam mengenai nalar politik yang akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Apa yang saya sampaikan dalam “Kata Pengantar” ini pada dasarnya hanya sebuah upaya untuk menyampaikan kembali beberapa butir pemikiran penting dari Dr. Guno yang telah disampaikannya sendiri dalam buku ini, tetapi tidak selalu dengan cara yang eksplisit dan sistematis. Akibatnya, butir-butir pemikiran tersebut menjadi agak sulit diidentifikasi. Dr. Guno juga belum menempatkan hasil kajiannya dalam konteks studi hubungan patronase dalam antropologi politik dan ilmu politik, sehingga kontribusi pemikirannya dalam studi fenomena sosial tersebut juga tidak gampang diketahui. Mudah-mudahan, “Kata Pengantar” ini dapat membuat pembaca lebih mudah menempatkan hasil kajian Dr. Guno ini dalam konteks yang semestinya.

Daftar Pustaka

- Ahimsa-Putra, H.S. 1996. "Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan: Kondisi pada Akhir Abad 19". *Prisma*, 6: 29-45.
- _____. 2007. *Hubungan Paron-Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Bailey, F. G. 1977 (1969). *Stratagems and Spoils: A Social Anthropology fo Politics*. Oxford: Basil Blackwell.
- Barth, F. 1959. *Political Leadership among Swat Pathans*. London: The Athlone Press.
- Blok, A.1969a. "Variations in Patronage". *Sociologische Gids*, 16: 365-378.
- _____.1969b. "Peasants, Patrons and Brokers in Western Sicily". *Anthropological Quarterly*, 42 (3): 155-170.
- Boissevain, J. 1966a. "Poverty and Politics in a Sicilian Agro-Town". *International Archives of Ethnography*, 50: 198-236.
- _____. 1966b. "Patronage in Sicily". *Man (NS)*, 1 (1): 18-33.
- _____. 1969. "Patrons as Brokers". *Sociologische Gids* 16: 379-386.
- _____. 1974. *Friends of Friends: Networks, Manipulators, and Coalitions*. Oxford: Basil Blackwell.
- _____. 1977. "When the saints go marching out: Reflections on the decline of patronage in Malta" dalam *Patrons and Clients in Mediterranean Societies*, Gellner dan J. Waterbury (eds.). London: Duckworth.
- Breman, J. 1974. *Patronage and Exploitation: Changing Agrarian Relations in South Gujarat, India*. Berkeley: University of Berkeley Press.
- Buxton, J. 1967. "'Clientship' among the Mandari of the Southern Sudan" dalam *Comparative Political Systems*,

- R. Cohen dan J. Middleton (eds.). Garden City, N. Y.: The National History Press.
- Campbell, J. K. 1964. *Honour, Family and Patronage: A Study of Institutions and Moral Values in a Greek Mountain Community*. Oxford: Oxford University Press.
- Cohen, R. 1966. "The Dynamics of Feudalism in Bornu" dalam *African History*, J.Butter (ed.). Boston University Papers on Africa II. Boston: Boston University Press.
- Corbin, J. 1979. "Social Class and Patron-Clientage in Andalusia: Some Problems in Comparing Ethnographies". *Anthropological Quarterly*, 52 (2): 99-114.
- Durkheim, E. (1938). *The Rules of Sociological Method*. Glencoe: The Free Press.
- Eisenstadt, S. N. dan L. Roniger. 1980. "Patron-Client Relations as a Model of Structuring Social Exchange". *Comparative Studies in Society and History*, 22: 42-77.
- Errington, F. K. 1974. *Karavar: Masks and Power in a Melanesian Ritual*. Ithaca: Cornell University Press.
- Foster, G. M. 1961. "The Dyadic Contract: A Model for the Social Structure of a Mexican Peasant Village". *American Anthropologist*, 63 (6): 1173-1192.
- _____. 1963. "The Dyadic Contract in Tzintzuntzan II: Patron-Client Relationship". *American Anthropologist*, 65: 1280-1294.
- Galt, A. H. 1974. "Rethinking Patron-Client Relationships: The Real Sytem and the Official System in Southern Italy". *Anthropological Quarterly*, 47 (2): 182-202.
- Geertz, C. 1980. *Negara: The Theatre State in Nineteenth Century Bali*. Princeton: Princeton University Press.
- Gerth, H. H. and C. W. Mills. 1974 (1946). *From Max Weber. Essays in Sociology*. New York: Oxfrrod University Press.

- Gilmore, D. 1977. "Patronage and Class Conflict in Southern Spain". *Man (NS)* 12 (3-4), 446-458.
- Gluckman, M. G. 1965. *Politics, Law and Ritual in Tribal Society*. Oxford: Blackwell.
- Gonzalez, N.L. 1972. "Patron-Client Relationships at the International Level" dalam *Structure and Process in Latin America: Patronage, Clientage and Power Systems*, A.Strickon and S.Greenfield (eds.). Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Graziano, L. 1973. "Patron-Client Relationships in Southern Italy". *European Journal of Political Research*, 1 (1): 3-34.
- Greenfield, S. 1972. "Charwomen, Cesspools, and Road Building: An Examination of Patronage, Clientage, and Political Power in Southeastern Minas Gerais" dalam *Structure and Process in Latin America: Patronage, Clientage and Power Systems*, A. Strickon and S. Greenfield (eds.). Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Hanks, L. M. 1966. "The Corporation and the Entourage: A Comparison of Thai and American Social Organization" dalam *Friends, Followers and Factions: A Reader in Political Clientelism*, S. W. Schmidt et al (eds.). Berkeley: Berkeley University Press.
- Heath, D. B. 1973. "New Patrons for Old: Changing Patron-Client Relationships in the Bolivian Yungas". *Ethnology*, 12 (1): 75-98.
- Hollnsteiner. M. R. 1961. "Reciprocity in the Lowland Philippines". *Philippine Studies*, 9.
- Jackson, K. D. 1980. *Traditional Authority, Islam and Rebellion*. Berkeley: University California Press.

- Kaufmann, R. R. 1974. "The Patron-Client Concept and Macro Politics: Prospects and Problems". *Comparative Studies in Society and History*, 16: 284-308.
- Kenny, M. 1960. "Patterns of Patronage in Spain". *Anthropological Quarterly*, 33: 14-23.
- _____. 1968. "Parallel Power Structures in Castille: The Patron-Client Balance" dalam *Contributions to Mediterranean Sociology*, J. G. Peristianny (ed.) The Hague: Mouton.
- Landé, C. H. 1977a. "Introduction: The Dyadic Basis of Clientelism" dalam *Friends, Followers and Factions: A Reader in Political Clientelism*, S. W. Schmidt et al. (eds.). Berkeley: Berkeley University Press.
- _____. 1977b. "Group Politics and Dyadic Politics: Notes for A Theory" dalam *Friends, Followers and Factions: A Reader in Political Clientelism*, S. W. Schmidt et al (eds.). Berkeley: Berkeley University Press.
- Legg, K. 1980. *Tuan, Hamba dan Politisi*. Jakarta.
- Lemarchand, R. 1977. "Political Exchange, Clientelism, and Development in Tropical Africa" dalam *Friends, Followers and Factions: A Reader in Political Clientelism*, S. W. Schmidt et al. (eds.). Berkeley: Berkeley University Press.
- Mair, L. 1969. "Clientship in East Africa" dalam *Anthropology and Social Change*, L. Mair. London: The Athlone Press.
- Milne, R. S. 1973. "Patrons, Clients, and Ethnicity: The Case of Sabah and Sarawak in Malaysia". *Asian Survey*, 13 (10): 891-907.
- Osborn, A. 1968. "Compadrazgo and Patronage: A Colombian Case". *Man (NS)* 3 (4): 593-608.
- Pitt-Rivers, J. A. 1961. *The People of Sierra*. Chicago: Chicago University Press.

- Powell, J. D. 1970. "Peasant Society and Clientelist Politics". *American Political Science Review* 64 (2): 411-425.
- Radcliffe-Brown, A. R. 1952. *Structure and Function in Primitive Society*. London: The Free Press.
- Schmidt, S. W. et al. (eds.). 1977. *Friends, Followers and Factions: A Reader in Political Clientelism*. Berkeley: University of California Press.
- Scott, J. C. 1972a. "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia". *American Political Science Review* 66 (1): 411-425.
- _____. 1972b. "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia". *Journal of Asian Studies*, 32 (1): 5-37.
- Shirley, R. W. 1972. "Patronage and Cooperation: An Analysis from Sao Paulo State" dalam *Structure and Process in Latin America: Patronage, Clientage and Power Systems*, A. Strickon and S. Greenfield (eds.). Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Silverman, S. 1965. "Patronage and Community-Nation Relationships in Central Italy". *Ethnology*, 4 (2): 172-189.
- Strickon, A. 1972. "Carlos Felipe: Kinsman, Patron, and Friend" dalam *Structure and Process in Latin America: Patronage, Clientage and Power Systems*, A. Strickon and S. Greenfield (eds.). Albuquerque: University of New Mexico Press.
- _____ and S. M. Greenfield. 1972. "The Analysis of Patron-Client Relationships: An Introduction" dalam *Structure and Process in Latin America: Patronage, Clientage and Power Systems*, A. Strickon and S. Greenfield (eds.). Albuquerque: University of New Mexico Press.

- Suparlan, P. 1978. *Pola Hubungan Patron-Klien: Model dan Pengetrapannya pada Komunitas Gelandangan*. P. P. Kependudukan UGM, Yogyakarta.
- Turner, V. 1968. *The Drums of Affliction: A Study of Religious Processes among the Ndembu of Zambia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Vincent, J. 1986. "System and Process, 1974-1985". *Annual Review of Anthropology* 15: 99-120.
- Weingrod, A. 1968. "Patrons, Patronage and Political Parties". *Comparative Studies in Society and History* 10: 377-400.
- Worsley, P. 1968. *The Trumpet Shall Sound: A Study of "Cargo" Cults in Melanesia*. New York: Schocken Books.

KATA PENGANTAR

PRAGMATISME POLITIK: Menakar “Harga” Partai dalam Pemilu dan Pilkada

Oleh:

Dr. Asep Nurjaman, M.Si.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Malang

“The political parties created democracy and . . . modern democracy is unthinkable save in terms of the political parties.”

(E. E. Schattschneider).

Pendahuluan

Reformasi telah memberi ruang kebebasan politik dan keterbukaan di Indonesia (Piage, 2004). Situasi dan kondisi politik pun berubah, termasuk perubahan partai dan sistem kepartaian maupun perilaku politik dalam pemilu. Pola hubungan partai dan konstituen berbasis kultural tidak lagi signifikan (Baswedan, 2004; Nurjaman, 2013). Figur-figur yang populer seperti artis dan para

pengusaha yang mempunyai kekuatan ekonomi lebih banyak mendapatkan suara dalam pemilu (Nurjaman, 2011). Di sisi lain, Jainuri (2010) menemukan bahwa orang kuat di tingkat lokal menentukan terpilih dan tidaknya seseorang dalam pemilu baik pemilu legislatif maupun pilkada. Lebih jauh, pola hubungan partai dan konstituen pada pemilu pasca Orde Baru tidak lagi mencerminkan politik aliran, justru figur populer lebih dominan (Liddle dan Mujani, 2007).

Pola hubungan pemilih dan konstituen lebih didasarkan pada kepentingan pragmatis, transaksional dan jangka pendek, begitu pun partai politik tidak lagi mengedepankan visi, misi, dan program partai yang mencerminkan ideologi partai (Nurjaman, 2011). Konstruksi politik hasil Pemilu 2009 menunjukkan adanya perubahan, pola hubungan sosio-religi, pola panutan, maupun kepemimpinan kharismatik tidak lagi signifikan dalam menentukan perilaku politik (Nurjaman, 2014). Akibatnya, proses politik menjadi tidak berkualitas, dan kepentingan warga semakin terabaikan. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya biaya politik, serta rendahnya partisipasi dan kepercayaan publik.

Berbeda dengan pola hubungan partai dan konstituen di negara-negara maju yang sangat rasional dan bertanggung jawab, di Indonesia, pola hubungan partai dan konstituen irasional dan kurang bertanggung jawab. Hal tersebut disebabkan oleh perilaku memilih masyarakat masih berbasis primordial dan pragmatis (Nurjaman, 2012). Lebih jauh, hal ini disebabkan oleh semakin bergesernya pola hubungan partai dan konstituen dalam menstrukturkan perilaku memilih masyarakat. Konstituen tidak lagi konsisten memilih partai berbasis kepentingan ideologisnya, begitu pun partai politik tidak lagi konsisten visi misinya (*platform* partai). Kondisi ini

tidak kondusif bagi kehidupan politik baik nasional maupun lokal.

Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa partai politik sudah tidak berharga dalam setiap pemilu baik nasional maupun lokal. Kerja keras dari sebuah partai politik dalam menggalang dukungan massa tidak berpengaruh pada pemilih, dan mesin partai tidak dapat menjamin menang atau kalahnya pasangan calon yang diusungannya. Kemenangan masing-masing pasangan calon dalam Pilkada lebih ditentukan oleh figur calon dan dukungan finansial daripada dominasi partai yang mengusungnya. Oleh karena itu banyak calon, dalam menggalang dukungan, sering melakukan aliansi dengan pelaku bisnis guna mendapatkan bantuan dana. Apabila calon tersebut terpilih, maka bisa dipastikan akan berdampak pada dirugikannya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, karena kebijakan akan diarahkan untuk kepentingan pengusaha bukan masyarakat.

Fenomena tersebut di atas menimbulkan pertanyaan, mengapa keberadaan partai semakin tidak bermakna pada pemenangan pemilu baik lokal maupun nasional, apakah partai sudah tidak berharga lagi bagi pemilih? Guna memberikan gambaran sedikit atas fenomena tersebut, *pertama*, penulis mengungkapkan persoalan *survival* partai. Ketakutan partai politik akan kehilangan status peserta pada pemilu berikutnya, dan usaha partai politik memperbesar basis konstituen dengan mentransformasi diri menjadi partai *catch-all*. *Kedua*, koalisi pragmatis dalam Pilkada. Koalisi pragmatis ini dimaksudkan untuk membentuk tim koalisi pemenang (*winning coalition*) dengan menghitung jumlah suara partai ketimbang ideologi. Pada tingkat akar rumput, kondisi ini justru kontra produktif, karena banyak pendukung partai yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa partainya berkoalisi dengan partai lain yang

tidak punya kesamaan ideologis. *Ketiga*, pelembagaan partai politik yang rendah. Kondisi ini lebih merujuk pada kondisi yang sering dialami internal partai. Misalnya, perolehan suara dari pemilu ke pemilu tidak stabil, partai tidak mengakar ke masyarakat, aturan dan struktur organisasi yang tidak stabil.

Transformasi Partai: Menuju Partai *Catch-All*

Dengan banyaknya partai politik yang bersaing, baik dalam Pemilu 1999 (48 partai politik), Pemilu 2004 (24 partai politik), Pemilu 2009 (38 partai politik)¹ dan Pemilu 2014 (12 partai nasional dan tiga partai lokal) kesulitan untuk mendapatkan suara yang hanya mengandalkan segmen massa politik yang terbatas. Banyak partai politik pada Pemilu 1999 harus gulung tikar akibat kurangnya dukungan untuk memenuhi *electoral threshold*. Begitu pun nasib partai politik yang lulus *electoral threshold* dengan segmen pemilih yang sempit, mengalami penurunan jumlah dukungan pemilih akibat ketidakmampuannya dalam meraih dan mempertahankan simpati pemilih. Kondisi ini telah mendorong partai-partai untuk memperluas segmen massa pemilihnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Demi memperoleh suara yang lebih besar dalam pemilu, ada kecenderungan partai-partai melakukan pencairan basis ideologi mereka, dengan cara mengubah sifat organisasi yang eksklusif menjadi inklusif.²

1 Proses politik yang terjadi di DPR hasil Pemilu 2004, pada penghujung masa jabatannya para anggota Dewan, khususnya dari partai kecil, berupaya mendesak agar partainya tidak diverifikasi ulang. Untuk itu, mereka mengajukan perubahan sistem *threshold*, dari *electoral* menjadi *parliamentary threshold*. Hasil verifikasi awal, KPU meloloskan sebanyak 34 partai politik baik yang lolos *threshold* maupun verifikasi administratif. Namun, keputusan ini dianggap tidak adil dan dianggap melanggar perundang-undangan. Oleh karena itu, sebagian partai peserta Pemilu 2004 yang tidak lolos mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK memutuskan bahwa empat partai politik berhak ikut dalam Pemilu 2009.

2 Setelah pemilu 1999, partai politik merasa tidak cukup kuat untuk meraih dukungan pemilih dari basis pemilih tradisionalnya. Maka, mereka berusaha untuk mengembangkan

Partai Nasionalis maupun Partai Islam, menurut I Ketut Putra Erawan (2008). terus berusaha melakukan pembenahan agar dapat tetap *survive*. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membenahi platform ideologi partai. PDI-P sangat relevan sebagai partai massa karena banyak pendukung setia (Marhaenis, Soekarno, Nasionalis, dan mungkin kelompok populis), dan secara teoretis sudah berada pada jalur partai massa sejak berdirinya. Namun, kenyataan Pemilu 2004 telah mendorong elite partai PDI-P untuk mengaburkan partai massa.³

Dengan demikian, demi memperoleh suara yang lebih besar dalam pemilu, ada kecenderungan partai-partai melakukan pencairan basis ideologi mereka, dengan cara mengubah sifat organisasi yang eksklusif menjadi inklusif. Perubahan ini membuka kemungkinan bagi partai untuk melakukan reposisi dan redefinisi fungsi mereka yang

segmen pemilihnya. Salah satu cara agar bisa meraih dukungan pemilih dari luar basis tradisional, partai Islam melakukan pembenahan dalam membangun isu politiknya dengan tidak menonjolkan syariat Islam secara vulgar walaupun tetap tidak mengubah jati dirinya sebagai partai Islam. Begitu pun partai Nasionalis berusaha untuk menggaet pemilih di luar basis tradisionalnya, dengan cara membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh Islam.

- 3 Di sisi lain, kelompok Islam tradisional melakukan *sophistikasi* dalam pendekatan dengan kelompok abangan. Partai-partai yang semula dikenal “hijau” mulai mencoba untuk menampilkan wajah nasionalis dengan mereduksi isu-isu penegakan syariat Islam dan negara Islam dalam kampanyenya, sebagaimana dilakukan oleh PPP dan PKS. Ketika masih bernama Partai Keadilan (PK) dengan mengusung isu Islam, partai ini tidak mendapatkan suara yang signifikan dalam Pemilu 1999; di parlemen hanya memperoleh tujuh kursi. Namun, setelah melakukan pembenahan dan mengganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta meluncurkan isu yang lebih riil dan menjadi dambaan masyarakat, seperti penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi dengan semboyan “bersih dan peduli”, perolehan kursi PKS meningkat menjadi 45 kursi pada Pemilu 2004. Namun sebaliknya PPP, meskipun sudah memperbaharui isu—dari isu syariat Islam dan negara Islam menjadi isu “mendukung” Pancasila—tetap saja stagnan dengan 58 kursi. PBB yang tetap ngotot dengan syariat Islam juga melorot, dari 13 kursi dalam Pemilu 1999 menjadi 11 kursi dalam pemilu 2004. PDI-P yang unggul dengan 153 kursi dalam Pemilu 1999, juga melorot dengan perolehan 109 kursi saja pada Pemilu 2004.

semakin jelas dan efektif dalam dinamika politik (Katz and Mair, 1955). Partai tidak sekadar berfungsi sebagai pencari legitimasi (perspektif partai elite) atau menyalurkan aspirasi massa (perspektif partai massa). Perubahan ini terjadi karena masuknya perspektif perilaku rasional ke dalam wacana perdebatan ilmiah mengenai peran dan fungsi partai politik (Downs, 1957).

Kenyataan tersebut di atas dipengaruhi oleh adanya perkembangan aspirasi politik masyarakat yang membangun kesadaran dari para pelaku politik untuk berpikir bagaimana bisa merangkul berbagai kepentingan yang ada. Apalagi hal ini didukung oleh keyakinan LaPalombara dan Weiner (1966), bahwa kegagalan partai politik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berkembang merupakan penyebab utama matinya sebuah partai politik. Dengan demikian, banyak partai yang aktif dalam menjaring aspirasi yang berkembang, dan hal ini telah melahirkan format baru dalam partai politik yang dikenal dengan *catch-all party*.

Dalam pandangan Riswanda Imawan (2004), terbentuknya *catch-all party* di era multi partai merupakan kelanjutan politik era Orde Baru yang menolak ideologi kiri-kanan, sehingga kedua spektrum ideologi harus hilang. Hilangnya ideologi ini menurutnya justru akan menghancurkan negara seperti yang terjadi di negara-negara sosialis. Untuk melukiskan kondisi tersebut, Riswanda mengutip pernyataan Bell, *'bahwa bangkrutnya negara-negara sosialis adalah akibat kosongnya makna dikotomi "kiri-kanan" dalam perspektif ideologi politik'*. Ia berpendapat bahwa bila kubu tengah terbentuk karena penolakan terhadap kubu "kiri atau kanan", maka format

catch-all party itu sendiri merupakan refleksi dari kehadiran satu ideologi baru.⁴

Tanpa ideologi terbuka, kemungkinan politik mengarah kepada pragmatisme dan oportunisme yang sangat akut.⁵ Logika produsen-konsumen yang merupakan pondasi pasar ekonomi menjadi dasar dalam kebijakan partai. Menurut Riswanda, logika ini mengandaikan bahwa segala pergulatan politik bergantung pada kreatifitas elite dalam menggiring massa politik untuk larut ke dalam jualan politik yang ditawarkan. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa bila

4 Untuk lebih jelasnya, lih. Riswanda Imawan, *Partai Politik Di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 4 September 2004.

5 Hingga saat ini, masih terdapat beragam pemahaman atas apa yang dimaksud dengan partai Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan yang berkembang di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia tentang hubungan antara Islam dan negara yang juga mendapat beragam tanggapan. Bagi kalangan akademisi, keragaman pandangan ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Akan tetapi, bagi kalangan awam keragaman ini masih relatif sulit dipahami dan tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan yang berpotensi memicu konflik. Untuk itulah, dalam kajian ini penting dikemukakan tentang apa yang dimaksud dengan partai Islam dan yang terkait dengan hal ini berikut argumentasi-argumentasi yang melandasinya, agar keragaman pandangan tentang apa yang dimaksud dengan partai Islam mendapat apresiasi yang proporsional. Pembahasan ini menjadi terasa penting bila dikaitkan dengan posisi umat Islam Indonesia yang menempati jumlah terbanyak di dunia, sekaligus yang memiliki jumlah partai Islam terbanyak pula. Sebagian kalangan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai-partai yang menggunakan nama atau simbol-simbol keislaman. Sebagian yang lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang menjadikan Islam sebagai azasnya. Sebagian kalangan lagi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang bertujuan memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat Islam, meskipun tidak menggunakan simbol atau atribut Islam, dan masih banyak lagi pendapat tentang hal ini. Dari berbagai pendapat tersebut, paling tidak dapat ditemukan suatu rumusan tentang apa yang dimaksud dengan partai Islam dengan kriteria sebagai berikut. *Pertama*, partai yang menggunakan nama, azas, tanda gambar, yang terkait dengan Islam. *Kedua*, partai yang konstituen utamanya adalah umat Islam. *Ketiga*, partai yang program dan tujuannya memperjuangkan kepentingan semua warga negara, tetapi konstituennya adalah umat Islam. Jadi, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang di dalamnya mengandung ketiga unsur di atas. Lebih jelas mengenai karakteristik partai, khususnya partai politik peserta Pemilu 1999, lihat *Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program, 2004-2009*, PT. Kompas Media Nusantara, 2004.

kalkulasi elitis ini terjadi dalam sistem politik yang masih memberlakukan personifikasi institusi, maka format *catch-all party* berpotensi melahirkan oligarkhi dalam tubuh partai itu sendiri. Dan, hal ini bertentangan dengan jati diri partai politik sebagai pilar demokrasi.⁶

Kenyataan tersebut di atas dipengaruhi oleh adanya perkembangan aspirasi politik masyarakat yang membangun kesadaran dari para pelaku politik untuk berpikir bagaimana bisa merangkul berbagai kepentingan yang ada. Apalagi hal ini didukung oleh kenyataan bahwa kegagalan partai politik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berkembang merupakan penyebab utama matinya sebuah partai politik.

Dengan demikian, banyak partai yang aktif dalam menjangring aspirasi yang berkembang, dan hal ini telah melahirkan format baru dalam partai politik yang dikenal dengan *catch-all party*.⁷ Posisinya berada di antara kutub dikotomi partai elite dan partai massa. Menurut Riswanda, format ini mengagungkan pragmatisme dan rasionalitas sebagai pilar penyangga sistem politik yang demokratis. Dengan prinsip pragmatisme dan rasionalitas ini, dimungkinkan bagi masyarakat untuk berpikir tentang “politik tanpa alur” (*politics without cliches*), tidak

6 Untuk lebih jelasnya, Lih. Riswanda Imawan, *Partai Politik Di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 4 September 2004.

7 Dasar pertimbangan utama mengapa partai politik tergoda untuk membangun *catch-all party* adalah keinginan untuk memenangkan pemilu. Baik *catch-all party* yang berbasis partai massa maupun partai kader sama-sama berpendangan bahwa untuk memenangkan pemilu, mereka harus menangkap semua atau berbagai kelompok kepentingan. Hal ini dilakukan dengan cara memperlunak ideologi mereka agar dapat masuk ke dalam berbagai kelompok. Semua *catch-all party* menjanjikan kondisi yang lebih baik bagi pengusaha, upah dan jaminan sosial yang lebih baik bagi pekerja, harga terjangkau dan dukungan pada petani, jaminan hari tua, bantuan terhadap pengusaha kecil, pendidikan dan lapangan kerja yang lebih baik bagi pemuda, dan sebagainya. Lebih jelasnya, lih. Mark N. Hagopian, *Regimes, Movements, and Ideologies*, A Comparative Introduction to Political Science, New York and London, Logman Inc., 1978.

menjadi tawanan ideologi sehingga masyarakat mampu menyikapi berbagai masalah tanpa prakonsepsi, tanpa distorsi ideologis, dan tanpa kekakuan bersikap partisan.

Dalam rangka merealisasikan ambisi partai politik membangun partai *catch-all*,⁸ beragam cara dilakukan, tidak hanya oleh partai yang punya segmentasi pemilih santri (Islam), tetapi juga partai yang punya segmentasi pemilih abangan (Nasionalis). Untuk merambah massa dengan beragam ideologi, beberapa partai Islam dan Nasionalis mencoba mengubah citra diri. PDI-P membentuk Baitul Muslimin untuk merebut simpati generasi muda Islam. PAN kian bergeser ke arah Nasionalis, sementara PBR mengawinkan Islam dan Sosialisme. Begitu juga PPP dan PKS berupaya melunakkan isu syariat Islamnya, dan hanya PBB yang secara konsisten mengampanyekan Syariat Islam. Semua pergeseran itu akan membawa konsekuensi politik para pendukung tradisionalnya. Hal ini didukung oleh hasil temuan lapangan yang menunjukkan bahwa segmentasi pemilih pada Pemilu 2009 sudah mengalami perluasan, karena hampir semua partai telah keluar dari basis tradisionalnya baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.

Koalisi Pragmatis dalam Pilkada

Jika dilihat dari jumlah partai yang memperoleh kursi di parlemen, sistem kepartaian pasca-Reformasi menunjukkan

8 Partai jenis ini, di permukaan hampir serupa dengan partai massa. Namun, berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, partai *catch-all* mulai berpikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai jenis ini berorientasi pada kemenangan pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu di setiap kampanye. Partai *catch-all* juga sering disebut sebagai partai *electoral-professional* atau partai *rational-efficient*. Namun, bergesernya posisi ideologis partai politik akan mengakibatkan hilangnya identitas masing-masing. Bisa jadi, setiap partai politik punya isu dan program yang sama sehingga tidak ada preferensi yang akan dijadikan dasar dalam menentukan pilihan politik.

pluralisme terpolarisasi. Namun sejatinya, dalam konteks ideologi masing-masing partai punya kesamaan. Kondisi ini berpeluang pada terbangunnya koalisi antarpolisi tanpa ada hambatan ideologis. Dalam hal ini, argumen yang bisa diajukan adalah bahwa dalam rangka memenangkan pilkada, partai politik akan melakukan koalisi satu sama lain dengan mudah tanpa ada hambatan ideologis, bahkan cenderung pragmatis.⁹

Lebih jauh, di tingkat lokal ditemukan adanya pola persaingan partai yang tidak konsisten di tingkat elektoral. Dalam pemilu legislatif, persaingan antarpolisi begitu tinggi, tetapi dalam kasus pilkada banyak partai yang bersaing tersebut justru bahu membahu untuk memenangkan persaingan. Sebagaimana kita pahami, dalam pemilu legislatif, partai terlibat persaingan yang sengit yang bersumber pada *cleavages* (Islam vs Nasionalis). Namun, dalam kasus Pilkada tampaknya mereka mengabaikan ideologi, dan justru bekerja sama walaupun tampaknya berseberangan ideologi.

Fakta terjalannya koalisi antara partai yang berlainan ideologi, disinyalir hanya bersumber pada *vested interest*, yakni kepentingan untuk meraih kekuasaan, jabatan, dan privilese ekonomi. Namun demikian, menurut saya kondisi ini juga dikarenakan jarak ideologi di antara masing-masing partai yang tidak terlalu ekstrim. Berbeda dengan pandangan saya, kondisi demikian menurut Ambardhi justru menunjukkan sebuah sistem kepartaian yang terkartelisasi. Sebagaimana dikemukakan Ambardhi, kondisi sistem kepartaian yang

9 Teori tentang koalisi digambarkan oleh Lieven De Winter dan Patrick Dumon, "Parties Into Government: Still Many Puzles", dalam Richard S Katz dan William Crotty (edt), *Handbook of Party Politics*, London: SAGE Publication, 2006. Sedangkan teori koalisi berbasis ideologi dikemukakan oleh de Swan (1973) yang menekankan pentingnya ideologi partai dalam pembentukan koalisi. Lih. Kuskridho Ambardhi, *Mengungkap Politik Kartel*, Jakarta: PT Gramedia, 2009. hlm. 26-27.

terkartelisasi di Indonesia pasca-Reformasi menjadi ajang “penjarahan” sumber daya alam atau keuangan negara baik secara legal maupun ilegal.¹⁰ Dampak dari sistem kepartaian yang terkartelisasi ini adalah terjadinya kolusi antara pemerintah dan partai politik yang pada akhirnya merugikan kepentingan konstituen.

Sebagaimana kita pahami bahwa sistem kepartaian yang terpolarisasi ekstrim sulit untuk terjadinya koalisi di antara partai politik (*marginal turn over*) dalam membangun pemerintahan. Sementara itu, dalam sistem pluralisme moderat, proses koalisi agak mudah karena tidak terlalu banyak partai yang bermain sehingga peta koalisi bisa diminimalisir. Hasil pemilu menunjukkan bahwa perwakilan di parlemen masih tergolong pluralisme moderat bila dilihat dari jarak ideologi. Dengan demikian, PDI-P, Golkar, dan PKB dapat dengan mudah mendorong kader masing-masing dalam persaingan pilkada, tetapi mereka lebih memilih aman dengan cara berbagi kekuasaan di antara mereka. Walaupun pada mulanya, koalisi (untuk mengusung calon presiden maupun kepala daerah) dibangun atas dasar kedekatan ideologi, tetapi dasar utama lebih banyak pada sisi pragmatis. Maka, dalam kasus tertentu, adakalanya partai-partai yang sangat berseberangan secara ideologis, bisa berkoalisi dan bekerja sama dalam mengusung calon kepala daerah karena kepentingan untuk mengusung calon (kasus Pilkada).¹¹

10 Penjelasan lebih lanjut mengenai sistem politik yang terkartelisasi, lih. Kuskridho Ambardhi, *Mengungkap Politik Kartel*, Jakarta: PT Gramedia, 2009.

11 Kasus Pilkada Jatim bisa dijadikan contoh. Untuk memenuhi syarat minimal pencalonan pasangan Khofifah-Mujiono, PPP dan PDS yang secara ideologis berseberangan harus menyatu dan berkoalisi. Secara ideologi, PPP menyatakan diri sebagai partai Islam seperti yang dicantumkan dalam asas partai, sementara PDS merupakan partai yang lahir dari kalangan Nasrani walaupun secara asas menggunakan Pancasila.

Koalisi yang dibangun atas dasar pragmatisme sebagaimana di atas berdampak pada terciptanya pemerintahan tanpa arah kebijakan yang jelas. Bahkan kesulitan yang sering terjadi dalam mengelola pemerintahan bisa dilihat baik di pusat maupun di daerah. Koalisi demikian, dibangun hanya dalam konteks berbagi kekuasaan, tetapi tidak linier dengan dukungan partai dalam persoalan arah kebijakan politik pemerintah yang akan dijalankan. Lebih lanjut, koalisi pragmatis ini juga berdampak pada , lahirnya banyak lobi dan transaksi di tingkat parlemen, yang cenderung bersifat material dalam mengegolkan satu kebijakan. Hal ini telah mendorong lahirnya genetika parlemen lama yang penuh dengan perilaku korup. Walaupun demikian, akibat sistem pemerintahan presidensial yang tidak memberi ruang kepada rakyat untuk melakukan mosi tidak percaya kepada pemerintah, maka posisi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah tetap aman, seberapa parah pun hancurnya bangunan koalisi.

Dilihat dari spektrum ideologis yang ada sekarang, partai-partai yang punya potensi tinggi untuk membangun koalisi adalah partai politik yang berideologi nasionalis religius. Sebagai catatan, apakah sebuah partai tergolong nasionalis sekuler atau nasionalis religius, sangat sulit dilihat dari platform partai. Namun, partai nasionalis religius bisa dilihat dari komposisi dukungan atau basis pemilih yang dibidik dan tentunya dengan aspek sosiologis dan historis dari partai tersebut. Melihat dari konfigurasi ideologis yang ada, maka partai yang termasuk berideologi nasionalis religius dengan dukungan pemilih yang cukup signifikan adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, dan termasuk juga PAN dan PKB yang punya kedekatan secara historis dan sosiologis dengan Islam. Sementara itu, dua kutub yang ekstrim, yang secara ideologis tidak mungkin dipertemukan, walaupun secara pragmatis bisa

ketemu, adalah PDI-P dengan ideologi nasionalisnya pada satu kutub, serta PKS, PPP,¹² dan PBB yang berideologi Islam pada kutub lainnya.

Rendahnya Tingkat Pelembagaan Partai

Demokrasi di negara-negara Barat didukung oleh tingginya tingkat pelembagaan partai dan sistem kepartaian sehingga terwujud akuntabilitas sistem politik yang baik. Sebaliknya, di negara yang baru menerapkan sistem demokrasi seperti Indonesia, tingkat pelembagaannya rendah dan hal ini menyebabkan rendahnya akuntabilitas politik. Mengutip hasil penelitian Mainwaring dan Scully di Amerika Latin, ada empat faktor yang menjadi penyebab lemahnya sistem kepartaian. *Pertama*, pola elektoral yang tidak stabil. *Kedua*, rapuhnya akar partai dalam masyarakat. *Ketiga*, rendahnya legitimasi partai dan Pemilu bagi mereka yang memerintah. *Keempat*, aturan dan struktur organisasi partai yang tidak stabil.

Rendahnya Stabilitas Elektoral

Rata-rata *electoral volatility* Indonesia pasca Orde Baru relatif tinggi (29,38); pada Pemilu 2004 sebesar 28,55 dan Pemilu 2009 sebesar 29,74. Implikasinya, tingkat keluar masuk partai ke dalam parlemen sangat tinggi. Hal ini mendorong partai-partai petahana membangun kerja sama guna membatasi partai baru masuk dalam sistem. Tingginya biaya politik untuk mempertahankan kinerja elektoral partai berimplikasi pada upaya eksploitasi keuangan negara secara berjamaah.

12 Kembalinya PPP ke *Khittah* 1973 menandai tekad partai berlambang Ka'bah ini melepaskan diri dari dilema ideologi. Menghadapi Pemilu 2004 lalu, PPP tetap mengedepankan prinsip *istiqomah* dalam melakukan tugasnya sebagai partai politik yang berasaskan Islam.

Menurunnya jumlah partai yang mendapatkan kursi di DPR (dari 21, kemudian menjadi 17, dan terakhir sembilan partai) tetap tidak mendorong ke arah stabilitas politik. Walaupun jumlah partai semakin sedikit, tetapi nilai *effective number of party* (ENP) meningkat, yaitu dari 5,06 pada Pemilu 1999, 8,55 pada Pemilu 2004, dan 9,59 pada Pemilu 2009. Besarnya ENP berarti semakin meratanya distribusi perolehan suara sehingga partai yang memperoleh suara signifikan semakin bertambah. Dengan demikian, pola kompetisi di tingkat parlemen menjadi semakin tinggi dan berdampak pada terjadinya kompromi politik yang menegasikan kepentingan publik. Dan, semakin banyaknya partai yang memperoleh kursi signifikan di DPR berimplikasi pada semakin kompleksnya pola komunikasi antarpol sehingga mendorong terjadinya *bargaining* politik yang melahirkan korupsi dan kolusi.

Akar Partai Rapuh

Pada Pemilu 1999, ada sekitar enam partai politik yang memperoleh suara lebih dari 2,5%, yaitu PDI-P, Golkar, PKB, PAN, PPP, dan PBB. Namun pada Pemilu 2004, PBB tersingkir dari pentas pemilu berikutnya karena dengan perolehan suara 2,56% dan kursi 2,09% tidak cukup memenuhi tuntutan *threshold* 3%. Sebagai pengganti PBB, masuk dua partai politik, satu partai lama yaitu PKS (pada Pemilu 1999 masih bernama PK) dan satu lagi partai baru yaitu Partai Demokrat. Kedua partai ini memperoleh suara cukup berimbang: PKS 7,20% dan Partai Demokrat 7,46% dengan persentase kursi masing-masing 8,18% dan 10,36%. Sementara itu, lima partai yang lolos *threshold* Pemilu 1999, pada Pemilu 2004 tidak tergoyahkan dan mendapat tiket untuk mengikuti Pemilu 2009, sehingga ada tujuh partai politik yang lolos *threshold*. Perolehan suara kelima partai tersebut ialah sebagai berikut: PDI-P 18,31%, Golkar 21,62%, PKB 12,61%, PAN 6,47%, PPP

8,16%, dengan perolehan kursi secara berturut-turut 19,82%, 23,27%, 9,45%, 9,45%, dan 10,55%.

Menurunnya dukungan elektoral konstituen partai menunjukkan bahwa tingkat afiliasi politik pemilih pada partai semakin menurun. Kondisi ini merupakan imbas dari ketidakjelasan relasi partai dan pemilih yang ditunjukkan dari tiadanya benang merah antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Hal ini ditambah pula dengan semakin kaburnya cita-cita ideal partai yang harus merepresentasikan kehendak rakyat, dan kekaburan ini tampak pada banyak hal, misalnya perilaku para wakil rakyat yang tidak elok.

Legitimasi Rendah

Tingkat pelembagaan partai politik sangat menentukan terciptanya sistem keterwakilan politik yang berkualitas. Reformasi struktural yang telah dilakukan sejak awal periode Reformasi ternyata tidak serta merta meningkatkan kualitas keterwakilan partai politik. Seluruh survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga untuk mengukur persepsi publik atas kinerja partai politik menghasilkan temuan yang sama, yaitu bahwa sebagian besar rakyat memiliki keraguan yang besar bahwa partai politik dapat memenuhi harapan-harapan rakyat.

Jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) memaparkan bahwa tujuh dari sepuluh orang Indonesia tidak merasa partai-partai politik yang ada merepresentasikan ide dan kepentingan mereka. Dalam representasi aspirasi, ada kesenjangan yang cukup besar antara aspirasi pemilih dengan sikap dan tindakan partai politik. Survei LSI menunjukkan, 65% publik menyatakan bahwa partai politik tidak merepresentasi aspirasi mereka untuk berbagai isu publik: posisi kelas sosial partai, isu ideologi dan sistem legal, dan isu ekonomi. Menurut Nababan (2004), pemilih merasa bahwa

partai politik sejauh ini lebih banyak melakukan tindakan yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dan para pemimpin partai, bukan pemilih pada umumnya.

Survei LSDP bulan Januari 2007 memaparkan, ada sekitar 50% pemilih baru yang menyatakan akan memilih partai baru pada Pemilu 2009. Hasil terbaru jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Harian Kompas pada 5-6 September 2007 menginformasikan bahwa mayoritas responden yaitu 63,9% mengakui bahwa partai politik saat itu cenderung mementingkan kekuasaan daripada kesejahteraan. Sebagian besar responden mencurigai partai politik saat itu cenderung dijadikan sebagai komoditas untuk kepentingan elite-elitenya.

Aturan Organisasi Partai Tidak Stabil

Dari sejumlah partai yang mengalami penurunan suara, PDI-P merupakan partai dengan rata-rata yang tinggi, yaitu menjadi 10,27%. Pada Pemilu 2004, perolehan suara PDI-P turun 15,38%, dan pada Pemilu 2009 turun lagi sebesar 5,15%. PKB yang merupakan partai dengan tingkat konflik elite yang tinggi juga tidak luput dari penurunan dengan rata-rata 4,65% setelah mengalami penurunan 2,24% dan 7,06% pada Pemilu 2004 dan 2009. Adapun Golkar yang merupakan partai nasionalis dengan konstituen yang hampir mirip dengan Demokrat, harus merelakan sebagian suaranya tergusur pada Pemilu 2004 dan 2009 sebesar 3,69% dan 5,12% sehingga rata-rata berjumlah 4,41%. Bagi PAN walaupun secara kumulatif rata-rata 2,84% tidak besar, tetapi jika dibandingkan dengan persentase perolehan suaranya, rata-rata penurunan yang terjadi sangat signifikan. Dari 10,53%, 6,77%, ke 4,86% terlihat perolehan suara PAN merosot drastis. Bertolak belakang dengan PAN, PKS yang merupakan partai Islam Modernis dengan basis massa yang sama dengan PAN justru terus

mengalami peningkatan kinerja elektoralnya dengan rata-rata peningkatan suara 3,32%. Pada Pemilu 1999 PKS (ketika masih bernama PK) hanya memperoleh suara 0,8%, tetapi pada pemilu 2004 mampu membalik keadaan menjadi 7,16%, dan pada Pemilu 2009 memperoleh 7,43%.

Penutup

Tingkat persaingan yang sangat tinggi dalam pemilu atau pilkada telah mendorong para kontestan untuk berusaha dengan segala cara meraih simpati massa. Kondisi ini telah mendorong mereka melakukan banyak aktivitas yang lebih mirip pembelian suara (*vote buying*), seperti bantuan pembangunan sarana dan prasarana, pemberian barang dan layanan sosial, bahkan pemberian uang. Di tingkat lokal, hal ini berdampak pada perilaku calon terpilih dalam menjalankan tugasnya, seperti gubernur, bupati/walikota yang mendapat bantuan pengusaha; mereka berusaha membayarnya dengan berbagai kebijakan yang mengarah pada kepentingan mereka. Kondisi ini berdampak pada terabaikannya kepentingan masyarakat luas karena pelayanan publik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat akan berkurang akibat kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Sementara itu, keberadaan partai politik menjadi tidak berharga karena tidak lagi sebagai lembaga yang berpengaruh dalam mengagregasi kepentingan publik. Dalam penentuan kebijakan, perannya sudah digantikan oleh para pengusaha yang menjadi penopang utama dalam kemenangan pilkada. Kondisi ini mendorong terjadinya *abuse of power* dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Daftar Pustaka

- Baswedan, Anis Raysid, 2004. Political Islam In Indonesia: Present and Future Trajectory, *Asian Survey*, Vol. 44, No. 5.
- Campbell, Angus, Gerald Gurin, and Warren Miller. 1960. *The American Voter*. New York: John Wiley and Sons.
- Down, Anthony. 1957. *An Economic Theory of Democracy*, Harver and Brothers.
- Geertz, Clifford. 1986. *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*, Jakarta: Pustaka Grafiti Pers.
- Gaffar, Afan. 1992. *Javanese Voters, A Case Study of Election Under Party a Hegemonic Party System*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jaction, Karl D. 1980. *Traditional Authority, Islam and Rebellion*, Berkeley: University of California Press .
- Jainuri. 2010. *Pergumulan Politik Antar Elit Partai di Aras Lokal: Menguak Lahir dan Dinamika PAN Kota Malang*, Malang: Citra Mentari Press.
- King, Dwight Y. 2003. *Half-Hearted Reform, Electoral Institution And The Struggle For Democracy In Indonesia*. USA: Praeger Publisher.
- Liddle and Mujani. 2007. "Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia". *Comparative Political Studies*, July 2007 40: 832-857, May 25.
- Harrop, Martin and William L. Miller. 1987. *Elections and Voters, A Comparative Introduction*. Hongkong: The MacMillan Press Ltd.
- Nurjaman, Asep. 2012. *Pola Hubungan Partai dan Pemilih di Tengah Memudarnya Politik Aliran*. Malang: Citra Mentari Press.

- _____. 2010. *Mangubur Ideologi, Menabur Materi: Perilaku Politik Pasca Reformasi 2009*, Malang : UMM Press.
- Tan, Paige Johnson. 2006. "Indonesia Seven Years after Suharto: Party System Institutionalization in a New Democracy," *Contemporary Southeast Asia* 28, 1.
- Ufen, Anreas. 2006. *Political Parties in Post-Soeharto Indonesia: Between Politik Aliran and 'Philippinasation'*, GIGA Research Programme: Legitimacy and Efficiency of Political System.
- _____. 2008. "From Aliran to Dealignment: Political Parties in Post Soeharto Indonesia". *South East Asia Research*, Vol.16, No. 1, March 2008.
- Key, V. O. , 1966. *The Responsible Electorate: Rationality in Presidential Voting, 1936-1960*, Massachusetts: Harvard University Press.
- Schattschneider, Elmer Eric.1960. *The Semisovereign People: A Realist's View of Democracy in America*. Holt, Rinehart, and Winston.

Daftar Isi

Sepatah Kata	
Perspektif Baru Terhadap Fenomena Patronase di Indonesia.....	iii
Kata Pengantar - Dari Praktik Politik ke Nalar Politik .	x
Kata Pengantar	
Pragmatisme Politik: Menakar “Harga” Partai dalam Pemilu dan Pilkada.....	xliv
Daftar Isi	lxiv
Daftar Gambar	lxvii
Daftar Tabel	lxviii
Daftar Akronim dan Glosarium	lxvix
BAB I	
Melacak Nalar Elite Lokal dalam Upaya Pemenangan pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).....	1
A. Pilkada Kalimantan Timur (Kaltim)	6
B. Elite Politik di Kutai Timur (Kutim) dan Kaltim....	7
C. Melacak Nalar Elite yang Berkontestasi	7
1. Studi-studi tentang Kontestasi Antarelite.....	16
2. Kajian Penalaran Demokrasi.....	24
D. Nalar Elite (AFI) dalam Meraih Kemenangan dalam Pilkada di Kaltim.....	31
BAB II	
Dinamika Politik Lokal: Melacak Jejak Perjalanan dan Interaksi Politik AFI	36

A. Konstelasi Politik.....	38
1. Hasil Pemilu 1999	41
2. Hasil Pemilu 2004	44
3. Peta Pilkada Kutim dan Kaltim.....	45
B. Rekam Jejak AFI	53
1. Aktivistis Ormas.....	54
2. Relasi Patron-Klien.....	55
C. Melacak Nalar Politisi.....	58
D. Strategi Elite Demokrat	62
1. Menaati Regulasi	63
2. Memengaruhi Perilaku Pemilih	65
3. Dilema <i>Money Politics</i>	69

BAB III

Nalar Politik Sang Bangsawan:

Menelisik Dua Pilkada Kutim (1999-2005)	75
A. Pemberian Gelar Kebangsawanan	76
B. Elite dan Momentum Pemekaran Wilayah.....	82
C. Implikasi Penetapan AFI sebagai Bupati Kutim	86
D. Bapak Pembangunan yang Dermawan	99
E. Revitalisasi Pertanian.....	100
F. Pemberian Pinjaman Modal	103
G. Rekayasa Modal Sosial.....	104
H. Merajut Patronase	110
I. Menggalang Dukungan Parpol	111
J. Safari (<i>Blusukan</i>) dari Desa ke Desa.....	112

BAB IV

Ambivalensi Nalar Politik:

Studi Dua Pilkada Kaltim (2003 dan 2008)	116
A. Fenomena Empiris tentang Praktik <i>Money Politics</i> dan Patronase	117
1. Mengikat Patronase dengan Masyarakat Pedalaman dan Pesisir	121

2. Patronase dengan Ketua Adat	123
3. Menjawab Kebutuhan Masyarakat	128
B. Nalar Aktivistis: Dilema Mahar Politik	131

BAB V

Refleksi Teoretis: Konseptualisasi Politik Ambivalensi ..	157
A. Kritik Terhadap Teori Patronase	158
B. Kritik Terhadap Teori Strategi Politik	163
C. Normalisasi Cara Pandang terhadap <i>Money Politics</i>	165
D. Pemberian-Penerimaan sebagai Budaya	171

BAB VI

Kesimpulan	184
A. Perspektif Normatif/Idealis	184
B. Perspektif Pragmatis	185
C. Politik Ambivalensi.....	186
D. Redefinisi Konsep <i>Money Politics</i>	188
E. Konstruksi Politik Ambivalensi	189
F. Paradigma Baru: Sebuah Tawaran	191
G. Urgensi Rekonstruksi Teori Demokrasi	196
H. Rekomendasi Penulis terhadap Penelitian Sejenis di Tanah Air	199
Indeks.....	201
Kepustakaan.....	205

◆ Lampiran I Nara Sumber Wawancara/Diskusi	224
◆ Lampiran II Pedoman Wawancara	226
◆ Lampiran III Daftar Gubernur Kalimantan Timur.....	231

Daftar Gambar

◆	Gambar 1.1. Nalar Politik Ambivalensi	12
◆	Gambar 2.1. Hasil Pemilu 1999 di Kaltim	41
◆	Gambar 2.2. Peta Politik Kaltim 2004	44
◆	Gambar 4.1. Peta Kalimantan Timur	130
◆	Gambar 5.1. Kluster Patron-Klien versi Scott	159
◆	Gambar 5.2. Kluster Patron-Klien versi Guno	160
◆	Gambar 5.3. Skema Piramida Patron-Klien versi Scott	162
◆	Gambar 5.4. Piramida Dinamika Patron-Klien versi Guno	162
◆	Gambar 5.5. Patronase dalam Tradisi Erau (Pemberian sebagai pewujudan kharisma)	175
◆	Gambar 5.6. Patronase dalam Tradisi Erau (Pemberian gelar menaikkan martabat)	176
◆	Gambar 5.7. Nalar Politisi Pemberian sebagai Kebiasaan/Budaya	178
◆	Gambar 5.8. Nalar Aktivistis Strategi Politik	179
◆	Gambar 5.9. Nalar Politik Ambivalensi	179

Daftar Tabel

◆ Tabel 2.1. Penduduk Kaltim Menurut Agama (%) .	43
◆ Tabel 2.2. Persentase Hasil Pemilu 1999 di Kaltim.	43
◆ Tabel 2.3. Peta Pilkada Kaltim 2005-2006.....	49
◆ Tabel 4.1. Kekuatan Partai Politik di DPRD Kaltim 2004-2009.....	131
◆ Tabel 4.2. Komposisi Penduduk Kaltim Berdasarkan Kelompok Etnis	140
◆ Tabel 4.3. Hasil Pilkada 2008 Kaltim Putaran I.....	151
◆ Tabel 4.4. Hasil Pilkada 2008 Kaltim Putaran II	153

DAFTAR AKRONIM DAN GLOSARIUM

- **adat:** kebiasaan atau budaya yang sudah ada dalam masyarakat
- **ABRI:** angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- **AFI:** Awang Farouk Ishak
- **AHAD:** Amins-Hadi
- **argumen:** pokok pikiran atau alasan dasar
- **Awang:** gelar bangsawan Kutai
- **BPS:** Badan Pusat Statistik
- **budaya pemberian:** kebiasaan pemberian-penerimaan dalam masyarakat Kaltim
- **data:** informasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti
- **deskripsi:** menjelaskan atau memaparkan
- **desentralisasi:** pengelolaan pemerintahan yang didelegasikan ke daerah
- **DPD:** Dewan Perwakilan Daerah
- **DPRD:** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- **DPR:** Dewan Perwakilan Rakyat
- **eksekutif:** pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan undang-undang
- **elite lokal:** sekelompok orang yang menguasai pemerintahan di daerah
- **elite politik:** sekelompok orang yang mengendalikan pemerintahan atau partai politik
- **elite:** bangsawan atau keturunan Sultan yang memiliki pengikut setia

- **erau:** pesta penobatan Raja Kutai Kartanegara
- **Fisipol:** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- **Golkar:** Golongan Karya
- **hegemoni:** otoritas mengontrol atau menguasai masyarakat
- **identitas etnis:** jati diri yang tampak dalam kesukuan, bahasa, adat, budaya dan agama
- **investasi:** upaya pemberian uang dan barang oleh elit kepada klien
- **implikasi:** sesuatu yang tersimpul tersirat atau tersugestikan dalam penelitian
- **instrumentasi:** pemanfaatan oleh elit politik
- **internet:** jaringan yang kompleks dan cepat meluas antar komputer yang saling terjalin
- **kader bempem:** bangsawan yang loyal terhadap Sultan dan Soeharto
- **KALIMA:** lima program unggulan: Ketaqwaan, Kebodohan, Kesehatan, Kerja, dan kesenjangan
- **kandidat:** calon dalam Pilkada
- **Kaltim:** Kalimantan Timur
- **kekerabatan:** jalinan persaudaraan sekandung satu bapak dan ibu
- **klasifikasi:** pemilahan data sesuai dengan variabel penelitian
- **kontribusi:** sumbangan berharga
- **konsolidasi:** suatu upaya untuk menghimpun kekuatan baru yang solid
- **KPUD:** Komisi Pemilihan Umum Daerah
- **KPK:** Komisi Pemberantasan Korupsi
- **KRB:** Koalisi Rakyat Bersatu
- **Kutim:** Kutai Timur
- **legislatif:** dewan yang memiliki kewenangan membuat undang-undang
- **LSI:** Lingkaran Survei Indonesia
- **LP3ES:** Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial

- **marjinal:** kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi
- **metode:** cara mengumpulkan data
- **money politics:** pemanfaatan uang oleh elit politik dalam memengaruhi massa
- **mobilisasi massa:** suatu upaya elite politik untuk memengaruhi masyarakat dengan tujuan memperoleh dukungan
- **nalar:** berpikir logis dan sistematis
- **No:** Nomor
- **NU:** Nahdlatul Ulama
- **Orba:** Orde Baru
- **otonomi daerah:** kewenangan daerah untuk mengelola pemerintahan
- **otoriter:** pemerintahan yang menguasai atau mengontrol masyarakat
- **PAN:** Partai Amanat Nasional
- **PDI-P:** Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan
- **PKB:** Partai Kebangkitan Bangsa
- **patronase:** relasi antara dua pihak yang saling menguntungkan
- **patronase ganda:** upaya elite memanfaatkan relasi nasional dan lokal untuk merengkuh kekuasaan
- **Pemilu:** Pemilihan Umum
- **pemenangan:** suatu kegiatan yang dilakukan oleh tim sukses untuk mendukung kandidat
- **perilaku pemilih:** pikiran, perasaan, dan sikap pemilih
- **Perda:** Peraturan Daerah
- **perspektif:** cara pandang
- **Pilkada:** Pemilihan Kepala Daerah
- **politik:** seni atau taktik dalam pemerintahan
- **politik pemberian:** memberi dalam rangka amanah budaya Kutai
- **PKS:** Partai Keadilan Sejahtera
- **PPP:** Partai Persatuan Pembangunan
- **pragmatis:** tindakan konkret atau langkah praktis
- **primordialis:** ikatan kekerabatan berdasar atas sedarah daging, satu bahasa, agama dan adat

- **PTG:** Pelaksana Tugas Gubernur
- ***qualitative research:*** penelitian untuk menemukan makna dan implikasi
- **rekayasa:** upaya untuk menguasai atau memengaruhi
- **rezim:** cara pemerintahan suatu negara
- **ruang publik:** memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif
- **sinkretis:** pencampuran antara nilai-nilai politik, adat, budaya dan agama
- **sentralisasi:** pengelolaan pemerintahan yang dipusatkan ke Jakarta
- **TNI:** Tentara Nasional Indonesia
- **UGM:** Universitas Gadjah Mada
- **Untag:** Universitas Tujuhbelas Agustus
- **Unmul:** Universitas Mulawarman
- **utang budi:** upaya elite mengikat masyarakat dengan memberikan uang dan barang
- **UUD:** Undang-Undang Dasar
- **UU:** undang-undang
- **valid:** informasi yang sah (akurat)
- **www.:** world wide web

BAB I

MELACAK NALAR ELITE LOKAL DALAM UPAYA PEMENANGAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)

Penerapan sistem demokrasi di era Reformasi berdampak pada diberlakukannya sistem nilai *one man, one vote, one value* pada saat Pilkada berlangsung. Prinsip dasar penyelenggaraan Pilkada adalah adanya apresiasi terhadap hak-hak individual untuk menentukan aspirasi politik. Namun, kenyataan bahwa kontestasi yang digelar untuk merayakan hak-hak individual ini dilangsungkan dalam masyarakat yang mengedepankan kolektivitas, termasuk di dalamnya kekerabatan, solidaritas etnis dan sebagainya belum cukup diperhatikan.

Tanpa disadari, ada ketidaksesuaian kultur yang diabaikan implikasinya oleh para pakar politik. Seolah-olah, kontestasi untuk menentukan pemenang ini merupakan satu-satunya cara mewujudkan kedaulatan rakyat. Seakan-akan, penerapan skema yang diatasnamakan demokrasi tersebut benar-benar kedap dari sistem budaya kekerabatan dalam masyarakat. Padahal, masyarakat setempat telah hidup dalam sistem budaya kekerabatan selama berabad-abad sehingga kapasitasnya mementahkan skema yang diberlakukan. Faktanya, sepuluh

tahun penerapan skema demokrasi ini tidak menghapuskan nilai-nilai budaya lokal. Bahkan, pemberlakuan skema tersebut dibarengi dengan tidak kunjung matangnya—kalau bukan melemahnya—parpol dalam mengagregasi kepentingan masyarakat.

Kontestasi yang berlangsung pada tingkat individual tidak berhenti pada individu itu sendiri. Masing-masing kontestan memobilisasi dukungan secara jorjoran untuk memastikan dirinya menang. Mereka rela mempertaruhkan uang dalam jumlah besar dan terlibat dalam praktik yang disebut sebagai *money politics*. Maraknya praktik ini pada Pilkada di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sebuah perbincangan menarik. Elite yang tampil sebagai kontestan dari kalangan bangsawan sangat cerdas menggunakan kebangsawannya. Mereka mengolah status atau posisi itu dan dengan cerdas mendayagukannya dalam bentuk relasi patron-klien.¹

Patronase diperankan sebagai basis untuk memobilisasi dukungan masyarakat. Elite mengikat batin tokoh masyarakat/adat melalui pemberian, baik yang bersifat material maupun non-material, yang secara derogatif dilabeli sebagai *money politics*.² Dalam hal ini, menarik untuk dicatat bahwa betapa

1 Heddy Shri Ahimsa Putra, *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988); Heddy Shri Ahimsa Putra, *The Politics of Agrarian Change and Clientelism in Indonesia: Bantaeng, South Sulawesi, 1983 to 1990*. Dissertation. (Columbia University, 1993); Hans Antlov dan Pujo Semedi, *Politik Negara dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal*, (Yogyakarta: Lempura Pustaka Utama, 2002); James C. Scott, "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia" dalam *The American Political Science Review*, Vol. 66, No.1. March, 1972. Yang dimaksud dengan istilah elite politik dalam buku ini ialah Awang Farouk Ishak (AFI). Penulis memfokuskan pada penalaran AFI dalam merengkuh kekuasaan sebagai Bupati dan Gubernur Kaltim periode 2003-2008.

2 Penulis menggunakan istilah *money politics* bukan politik uang untuk menjelaskan fenomena pemberian materi (uang) yang dilakukan oleh elite untuk memengaruhi masyarakat, karena istilah *money politics* ini sudah lazim digunakan wartawan di media nasional maupun lokal.

pun sinisnya para pengamat terhadap praktik ini, faktanya, mayoritas masyarakat tidak memersepsikannya demikian. Justru sebaliknya, praktik tersebut disambut sebagai bentuk kehormatan atau kepedulian patron (bangsawan). Proses yang biasanya dimaknai secara ketat sebagai skema demokrasi itu dikait-kaitkan dengan kesejahteraan, khususnya sebagai usaha pengentasan kemiskinan. Hal tersebut menandai adanya praktik yang dalam studi ini disebut sebagai kebiasaan pemberian-penerimaan dalam masyarakat. Gejala ini mengharuskan adanya pembahasan *money politics* dari perspektif para pelaku di tingkat lokal.

Pada umumnya, para analis menilai bahwa pemberian materi dan non-materi kepada masyarakat merupakan pelanggaran hukum yang menghambat tumbuhnya kemandirian demokrasi dalam masyarakat. Berangkat dari vonis moral tersebut, pengamat Hermawan Sulistyو mendefinisikan *money politics* sebagai bentuk penggunaan uang dalam rangka memperoleh kekuasaan politik.³ Meskipun demikian, istilah *money politics* perlu disikapi dengan hati-hati. Duverger mengingatkan bahwa dalam demokrasi liberal uang berperan penting. Melalui uang itulah suara pemilih diperoleh, lalu dikonversi menjadi jabatan publik. Duverger memang menggunakan istilah *money buying democracy* untuk mendeskripsikan pengaruh uang dalam pengisian jabatan publik termasuk dalam Pilkada.⁴ Hanya saja, ada keperluan untuk tidak membabi buta atau secara pukol rata menyatakan bahwa pemberian tersebut dianggap sebagai tindakan tidak bermoral.⁵ Terlepas dari popularitas telaah yang stigmatik

3 Hermawan Sulistyو dan A. Kadar, *Uang dan Politik dalam Pemilu 1999*, (Jakarta: KIPP,2000), hlm. 6.

4 Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 258.

5 Menurut KPK dalam Surat No. B 143/01-13/01/2013 tentang himbauan kepada para pejabat negara, pemberian uang, barang, dan jasa melanggar UU No.31 Tahun 1999

tersebut, tidak ada jaminan bahwa para pelakunya bersepakat dengan penghakiman moral yang divoniskannya. Oleh karena itu, pada masa kini, fenomena kebiasaan pemberian-penerimaan tersebut perlu dikaji dari perspektif nalar para pelakunya.

Dalam menyikapi skema Pilkada, elite diwacanakan ambil bagian dalam menegakkan prinsip: *one man, one vote, one value*. Dalam pewacanaan ini, suara individu diasumsikan sebagai cerminan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, satu suara sangatlah berharga karena akan menentukan kalah/menangnya seorang elite dalam Pilkada. Dengan demikian, elite yang memiliki kapasitas untuk berkontestasi saling adu pengaruh melalui berbagai cara, termasuk *money politics*. Yang menjadi persoalan dalam studi ini bukan akurat tidaknya kategorisasi cara-cara (modus) melakukan praktik tersebut, melainkan makna dari tindakan atau interaksi yang dijalin. Tindakan-tindakan mereka dinilai tidak melibatkan ikatan batin dan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.⁶ Pemaknaan tersebut di atas justru dilakukan dari telaah yang berdurasi singkat sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak akurat. Elite bisa dan biasa saja melakukan kegiatan transaksional,

tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Lihat L. Sumartini dan Syaiful Watni, *Money Politics* dalam Pemilu (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005). Lihat juga Amzulian Rifai, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). Kwik menyebut politik pemberian dengan sebutan 'politik dagang sapi' yang merusak tatanan demokrasi. Kwik Kian Gie, *Kebijakan Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006). Menurut hasil survei ICW di Jakarta, Aceh, Jayapura, Banten, Kendari, dan daerah lain, dalam Pilkada masih terjadi politik transaksional yang dianggap mengancam proses demokrasi di Indonesia. "Pilkada di Indonesia masih dibajak oleh cukong dan elite lokal. Banyak APBD dipakai oleh incumbent dan [mereka pun] menang, serta penyelenggara yang mudah diintervensi politik. Namun, [Pilkada] belum bisa dibilang gagal, tinggal sistem harus diperbaiki. Saat ini momentum pengawalan dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR," ungkap Abdullah Dahlan memaparkan hasil riset ICW.

6 Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel* (Jakarta: PT Gramedia-LSI, 2009), hlm. 362-365.

dan transaksi itu ikut mengembangkan kekuasaan. Namun, tanpa telaah kontekstual, penghakiman yang divonisikan akan tetap menjadi masalah serius.

Dampaknya, selama ini muncul pemahaman dalam masyarakat bahwa maraknya *money politics* mencerminkan kekecewaan terhadap kemajuan demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, ada hal penting yang luput dari pengamatan para pakar. Pada mulanya, elite bersepakat bahwa penerapan Pilkada langsung diniatkan sebagai pemberlakuan sistem demokrasi modern di Indonesia. Namun, hal ini tidak otomatis menghilangkan kebiasaan pemberian-penerimaan yang sudah mengakar selama berabad-abad.⁷ Kebiasaan itu malah terus berkembang pesat dalam masyarakat dan pada akhirnya menjadi budaya.

Kita tahu bahwa budaya (*culture*) adalah *all the arts, beliefs, social institutions, etc. characteristic of a community, race*.⁸ Budaya yang mencakup kepercayaan dan institusi sosial melekat dalam perilaku dan mewujudkan sebagai karakteristik komunitas. Nilai-nilai budaya dijiwai dan memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan hal ini, pemberlakuan mekanisme berdemokrasi tidak semestinya dilepaskan dari konteks budaya lokal. Telaah terhadap praktik pemberian materi dan non-materi semestinya dilakukan tidak semata-mata dengan pendekatan serupa penghakiman moral yang berpotensi menyesatkan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif dalam memahami nalar elite di balik upaya pemenangan pada Pilkada. Jadi, fokus buku ini bukan pada

7 David Held, *Models of Democracy* (Cambridge: Polity Press, 1987); Clifford Geertz (ed.), *Old Societies and New States* (New York: Free Press, 1963).

8 AS Hornby, *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English* (New York, Toronto: Oxford University Press, 1986), hlm. 210.

tindakan memberi, melainkan pada nalar yang membangun keyakinan akan keniscayaan untuk menang berkontestasi dalam Pilkada.

Berdasarkan uraian di atas, dalam buku ini kajian difokuskan pada Pilkada Kaltim, khususnya periode 2003-2008.

A. Pilkada Kalimantan Timur (Kaltim)

Ada lima alasan mengapa Pilkada Kaltim menjadi awal pembahasan dalam buku ini. *Pertama*, belum banyak pakar yang mengkaji Pilkada Kaltim. *Kedua*, diterapkannya dua sistem yang berbeda dalam Pilkada. Pada awal era Reformasi, kepala daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sebaliknya, dalam Pemilihan Bupati (2005) dan Gubernur Kaltim (2008) digunakan sistem Pilkada langsung, yakni masyarakat langsung memilih pemimpin mereka. *Ketiga*, kondisi masyarakat majemuk. Hal ini menarik untuk dikaji karena akan menyediakan berbagai perspektif tentang nalar elite dalam kemenangan Pilkada. *Keempat*, stratifikasi sosial dalam masyarakat Kaltim menyebabkan kontestan dengan latar belakang bangsawan niscaya menggunakan strategi patronase dalam mengikat masyarakat. *Kelima*, dalam tradisi masyarakat Kaltim, pemberian materi dan non-materi menjadi hal yang biasa dipraktikkan untuk mempererat relasi. Adanya kebiasaan pemberian materi dan non-materi ini perlu digali lebih dalam, apakah termasuk kasus praktik *money politics* atau bukan.

Pembahasan Pilkada Kaltim ini memiliki arti penting sebagai wujud pengembangan teori demokrasi di Indonesia. Diasumsikan bahwa nalar politik dalam kemenangan kontestasi antarelite terkait dengan posisi elite itu sendiri sehingga akan mengerangkai kekhasan praktik-praktik yang dilakukan dalam berdemokrasi. Maka, dengan penghayatan secara

kontekstual, diharapkan akan tersedia rujukan praktis yang lebih akurat. Kontekstualisasi teori demokrasi yang bersesuaian dengan kearifan lokal diharapkan akan mempersempit kesenjangan antara teori dengan praktik demokrasi. Nalar politik yang dipaparkan dalam buku ini mudah-mudahan akan memungkinkan kita menyikapi secara lebih bijak gejala-gejala yang diungkap dalam istilah *money politics*.

B. Elite Politik di Kutai Timur (Kutim) dan Kaltim

Studi ini fokus pada figur Awang Faroek Ishak (selanjutnya disebut sesuai inisialnya: AFI). *Pertama*, sebagai Bupati Kutim tahun 1999-2003. *Kedua*, juga sebagai Bupati Kutim (2005) dan *ketiga* sebagai Gubernur Kaltim (2008). Sebagai salah satu aktor utama dalam Pilkada tidak langsung (DPRD) dan Pilkada langsung serta sebagai anggota DPR dua periode ketika Orde Baru, ia figur yang tepat untuk dijadikan model dalam sebuah perbincangan politik. Bagaimana ia menyikapi skema regulasi yang diberlakukan dalam Pilkada dan mengelola patronase? Penalaran seperti apa yang dikembangkannya dalam rangka kemenangan Pilkada baik tidak langsung maupun langsung?

Berangkat dari adanya permasalahan dua perspektif yang saling bersinggungan (ambivalen) tersebut, dalam buku ini diungkap cara kerja nalar elite yang diliputi dua hal: aturan mekanistik regulasi dalam berdemokrasi, dan keniscayaan patronase (pemberian-penerimaan) yang lazim dalam masyarakat.

C. Melacak Nalar Elite yang Berkontestasi

Dalam melacak nalar elite, buku ini berkiblat pada demokrasi model Dahl, Sartori, Lijphart, Diamond, Linz dan

Lipset.⁹ Menurut mereka, demokrasi melibatkan kepatuhan pada serangkaian kaidah. Di samping itu, buku ini juga mengacu pada penjelasan Schroder, Scott, Wolf, dan Downs perihal kontestasi antarelite yang tentu menyerap perhatian dan energi para kontestan sehingga sangat mungkin bahwa mereka akan mengorbankan kepatuhan pada kaidah-kaidah berdemokrasi.

Menurut Schroder (2004), untuk merebut kekuasaan haruslah ada kontestasi antarelite yang diwujudkan secara demokratis melalui Pemilu.¹⁰ Elite bersaing dengan jujur dan bebas untuk saling berebut kekuasaan dengan cara yang diatur dalam regulasi. Masing-masing elite haruslah menaati regulasi dan mengutamakan integritas yang terwujud melalui Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (disingkat dengan *luber* dan *jurdil*). Dengan mengacu pada asumsi Pemilu harus *luber* dan *jurdil* tersebut, elite yang berkontestasi dan menang akan mendapatkan legitimasi yang kuat. Dalam konteks kontestasi antarelite tersebut, dia memerlukan strategi yang efektif agar dapat memenangkan Pemilu secara jujur dan adil. Menurut Schroder (2004), strategi kontestasi dalam kemenangan elite ada dua: *ofensif* dan *defensif*.¹¹

Strategi *ofensif* adalah suatu cara untuk memperluas segmen pemilih dan menembus segmen pemilih baru. Strategi *ofensif* ini diperlukan oleh elite dalam rangka merebut massa sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain, strategi *ofensif* ini menjadi penentu bagi elite, apakah dia diterima oleh pemilih atau tidak. Semakin banyak dia memperluas segmen pemilih

9 Lihat Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation* (Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1999).

10 Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Fridrich Nauman Stiftung, 2004), hlm.4-10.

11 *Ibid*, hlm. 95-110.

dan menembus pemilih baru, semakin besar peluangnya untuk meraih suara banyak.

Sebaliknya, strategi *defensif* adalah suatu cara elite untuk mempertahankan basis massa pendukung dari serangan lawan politik. Dengan kata lain, elite membentengi basis massa pendukung sedemikian rupa agar mereka tidak terpengaruh bujukan dari lawan politik. Oleh karena itu, elite harus dipastikan menjamin kecukupan kebutuhan massa pendukung agar mereka tidak menerima pemberian uang, barang, dan jasa dari lawan politik. Ketika mereka berhasil dipengaruhi untuk menerima uang, barang, dan jasa dari lawan politik, maka pertahanan basis massa pendukung rentan dan suara mereka akan beralih ke lawan politik.

Untuk menerapkan strategi *ofensif*, diperlukan rekayasa sosial dan program yang inovatif. *Pertama*, elite merekayasa adanya 'musuh bersama' agar terwujud 'rasa kekitaan'. Diperlukan program-program inovatif yang populis dan pencitraan elite sebagai *problem solver* terhadap kemiskinan, kebodohan, perusakan alam, dan sempitnya lapangan kerja. Dengan adanya program keberpihakan kepada masyarakat menengah ke bawah dan bukti konkret elite berupa pemberian bantuan materi, pendidikan gratis, pemberian tanah dan pupuk, masyarakat akan menaruh simpati dan memilih elite tersebut.

Bila elite dikenal dengan baik oleh masyarakat, apalagi memiliki kedekatan dengan mereka, maka peluang untuk dipilih sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendekatan pribadi. Dengan teori Scott, bisa dijabarkan bahwa elite memanfaatkan kultur patronase dalam berkompetisi merebut kekuasaan sebagai kepala daerah. Sementara itu, untuk menjelaskan strategi pendekatan pribadi yang relevan,

bisa diaplikasikan teori Scott dan Eric R. Wolf¹² berkaitan dengan *kinship* (kekerabatan), *friendship* (pertemanan), dan patronase. Menurut Scott, patronase adalah relasi patron-klien antara dua orang yang berbeda status, di dalamnya terjadi proses pemberian uang, barang, dan jasa.¹³

Biasanya, patron berasal dari kalangan bangsawan atau tuan tanah. Dengan sumber daya dan pengaruh yang sangat besar di masyarakat, biasanya ia memiliki status yang lebih tinggi. Ia memberikan pinjaman uang, tanah, peralatan pertanian dan perlindungan keamanan kepada klien. Sementara itu, klien yang berasal dari kelas sosial lebih rendah hanya menerima pemberian tersebut dan membalasnya dengan loyalitas. Artinya, sang patron menginvestasikan kebaikan melalui pemberian materi dan non-materi. Dampak dari apa yang dilakukan sang patron ialah utang budi dan loyalitas. Semakin besar pemberian sang patron, klien akan merasa berutang semakin besar sehingga tertutup kemungkinan untuk bisa membalasnya. Menurut Scott, fenomena patronase tersebut mengakar kuat dalam masyarakat di Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Temuan Scott juga mengindikasikan adanya penguatan relasi patron-klien dalam masyarakat agraris. Dengan kata lain, dalam masyarakat Asia Tenggara—khususnya di Indonesia—masih terikat kuat dengan kebiasaan patronase yang berimplikasi terhadap perilaku elite lokal. Ketika elite mencalonkan diri dalam Pilkada, maka relasi patron-klien tersebut ditransformasi menjadi mobilisasi massa dan perolehan suara baginya.

12 Erick R. Wolf, “*Kinship, Friendship and Patron-Client Relations in Complex Societies*” dalam Michael Banton, *The Social Anthropology of Complex Societies* (New York: Praeger, 1966).

13 Scott, *op. cit.*, hlm. 91-113.

Selaras dengan itu, Wolf berpendapat bahwa kontrol kekuasaan tidak hanya berada pada pemerintah pusat, tetapi juga pada penguasa lokal. Peran tuan tanah/bangsawan sangat besar. Mereka mengontrol kepemilikan tanah dan mengikat masyarakat dengan pajak. Dalam hal ini, Wolf memersepsikan bahwa kekuasaan bisa terjadi karena faktor kekerabatan, pertemanan, dan patron-klien. Secara khusus Wolf mendasarkan argumennya pada studi kasus masyarakat di Amerika Latin dan Eropa Tengah. Benang merah pandangan Wolf dan Scott terletak pada pengaruh tuan tanah/bangsawan dengan memanfaatkan patronase untuk menginvestasikan utang budi dan menumbuhkan loyalitas klien.

Sehubungan dengan hal tersebut, Flyvbjerg menyarankan agar dalam analisis politik dibedakan antara '*real rationality*' dan '*real politics*'.¹⁴ Dengan mengikuti saran ini kita bisa menganalisis nalar politik melalui telaah *rationality in action*.¹⁵ Dengan *rationality in action* kita bisa memahami apa yang berkecamuk di balik strategi-strategi yang ditempuh dalam praktik Pilkada selama ini. Pengertian *rationality in action* inilah yang membantu kita memiliki keputusan untuk mewujudkan demokrasi melalui tindakan untuk mewujudkan kemenangan dalam kontestasi.

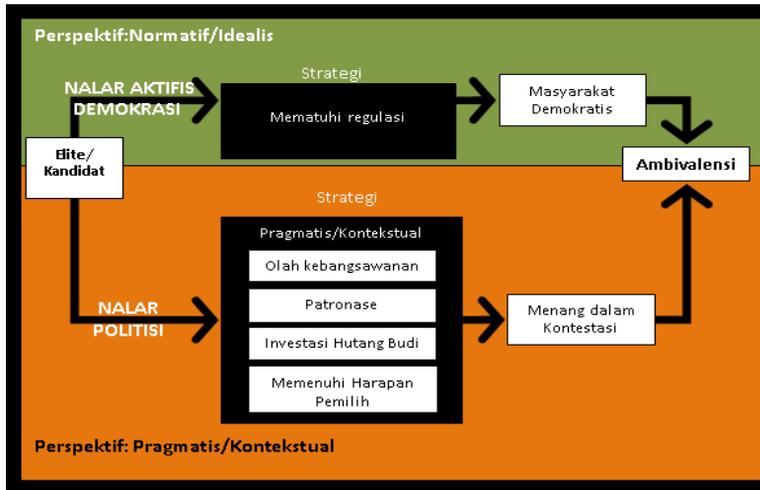
Setelah menganalisis rasionalitas elite dalam proses berdemokrasi, tampak bahwa berbagai tuntutan konsistensi yang tidak selalu terpenuhi. Di satu sisi, elite dituntut untuk menjadi demokrat, sedangkan di sisi lain ia juga dituntut menang apapun caranya. Hal ini menjadikan pelacakan keruntutan teori dalam standar rasionalitas yang berlaku tidak

14 Bent Flyvbjerg, *Rationality and Power: Democracy Practice* (Chicago: The University of Chicago, 1998), hlm. 4-6.

15 Vohn R. Rearle, *Rationality in Action* (Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 2001).

dapat terpenuhi. Berangkat dari paparan tersebut, kontestan yang menjadi kontestan Pilkada terikat untuk melakoni dua keharusan (ambivalen) sekaligus: keharusan untuk mematuhi kaidah-kaidah berdemokrasi, dan pada saat yang sama harus memenangkan kontestasi. Gambar 1.1. mengilustrasikan dua aras ini dengan warna berbeda: hijau dan oranye.

Gambar 1.1. Nalar Politik Ambivalensi



Aras pertama adalah aras normatif atau idealis (warna hijau), dan yang kedua adalah aras pragmatis atau kontekstual (oranye). Warna hijau di atas menggambarkan area perspektif persemaian nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan oleh para aktivis.¹⁶ Ketika masuk ke aras tersebut, elite niscaya menggunakan perspektif masing-masing. Di aras idealis, ia mengadopsi perspektif normatif. Namun, pada saat yang sama, aktor tersebut juga harus berada di aras praktis dan tidak memiliki pilihan selain pragmatis.

¹⁶ Anders Uhlin, *Indonesia and "The Third Wave of Democratization": The Indonesia Pro-Democracy Movement in a Changing World* (Great Britain: Curzon, 1977), hlm. 84-127. Uhlin mengategorikan kelompok pro-demokrasi ini menjadi empat kategori, yakni *elite dissident groups and intellectuals, the old generation of NGOs, student activist, dan the new generation of pro democracy and human rights NGO.*

Dalam posisinya di ranah normatif, kontestan diharapkan memerankan diri sebagai orang yang taat terhadap nilai-nilai demokrasi,¹⁷ atau sebagai aktivis pro-demokrasi. Maka, jika pun tidak memperjuangkan secara konstitusional nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan sebagai prasyarat terwujudnya masyarakat yang demokratis, dalam posisi ini, ia diasumsikan selalu tunduk.¹⁸ Demi terimplementasikannya nilai-nilai demokrasi ini, semestinya ia bersaing secara bebas dengan rivalnya dalam memperebutkan kekuasaan.¹⁹ Hanya saja, ia dituntut mengelola persaingan tersebut secara jujur dan adil. Itu semua dibayangkan sebagai bentuk investasi untuk mewujudkan demokrasi melalui keterlibatannya dalam pemerintahan. Dalam posisi seperti ini, ia mengadopsi nalar yang dilabeli sebagai “nalar aktivis demokrasi”. Dalam jebakan posisi seperti inilah para elite terstruktur untuk menjanjikan pemerintahan yang lebih demokratis selama dia memimpin kelak.

Apa yang terjadi ketika elite berada pada aras pragmatis (warna oranye)? Penalaran macam apa yang menggerakkan tindakan-tindakannya? Ketika berada di aras ini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya berada dalam persaingan ketat. Artinya, ia harus bisa mempersiapkan kemenangan dengan menggunakan strategi terbaik dalam merebut dukungan masyarakat. Ada empat strategi yang dipakai elite untuk memperoleh kemenangan, yaitu mengolah posisi dan peran kebangsawanan, patronase, investasi utang budi, dan memenuhi harapan masyarakat. Namun, yang urgen untuk

17 Bandingkan Robert A. Dahl *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven: Yale University Press, 1971).

18 Bandingkan Dahl, Sartori, dan Diamond.

19 Bandingkan, *Democracy in Plural Societies*.

dijelaskan di sini bukan detail atau corak strategi itu sendiri,²⁰ melainkan nalar yang menggerakkan strategi itu sendiri. Yang jelas, dalam posisi ini peran dan kepiawaiannya sebagai politisi sedang dipertaruhkan. Apapun strategi yang diambil, ia tidak boleh membiarkan diri menjadi sekadar nomor dua, karena

20 Dalam kasus yang diteliti, kontestan terlibat secara aktif dalam “mengolah” peran dan posisinya sebagai bangsawan dalam rangka mencitrakan dirinya sebagai *problem solver*. Artinya, ia mencitrakan diri sebagai seorang bangsawan yang dermawan dengan membagi-bagikan materi dan non-materi. Hal ini berkaitan dengan perspektif masyarakat bahwa seorang bangsawan yang berkhariaisma harus memberikan materi dan non-materi. Dengan pemberian itu, masyarakat akan memercayainya. Bagi masyarakat, pemberian tersebut merupakan kehormatan, bukan tindakan *money politics*. Karena masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi kekerabatan, maka strategi pendekatan pribadi lebih efektif. Selaras dengan hal ini, dalam demokrasi yang menerapkan prinsip *one man, one vote, one value*, pengenalan dan kedekatan kontestan dengan masyarakat sangat menentukan. Oleh karena itu, agar masyarakat terikat batin dan loyal, kontestan tersebut mengelola pemberian itu secara kontinyu. Dengan kata lain, secara sadar ia mengadakan rekayasa relasi patron-klien dengan memberikan materi dan non-materi sebagai simbol pengikat bagi dirinya terhadap tokoh masyarakat, adat, dan agama. Dengan adanya ikatan relasi patron-klien yang kemudian ‘dilembagakan’ dalam bentuk ormas dan dikelola secara terus menerus, muncul kedekatan batin dan utang budi.

Pemberian materi dan non-materi tersebut merupakan investasi berupa utang budi yang besar hingga masyarakat sebagai klien tidak bisa membalas. Investasi tersebut juga dikelola dengan memanfaatkan dana APBD dan birokrasi, serta dikawal oleh para penyuluh ke desa-desa. Adakalanya, ketika elite sebagai pejabat atau kepala daerah, dia membuat kebijakan yang radikal dengan membagi-bagikan tanah secara gratis, sertifikat tanah gratis, pendidikan gratis, pengobatan gratis, pinjaman dana bagi petani, dan perlindungan hasil panen melalui koperasi.

Kebijakan ‘sinterklas’ tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat dan dengan demikian elite mendapatkan sarana untuk mencitrakan dirinya sebagai *problem solver* atas berbagai masalah, baik kemiskinan, kebodohan, maupun perlindungan terhadap masyarakat. Implikasi penerapan strategi investasi utang budi tersebut memunculkan citra elite sebagai “bapak pembangunan” yang dermawan dan peduli terhadap masyarakat. Ketika ia mencalonkan diri sebagai kontestan dalam Pilkada, relasi patron-klien dan investasi utang budi yang telah ‘ditanamkan’ tersebut ditransformasi menjadi mobilisasi massa dan dukungan suara terhadapnya.

Dalam hal ini, berlaku penalaran elite bahwa dia perlu mengikat batin masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga mereka loyal kepadanya, dan keterikatan batin itu dirajut melalui pemberian materi dan non-materi. Namun, agar elite tidak divonis melakukan tindakan *money politics* dan terkena sanksi hukum, mekanisme pemberian ini dikemas secara kultural dengan menyesuaikan adat setempat. Pemanfaatan adat atau budaya ini dimaksudkan untuk ‘menanamkan’ ikatan batin dan utang budi. Penanaman ‘utang budi’ tersebut berlangsung bertahun-tahun dan dikelola secara profesional.

yang menduduki jabatan kepala daerah hanyalah pemenang nomor satu. Artinya, dirinya tidak mungkin main-main atau setengah hati. Sekali memutuskan untuk ikut dalam kontestasi, ia harus melakukannya dengan sepenuh tenaga. Nalar yang menuntun perumusan dan keseriusan untuk mengadopsi strategi di sini adalah nalar politisi.

Dari paparan di atas, teridentifikasi adanya dua nalar yang niscaya beroperasi saat berlangsungnya kontestasi dalam Pilkada. Keduanya tidak bisa dihindari, meskipun bersifat kontradiktif. Oleh karena itu, elite yang terlibat dalam kontestasi Pilkada dihadapkan pada pilihan sulit atau dilematis dari waktu ke waktu. Peluang manuver yang telah tersedia suatu saat terbuka lebar, meskipun lama kelamaan bisa menyempit. Situasi seperti ini menjadikan dirinya terjebak dalam ambivalensi.

Ringkasnya, dalam buku ini, diasumsikan bahwa elite yang masuk dalam kontestasi menyadari bahwa dirinya memasuki ke dua aras tersebut. Maka, ia harus mengemas diri sedemikian rupa dan mencitrakan dirinya. Ketika memasuki tahapan Pilkada, dia akan mencitrakan diri sebagai seorang demokrat dengan mematuhi regulasi yang berlaku. Sebaliknya, ketika menghadapi masyarakat secara langsung, nalarnya sebagai politisi yang kontekstual yang bekerja sehingga ia mencitrakan diri sebagai sosok bapak pembangunan yang dermawan. Telaah Pilkada Kaltim yang disajikan dalam buku ini tampaknya memperlihatkan gejala yang sama. Elite mencampuradukkan dua nalar, yakni nalar sebagai aktivis dan nalar sebagai politisi. Pencampuradukan dua nalar yang saling bertentangan itulah yang disebut dengan politik ambivalensi. Pencampuradukan ini akan terasa maknanya jika dikontraskan dengan teori demokrasi dan kontestasi antarelite.

Selanjutnya, untuk melacak nalar di balik strategi yang diadopsi oleh elite, dan dugaan mengenai penerapan dua nalar yang bertentangan (ambivalensi), ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu hasil-hasil studi tentang kontestasi antarelite dan penalaran demokrasi.

1. Studi-studi tentang Kontestasi Antarelite

Studi-studi tentang kontestasi antar-elite dalam Pilkada di Indonesia bisa dikelompokkan menjadi beberapa kategori. *Pertama*, studi yang berperspektif bahwa elite kontestan memadukan strategi *ofensif* (serangan) dan *defensif* (bertahan). Kategori ini muncul dalam studi Mukhlis (2009) yang meneliti kontestasi antarelite dalam Pilkada Kota Sabang (2006). Temuan Mukhlis menunjukkan kemenangan elite ditentukan oleh instrumentasi strategi *political marketing*. Elite memadukan dua strategi sekaligus, yakni strategi *ofensif* untuk mencari suara sebanyak-banyaknya di basis massa pesaing. Sebaliknya, di daerah yang dianggap sebagai basis massanya, ia menggunakan strategi *defensif*.²¹ Hasil penelitian Mukhlis tersebut diperdalam dengan temuan Ismail (2010) yang mengkaji strategi mobilisasi dukungan pemilih di Kota Tidore.²² Temuan Ismail menunjukkan bahwa Golkar meraih

21 Mukhlis menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan pengumpulan data melalui wawancara kontestan, tim sukses, anggota KIP, masyarakat dan studi literatur. Temuan Mukhlis dipengaruhi oleh pemikiran kontestan dengan penekanan pada strategi *ofensif* dan *defensif*, karena penulis merujuk pada apa kata kontestan. Independensi penulis dalam hal ini menjadi kurang, karena ia hanya seperti wartawan yang melaporkan apa yang dikerjakan kontestan (Mukhlis, 2009: 24).

22 Dalam studinya, Ismail menggunakan metode kualitatif. Dia mengumpulkan data melalui berbagai informan, antara lain elite partai politik, tokoh agama, pebisnis, dan tokoh adat (Ismail, 2010: 22). Namun, penulis terjebak hanya menganalisis data hasil Pilkada, tetapi tidak menganalisis strategi di balik kemenangan kontestan. Pertanyaan kritis terhadap studi ini adalah bagaimana kontestan memobilisasi massa? Apakah ia melakukan *money politics* ataukah hanya melakukan mobilisasi etnis? Tampaknya, penulis tidak memaparkan strategi *money politics* yang diterapkan oleh kontestan sehingga terkesan, hasil penelitian tersebut hanya menyuarkan opini kontestan.

24.046 suara (52,76%), sedangkan PKS dan PAN meraih 21.527 suara (47,24%). Strategi yang digunakan oleh Golkar ialah pemantapan struktur organisasi sampai ke tingkat desa. Oleh karena masyarakat Tidore menjunjung tinggi nilai-nilai agama, maka elemen kesalehan juga menjadi isu utama yang dikampanyekan kepada masyarakat. Strategi pemenangan Golkar di Tidore ditentukan oleh empat mobilisasi, yakni masyarakat adat, kelompok agama, kelompok paguyuban, dan kekerabatan.

Perpaduan strategi *ofensif* dan *defensif* dalam pemenangan Pilkada juga dipaparkan oleh Ismardi (2009) yang meneliti pemilihan walikota di Banda Aceh.²³ Elite menggunakan prinsip-prinsip *political marketing* yang meliputi tiga hal, yakni *segmenting*, *targeting*, dan *positioning*. Sebaliknya, Nugraheni (2009) menemukan bahwa kemenangan Rustriningsih ditopang oleh instrumentasi birokrasi yang dikuasainya. Elite menginstrumentasi birokrasi dalam rangka *positioning* terhadap para pesaingnya. Selain itu, Rustriningsih memiliki sumber dana yang besar sehingga mampu menguasai media massa di Kabupaten Kebumen. Penguasaan elite atas media massa tersebut mampu merekayasa opini publik, khususnya melalui isu sekolah gratis, kesehatan gratis, dan perbaikan ekonomi.²⁴ Kelemahan penelitian dengan menggunakan paradigma *ofensif* dan *defensif* ialah bahwa penelitian yang

23 Tampaknya, penulis terjebak dengan teori *marketing politics* yang menekankan pada strategi membangun citra, *ofensif*, dan *defensif*. Dengan dasar teori tersebut, penulis menganalisis strategi politik kontestan di daerah pascabencana. Pertanyaan kritis yang patut diajukan ialah, apakah benar kontestan menggunakan strategi pencitraan, *ofensif*, dan *defensif*? Apakah tanpa *money politics* kontestan bisa memenangkan Pilkada? Penulis hanya memaparkan apa yang tampak di luar dan hal ini bisa dimaklumi, karena sumber data diperoleh melalui elite parpol atau kontestan.

24 Nugraheni tidak memaparkan bagaimana strategi *money politics* yang dilakukan untuk memengaruhi citra masyarakat. Padahal, strategi *network* diduga sarat *money politics*. Pendekatan kontestan ke tokoh agama, tokoh adat, dan elite politik menunjukkan adanya “kesepakatan-kesepakatan khusus” yang tidak tampak ke permukaan (luput dari liputan

dilakukan hanya melihat dari sudut orang di luar aktor. Selain itu, data-data yang digunakan cenderung sekunder. Hasil analisis cenderung kurang tajam dan kurang fokus terhadap penggunaan uang, barang, dan jasa yang menjadi daya dukung mobilisasi massa. Dengan demikian, hasil penelitian belum menjawab dan mengungkap nalar elite di balik instrumentasi strategi *ofensif* dan *defensif*.

Kedua, studi yang berperspektif bahwa elite yang terlibat dalam kontestasi biasanya memiliki modal sosial, modal finansial, dan modal politis. Kepemilikan modal yang besar ini menjadi salah satu penentu kemenangan dalam Pilkada. Termasuk dalam kategori ini ialah studi Hartati (2009) yang meneliti *political marketing* kontestan dengan perspektif permodalan. Temuan Hartati menunjukkan bahwa elite unggul karena dia memiliki modal ekonomi, sosial, dan politik yang lebih besar dibanding pesaingnya.²⁵ Selain modal ekonomi, elite juga harus memiliki agenda politik (program inovasi) yang jelas yang bisa dijual ke masyarakat. Hal ini ditegaskan dengan temuan Paskarina (2004) yang meneliti ruang publik dalam Pilkada dengan studi kasus Pilkada Walikota Bandung. Paskarina menemukan bahwa elite yang tidak jelas memiliki agenda atau dukungan sosial tidak akan mendapat dukungan masyarakat. Dengan kata lain, elite yang tidak memiliki modal sosial cenderung akan teralienasi dari masyarakat.²⁶

media massa). Penulis hanya mengkaji strategi petahana dari permukaan saja dan tidak menganalisis secara mendalam di balik bagaimana ia 'menguasai' massa.

25 Temuan penulis di lapangan justru menunjukkan bahwa pada umumnya kontestan belum memiliki modal yang memadai sehingga mereka mendekati para pengusaha untuk membiayai semua proses kandidasi. Maka, tidak mengherankan jika dalam Pilkada, marak terjadi praktik *money politics* dalam rangka memengaruhi pemilih.

26 Dukungan sosial dan agenda yang sistematis tidak cukup memengaruhi pemilih, khususnya mereka yang masih terikat tradisi, adat, dan agama. Selain itu, faktor *money politics* dan kedekatan secara psikologis antara kontestan dengan pemilih juga menjadi pendorong bagi mereka untuk menentukan pilihan.

Hal ini selaras dengan temuan Rasyid (2010) yang meneliti Pilkada Kabupaten Paser, Kaltim. Menurut Rasyid, kemenangan elite ditopang oleh tiga modal, yaitu politik, sosial dan ekonomi.²⁷ Apabila mereka memiliki modal besar dan melakukan tindakan *money politics*, kemudian menang dalam Pilkada, itu adalah hal yang lumrah. Artinya, dalam proses transaksi antara elite dengan masyarakat telah terjadi pertukaran uang, barang, dan jasa, tetapi tidak ditindak tegas oleh pejabat berwenang. Seolah-olah, terjadi pembiaran atas tindakan *money politics*. Penelitian ini belum menjawab bagaimana peran uang, barang dan jasa dalam proses kemenangan elite dalam Pilkada sehingga paradigma bahwa elite memiliki modal ekonomi, sosial, dan politik adalah normatif dan jamak. Padahal, mungkin saja hanya peran modal ekonomi dan sosial saja yang dominan karena banyaknya kontestan yang belum matang berpolitik. Kelemahan dari perspektif ini adalah bahwa studi yang dilakukan tidak secara detail atau tajam mengurai peran elite dalam memobilisasi massa dan pemanfaatan sistem nilai budaya.

Ketiga, studi-studi yang berperspektif bahwa elite memanfaatkan isu kelompok etnis. Tidak sedikit penelitian yang menelaah etnisitas dari kerangka pikir instrumental. Dalam studi ini, elite politik diperlakukan sebagai aktor yang secara sadar meniyasati solidaritas etnis. Dalam pengertian inilah, istilah ‘elite memanfaatkan isu kelompok etnis’ dipakai. Penelitian tentang isu etnis dalam kemenangan Pilkada dilakukan oleh Umasugi (2009), Ramadlan (2008), dan Syarkawi (2007). Umasugi menemukan bahwa kemenangan

27 Pertanyaan kritis yang patut diajukan ialah apakah kontestan yang tidak memiliki tiga modal tersebut akan kalah bersaing? Kenyataannya, tidak semua kontestan memiliki tiga modal tersebut secara penuh. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya *money politics* dalam Pilkada dan keterlibatan para pengusaha dalam membiayai kontestan.

Pilkada di Kabupaten Buru diperoleh dengan memanfaatkan isu etnis—hal ini diidentifikasi dari fakta bahwa pemilihan wakil bupati menunjuk kontestan dari suku yang berpengaruh di Kabupaten Buru. Elite memanfaatkan isu kelompok etnis dalam rangka membangkitkan ikatan primordialisme (kesukuan) dan kekerabatan untuk mendukungnya. Dampak dari hasil Pilkada ini ialah bahwa hanya etnis tertentu yang menempati posisi strategis dalam pemerintahan.²⁸

Sebaliknya, Ramadlan mengkaji isu etnis Dayak dari sisi yang berbeda. Temuan Ramadlan menunjukkan bahwa kemenangan elite dalam Pilkada ditopang oleh strategi jejaring etnis. Instrumentasi jejaring etnis yang ditopang dengan adanya isu ‘putra daerah’ (etnis asli) menarik simpati pemilih. Pemanfaatan isu ‘putra daerah’ juga ditemukan dalam penelitian Syarkawi yang meneliti fisibilitas politik identitas dalam Pilkada di Kalimantan Tengah (Kalteng). Syarkawi menemukan bahwa politik identitas berpengaruh kuat terhadap masyarakat Kalteng yang masih terikat tradisi dan adat istiadat. Pasangan Narang dan Diran yang merupakan perpaduan dua etnis Dayak dan Jawa merepresentasikan masyarakat dominan tinggal di Kalteng. Temuan Syarkawi ini selaras dengan temuan Azis (2007) dalam penelitian di provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang mengindikasikan perlunya akomodasi semua etnis dalam masyarakat, agar kontestan menang dalam kontestasi.

Sebaliknya, temuan Bangsawan (2007) agak unik; ternyata kontestan dari etnis minoritas mampu menang dalam Pilkada yang mayoritas pemilihnya beretnis dan beragama

28 Dalam masyarakat yang masih terikat kuat dengan adat (suku), tampaknya pengaruh etnis menjadi dominan. Namun, faktor penentu tak kasat mata yang mampu memobilisasi mereka—yakni *money politics*—sering berbaur dan menyatu dalam adat, agama, dan acara ritual lainnya. Dengan kata lain, instrumentasi etnis tidak dapat terpisahkan dari praktik *money politics*.

berbeda dengannya. Penelitian tentang Ahok dalam Pilkada di Kabupaten Belitung membuktikan bahwa Ahok selaku representasi etnis minoritas mampu mengalahkan ‘putra daerah’. Kemenangan Ahok ditopang oleh strategi kampanye pendidikan dan kesehatan gratis terhadap masyarakat kota. Sedangkan terhadap masyarakat pinggiran, Ahok menerapkan strategi dengan memainkan isu penyediaan lapangan kerja dan bantuan usaha. Sementara itu, untuk masyarakat pedesaan, strateginya ialah pencitraan diri sebagai figur yang kredibel, kapabel, dan bertanggung jawab. Buktinya, Ahok dari etnis minoritas mampu mengalahkan kelompok etnis mayoritas karena program yang ditawarkan menjawab kebutuhan masyarakat.²⁹

Dari kuatnya tradisi analisis etnisitas tersebut, terlihat jelas bahwa elite berlomba-lomba memanfaatkan isu “kelompok etnis” untuk mendapatkan dukungan. Namun, rivalitas antaretnis dalam Pilkada ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Hal ini dibuktikan oleh Kocu (2007) yang meneliti perilaku pemilih di tengah rivalitas antarkelompok etnis di Sorong Selatan, Papua Barat. Kocu menemukan bahwa loyalitas individu terhadap kesamaan etnis tidak terbukti; mereka lebih memilih kontestan yang mampu membawa kesejahteraan masyarakat (perubahan ekonomi). Sekalipun etnis mereka berbeda dengan kontestan, tetapi apabila mampu menunjukkan karya nyata dan mampu membangkitkan solidaritas yang sama untuk mengentaskan kemiskinan, kontestan tersebut yang akan dipilih oleh masyarakat. Dalam hal ini, perlu dikedepankan bahwa studi Kocu mengacu pada

29 Dalam kasus Ahok, faktor instrumentasi etnis tampaknya tidak berlaku, karena masyarakat Belitung sudah mampu memilah dan memilih antara kandidat yang mampu memberikan solusi atas masalah ekonomi sehingga layak dipilih, dan kandidat yang tidak mampu. Mereka mampu memilih kandidat yang kredibel dan bertanggung jawab tanpa membedakan etnis dan agama.

pandangan *rational choice*. Dengan demikian, pemilih terlihat tidak dipengaruhi oleh faktor kesamaan etnis, dan mereka cenderung memilih kontestan yang tidak memicu konflik, agar terjadi kenyamanan dan perubahan ekonomi dalam masyarakat.

Paradigma instrumentalistik juga telah dipakai dalam menelaah peran adat dan agama. Keduanya diperankan sebagai basis memobilisasi massa. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana pemberian-pemberian dimaknai dan pada gilirannya malah bermakna sebagai investasi atau praktik utang budi. Investasi dalam bentuk penanaman utang budi ini pada gilirannya dapat dimanfaatkan oleh elite dalam Pilkada. Selain itu, dalam proses persaingan antarkontestan tidak bisa dimungkiri adanya tindakan transaksi untuk memengaruhi masyarakat. Artinya, elite akan melakukan tindakan apa saja termasuk *money politics* dalam rangka mendapatkan dukungan. Jika pesaing berani memberikan uang lima puluh ribu rupiah per orang, misalnya, maka dia akan tergoda untuk memberikan seratus ribu rupiah. Namun demikian, tampaknya, teori *rational choice* sebagaimana yang diacu Kocu dalam penelitiannya ini belum sepenuhnya bisa diyakini, karena masyarakat Indonesia masih terikat dengan kekerabatan. Dengan asumsi bahwa masyarakat masih kuat terikat secara etnis dan agama, faktor patronase berpengaruh besar.

Keempat, studi-studi yang berperspektif bahwa elite memanfaatkan sistem nilai budaya lokal. Studi demikian dilakukan oleh Haryanto (2013) yang meneliti Pilkada Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat (2010).³⁰ Temuan Haryanto mengindikasikan adanya pelemahan peran parpol

30 Haryanto, *Politik Kain Timur: Memahami Kekuasaan dan Mobilisasi Dukungan* (Studi Kasus Pemanfaatan Tradisi untuk Meraih Kekuasaan dalam Pilkada di Kabupaten Sorong

karena peran partai tumpang tindih dengan peran kelompok etnis dalam masyarakat. Hal itu tampak pada fenomena kemenangan Otto Ihalauw. Sebagai pendatang, ia terpilih menjadi Bupati Sorong Selatan di dalam masyarakat yang masih kuat ikatan etnisnya. Dalam hal ini, terjadi politisasi birokrasi dan pemanfaatan tradisi “Kain Timur” yang dikonkretkan dengan pemberian-penerimaan. Otto selaku petahana dan Ketua Golkar memberikan posisi strategis dalam pemerintahan kepada anggota suku-suku mayoritas yang ada di Sorong. Selain itu, ia juga memberikan jabatan kepala distrik kepada warga etnis asli. Tampaknya, Otto memahami sistem nilai “Kain Timur” sehingga ia memberi posisi terhormat kepada ‘putera daerah’. Hal ini berkaitan dengan pandangan masyarakat Sorong, bahwa posisi dalam pemerintahan menjadi suatu kebanggaan yang berkaitan dengan martabat suku.

Menurut Haryanto, kunci kemenangan Otto dalam Pilkada Sorong Selatan (2010) bukan ditentukan oleh dukungan Partai Golkar, PKS, dan Hanura. Namun, kuncinya ialah bahwa selaku petahana, ia memanfaatkan tradisi “Kain Timur” sebagai investasi utang budi yang dijabarkan secara konkret dalam pemberian jabatan birokrasi, politik, dan masyarakat. Konsekuensi logisnya, ketika ia mencalonkan diri dalam Pilkada, mereka yang menerima jabatan tersebut membalasnya dengan memberi dukungan atau mobilisasi massa. Parpol dalam hal ini hanya berperan sebagai formalitas pengusung kontestan dalam Pilkada. Sementara itu, regulasi inovasi pembangunan yang dilakukan oleh Otto merupakan instrumen pencitraan dan legitimasi bagi dirinya. Ringkasnya, instrumentasi tradisi “Kain Timur” oleh Otto merupakan suatu keniscayaan yang mewujud dalam pemberian-penerimaan.

Selatan, Papua Barat, 2010). Naskah Disertasi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Gadjah Mada, 2013).

Artinya, pemberian-penerimaan telah menjadi sistem nilai budaya yang memengaruhi perspektif dan perilaku masyarakat.

Pembahasan dalam buku ini berbeda fokus dengan pembahasan Haryanto, baik dalam hal pendekatan maupun teori. Studi Haryanto berkonsentrasi pada praktik-praktik berkaitan dengan tradisi "Kain Timur" sebagai bagian dari proses dan strategi pemenangan seorang kontestan sebagai kepala daerah. Sementara itu, studi ini melacak penalaran elite yang bekerja di balik pemenangan Pilkada.

2. Kajian Penalaran Demokrasi

Penalaran yang dimaksudkan di sini ialah cara berpikir sistematis dan logis yang dimanfaatkan oleh elite agar dia bisa menang dalam Pilkada. Cara berpikir logis dan sistematis tersebut diwujudkan melalui orientasi, strategi, dan hasil. Ada dua nalar yang bertentangan (ambivalensi) dalam pemenangan Pilkada, yakni nalar aktivis dan nalar politisi. Kedua nalar tersebut dikelola oleh elite dalam rangka memenangkan persaingan dalam Pilkada.

Sebagaimana yang disarankan oleh Bent Flyvbjerg³¹ demokrasi bisa dibayangkan sebagai agenda yang diusung dalam skema modernitas. Saran tersebut mendapat perhatian serius dalam studi ini meskipun dipahami bahwa telaah-telaah yang biasa dilakukan cenderung bersifat normatif. Telaah yang tersaji biasanya terobsesi menjelaskan apa yang semestinya.

Sehubungan dengan hal itu, perlu dikembangkan kajian yang mengungkap apa yang senyatanya, termasuk apa yang dibayangkan oleh para praktisi demokrasi itu sendiri. Dalam konteks inilah pandangan penalaran elite lokal yang berpartisipasi dalam skema demokrasi lokal mengajukan diri

31 Bent Flyvbjerg, *Rationality and Power: Democracy Practice* (Chicago: The University of Chicago, 1998).

sebagai kontestan Pilkada hendak dilakukan.³² Yang perlu digarisbawahi ialah bahwa pemaksaan pandangan normatif itu menyimpan 'bahaya' tersendiri. Studi Flyvbjerg di Denmark menegaskan bahwa penyebutan 'pemerintahan demokratis' saja sebetulnya bisa menyesatkan. Pelabelan suatu negara sebagai 'negara demokrasi' menyimpan elemen propaganda, karena di dalam tatanan negara yang dilabeli demokratis itu ada elemen-elemen lain yang tidak demokratis dan justru dapat menghalangi proses demokratisasi itu sendiri.

Namun, tampaknya pandangan Flyvbjerg tersebut di atas bertolak belakang dengan asumsi Dahl. Baginya, demokrasi³³ adalah praktik pemerintahan dengan kekuasaan yang diperebutkan, dan perebutan itu dilakukan secara jujur dan adil melalui Pilkada.³⁴ Jika dipahami dari sudut pandang pelaku, demokrasi perlu dimaknai normatif dengan kekuasaan yang diperebutkan antarelite secara jujur dan adil melalui Pilkada.³⁵ Keniscayaan untuk memenangkan kontestasi ini pada akhirnya mengantarkan Dahl menawarkan konsep demokrasi minimalis yang disebut dengan *poliarkhi*. Inti dari gagasan Dahl tentang *poliarkhi* ialah bahwa totalitas kebebasan partisipasi masyarakat dalam Pilkada dijamin sepenuhnya oleh negara. Dengan demikian, elite politik memiliki hak yang setara dalam memperebutkan kekuasaan dan hak ini dijamin oleh undang-undang, serta dia harus menggunakan hak-haknya untuk memenangkan kontestasi. Dahl memang

32 *Bandingkan* Edward Aspinall and Greg Fealy (ed.), *Local Power and Politics in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2003), hlm. 6-108. Adanya otonomi daerah berimplikasi pada kebangkitan elite lokal yang memanfaatkan tradisi atau adat, agama, dan budaya sebagai basis mobilisasi massa. Nalar elite lokal sering berlawanan dengan nalar demokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-undang.

33 Robert A. Dahl. *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Heaven: Yale University Press, 1971).

34 Lihat David Held, *Models of Democracy* (Cambridge-UK: Polity Press, 1987), hlm. 143-45.

35 *Ibid.*

tidak memaparkan tentang bagaimana strategi politik elite secara detail dalam memperebutkan kekuasaan, tetapi studi ini memicu pertanyaan: bagaimana bekerjanya nalar elite yang harus memenangkan kontestasi? Sejauh ini, Dahl hanya berasumsi bahwa demokrasi yang ideal ialah terwujudnya kedaulatan rakyat dan dalam perwujudan kedaulatan ini rakyat mengekspersikan aspirasi politiknya baik secara personal maupun melalui parpol.³⁶ Dalam ekspresi yang seperti inilah dibayangkan ada ekspresi kedaulatan rakyat. Dalam berbagai studi telah jelas ditunjukkan bahwa Pilkada dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsepsi demokrasi di suatu negara. Bahwa dengan menjalankan pemilihan itu demokrasi akan terwujud. Lebih lanjut dijelaskan Diamond (1999), bahwa konsepsi demokrasi terdiri dari dua, yakni *electoral democracy* dan *liberal democracy*.³⁷ Yang dimaksud dengan *electoral democracy* ialah sistem pemerintahan dalam suatu negara bangsa yang dijalankan dengan cara masyarakat memilih langsung pemimpin negara melalui pemilihan yang jujur dan adil. Sistem yang diterapkan seperti di Athena tersebut memiliki kelemahan apabila diterapkan dalam masyarakat majemuk. Hal ini selaras dengan pemikiran Aristoteles yang mengkritik pemilihan langsung pemimpin negara. Menurutnya, sistem ini justru akan menghasilkan *oligarkhi* elite dan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat justru cenderung terabaikan.³⁸

36 *Bandingkan* James Mill, *Political Writing*, ed. Terrence Ball (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), hlm. 21-24; Hannah Fenichel Pitkin, *The Concept of Representation* (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 232-236; Anne Philips, *The Politics of Presence* (Oxford: Clarendon Press, 1995), hlm. 5-9.

37 Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation* (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1999), hlm. 7; *Bandingkan* David Held, *Models of Democracy*, hlm. 143-185.

38 Aristotle, *The Politics*, ed. and trans. Ernest Barker (Oxford: Clarendon Press, 1946), hlm. 163-9; Lih. David Held, *Models of Democracy*, hlm. 13-34; T. H. Marshall, *Class*,

Selaras dengan pemikiran tersebut, Schumpeter mengkritisi penerapan sistem *electoral democracy*. Menurutnya, sistem ini akan meniadakan kontestasi antar-partai politik (parpol).³⁹ Dengan kata lain, kehadiran parpol tidak dibutuhkan lagi. Selain itu, Schumpeter juga mengajukan kritik bahwa sistem *electoral democracy* ini juga meniadakan adanya kontrol terhadap kekuasaan. Ada kecenderungan bahwa pemilihan langsung oleh masyarakat tersebut justru menghasilkan kepemimpinan yang diktator.⁴⁰ Oleh karena itu, pemimpin perlu dikontrol oleh masyarakat yang memilihnya dalam suatu kontrak sosial. Dengan adanya kontrak sosial yang jelas antara masyarakat dengan pemerintah, kecenderungan pemimpin yang korup dan absolut akan diminimalisir.⁴¹ Dengan demikian, diperlukan kritik terhadap sistem demokrasi yang tidak bisa terlepas dari sistem budaya yang mewarnainya.

Menurut Diamond (1999), yang dimaksud dengan *liberal democracy* ialah kebebasan dan kesetaraan masyarakat sipil untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif.⁴² Pemilihan tersebut dilakukan secara berkala, dan masyarakat diberikan kesempatan untuk mendirikan parpol dan menyalurkan aspirasinya. Dalam sistem *liberal democracy*, peran parpol sangat penting, karena aspirasi masyarakat diperjuangkan. Selaras dengan pandangan Diamond tersebut, menurut

Citizenship and Social Development (Cambridge: Cambridge University Press, 1950), hlm.10-14.

39 Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy* (London: Unwin University Books, 1943), hlm. 260-263; Lihat David Held, *Models of Democracy*, hlm.105-136; Bandingkan Will Kymlicka and Wayne Norman, "The Return of The Citizen" on Ethics, 104, January, 1994, hlm. 360-367.

40 Bandingkan Thomas Hobbes, *Leviathan*, ed. C. B. Macpherson (Harmondsworth: Penguin, 1968), hlm. 239-248.

41 Jean Jacques Rousseau, *The Social Contract and Discourse*, trans. GDH Cole (London-New York: Everyman's Library, 1968), Book I, Chapter VIII, hlm. 15-16.

42 Larry Diamond, *loc.cit.*

Dahl (1982), demokrasi yang ideal mencakup lima hal,⁴³ yakni persamaan hak sipil, partisipasi efektif, transparansi informasi, kebebasan masyarakat sipil mengakses kebijakan pemerintah, dan kesetaraan masyarakat di hadapan hukum. Kelima kriteria tersebut didasarkan pada premis mayor bahwa penerapan demokrasi pada suatu negara hendaknya mengacu pada kemajemukan, historisitas, dan demokrasi kota. Dalam konteks ini, Dahl mengembangkan pemikiran bahwa demokrasi tidak tunggal, tetapi ada unsur legislatif, yudikatif, eksekutif dan lembaga negara lain (*poliarkhi*). Dahl berasumsi bahwa dalam masyarakat yang majemuk (*plural*) diperlukan suatu sistem demokrasi yang mengekspresikan suara masyarakat secara bebas dan jujur. Artinya, masyarakat perlu diberi kewenangan untuk menyampaikan aspirasinya melalui parpol yang berkontestasi dalam pemilihan yang jujur dan adil.⁴⁴

Selaras dengan pikiran Dahl tersebut di atas, Sartori berpendapat bahwa dasar *liberal democracy* ialah kebebasan (*liberty*) dan kesetaraan (*equality*).⁴⁵ Oleh karena *liberal democracy* menekankan pada kebebasan dan kesetaraan, maka sistem ini berimplikasi pada mewujudnya *one man, one vote, one value*. Artinya, suara individu diindikasikan dengan kedaulatan rakyat dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan terpilihnya seorang pemimpin. Namun, konsep *one man, one vote, one value* ini tidak dengan sendirinya bebas dari kelemahan.

43 Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 9-10.

44 Robert A. Dahl. *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Heaven: Yale University Press, 1971), hlm. 2.

45 Giovanni Sartori, *The Theory of Democracy Revised* (New Jersey: Chatam House Publishers, 1987), hlm. 383-386.

Kritik terhadap penerapan sistem demokrasi juga dipaparkan oleh Gould. Menurut Gould (1990), sistem *liberal democracy* lebih mengedepankan individualisme dan tidak mengutamakan kepentingan umum. Dampaknya, kepentingan orang banyak cenderung dinafikan sebab parpol pemenang Pilkada cenderung mengutamakan kepentingan parpol daripada kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan pemikiran Gould, Lijphart (1977) mendefinisikan demokrasi dengan '*government by and for people*'.⁴⁶ Artinya, demokrasi dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Definisi Lijphart tersebut memunculkan pertanyaan: siapa yang dimaksud rakyat? Jawabannya ialah, mereka yang mayoritas menang dalam Pilkada. Hal ini memunculkan dilema bagaimana sikap mayoritas terhadap minoritas? Oleh karena itu, Lijphart menawarkan konsep perlunya konsensus demokrasi, yaitu sebuah konsep agar mayoritas pemenang dalam Pilkada hendaknya mengakomodasi kepentingan kelompok minoritas dalam pemerintahan. Parpol pemenang Pilkada perlu membuat *grand coalition* dengan tujuan mengakomodasi semua kepentingan kelompok dalam masyarakat.⁴⁷

Dilema demokrasi juga dipaparkan Cunningham. Menurutnya, penerapan sistem demokrasi memunculkan eksekusi negatif, yakni konflik horisontal dan vertikal, tidak efektifnya pemerintahan, maraknya *money politics*, dan munculnya politik pencitraan.⁴⁸ Munculnya dampak negatif tersebut mengindikasikan adanya kelemahan pada aktor

46 Arendt Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty Six Countries*, (New Haven and London: Yale University Press, 1999), hlm. 1.

47 Arendt Lijphart, *Democracy in Plural Societies* (New Haven and London: Yale University Press, 1977), hlm. 25-52.

48 Frank Cunningham, *Theories of Democracy: A Critical Introduction*, (London and New York: Routledge, 2002), hlm. 15-26.

dan sistemnya. Cunningham mengkritisi sistem demokrasi dari perspektif relasi individu terhadap dampak sosial. Ia pun menawarkan konsepsi tentang *holistic socialism*, yaitu individu sebagai pribadi secara internal dan eksternal (sosial) harus tercukupi kesejahteraannya. Artinya, semakin demokratis sebuah masyarakat, idealnya semakin tercukupi kesejahteraan individu secara materi dan non-materi. Jadi, ada korelasi antara demokrasi dengan kecukupan kesejahteraan individu.

Dalam tradisi pemikiran liberal tersebut di atas, demokrasi mensyaratkan kontestasi, khususnya dalam pengisian jabatan publik. Diamond, Linz dan Martin Lipset⁴⁹ beralih bahwa suatu negara menganut sistem demokrasi haruslah mampu menyelenggarakan tiga hal. *Pertama*, melembagakan kompetisi antarelite atau kelompok dalam rangka mendudukkan elite dalam pemerintahan dengan tanpa paksaan atau kekerasan. *Kedua*, memaknai kontestasi ini sebagai partisipasi dalam memilih pemimpin mereka secara langsung, berkala melalui Pemilu, dan *ketiga*, menjamin kebebasan sipil dan politik yang terwujud dalam kebebasan masyarakat mengemukakan pendapat, kebebasan pers, dan kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan parpol. Dalam konteks merebut kekuasaan melalui Pilkada, elite harus berkompetisi secara jujur dan adil. Kejujuran dan keadilan ini dijalankan dengan pantauan masyarakat sehingga apabila mereka melakukan tindakan tidak jujur, misalnya kampanye hitam atau *money politics*, mereka mendapat sanksi dengan tidak akan dipilih.

Sejalan dengan pernyataan bahwa kontestasi adalah keniscayaan, Downs menjelaskannya dengan pendekatan

49 Lary Diamond, Juan Linz and Seymour Martin Lipset (eds.), *Democracy in Asia* (Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 1989), hlm. xvi atau Lary Diamond, Juan Linz and Seymour Martin Lipset (eds). *Political and Developing Countries: Comparing Experience with Democracy* (Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 1990), hlm. 6-7.

*rational choice*⁵⁰ secara menarik. Agar bisa memenangkan persaingan antarelite dalam Pilkada, kontestan harus mengalkulasi dan mengetahui kekuatan dan kelemahan modal (ekonomi) yang dimiliki pesaing. Selain itu, ia harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan diri sendiri yang dibandingkan dengan kekuatan lawan. Setelah mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal tersebut, ia dapat menyusun strategi yang efektif untuk meraih tujuan akhir dalam Pilkada, yaitu memperoleh kemenangan.

D. Nalar Elite (AFI) dalam Meraih Kemenangan dalam Pilkada di Kaltim

Melalui wawancara mendalam, dokumen tertulis, diskusi kelompok dan observasi lapangan, data primer mengenai Pilkada AFI Kaltim 2003-2008 dikumpulkan selama enam bulan, Juni-November 2009. Setidaknya, ada lima hal yang dilakukan untuk menguak kinerja nalar elite di balik kemenangan AFI dalam Pilkada Kaltim tersebut. *Pertama*, menemui anggota tim sukses AFI.⁵¹ Pertemuan dengan RTK sebagai salah satu anggota tim sukses di Yogyakarta menjadi pintu untuk penghimpunan data primer. Melalui RTK dokumen *grand strategy* AFI dalam Pilkada 2008, notulen rapat Dewan Pakar, makalah dan data kependudukan Kaltim diperoleh. Data primer ini penting untuk dikembangkan dan dianalisis secara kritis, khususnya tentang bagaimana elite mengimplementasikan strategi kemenangan Pilkada.

Kedua, wawancara dengan AFI. Dengan bantuan RTK, wawancara secara langsung dengan AFI di tengah kesibukan sebagai Gubernur Kaltim bisa terlaksana. Wawancara itu seputar strategi politik AFI, keluarga, latar belakang keluarga,

50 Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy*, (New York: Harper and Row, 1957), hlm. 3-7.

51 Lih. *Lampiran I*.

dan jaringan patronase. Pendekatan secara kultural sebagai bangsawan dimanfaatkan oleh AFI sebagai sarana untuk mengikat batin masyarakat pedalaman dan pesisir. Dengan demikian, terkuaklah cara kerja elite (AFI) dalam pemenangan Pilkada.

Wawancara juga dilakukan dengan akademisi di Universitas Mulawarman (MA dan HS), tokoh masyarakat, wartawan, dan aktivis.⁵² Sebenarnya, MA ikut aktif sebagai anggota KALIMA, ormas yang dibentuk oleh AFI dalam rangka memobilisasi massa. Dari wawancara dengan MA, diperoleh peta konstelasi politik persaingan antarelite di Kaltim. Dalam hal ini, elite bersaing ketat dan harus menang dengan segala cara untuk memengaruhi pemilih. Bekerjanya nalar elite juga ditemukan dalam wawancara dengan MA: elite memanfaatkan strategi kampanye dengan isu etnis, agama, dan rekayasa sosial di basis massa AFI.

Data wawancara dengan MA tersebut kemudian dicek lagi kebenarannya melalui wawancara terhadap masyarakat awam, seperti ibu rumah tangga, pengusaha, aktivis LSM atau lembaga lain, sopir, pegawai, dan wartawan. Selain itu, untuk memperkaya data primer tersebut, hal lain yang dilakukan adalah menyandingkan data sekunder melalui website <http://awangfarokishak.info/> yang secara khusus memuat program kegiatan AFI, visi, misi, strategi, dan riwayat hidupnya. Artinya, validitas dan kebenaran data dari website tersebut bisa dipertanggungjawabkan untuk mengungkap nalar elite politik di balik kemenangan dirinya di Pilkada.

Ketiga, diskusi kelompok bersama mahasiswa Kaltim (Kutai) yang kuliah di DIY.⁵³ Untuk melacak penalaran elite di balik kemenangan AFI dalam Pilkada, masukan dari

52 *Ibid.*

53 *Ibid.*

mahasiswa juga sangat dibutuhkan. Sebagian besar mahasiswa yang terlibat dalam diskusi menyatakan keinginannya setelah selesai studi untuk kembali dan membangun Kaltim. Hal ini merupakan indikasi keberhasilan program AFI memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yang berdampak keterikatan mereka terhadap elite. Tampaknya, rasa mencintai dan memiliki Kaltim sangat tinggi sehingga mereka ingin menerapkan ilmu yang didapatnya untuk membangun daerah mereka.

Keempat, studi literatur. Teori yang mendasari studi ini adalah teori demokrasi, kontestasi antarelite, dan patronase, yang dikembangkan di Indonesia dan kemudian dibandingkan dengan hasil-hasil studi demokrasi di Eropa, Amerika, Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Studi banding ini dilakukan untuk melacak relasi antara konsep demokrasi dengan nalar aktivis atau idealis yang berimplikasi pada strategi politik. Untuk memperdalam pemahaman tentang nalar aktivis tersebut dilakukanlah pengecekan lewat internet. Melalui website <http://www.jstor.org> konsep demokrasi dianalisis. Web ini berisi tentang jurnal *online* yang terpercaya secara ilmiah. Sementara itu, website yang menjadi rujukan untuk mengumpulkan data tentang praktik *money politics* adalah website ICW, KPK, *Kaltim Post*, *Tribun Kaltim*, *Koran Kaltim* dan *Majalah Bongkar*. Kemudian, media massa nasional *online* yang menjadi rujukan adalah *Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Media Indonesia*, *Suara Karya* dan *Majalah Tempo*.

Untuk melacak dasar teori tentang nalar politisi, hal yang bisa dilakukan adalah melalui studi mengenai patronase. Adapun studi tentang patronase itu kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian di Yunani, Italia, Afrika, Amerika Latin, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Makassar. Rujukan lain berupa temuan disertasi HSAP tentang patronase (*minawang*) di Sulawesi Selatan (Sulsel). Temuan penting dalam disertasi

HSAP tersebut ialah adanya ketidakseimbangan posisi antara patron dan klien tidak berarti klien lemah atau tidak mampu memberikan kepada patron. Dengan kata lain, klien memiliki posisi tawar-menawar yang harus diperhitungkan oleh patron.

Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap 56 tesis atau disertasi tentang Pilkada di Indonesia yang telah dikerjakan oleh para mahasiswa Pascasarjana Fisipol UGM. Hal ini dilakukan untuk mempertajam data awal tentang nalar politisi dan nalar akitivis yang sudah dikumpulkan. Studi pustaka tentang kontestasi antarelite dalam Pilkada dilakukan di Perpustakaan Fisipol Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Pascasarjana Fisipol Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Universitas Mulawarman, dan Perpustakaan Pemda Kaltim. Dalam studi pustaka itu, analisis difokuskan pada Pilkada di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun (2003-2008). Hasilnya kemudian diklasifikasi ke dalam empat kategori. Kemudian, metode dan paradigma yang digunakan dalam bahan-bahan pustaka itu dikritisi.

Kelima, observasi lapangan. Selain pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara mendalam, diskusi kelompok dan pelacakan internet, juga diadakan observasi lapangan ke Kaltim pascapenelitian 2009. Observasi tersebut dilaksanakan selama dua minggu (Februari-Maret 2012) di Kutai Kartanegara. Observasi ini bertujuan untuk mengamati kehidupan masyarakat kota dan pedalaman, serta mengadakan cek data: apakah data yang didapat melalui studi pustaka dan wawancara terdahulu dapat diandalkan kebenarannya? Studi ini dibantu oleh asisten peneliti lokal yang memberikan laporan secara berkala tentang perkembangan politik lokal yang terjadi di Kaltim baik secara lisan maupun tulisan melalui kliping surat kabar lokal. Pada tahap observasi lapangan ini, temukan data tentang tradisi *erau* yang memengaruhi perilaku masyarakat Kaltim, khususnya dalam kebiasaan pemberian-penerimaan.

Erau bermula dari tradisi pada penobatan raja, kemudian berkembang menjadi kebiasaan pemberian-penerimaan dalam masyarakat. Pada tahap ini, langkah selanjutnya adalah dengan mengontraskan pemberian-penerimaan dengan *money politics*. Tampaknya, di sinilah sisi kebaruan (*novelty*) studi ini, pertemuan antara nalar aktivis dan nalar politisi terjadi. Elite memanfaatkan kebiasaan pemberian-penerimaan dalam rangka mengikat konstituen. Sebaliknya, tindakan elite memberikan materi dan non-materi divonis kelompok aktivis sebagai tindakan melanggar hukum dan menghambat proses demokratisasi.

Buku ini terdiri dari enam bab. Pada bab pertama, diuraikan tentang apa itu *money politics*, serta sekilas tentang elite dan strateginya dalam memenangkan Pilkada. Bab dua membahas tentang dinamika politik di Kaltim yang memberi gambaran konstelasi politik pasca-Orde Baru dalam rangka melacak peta Pilkada dan jejak rekam AFI, baik di era Orde Baru maupun era Reformasi.

Adapun paparan dalam bab ketiga adalah tentang perpaduan dua nalar. Pada bab ini, dinamika politik lokal yang berkaitan dengan pemberian gelar bangsawan mulai dipaparkan. Sementara itu, nalar elite dalam memenangkan Pilkada tersaji dalam bab keempat. Dalam konteks ini, elite memanfaatkan berbagai strategi untuk memenangkan kontestasi dalam Pilkada. Selanjutnya, bab kelima merefleksikan konseptualisasi ambivalensi antara nalar aktivis dan politisi yang bertitik temu pada pemberian dan *money politics*. Perbedaan mendasar antara pemberian dan *money politics* yang selama ini dipersepsi secara salah oleh kelompok aktivis mulai digali. Adapun bab terakhir, yakni bab keenam dalam buku ini menegaskan inti temuan yang diwujudkan dalam sebuah kesimpulan.

BAB II

DINAMIKA POLITIK LOKAL: MELACAK JEJAK PERJALANAN DAN INTERAKSI POLITIK AFI

Seperti apakah dinamika politik Kaltim di era Orde Baru dan Reformasi saat AFI menjadi pemenang dalam Pilkada? Seperti apa jejak perjalanannya dalam membawa diri sehingga dia meraih kemenangan tersebut? Apakah benar ada embrio dua nalar yang ambivalen, yakni nalar politisi dan nalar aktivis (demokrasi) dalam taktiknya sebagaimana disinggung dalam bab sebelumnya? Di sini penulis berusaha menghadirkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut secara runtut berdasarkan hasil penelitian (studi lapangan) yang telah dilakukan.

Mari kita mulai dari gambaran umum Kaltim. Kaltim adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam (SDA), seperti kayu, minyak, gas bumi, dan batu bara. Dalam sejarah pemerintahan Kaltim sebelum bergabung dengan Republik Indonesia, berdiri Kesultanan Kutai Kartanegara. Hal ini menyebabkan nama Kutai lebih populer dibanding Kaltim pada saat itu, tepatnya pada saat sebelum era Kemerdekaan. Kutai menjadi kabupaten setelah bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950. Berbicara tentang SDA Kaltim otomatis berkaitan dengan

hasil hutannya (kayu) yang banyak diekspor ke luar negeri. Setelah hutan-hutan itu gundul karena pohon-pohonnya habis ditebangi, pencarian SDA dialihkan pada tambang, khususnya batu bara, minyak, dan gas bumi.

Secara administratif, wilayah Kaltim sebelah utara bersebelahan dengan Sabah, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Kalimantan Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Serawak.¹ Dengan wilayah daratan seluas 198.441,17 km² dan laut seluas 10.216,57 km², Kaltim terletak antara 113,44^o bujur timur dan 119^o bujur barat, serta 4,24^o lintang utara dan 2,25^o lintang selatan. Penduduk Kaltim pada tahun 2003 berjumlah 2.704.851 jiwa, kemudian berkembang menjadi 3.553.143 jiwa pada tahun 2010. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.871.690 jiwa (52,68%) dan penduduk perempuan 1.681.453 jiwa (47,32%).

Lambat laun, Kaltim mengalami pemekaran wilayah di era Reformasi (1999). Pemekaran wilayah itu diatur dalam Undang-Undang No. 47 tahun 1999 yang mengatur pembentukan Kabupaten Kutai menjadi Kutai Timur dan Kutai Barat, serta pembentukan Kabupaten Malinau, Nunukan, dan Kota Bontang. Selanjutnya, masih dalam era yang sama diterapkan pola otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Dengan demikian, sejak tahun 1999 Kaltim telah dimekarkan menjadi 12 wilayah Administrasi Pemerintahan yang terdiri dari delapan kabupaten dan empat kota madya.

1 www.kaltim.go.id/ diakses pada 31 Januari 2015, sumber website resmi Pemda Kaltim. Data diolah dan dikembangkan oleh penulis. Lih. *Lampiran I*. Penulis mendapatkan data tersebut melalui diskusi dan wawancara dengan tokoh masyarakat di Kaltim.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kaltim memekarkan diri menjadi 14 kabupaten/kota dengan 140 kecamatan dan 1445 desa/kelurahan. Adapun sepuluh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser dengan ibu kota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibu kota Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibu kota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibu kota Sangatta, Berau dengan ibu kota Tanjung Redeb, Malinau dengan ibu kota Malinau, Bulungan dengan ibu kota Tanjung Selor, Nunukan dengan ibu kota Nunukan, Penajam Paser Utara dengan ibu kota Penajam, dan Tana Tidung dengan ibu kota Tideng Pale (pemekaran dari Kabupaten Bulungan yang disetujui pembentukannya pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007). Sedangkan empat kota di Kaltim adalah Balikpapan dengan ibu kota Balikpapan, Samarinda dengan ibu kota Samarinda, Tarakan dengan ibu kota Tarakan, dan Bontang dengan ibu kota Bontang.

A. Konstelasi Politik

Pada era Orde Baru, Golkar di Kaltim selalu unggul di atas 70% pada setiap Pemilu. Namun, kemenangan mutlak tersebut tidak bertahan di era Reformasi. Pada 1999, Golkar mengalami kekalahan untuk pertama kalinya dari PDI-P. Kekalahan ini juga terjadi di tiga daerah yang menjadi basis massa Golkar dan basis kelompok pendatang (54%), yaitu Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Kekalahan tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor.

Pertama, soliditas internal guncang ketika Soeharto lengser dan Golkar dikecam masyarakat.² Hujatan masyarakat

2 *Bandingkan* John C. Pevenhouse, *Democracy from Above* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005); faktor yang memengaruhi jatuhnya rezim otoriter ialah tekanan dunia internasional, krisis ekonomi dan resistensi masyarakat. Selama Orde Baru memerintah, demokrasi yang dibangun hanya semu (*democracy from above*).

terhadap Golkar sangat gencar baik secara nasional maupun lokal terhadap Golkar sebagai partai yang ikut bertanggung jawab atas krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Masyarakat menghendaki partai ini dibubarkan sebagai parpol dan dilarang ikut Pemilu 1999. Hal ini menyebabkan para pendukungnya banyak yang berpindah ke PDI-P atau partai lainnya.

Kedua, kekalahan Golkar di basis massa Kutai dan kelompok pendatang merupakan indikasi adanya penolakan terhadap keotoriteran yang diwariskan oleh Orde Baru dalam setiap Pemilu.³ Kemenangan Golkar di era Orde Baru tampak tidak wajar karena banyak kejanggalaan dalam Pemilu-Pemilu tersebut, baik dalam hal penyelenggaraan, surat suara, maupun saksi penghitungan suara. Ketika Soeharto lengser (1998), rakyat Kaltim menghendaki perubahan kepemimpinan. Mereka sudah bosan dengan kepemimpinan otoriter yang tercermin dengan keterlibatan militer dan birokrasi dalam setiap Pemilu.

Ketiga, masyarakat Kaltim ingin memberi pelajaran bagi elite Golkar yang mengabaikan kesejahteraan dan aspirasi

Soeharto merekayasa masyarakat yang *plural* sedemikian rupa sehingga mereka tidak diberi hak untuk memilih dalam Pemilu dengan jujur, langsung, dan adil. Tentang teori demokrasi di tengah masyarakat majemuk, bisa dibaca Charles Taylor, "The Dynamics of Democratic Exclusion" dalam *Journal of Democracy*, 19 (4), 1998, hlm. 148-50; Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, (Clerendon: Oxford Press, 1995), hlm. 144-149; A. Philips, *The Politics of Presence: Issues in Democracy and Group Representation*, (Oxford: Oxford University Press, 1995).

3 Menurut Liddle, Orde Baru memiliki lima kelemahan, yakni kesenjangan demokrasi Pancasila dengan demokrasi murni, ketegangan antara elite militer dengan elite sipil, kesenjangan persepsi massa dengan pemerintah, kepedulian terhadap konsekuensi distribusi kebijakan ekonomi pemerintah, dan konflik internal antarelite angkatan bersenjata. Baca R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 1994); *Bandingkan* J. Kristiadi (peny.), *Menyelenggarakan Pemilu yang Bersifat Luber dan Jurdil*, (Jakarta: CSIS, 1997); Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006); *Lih.* Hans Antlov and Sven Cederroth, *Election in Indonesia*, (London and New York: Routledge Curzon, 2004).

rakyat.⁴ Dalam setiap Pemilu selama ini, mereka hanya diberi janji-janji, sementara hasil kekayaan alam Kaltim hanya dinikmati oleh elite parpol dan pemerintah pusat (Orde Baru). Mereka semakin sadar dan cerdas menentukan pilihan mereka dalam Pemilu. Mereka juga mulai menyadari adanya kesenjangan sosial dan tertinggal pembangunan dengan provinsi-provinsi di pulau Jawa. Mereka menghendaki adanya pemimpin baru dan pilihan jatuh pada PDI-P yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputeri. Mega menjadi daya tarik untuk melampiaskan 'kejengkelan' mereka. Dengan kata lain, kemenangan PDI-P pada Pemilu 1999 bukan karena program PDI-P yang baik, tetapi karena faktor sentimen terhadap elite Golkar.⁵

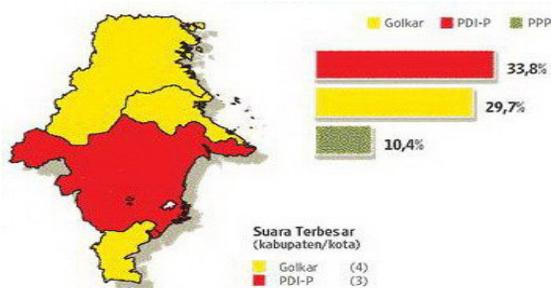
4 *"Ia heran mengapa setelah kalah dalam Pemilu dan Pilpres 2009, kader partai Golkar terbelah. Padahal, setelah Pemilu 1997, Golkar memang kalah terus menerus, baik Pemilu 1999 dan 2004, termasuk dalam Pilpres 2009. Kita kalah beruntun karena setelah kalah tidak ada evaluasi dan tidak ada pembaruan tekad. Komitmen kader hanya bagaimana dirinya dapat kursi di DPR/DPRD. Tak ada yang berpikir bagaimana caranya supaya Golkar menang mayoritas,"* kata Herlan Agussalim (Ketua DPRD Kalimantan Timur 2004-2009). Herlan yakin, bila kader Golkar tidak mengedepankan perlunya evaluasi atas kekalahan, melakukan pembaruan tekad berpartai, bisa jadi pemilih semakin apatis dengan Golkar. Pasalnya, yang diperagakan kader adalah saling sikut untuk dapat kekuasaan di kepengurusan partai ([www.bongkar.co.id/Terjun Bebasnya Golkar](http://www.bongkar.co.id/Terjun_Bebasnya_Golkar), 29 Agustus 2009); Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2005-2006 masih menunjukkan tingkat yang paling tinggi sebesar 20-21%, diikuti oleh Kabupaten Samarinda 12-13% dan Kutai Timur sebesar 10-11%. Ironisnya, kantong kemiskinan paling tinggi terjadi justru di kabupaten yang juga memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kaltim, yaitu Kutai Kartanegara (BPS Kaltim, 2008). Bandingkan Lampiran I. Informasi didapatkan dari tokoh masyarakat Kaltim.

5 *Ibid.* "Sebagai tokoh senior di Partai Golkar, Achmad Amins tentu sudah punya pengalaman mengelola partai. Ia sudah terbiasa dengan berbagai tipikal orang-orang partai, termasuk bagaimana sakitnya hati ketika dikhianati. Pengalaman ketika ia maju sebagai calon Gubernur Kaltim beberapa waktu lalu adalah pelajaran paling berharga yang tidak mungkin terlupakan olehnya. Waktu itu Achmad Amins tidak mendapat tempat di Partai Golkar, padahal ia adalah satu-satunya kader Golkar yang memenuhi syarat menurut hasil survei untuk maju dalam Pilgub Kaltim tersebut. Berbagai survei menempatkan dirinya di posisi kedua setelah Awang Faroek Ishak. Puncak kekecewaan Amins saat Golkar melaksanakan konvensi. DPP Partai Golkar malah mengalokasikan suara votingnya kepada Jusuf SK yang waktu itu menjabat Walikota Tarakan dan posisinya masih jauh

1. Hasil Pemilu 1999

Berikut hasil lengkap Pemilu 1999 di Kaltim yang menunjukkan bahwa parpol PDI-P paling unggul.

Gambar 2.1. Hasil Pemilu 1999 di Katim



Sumber: KPU 1999; Litbang Kompas, 2004

Tampilan Gambar 2.1. di atas menunjukkan dengan jelas bahwa PDI-P menang di daerah basis penduduk asli Kutai dan pendatang. Padahal, sebelum itu, mereka memberikan kontribusi terhadap kemenangan mutlak Golkar. PDI-P menang di Balikpapan (37,3%), Samarinda (33,2%) dan Kutai (38,6%). Kejadian ini mengejutkan para pengamat politik. Mereka tidak habis pikir mengapa Golkar yang sangat solid selama 32 tahun di ketiga daerah tersebut mengalami kekalahan mutlak. Kemenangan PDI-P di basis Golkar merupakan kemenangan yang mengundang banyak pertanyaan.⁶ Sebaliknya, Golkar menang di empat Kabupaten, yakni Berau (30,6%), Bulungan (48,3%), Tarakan (38,9%),

dalam survei-survei? (www.bongkar.co.id/ diakses pada 31 Agustus 2009, *Amunisi Baru Demokrat*).

- 6 Penulis berpendapat bahwa kemenangan PDI-P dalam Pemilu 1999 di basis massa Golkar dipengaruhi oleh '*sentimen politik anti-Golkar*', karena Golkar dikatakan sebagai penyebab krisis nasional. Selengkapnya, baca Akbar Tanjung, *The Golkar Way*; Bandingkan Cornelis Lay, "*Arti Strategis Pelaksanaan Pemilu 1997 yang Luber dan Jurdil Bagi Pembangunan Nasional: Analisis Perspektif PDI*" dalam J. Kristiadi (peny.), *Menyelenggarakan Pemilu yang Bersifat Luber dan Jurdil* (Jakarta: CSIS, 1997), hlm. 74-85.

dan Pasir (35,6%). Perolehan suara Golkar dalam Pemilu 1999 di Kaltim mengalami penurunan hingga 40,3% dibandingkan dengan hasil Pemilu 1971-1997. Di tahun itu perolehan suara Golkar mencapai 55% hingga 71%.

Selama Orde Baru, PDI-P tidak pernah memperoleh satu kursi pun di DPR. Namun, setelah Soeharto lengser, para pendukung Golkar mengalihkan pilihannya ke PDI-P. Kemenangan PDI-P di basis massa Golkar semacam ini membuktikan bahwa penurunan 40,3% suara Golkar tersebut terjadi karena suara-suara itu beralih ke PDI-P.⁷

Sementara itu, PPP yang berada di urutan ketiga dengan perolehan suara 10,4% mengalami penurunan suara sekitar 9,6%. Selama Pemilu Orde Baru, PPP mendapatkan suara minimal 20%, tetapi di era Reformasi mereka mengalami penurunan perolehan suara. Mengapa PPP mengalami penurunan suara? Hal tersebut tidak lain karena kemunculan PAN dan PKB sebagai parpol baru yang mampu merebut suara yang signifikan.⁸ Ada indikasi bahwa suara PPP pada era Reformasi berpindah ke PAN dan PKB. Basis massa PAN ialah kelompok Muhammadiyah dan kaum terpelajar, sedangkan basis massa PKB ialah kelompok Nahdlatul Ulama yang merupakan simpatisan Masyumi. Basis massa kelompok

7 Penurunan suara Golkar pernah juga dialami pada Pemilu 1992 yang disebabkan oleh enam faktor, yakni sikap Golkar yang terlalu *defensif*, dampak modernisasi, elite Golkar arogan, keterbukaan LPU-Depdagri, *political realignment*, dan identifikasi Golkar sama dengan birokrasi. Lihat Riswandha Imawan, "Dinamika Pemilih dalam Pemilu 1992" dalam M. Sudibyo (peny.), *Pemilihan Umum 1992: Suatu Evaluasi* (Jakarta: CSIS, 1995), hlm. 49-69; Bandingkan Kwik Kian Gie, "Dinamika Pemilih dalam Pemilu 1992: Suatu Tanggapan" dalam Sudibyo (peny.), *Pemilihan Umum 1992: Suatu Evaluasi*.

8 Dengan munculnya PAN dan PKB dalam Pemilu 1999, maka massa Islam terpecah dalam memberikan suaranya, dan hal ini berdampak pada penurunan suara PPP. Masyarakat membutuhkan pemimpin baru yang mampu mengakomodasi kepentingan mereka.

agama cukup signifikan di Kaltim.⁹ Hal ini ditunjukkan dengan Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1. Penduduk Kaltim Menurut Agama (%)

No	Agama	Prosentase
1.	Islam	84,02
2.	Katholik	4,53
3.	Kristen Protestan	9,34
4.	Hindu	0,97
5.	Buddha	1,08
6.	Konghuchu	0,01
7.	Lainnya	0,05

Sumber: Bapeda, *Kaltim dalam Angka 2014*

Secara keseluruhan, hasil Pemilu 1999 di Kaltim menunjukkan, PDI-P memperoleh suara 33,8%, Golkar memperoleh suara 29,7%, dan PPP memperoleh suara 10,4%. Hasil Pemilu 1999 tersebut menunjukkan adanya gejolak masyarakat pada tataran bawah yang tidak puas terhadap kepemimpinan Orde Baru (Golkar) dan kemudian hal ini berdampak pada hasil Pemilu. Selengkapnya hasil Pemilu 1999 di Kaltim ditunjukkan dengan Tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2. Persentase Hasil Pemilu 1999 di Kaltim

No.	KABUPATEN/KOTA	PDI-P	GOLKAR	PPP	PAN	PKB
1.	Berau	23,9	30,6	10,3	3,4	5,2
2.	Bulongan	23,7	48,3	7,3	2,7	1,3
3.	Kota Balikpapan	37,3	22,1	10,4	11,0	4,9
4.	Kota Samarinda	33,2	22,5	12,5	9,1	6,0
5.	Kota Tarakan	33,2	38,9	5,9	5,1	4,7

⁹ Umat Islam di Kalimantan Timur mencapai 85,0% dan hal ini menjadi 'rebutan' parpol, khususnya parpol yang mengusung ideologi agama. Namun, dalam realitanya parpol yang mengusung ideologi nasionalislah yang memenangi Pemilu 1999 (PDI-P) di Kaltim. Sementara Pemilu 2004 dan 2009 dimenangkan oleh Golkar.

6.	Kutai	38,6	29,5	7,9	5,0	4,8
7.	Pasir	24,7	35,6	17,1	4,7	5,8

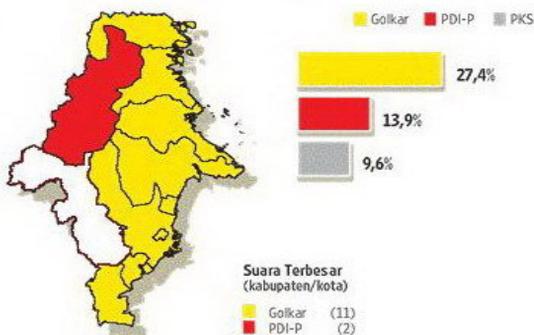
Sumber: KPU, 1999; Litbang Kompas, 2004

Kemenangan PDI-P dalam Pemilu 1999 di Kaltim tersebut mengubah peta politik lokal. PDI-P menjadi mayoritas dalam DPRD Provinsi Kaltim yang berjumlah 45 orang. Adapun rincian komposisi anggota DPRD Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut: PDI-P 14 kursi, Golkar 13 kursi, TNI/Polri 5 kursi, Cahaya Reformasi 5 kursi, PPP-PNU 5 kursi, dan PKB 3 kursi.

2. Hasil Pemilu 2004

Duet Suwarna dan Yurnalis sebagai kepala daerah yang didukung oleh PDI-P, Golkar, dan TNI/Polri justru memperkuat sisi internal Golkar yang sedang goyah. Konsolidasi nasional yang dilakukan oleh Golkar berdampak pada keberhasilan Golkar memenangi Pemilu legislatif (2004) dan Pilkada (2005) di Kaltim. Gambar 2.2. di bawah ini menunjukkan keberhasilan Golkar merebut kembali basis massa yang dikuasai oleh PDI-P dalam Pemilu 1999.

Gambar 2.2. Peta Politik Kaltim 2004



Sumber: KPU, 2004; Litbang Kompas, 2004

Dari Gambar 2.2. tersebut tampak jelas bahwa PDI-P hanya menang di dua kabupaten, yakni Kutai Barat dan Malinau. Adapun di basis massa masyarakat asli Kutai dan kelompok pendatang (Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara) yang merupakan penyumbang suara terbesar (54%), Golkar menang. Golkar dalam Pemilu 2004 ini berhasil menang di 11 kabupaten/kota, sedangkan PKS sebagai partai baru menarik pemilih muda atau kalangan menengah di Samarinda dan Balikpapan.¹⁰ Sementara itu, PPP mengalami penurunan suara, karena basis massa Islam terbagi ke dalam tiga parpol, yakni PKS, PAN, dan PKB. Sedangkan Partai Demokrat sebagai partai baru memperoleh dukungan yang signifikan di Balikpapan dan Samarinda sehingga menggusur posisi PAN dan PKB. Selengkapnya persentase perolehan suara dalam Pemilu 2004 di Kaltim adalah sebagai berikut: Golkar (27,4%), PDI-P (13,9%), PKS (9,6%), PPP (8,56%), dan Demokrat (5,97%).¹¹ Kemenangan Golkar dalam Pemilu 2004 di Kaltim ini menandai 'kebangkitannya'.¹² Golkar tidak runtuh pada saat Soeharto lengser (1998) karena infrastruktur yang dibangun melalui birokrasi sangat solid sampai ke desa-desa. Golkar di Kaltim mampu mengatasi konflik internal maupun eksternal. Bahkan, dia mengalami konsolidasi yang mantap.

3. Peta Pilkada Kutim dan Kaltim

Kebangkitan Golkar di Kaltim ditandai dengan kemenangan pemilihan bupati/walikota di Kutai Kartanegara,

10 *Lihat* www.elshinta.com; www.kompas.com; www.kpu.go.id.

11 www.kpu.go.id/Kalimantan_Timur.

12 Kata 'kebangkitannya' sengaja ditulis dalam tanda petik. Artinya, tampaknya saja Golkar solid, tetapi perkembangan selanjutnya menampakkan bahwa Golkar keropos sehingga mengalami penurunan perolehan kursi (suara) dalam Pemilu 2009.

Samarinda, Bontang, dan Malinau.¹³ Dukungan Golkar terhadap Syaukani (etnis Bugis) dan Samsuri Aspar (etnis Banjar) mengantarkan mereka menjadi pemenang dalam Pilkada Kutai Kartanegara 2005 dengan perolehan 159.303 suara mengalahkan Aji Sofyan dan H. M. Irkham yang diusung oleh PAN dan PKS (88.625 suara). Kemenangan Syaukani-Samsuri tersebut menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Syaukani di Kutai Kartanegara. Meskipun Aji Sofyan ialah kerabat dekat Sultan Kutai dan didukung oleh elite Kutai, pasangan Syaukani-Samsuri tetap menang.¹⁴ Selain itu, perolehan suara Golkar di Kutai Kartanegara tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur yang telah dibangun Orde Baru melalui birokrasi sangat efektif untuk mendulang suara. Sayangnya, kemenangan Syaukani-Samsuri tersebut tidak diimbangi dengan kinerja yang baik sehingga mereka berurusan dengan KPK akibat terlibat kasus korupsi.¹⁵

Kemenangan Golkar dalam Pilkada Kutai Kartanegara tersebut disusul dengan kemenangan Achmad Amins-Syaharie Djaang (Bugis-Dayak) sebagai walikota/wakil di Samarinda dengan perolehan suara 110.550 suara. Kemenangan mereka didukung oleh komunitas Bugis, Dayak, dan Muslim yang mengalahkan Masykur-Kasmiruddin (57.102 suara) yang diusung PKS. Pada Pemilu sebelumnya, Samarinda menjadi basis PDI-P, tetapi calon mereka Awang-Siti ditaklukkan oleh Amins-Djaang. Awang-Siti hanya memperoleh 49.986 suara dan jauh tertinggal dari Amins-Djaang. Awang Ferdian Hidayat adalah anak Bupati Kutai Timur, Awang Faroek Ishak

13 Akbar Tanjung, *loc. cit.*

14 Gelar Aji menunjukkan seseorang masih keluarga Sultan Kutai, sebab gelar ini hanya disandang oleh bangsawan Kutai.

15 Lih. www.detik.com/diakses pada 21 September 2007, *Syaukani Paling Fenomenal*; www.kompas.com/diakses pada 15 Desember 2007, *Korupsi, Syaukani Dihukum 2,5 Tahun*; www.kompas.com/diakses pada 15 Februari 2008, *Syaukani: Ya.. Mau Apa Lagi*.

adalah kerabat Sultan Kutai, dan yang menjadi kontestan di sini adalah Awang Ferdian Hidayat.

Kekuatan Amins-Djaang dalam meraup suara di Pilkada ini tidak terbantahkan. Hal ini terbukti dengan kemampuan mereka mengalahkan popularitas PKS dan Awang Ferdian Hidayat. Dari dua kasus (Kutai Kartanegara dan Samarinda) tersebut dapat ditengarai bahwa peran kelompok pendatang seperti Bugis, Banjar, dan Dayak sangat dominan di basis massa orang Kutai. Ikatan sentimen suku dan agama berpengaruh besar dalam mendulang suara di Pilkada 2005. Selain itu, perubahan komposisi penduduk di Kaltim tampaknya mulai menggeser dominasi orang Kutai dalam pemerintahan. Akibatnya, pengaruh mereka kurang dalam masyarakat, khususnya di Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara.¹⁶

Kota Balikpapan merupakan wilayah Kutai pada zaman Belanda. Namun, dalam perkembangannya Balikpapan menjadi kota modern dengan kelompok pendatang mendominasi (Jawa, Sunda, Bugis, Banjar, Toraja, dan Batak) mencari kerja dan menetap. Hal ini memengaruhi komposisi penduduk di Balikpapan yang menyebabkan kelompok pendatang memenangi Pilkada 2006. Hamid-Effendi yang diusung PDI-P dan gabungan parpol berhasil menang dalam Pilkada 2006 dengan perolehan 122.330 suara mengungguli Pabotingi-Gunawarman (72.326 suara) yang diusung oleh Golkar. Pilkada 2006 di Balikpapan merupakan kompetisi antara kelompok

16 Wawancara dengan Awang Faroek Ishak di Samarinda, 11 Agustus 2009; Wawancara dengan Mohammad Arifin di Universitas Mulawarman, 11 Agustus 2009. Pertambahan jumlah kelompok pendatang dari Jawa, Sunda, Bugis, dan Banjar dalam sepuluh tahun terakhir menyebabkan pergeseran sosial politik. Dalam sistem pemilihan kepala daerah yang proporsional terbuka sangat dimungkinkan sentimen sektarian dan primordialisme menentukan seseorang terpilih sebagai kepala daerah. Oleh karena kelompok pendatang mayoritas di Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara, maka diprediksi mereka yang akan menang dalam Pilkada, bukan etnis Kutai atau Dayak yang merupakan suku asli Kalimantan Timur.

pendatang yang terdiri dari etnis Jawa dan Sunda—dan jumlah mereka dominan—dengan etnis asli Kaltim yang terdiri dari etnis Kutai dan Dayak.

Etnis Kutai hanya menang Pilkada di Kutim (2005). Saat itu, Awang Faroek Ishak-Isran Noor yang diusung oleh gabungan parpol berhasil memperoleh 66.192 suara. AFI-Noor mengalahkan Mahyudin-Sulaiman (31.906 suara) yang diusung oleh Golkar dan gabungan parpol. AFI sebagai ‘putera daerah’ dengan pengalaman politik nasionalnya yang luas mampu mengungguli Mahyudin (Ketua Golkar Kaltim).¹⁷ Sementara itu, di daerah pemekaran Kutai Kartanegara (Kutai Barat), etnis Dayak berhasil mengalahkan etnis Kutai. Pada Pilkada 2006 Ismael Thomas dan Didik Effendi yang diusung oleh PDI-P dan PAN berhasil menang dengan perolehan 27.639 suara mengalahkan Asia-Encik (22.800 suara) yang diusung PDS, Partai Demokrat, Partai Pelopor, dan PPKD.¹⁸ Persaingan antarelite politik berdasarkan etnis dan agama sangat efektif dalam Pilkada untuk diangkat menjadi isu dalam memperoleh suara. Hasil Pilkada 2006 di daerah industri minyak dan gas,

17 Konflik internal dalam tubuh Golkar sarat dengan kepentingan kelompok yang menyebabkan Golkar keropos. Mahyudin (Banjar) memiliki kedekatan dengan Syaokani (Bugis). Sementara itu, Syaokani dengan Faroek berseberangan. Oleh karena Syaokani mendukung Mahyudin, maka dia pun berseberangan dengan Faroek. Persaingan antaretnis pun merebak mewarnai pemekaran wilayah di Kaltim. Etnis Jawa, Bugis, Banjar, Kutai, dan Dayak bersaing dalam Pilkada 2005. Tampaknya, Kutai Timur masih didominasi oleh orang Kutai dan Jawa. Lihat www.kompas.com/ diakses pada 17 Februari 2009, *Dinamika Banjar dan Kutai*; www.pelita.com/ diakses pada 29 Januari 2010, *Multi Etnis Warnai Pertarungan Politik di Dapil Kaltim*.

18 Bakal calon petahana Bupati Kubar 2011–2016, Ismael Thomas, menebar pesona Natal dan Tahun Baru dengan membagi-bagi ‘*ang pao*’ ke semua umat Kristiani di sana. ‘TERUSKAN!!! Perjuangan & Pembangunan Bersama Masyarakat Kutai Barat 2011–2016.’ Begitu *embel-embel* pesan yang tertulis di kartu ucapan Natal 25 Desember 2009 dan Tahun Baru 2010 dari Ismael Thomas, salah satu kontestan bakal calon petahana Bupati Kubar 2011–2016. Kartu ucapan Natal dan Tahun Baru ini dibagikan ke semua umat Kristiani saat ritual perayaan Natal di semua gereja Katolik yang ada, termasuk ketika Natal Bersama di Sendawar, ibu kota Kabupaten Kubar (www.bongkar.co.id/ diakses pada 19 Januari 2010, *Pesona Natal Ismael Thomas*).

sang kontestan yang diusung Golkar berhasil menang, yakni Yusuf Serang Kasim dan Thamrin AD di Kota Tarakan, serta Sofyan Hasdam dan Syahid Daroini di Kota Bontang. Dalam Tabel 2.3. di bawah ini secara detail dipaparkan hasil Pilkada 2005-2006 di Kaltim.

Tabel 2.3. Peta Pilkada Kaltim 2005-2006

No	Kabupaten/ Kota	Kepala Daerah	Perolehan Suara/ Partai	Rivalitas
1.	Kutai Kartanegara 1 Juni 2005	H.Syaukani H R Samsuri Aspar Dilantik 13 Juli 2005	159.303 suara GOLKAR	1. Aji Sofyan Alex dan H. M. Irkham PAN dan PKS (88.625 suara) 2. H M Tajuddin Nor dan Abdul Djafar Bukran PATRIOT, PPP, MERDEKA (13.862 suara)
2.	Bulungan 27 Juni 2005	Budiman Arifin Liet Ingai Dilantik 31 Agustus 2005	17.971 suara PAN, PELOPOR dan PKB	1. Abdul Djalil Fatah dan Obed Bahwan GOLKAR (15.819 suara) 2. Enci M. Yunus dan Parir O. Singal PDS, PNI Marhaenis dan PIB (10.572 suara) 3. Yusuf Abdullah dan Nikodemus PBSD, Merdeka, PPDK, PNBK, Demokrat, PKPI, PPDI, PPNUI, PKPB, PBR, PSI dan PPD (4.938 suara)

No	Kabupaten/ Kota	Kepala Daerah	Perolehan Suara/ Partai	Rivalitas
3.	Pasir 29 Juni 2005	Riduan Suwidi Hatta Garit Dilantik 29 Agustus 2005	34.300 suara PPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yusriansyah Syarkawi dan Mardi Kansyah (29.063 suara)-GOLKAR, PBB, PDK dan PDI-P 2. Ishak Usman dan Aksa Arsyad (16.346 suara)-PKS, PBR, dan PATRIOT 3. Ajumran Kombeng dan Sulaiman E.Merukh (9.701 suara)-PDI-P 4. Sabaruddin Yasin dan Noor Sinah (2.224 suara)-gabungan parpol
4.	Berau 8 Agustus 2005	Makmur dan Achmad Rifai Dilantik 9 September 2005	34.752 suara Gabungan Parpol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muharam dan Warsito (23.357 suara)- gabungan partpol 2. Saukani dan Abdul Kadir (15.513 suara)- gabungan parpol
5.	Samarinda 19 September 2005	Achmad Amins dan Syaharie Djaang Dilantik 23 November 2005	110.550 suara GOLKAR, PPP, PKB, PATRIOT, PELOPOR dan PBSB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masykur Samian dan Kasmiruddin (57.102 suara)-PKS 2. Awang Ferdian Hidayat dan Siti Muriah (49.986 suara)-PDI-P 3. Abdurrahman Al Hasni dan Suryadi Hidjrati (35.197 suara)-Demokrat, PDS, PKPB, PNBK NUI, MERDEKA, PPDI

No	Kabupaten/ Kota	Kepala Daerah	Perolehan Suara/ Partai	Rivalitas
6.	Kutai Timur 12 Desember 2005	Awang Faroek Ishak dan Isran Noor Dilantik 13 Februari 2006	66.192 suara Gabungan Parpol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahyudin dan Ardiansyah Sulaiman (31.906 suara)-gabungan partpol 2. Abdal Nanang dan Mujiono (4.247 suara)-gabungan parpol 3. Irsyadi dan Siti Nur Aeni (1.416 suara)-gabungan partpol
7.	Bontang 30 Januari 2006	Sofyan Hasdam dan Syahid Daroini Dilantik 23 Maret 2006	25.818 suara GOLKAR, PBSD, PDK, MERDEKA, PNUI, PNIM, PELOPOR, PDS dan PSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zulkifli Arman dan Suroyo (22.819 suara)- PAN, PKB, Demokrat dan Patriot 2. Gunawan Wiratomo dan Nukman Fadli (14.130 suara)- PDI-P dan PKS 3. HM Yamin dan Adam Malik (7.359 suara)- Patriot, PBB, PBR, PPIB, PKPB, PPD, PKPI, PNBK dan PPDI

No	Kabupaten/ Kota	Kepala Daerah	Perolehan Suara/ Partai	Rivalitas
8.	Kutai Barat 20 Februari 2006	Ismael Thomas dan Didik Effendi Dilantik 19 April 2006	27.639 suara PDI-P dan PAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rama A. Asia dan Encik Mugnidin (22.800 suara)- PDS, Demokrat, Pelopor dan PPDK 2. Abdul Azis dan Amon Nereng (19.767 suara)- GOLKAR 3. Agustinus Markus dan Hermain D (10.175 suara)-Patriot, PPP, PKPI, PKPB, PNIM, PPDI, PNBK, PBSB, PSI, PKB, dan PSI
9.	Malinau 23 Februari 2006	Marthin Billa dan Dt.Nasir dilantik 3 April 2006	19.869 suara PDI-P, GOLKAR, PDS dan Pelopor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fredrick Bid dan Amir Fauzi (8.089 suara)- PAN, PKPB, PBR, PBSB, MERDEKA, PPIB, Demokrat, dan PKS 2. Syamsuri dan Kilit Laing (195 suara) -PP, PPDI, PKB, dan Patriot
10.	Balikpapan 28 Maret 2006	Imdaad Hamid dan Rizal Effendi Dilantik 28 Mei 2006	122.330 suara PDI-P, PKB, Patriot, PKPB dan Partai Karya Peduli Bangsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mukmin F.Pabotingi dan Gunawarman (72.326 suara)-GOLKAR, PKS, PBR, PKPI, dan PNBK 2. Ismed Alimin dan Totok Sudarto (13.744 suara) -PDS, PBB, PELOPOR, PPDI, PNBK, PPNUI, PNIM, PPIB, PAN, dan PPD 3. Jamal Noor dan Priyono Demo (13.416 suara)- PPP, Demokrat, PDK

No	Kabupaten/ Kota	Kepala Daerah	Perolehan Suara/ Partai	Rivalitas
11.	Nunukan 17 April 2006	Abdul H.Achmad dan Kamir Forets Dilantik Juni 2006	30.097 suara PBB dan PKS	1. Asmah Gani dan Amin Syawal (16.372 suara)- GOLKAR 2. Mashur M.Alias daYepta Berto (11.263 suara)- PDK, PBR, PELOPOR, PSI, Demokrat, PFPI, PDS, dan PKB 3. Yakup MP dan Arifuddin Ali (1.645 suara)-PAN, dan PDI-P

Sumber: KPU Kaltim, 2008 Pengolahan data oleh penulis

Mengacu dari paparan Tabel 2.3. di atas tampak jelas bahwa Golkar sebagai pengusung tunggal kontestan bupati menang di Kutai Kartanegara, Berau, dan Penajam Paser Utara. Golkar berkoalisi dengan parpol lain menang di Tarakan, Bontang, dan Samarinda. Sementara itu, PDI-P sebagai pengusung Bupati yang berkoalisi dengan parpol lain menang di Tarakan, Malinau, Kutai Barat, dan Balikpapan. Sedangkan PPP sebagai pengusung tunggal bupati menang di Pasir. PPP sebagai pengusung bupati yang berkoalisi dengan partai lain menang di Kutai Timur.

B. Rekam Jejak AFI

Dengan memperhatikan konstelasi politik dan peta Pilkada Kaltim, tidak bisa disangkal bahwa peran figur dan parpol sangat berpengaruh pada kemenangan Pilkada. Untuk melacak interaksi politik AFI, mari kita perhatikan jejak rekamnya mulai dari saat dia masih siswa, kemudian mahasiswa, dan ketika menjadi seorang politikus. Latar belakang AFI selama menjadi siswa tidak begitu istimewa

dalam bidang politik. Layaknya siswa yang lain, AFI mengikuti ayahnya berpindah-pindah tempat. AFI kecil bersekolah di SR di Tarakan, kemudian melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di Tenggarong.

1. Aktivistis Ormas

Yang menarik dari AFI ketika dia masih muda adalah keaktifannya dalam berorganisasi. Lambat laun, keaktifannya di organisasi menjadikan dirinya menduduki peran sebagai pemimpin. Dalam berorganisasi, AFI berinteraksi dengan tokoh elite lokal dan nasional. Interaksi ini menjadi sebuah embrio rajutan relasi dalam dunia politik. Ketika AFI menginjak SMA, dia menjadi Ketua Ikatan Pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri Tenggarong (1963-1966).¹⁹ Selain itu, AFI juga terpilih menjadi Ketua Umum DPC Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Kabupaten Kutai (1963-1966).

Saat menjabat sebagai Ketua GSNI, jangkauan organisasi AFI meluas hingga tingkat nasional. Semenjak itu, jaringannya terus berkembang pesat, terlebih ketika dia menjadi mahasiswa di IKIP-Malang (1968-1973) dan bergabung dengan organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).²⁰ Pengalamannya dalam organisasi GMNI inilah yang menempa ideologinya dan jiwa kepemimpinannya sehingga terbuka peluang baginya untuk merajut jaringan patronase nasional.²¹

19 *Curriculum Vitae AFI* dalam www.awangfarokishak.com/ diakses pada 19 Maret 2012.

20 *Ibid.*

21 Saat AFI bergabung dengan GMNI di Malang, Theo Sambuaga, Taufik Kiemas, dan Siswono Yudhohusodo menjadi pengurus GMNI pusat. Hal ini dapat dimaknai bahwa AFI sudah mengenal baik sosok Theo, Kiemas, dan Siswono sejak mahasiswa. Komunikasi mereka terus terjalin hingga AFI menjadi politisi Golkar dan Kepala Daerah Kaltim. Ayah Siswono bernama dokter Siswondo yang tak lain adalah rekan ayah AFI sewaktu ayahnya menjadi petinggi di Kaltim. Hubungan pertemanan antara AFI dengan senior GMNI tersebut merupakan embrio bagi AFI dalam mengembangkan patronase politik baik dalam internal Golkar maupun di luar seperti PDI-P.

Karir politik AFI muda kali pertama dimulai ketika dia bergabung dengan Golkar (1971) di Malang. Tahun 1970 di bawah kepemimpinan Soeharto, Golkar mengalami masa kejayaan. Oleh karena ideologi Golkar yang nasionalis dan pluralis inilah AFI muda tertarik untuk bergabung dengannya. Selain aktif di Golkar, AFI muda juga aktif di organisasi pendidikan sesuai dengan ilmu yang digelutinya.

Tampaknya, keaktifan dalam organisasi sudah menjadi gaya hidup AFI muda. Bahkan, bisa dikatakan bahwa semua organisasi muda dikuasainya. Benih-benih haus kekuasaan sudah tampak dalam diri AFI muda. Jiwa AFI yang suka berorganisasi, memimpin, dan tidak suka dipimpin sudah tampak sejak muda.²² Melalui organisasi GMNI, pengalaman politik dan mentalnya ditempa oleh senior-seniornya. Pengalaman AFI dalam organisasi masyarakat telah memupuk keterampilannya dalam berorganisasi dan memimpin. Sementara itu, motif bergabungnya AFI dengan Golkar adalah untuk meraih kekuasaan atau kedudukan.

2. Relasi Patron-Klien

Setelah lulus sarjana dari IKIP-Malang, AFI memenuhi panggilan Gubernur Kaltim untuk menjadi staf Biro Pembangunan di kantor gubernur (1973-1974). Hal ini menunjukkan bahwa AFI sudah dikader sejak mahasiswa. Selain itu, karena AFI juga merupakan keturunan bangsawan, maka dia mendapat prioritas jabatan dalam pemerintahan. Karir AFI dalam dunia organisasi sejak muda tampaknya terbaca oleh Sjachranie selaku Gubernur Kaltim. Oleh karena itu, Sjachranie menempunya di kantor gubernur. Penempatan AFI dalam posisi sebagai staf Biro Pembangunan jelas tidak

22 *Loc.cit.*, *Curriculum Vitae AFI*.

sesuai dengan latar belakang pendidikannya.²³ Tampaknya, karir AFI tidak bisa lepas dari Sjachranie selaku gubernur sebagai langkah awal kaderisasi 'putra daerah' (bangsawan) dalam pemerintahan.

Setelah dirasa cukup pengenalan AFI selama satu tahun dalam birokrasi, berikutnya Sjachranie memindahkan AFI ke bagian Perencanaan Pembangunan (1974-1976).²⁴ Di bidang inilah kepiawaian AFI terlatih, khususnya dalam rangka memahami kebutuhan dan merencanakan pembangunan Kaltim. Pengalaman AFI ketika aktif di Golkar dan GMNI Malang sangat membantunya, khususnya dalam perencanaan, karena untuk bisa terampil sebagai perencana pembangunan daerah dibutuhkan keahlian manajemen, khususnya memahami kebutuhan masyarakat, membuat proposal ke Bappenas, dan melakukan lobi-lobi nasional. Selain itu, relasi AFI terhadap Sultan dan elite Golkar dimanfaatkan oleh Sjachranie guna percepatan pencairan dana pembangunan Kaltim.

Karena latar belakang AFI adalah Sarjana Pendidikan, maka Sjachranie mulai memfokuskan diri mengadernya pada pembenahan pendidikan di Kaltim. Kemudian, Sjachranie memindahkan AFI ke Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai Pembantu Dekan III, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (1976-1977).²⁵ Tujuan Sjachranie memindahkan AFI ke Unmul adalah untuk membenahi dan mempersiapkan tenaga pendidik yang berkualitas. Tampaknya, karir AFI dalam dunia pendidikan cepat berkembang. Hanya dalam kurun waktu satu tahun, AFI sudah diangkat menjadi Kepala Kemahasiswaan Unmul (1977-1978).

23 *Ibid.*; *Jejak Rekam AFI 2* dalam www.awangfaroekishak.com/ diakses pada 19 Maret 2012

24 *Ibid.*, *Jejak Rekam AFI 2*.

25 *Ibid.*

Karir AFI berkembang pesat dalam birokrasi, karena intervensi Sjachranie selaku gubernur. Hal ini bisa ditengarai dengan kepindahan AFI dari kantor gubernur ke Unmul atas penunjukan Sjachranie.²⁶ AFI dalam usia yang relatif muda (29 tahun) menjadi Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unmul dengan pangkat Eselon I/b (1980-1984).²⁷ Umumnya, untuk menjadi seorang dekan, setidaknya diperlukan jam terbang yang tinggi yang dimulai dengan proses menjadi dosen puluhan tahun, minimal bergelar Magister (S2), menulis buku ilmiah, dan publikasi penelitian. Namun, AFI tidak melalui proses-proses itu. Karirnya terlihat cenderung dipengaruhi oleh unsur intervensi politik Sjachranie. Hal ini tidak mengherankan, sebab AFI memiliki jaringan patronase terhadap Sjachranie.

Melejitnya karir AFI dalam birokrasi dan pendidikan, khususnya di kantor gubernur dan Unmul disebabkan oleh faktor relasi patron-klien dan status kebangsawannya. Kakek dan ayah AFI dikenal oleh Sultan dan Sjachranie, sementara sudah menjadi kebijakan yang tidak tertulis bahwa keturunan kelas menengah (Awang) mendapat prioritas untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan di Kaltim. Ayah AFI bekerja dan loyal terhadap Sultan²⁸ sehingga ia diangkat sebagai petinggi dan camat di Sangasanga.

26 Faktor patronase dalam hal ini adalah kedekatan AFI terhadap Sjachranie dan latar belakang dari keluarga bangsawan mendukung suksesnya karir AFI dalam birokrasi dan pendidikan.

27 Berdasarkan prosedur yang berlaku secara formal, untuk menjabat sebagai dekan dalam Perguruan Tinggi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antara syarat-syarat ini, ada yang tidak mungkin dipenuhi AFI, misalnya harus minimal bergelar Doktor dan berpengalaman mengajar atau mengabdikan dalam dunia pendidikan minimal 10 tahun. Oleh karena patronase antara Sjachranie dengan AFI yang tentunya juga dipengaruhi oleh Sultan Kutai, maka AFI melenggang pesat dalam karirnya.

28 *Wawancara* dengan AFI, tanggal 11 Agustus 2009 di kantor Gubernur, Samarinda.

Setelah menjabat sebagai dekan, karir AFI terus berkembang dan mencapai puncaknya dengan pangkat Lektor di Fakultas Ekonomi Unmul (1984-1987). Tidak ada catatan yang jelas tentang mengapa AFI berpindah jurusan dari Fakultas Pendidikan ke Fakultas Ekonomi. Secara akademis, hal ini sangat tidak lazim, karena pada umumnya tradisi akademisi mengacu jalur linear. Artinya, kalau pada tingkatan sarjana jurusannya pendidikan, maka pada pascasarjana juga pendidikan. Namun, hal ini kemudian bisa dimaklumi, karena faktor intervensi Sjachranie dalam rangka kaderisasi 'putera daerah'. Studi pascasarjana AFI berkonsentrasi pada bidang Studi Ketahanan dan Keamanan di Universitas Indonesia. Sedangkan pada tingkat doktoral, ia mengambil bidang Ekonomi di Universitas Airlangga.²⁹ Tampaknya, tradisi akademis yang sejalur (linear) dengan jabatan akademis tidak berlaku bagi AFI.

C. Melacak Nalar Politisi

Oleh karena jasa dan prestasinya memajukan Kaltim, AFI diberikan gelar *Awang Ngebei Setia Negara* oleh Sultan. Hal inilah yang membawa konsekuensi politik dan loyalitas baginya. Selain itu, AFI mengemban amanah untuk mempertahankan eksistensi dan kekuasaan Sultan di era Orde Baru. Dia memiliki kewajiban memperjuangkan pelaksanaan ritual *erau*³⁰ sebagai simbol eksistensi elite Kutai. Supaya ritual *erau* tersebut dapat berlangsung lancar, AFI memiliki peran untuk melobi elite Orde Baru, khususnya dalam hal

29 *Loc.cit*, Curriculum Vitae AFI.

30 *Erau* berasal dari bahasa lokal/daerah Kutai, dan disebut juga dengan *eroh* yang berarti ramai, hilir mudik, bergembira, berpesta ria. *Erau* dilaksanakan secara adat oleh Kesultanan atau kerabat kerajaan dengan maksud tertentu dan diikuti oleh seluruh masyarakat umum dalam wilayah administratif kesultanan. Diambil dari <http://budaya-indonesia.org/Erau-Pesta-Adat-Budaya-Kutai/> pada tanggal 4 Agustus 2015.

pendanaan. Strategi yang diterapkan oleh elite Kutai melalui AFI ialah dengan memberikan upeti, yakni hak pengelolaan hutan kepada elite Orde Baru. Sebagai imbalannya, Soeharto merestui pendanaan ritual *erau* yang dianggarkan melalui APBD.

Sebelum AFI menjadi klien Sultan untuk mengemban amanah tersebut, dia dikader melalui beberapa tahapan. *Pertama*, pengaderan melalui pendidikan formal dan pemerintahan (birokrasi Kaltim). Nama AFI cepat dikenal oleh masyarakat Kaltim, karena prestasi dan karyanya dalam bidang pemerintahan (birokrasi) dan pendidikan. Wajah AFI setiap hari menghiasi koran-koran lokal di Kaltim³¹ dan ini menjadi modal pencitraan baginya. Selain itu, AFI juga berprestasi dalam karya nyata baik dalam pemerintahan dan memajukan pendidikan, khususnya membenahan Universitas Mulawarman.

Kedua, pengaderan melalui klien ganda. AFI dikenal dekat dengan masyarakat, khususnya para petani.³² Kondisi ini dimanfaatkannya untuk merajut jejaring lokal. Dengan modal pencitraan dan modal sosial yang cukup serta dukungan Sjachranie (gubernur), AFI dikader menjadi klien Golkar di era Orde Baru. Dalam hal ini, AFI berperan sebagai klien ganda, yakni klien Sultan dan Sjachranie. Sebagai klien Sultan, dia harus menjalankan amanah untuk memberikan upeti (konsesi hutan), agar Sultan memperoleh pembiayaan

31 Observasi penulis pada tahun 2009-2012 terhadap Koran Kaltim, Tribun Kaltim, dan Kaltim Post yang merupakan tiga surat kabar berpengaruh di Kaltim. Ada halaman khusus tentang kegiatan Pemda yang memuat gambar AFI dengan menonjol. Namun, para aktivis lingkungan mengecam AFI karena maraknya pemberian izin tambang yang berdampak merusak lingkungan. Lih. *Lampiran I*.

32 Saat AFI sebagai Bupati Kutai Timur, dia membuat kebijakan yang reformis, yakni dengan memberikan tanah seluas 5 ha dan sertifikatnya kepada masing-masing kepala keluarga. Pada waktu bersamaan, AFI menggulirkan program Gerdabangagri (Gerakan Berbasis pada Pembangunan Agrobisnis).

ritual *erau*. Sedangkan sebagai klien Sjachranie, AFI bertugas melayani kepentingan Soeharto dan kroni-kroninya di Kaltim.

Adapun besaran upeti yang diberikan oleh AFI kepada elite Orde Baru dapat diindikasikan melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).³³ PDRB Kaltim mencapai tingkat tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Jumlah PDRB Kaltim mencapai Rp 80 triliun, Rp 964 milyar, dan Rp 21 juta (tanpa minyak dan gas) pada tahun 2006.³⁴ Artinya, sebagian besar PDRB Kaltim tersebut disetor ke Jakarta. Sementara itu, elite Kutai yang mengklaim memiliki tanah adat yang di atasnya terdapat tambang dan mineral yang dieksplorasi tidak mendapatkan royalti. Oleh karena itu, mereka memanfaatkan AFI sebagai klien untuk memerjuangkan kepentingan elite Kutai melalui ritual *erau* yang dibiayai oleh APBD.

Ketiga, pengaderan sebagai klien Soeharto. Implikasi AFI sebagai klien Sultan adalah memosisikan dirinya sebagai klien Soeharto juga, khususnya dalam mengamankan pemberian upeti. Perannya dalam melayani kepentingan Soeharto dan kroni-kroninya berfokus pada pengeksplorasi kekayaan alam Kaltim.³⁵ Untuk membantu para kroni dan keluarga

33 Penulis belum menemukan data resmi tentang jumlah upeti yang diberikan oleh elite Kutai kepada kroni Soeharto.

34 *Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Kaltim tahun Anggaran 2000*. Hasil PDRB (tanpa minyak dan gas) Kaltim pada era Orde Baru sebesar Rp.21,61 triliun (1995) meningkat menjadi Rp. 24,11 triliun (1996) dan meningkat lagi menjadi Rp. 27,30 triliun (1997). Uang setoran PDRB Kaltim tersebut dikawal oleh AFI untuk diberikan kepada Pemerintah Pusat, tetapi yang kembali ke Kaltim tidak kurang dari 2,1% (Rp.1,2 triliun). Oleh karena itu, elite Kutai mengadakan *bargaining* menuntut otonomi adat, dengan ritual *erau* yang dibiayai oleh APBD.

35 Pasca-Reformasi, baru diketahui adanya kroni Soeharto yang dijatuhi hukuman, karena *mark up* dana reboisasi hutan Kaltim oleh Probosutedjo (adik tiri Soeharto). "*Majelis Hakim tingkat kasasi Mahkamah Agung memutuskan untuk menghukum Probosutedjo empat tahun penjara serta denda sebesar Rp.30 juta subsider 3 bulan penjara. Ia juga harus membayar kembali Rp.100,931 miliar sebagai pengganti uang yang dikorupsi tersebut*" dalam id.wikipedia.org/wiki/Probosutedjo/diakses pada 15 Juli 2013; Selain itu, Bob Hassans selaku tangan kanan Soeharto divonis 2 tahun dan denda Rp.14 milyar. "*Bob*

Cendana tersebut, AFI bekerja sama dengan Sjachranie yang merupakan orang kepercayaan Soeharto di Kaltim. Program-program mereka dikemas atas nama “Pembangunan”. Hal ini terindikasi dengan adanya penamaan Bukit Soeharto di area hutan lindung Kutai Kartanegara. Nama Bukit Soeharto sengaja diberikan dalam rangka mengenang jasa Soeharto yang telah membangkitkan ritual *erau* sebagai festival budaya. Fakta tersebut mempertegas pendapat penulis tentang adanya kesepakatan khusus antara Soeharto dan elite Kutai dengan adanya pemberian *privelege* terhadap elite Kutai oleh Soeharto. Sebaliknya, elite Kutai memberikan upeti kepada Soeharto dan kroni-kroninya dengan hak untuk mengeksplorasi hutan.

Keempat, pengaderan sebagai pengemban amanah budaya. AFI selaku ‘putra daerah’ mengemban amanah sesuai sumpah yang diucapkan ketika menerima gelar ***Awang Ngebei Setia Negara***. Tugas utama AFI sebagai seorang klien harus memperjuangkan eksistensi Sultan yang mewujud melalui pelaksanaan ritual *erau*. Hal ini memungkinkan terjadi, karena posisi AFI sebagai anggota DPR (1987-1992) mewakili Golkar Kaltim,³⁶ di samping kemampuannya untuk memengaruhi elite Orde Baru. Kemampuan tersebut didukung oleh kepemilikan aksesnya secara langsung dengan Soeharto dan Golkar. Dengan demikian, dia memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan elite Kutai. Selanjutnya, AFI berkata kepada wartawan “*Provinsi Kaltim dalam waktu dekat bakal semarak dengan digelarnya erau*

Hasan didakwa melakukan korupsi dalam proyek pemotretan dan pemetaan kawasan hutan seluas 30,6 juta ha di seluruh Indonesia dengan menggunakan dana Asoisasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) sebesar 168,11 juta dolar AS dan dana reboisasi Dephut sebesar 75,6 juta dolar AS” dalam “Dua Tahun dan 14 milyar untuk Bob Hassan” <http://gatra.com/diakses> pada 15 Juli 2013.

36 Wawancara dengan Rudy Iskandar, tanggal 13 Agustus 2009 di Samarinda. Menurut Rudy, para pemimpin Kaltim yang berasal dari Jawa lebih banyak memperkaya diri sendiri. Hal ini berbeda dengan AFI yang peduli terhadap pembangunan Kaltim.

*Kaltim. Untuk itu, demi suksesnya terus dipantau sampai mana persiapan yang sudah dilakukan panitia.*³⁷

Perhatian AFI yang sangat besar terhadap ritual *erau* merupakan bukti konkret kesetiaannya terhadap Sultan. Sejak diadakannya kembali ritual *erau* tahun 1971, AFI selaku klien yang berstatus sebagai anggota DPR memiliki tanggung jawab terhadap pendanaan ritual *erau*. Tampaknya, Soeharto memahami kebutuhan elite Kutai dan merestui ritual *erau* yang diadakan setiap dua tahun dengan pendanaan yang diambilkan dari APBD. Dalam hal ini, peran AFI ialah meyakinkan pemerintah bahwa ritual *erau* adalah warisan budaya yang dapat dijual kepada wisatawan asing. Dengan asumsi ritual *erau* sebagai aset budaya bangsa yang sangat berharga, maka hal ini selaras dengan program pemerintah dalam hal pemasukan devisa negara melalui pariwisata.

D. Strategi Elite Demokrat

Sejak adanya perubahan rezim otoriter ke rezim demokrasi, elite politik berlomba-lomba mencitrakan dirinya sebagai seorang demokrat. Hal ini menjadi isu utama Pilkada. Dalam konteks elite memerankan diri sebagai seorang yang demokrat, strategi kemenangan dalam Pilkada identik dengan mematuhi regulasi dan memengaruhi perilaku pemilih, agar dia menang dalam Pilkada. Mematuhi regulasi berarti apa yang dilakukan oleh elite harus konstitusional dan legal.

Sebaliknya, menjalankan strategi berdasar ideologi berarti elite bekerja secara sistematis, rasional, dan ilmiah. Artinya, kepatuhan terhadap regulasi dan teori adalah bagian dari mewujudkan demokrasi. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, maka elite bisa berkompetisi dengan bebas,

³⁷ Manuntung, 26 Juli 1991.

jujur, dan adil. Oleh karena itu, kelompok aktivis mendorong terbentuknya parpol dalam masyarakat sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai demokrasi, sebab keberadaan parpol adalah suatu keniscayaan dalam demokrasi. Pembentukan parpol bertujuan untuk mengagregasi kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, parpol merupakan representasi dan aktualisasi kebutuhan masyarakat. Melalui parpol diharapkan elite memperjuangkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

1. Menaati Regulasi

Melalui parpol diharapkan kontestasi yang sehat dalam meraih kekuasaan pemerintahan dapat terwujud. Dalam regulasi Pilkada disyaratkan seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah harus mendapat dukungan minimal 15% dari anggota DPRD atau dukungan parpol yang memperoleh suara sah dalam Pemilu paling sedikit 15%. Jika dukungan parpol belum memenuhi kuota 15%, maka parpol bisa bergabung dengan parpol lain sampai jumlah minimal tersebut³⁸ terpenuhi.

Maka, untuk menjadi kepala daerah, AFI harus mendaftar melalui parpol. Kemudian, parpol akan mendaftarkan dirinya ke KPUD dan merancang semua program kampanye. Setelah didaftarkan ke KPUD, ia harus memenuhi sejumlah syarat, seperti mengumpulkan berkas yang terdiri dari riwayat hidup dan ijazah minimal SLTA, berusia minimal 30 tahun, sehat jasmani dan mental, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, tidak sedang dicabut hak pilihnya, melaporkan harta

38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.68 Tahun 2009, *Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, ps.4. Ketika penulis mengadakan revisi disertasi ini, DPR sedang merevisi UU No.1 tahun 2014 tentang Pilkada, pasal 38 yang mewajibkan adanya uji publik bagi bakal calon. Waktu pelaksanaan untuk uji publik yang disepakati DPR hanya satu bulan. Sedangkan dalam Perppu No.1 tahun 2014, waktu yang disediakan untuk uji publik tiga bulan.

kekayaannya, tidak memiliki tanggungan hutang, belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dua kali, dan sebagainya.³⁹ Syarat-syarat tersebut dilengkapi dengan dukungan parpol, kemudian diverifikasi oleh KPUD dan hasilnya disampaikan kepada parpol sehingga dapat diputuskan apakah AFI lolos sebagai kontestan atau tidak. Jika ternyata lolos, maka tahap berikutnya dia harus melakukan kampanye baik tertutup maupun terbuka. Kontestan juga diwajibkan untuk membuat laporan dana kampanye, karena semua pemasukan dan pengeluaran selama kampanye akan diaudit oleh akuntan publik.

Selain melalui jalur parpol, untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah ada jalur lain, yakni melalui jalur perseorangan. Jalur perseorangan diatur dengan regulasi berdasarkan banyaknya jumlah penduduk yang dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk. Secara umum, syarat pengajuan sebagai kepala daerah sama dengan jalur parpol. Namun, ada tambahannya, yakni kontestan yang tidak didukung oleh parpol harus mendapatkan dukungan dari masyarakat yang besarnya didasarkan pada banyaknya jumlah penduduk yang ditetapkan melalui regulasi. Persentase dukungan masyarakat terhadap calon perseorangan diatur PKPU⁴⁰ sebagai berikut:

- a. Calon di provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5 % dari jumlah penduduk;
- b. Calon di provinsi dengan jumlah penduduk antara 2.000.000-6.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% dari jumlah penduduk;

³⁹ *Ibid*, ps. 9-10.

⁴⁰ *Ibid*, ps. 8.

- c. Calon di provinsi dengan jumlah penduduk antara 6.000.000-12.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4 % dari jumlah penduduk; dan
- d. Calon di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3 % dari jumlah penduduk.

Dengan memperhatikan minimal syarat dukungan terhadap calon kontestan perseorangan tersebut, maka representasi masyarakat terwakili. Apabila kontestan dari parpol disyaratkan mendapat dukungan minimal 15% suara dari anggota DPRD,⁴¹ maka untuk calon perseorangan jumlah dukungan berkisar antara 3%-6,5% dari jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula dukungan yang diperlukan oleh kontestan tersebut.

2. Memengaruhi Perilaku Pemilih

Dalam konteks Pemilu/Pilkada dengan sistem *one man, one vote, one value*, AFI harus memahami latar belakang pemilih dan melakukan pendekatan terhadap mereka. AFI harus memahami dan mengenal benar siapa konstituennya dan memperhitungkan secara matang perolehan suara dari masing-masing desa. Tanpa perencanaan dan kalkulasi detail tentang perolehan jumlah pemilih, dia akan cenderung kalah bersaing dengan elite lain.

Menurut para pakar, ada tiga teori yang menjadi strategi elite politik dalam memengaruhi perilaku pemilih di Pemilu/ Pilkada. Ketiga teori tersebut adalah sosiologis atau sosial struktural, psikologi sosial, dan pilihan rasional (*rational choice*). *Pertama*, pendekatan perilaku pemilih secara sosial

41 Menurut Perppu No.1 tahun 2014, pasal 40 dukungan parpol pengusung terhadap kontestan naik menjadi 20% dari jumlah kursi atau 25% dari akumulasi perolehan sah dalam Pemilu legislatif.

kultural. Menurut Lazarsfeld, Berelson, dan Gaudet (1944), perilaku pemilih memiliki kaitan erat dengan empat faktor yang saling memengaruhi, yakni status sosial ekonomi (pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan kelas), agama, etnis, dan wilayah tempat tinggal (kota, pesisir, desa dan pedalaman).⁴² Penelitian Lazarsfeld, Berelson, dan Gaudet memfokuskan pada perilaku pemilih dalam pemilihan Presiden Amerika (1940). Sampel yang diambil berjumlah 600 orang dan data dikumpulkan melalui wawancara.

Hasil dari penelitian Lazarsfeld dan kawan-kawannya tersebut menunjukkan bahwa ada perilaku pemilih yang dominan dipengaruhi oleh faktor etnis dan agama.⁴³ Faktor etnis ini diwujudkan dengan status sosial kontestan (elite politik) dalam kaitannya dengan latar belakang etnis pemilih. Orang kulit putih akan cenderung memilih kontestan dari kulit putih. Sebaliknya, orang kulit hitam atau pendatang akan cenderung memilih kontestan (kulit hitam) atau kontestan yang mengangkat isu tentang hak-hak kelompok minoritas. Dari sisi pendekatan agama, pemilih yang beragama Kristen Protestan cenderung memilih kontestan dari Partai Republik. Sementara itu, pemilih yang beragama Katolik cenderung memilih kontestan dari Partai Demokrat. Pendekatan perilaku pemilih dengan perspektif sosiologis ini dipelopori oleh pakar politik dari University of Columbia, sehingga perspektif ini disebut dengan *Columbia Model*.

Kedua, pendekatan perilaku pemilih dengan pendekatan psikologi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menyanggah teori *Columbia Model* yang dipelopori oleh Lazarsfeld,

42 Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet, *The People Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign*. (New York: Columbia University Press, 1948).

43 *Ibid.*, *The People Choice*.

Berelson, dan Gaudet di atas. Penelitian ini diprakarsai oleh Angus Campbell dan Robert Kahn (1948) dengan metode pengumpulan data melalui wawancara responden pemilihan presiden.⁴⁴ Hasil temuan Campbell dan Kahn menunjukkan bahwa perilaku pemilih tidak dipengaruhi secara langsung oleh faktor sosial, tetapi lebih banyak oleh faktor psikologis. Yang dimaksud faktor psikologis ialah kedekatan kontestan dengan pemilih, kharisma kontestan, karakter kontestan di hadapan pemilih dan kepedulian kontestan terhadap para pemilih. Dengan kata lain, Campbell dan Kahn menyanggah temuan kelompok Columbia dengan cara membuktikan bahwa faktor psikologis pemilih lebih dominan berperan memengaruhi pemilih dibanding faktor sosial budaya. Campbell dan Kahn merupakan pakar Michigan University sehingga hasil temuan mereka disebut *Michigan Model*.

Ketiga, pendekatan perilaku pemilih secara rasional. Pendekatan perilaku pemilih dengan perspektif *rational choice* ini dipelopori oleh Anthony Downs.⁴⁵ Argumen yang diajukan Downs ialah, perilaku pemilih ditentukan pada saat dia memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS). Pemilih secara rasional memberikan penilaian terhadap kontestan secara proporsional dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan sosial atau faktor psikologis. Pemilih yang rasional ini biasanya memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan mereka tinggal di perkotaan. Pada umumnya, mereka memiliki tingkat pemahaman politik yang matang. Mereka akan memilih kontestan yang telah terbukti berkarya secara nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan memberantas korupsi, serta berintegritas. Sebaliknya, apabila kontestan

44 Angus Campbell, Philip E. Converse, Warren E. Miller and Donal E. Stokes, *The American Voter*. (New York: John Wiley, 1960).

45 Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy*. (New York: Harper and Row, 1957).

tidak berkarya nyata dalam masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka dia cenderung tidak akan didukung. Dalam hal ini, pertimbangan pemilih ialah *cost and benefits* (untung dan rugi) yang mungkin akan mereka peroleh dalam menentukan pilihan kepada kontestan. Kalau menurut mereka kontestan yang berkompetisi tidak mampu membawa perubahan dalam bidang ekonomi dan politik, mereka cenderung golput (golongan putih, yakni tidak akan memilih siapa pun).

Ketiga teori tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dipakai AFI untuk memengaruhi perilaku pemilih di Kaltim. Upaya untuk menggabungkan perilaku pemilih dengan perspektif ekonomi, sosial, dan psikologi dapat menjelaskan tentang fenomena perilaku pemilih dalam Pemilu/Pilkada. Artinya, AFI bisa memenangkan kontestasi dalam Pilkada tanpa harus melakukan tindakan *money politics*. Berdasarkan tiga teori tersebut, AFI cukup membutuhkan tiga modal untuk menang dalam Pilkada, yakni modal sosial, modal kedekatan, dan modal pencitraan. Modal sosial diwujudkan melalui kesetaraan AFI dengan pemilih dari segi status sosial, agama, etnis, dan kedaerahan. Jika AFI dapat menempatkan diri setara dengan pemilihnya dalam tiga hal tersebut, maka dia secara teoretis akan mudah memengaruhi pemilih.

Untuk menyiapkan modal kedua, diperlukan terobosan baru karena masyarakat Kaltim terdiri dari berbagai suku dan latar belakang yang berbeda dengan AFI. '*Blusukan*' ke kampung-kampung atau desa kiranya menjadi terobosan yang bisa dipakai guna mendekatkan diri kepada para pemilih. Mayoritas pemilih cenderung memilih kontestan yang dekat dengan mereka, mereka kenal, dan terbukti nyata menyejahterakan masyarakat. Dalam sistem Pemilu/Pilkada yang menganut nilai *one man, one vote, one value*-strategi

blusukan ke pasar-pasar dan desa sangat efektif meningkatkan elektabilitas.

Sebaliknya, untuk memengaruhi masyarakat perkotaan yang cenderung apolitis dan kurang peduli terhadap politik, AFI menerapkan strategi berupa pencitraan diri sebagai *problem solver*. Artinya, AFI membuktikan dirinya layak dipilih sebagai kepala daerah, karena telah terbukti mampu mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan memberikan kepastian tercukupinya kesejahteraan masyarakat. Strategi tersebut dilakukan karena pertimbangan utama masyarakat (para pemilih) kota adalah untung dan rugi, atau ada perubahan atau tidak. Jadi, apabila AFI mampu membuktikan diri membawa perubahan dalam menyejahterakan masyarakat, maka secara teoretis dia akan cenderung dipilih, walau dia tidak dikenal secara pribadi oleh masyarakat.

3. Dilema *Money Politics*

Dalam memerankan diri sebagai seorang yang demokrat, AFI tidak akan pernah terlepas dari perkara *money politics*, sebab semua lawan politiknya akan menggunakan strategi membagi-bagi materi dan non-materi dalam rangka memengaruhi perilaku para pemilih. Pertanyaan mendasar di sini adalah apakah pemberian materi dan non-materi yang telah dilakukan oleh AFI sebelum Pilkada berlangsung termasuk *money politics*? Pertanyaan ini layak diajukan dengan mengingat bahwa pemahaman kaum aktivis mengenai tindakan elite yang memberikan materi dan non-materi terhadap pemilih merupakan bentuk pelanggaran hukum. Bagi mereka, pemberian materi dan non-materi tersebut identik sebagai *money politics* dan menghambat proses demokratisasi.

Berkaitan dengan *money politics*, secara patologis tersirat cara pandang legalistik. Tokoh dan organisasi yang paling

menonjol dalam studi yang menggunakan perspektif ini adalah Alkostar,⁴⁶ Saldi Isra, Mulyana W. Kusumah, Kacung Maridjan, PUKAT-UGM, ICW, dan KPK. Dalam sistem hukum formal yang berlaku di Indonesia, memang sudah dirumuskan ciri-ciri dari tindakan yang melawan hukum, dan rumusan ini menjadi dasar penghakiman terhadap praktik *money politics*. Salah satu ketentuan hukum yang menjadi rujukan tindakan itu tertera pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 117 ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang..... atau memilih Pasangan calon tertentu.....diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).”

Atas dasar adanya ketentuan dalam UU No.32 tahun 2004 tersebut, khususnya dengan spesifikasi istilah yang dipergunakan ‘memberi uang’ atau ‘menjanjikan uang’, maka setiap transaksi yang masuk dalam kategori itu disebut *money politics*. Dengan demikian, pelaku harus dikenai hukum pidana. Namun, perlu juga dicermati bahwa pendekatan legalitas kasus pidana terhadap elite politik tidak memberikan efek jera, karena sanksi atau denda yang diberikan sangat ringan. Dalam

46 Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008). Selain itu, KPK dan ICW juga sering mengutamakan pendekatan legalis dalam mengkaji gratifikasi. Menurut UU No. 20 Tahun 2001, pasal 12 B tindakan gratifikasi tersebut dianggap pelanggaran hukum. Lihat KPK, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006), hlm. 94-98. *Bandingkan* John Girling, *Corruption, Capitalism and Democracy* (London and New York: Routledge, 1997), hlm. 1-41. Baca juga Michael Johnston, *Syndromes of Corruption* (Cambridge-UK: Cambridge University Press, 2005), hlm. 89-119. Bnd. S.H. Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 120-176. Baca Susan Rose-Ackerman, *Korupsi Pemerintahan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 127-154.

pendekatan legalistik tindakan *money politics* yang dilakukan oleh elite juga diperhadapkan sebagai pelanggaran PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 64 ayat 1 dan 2 menuliskan, sebagai berikut:

“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Pasangan calon/tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat 1, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum akan dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.”

Dengan kata lain, tindakan memberikan uang (*money politics*) tersebut diperlakukan sebagai pelanggaran Undang-Undang yang berlaku dan dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan oleh DPRD. Namun, tidak bisa disangkal bahwa anggota DPRD sendiri juga ikut menerima pemberian uang dari kontestan, sehingga mereka cenderung menutupi praktik *money politics*.

Sebagaimana dituliskan oleh Sahdan dan Haboddin, mahalnya biaya Pilkada disebabkan oleh pembelian dukungan parpol atau anggota DPRD.⁴⁷ Rinakit memaparkan biaya untuk menjadi gubernur dalam Pilkada minimal Rp. 100 miliar dan bisa bervariasi tergantung daerahnya. Sedangkan biaya untuk mencalonkan menjadi bupati berkisar antara Rp 1,8–Rp 16 miliar.⁴⁸ Biaya kandidasi ini bervariasi tergantung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi PAD, maka biaya kandidasi semakin mahal. Di sini ada hal yang tidak mudah dimengerti.

47 Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin (ed.), *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*, (Yogyakarta: IPD, 2009), hlm. 120-149.

48 Kacung Marijan, *Demokrasi di Daerah Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung* (Surabaya: Eureka, 2006), hlm. 94.

Elite sadar bahwa memberi uang kepada pengurus partai adalah tindakan melanggar hukum, tetapi pada saat yang sama dia membayar/membeli dengan sangat mahal. Artinya, ada sesuatu yang sifatnya berada di luar jangkauan moralitas elite itu sendiri.

Dengan cara pandang itu, para tokoh dalam mazhab ini merasa telah membeberkan gejala *money politics* menjadi rahasia umum. Hanya saja mereka tidak dapat memberikan penjelasan mengapa solusi berupa tindakan tegas oleh penegak hukum tidak pernah dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, Rifai menganalisis maraknya *money politics* dalam Pilkada berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.⁴⁹ Ini pertanda bahwa cara pandang legalis tidak mampu menjelaskan tetapi hanya menilai gejala tersebut, sedangkan hukum yang menjadi dasar untuk menilai ternyata juga dianggap sebagai hukum yang tidak efektif. Maka, sangat mungkin bahwa dalam masyarakat ada sesuatu yang mengikat sebagaimana hukum dan perkara ini tidak pernah ditelaah. Ikatan itu adalah budaya.

Singkatnya, dalam konsepsi para pakar, pemberian yang dilakukan oleh AFI kepada masyarakat ditafsirkan identik dengan *money politics*. Padahal, pemberian dalam bentuk tanah, barang, dan jasa biasa diberikan oleh kaum bangsawan dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Pemberian AFI kepada masyarakat tidak harus dihakimi sebagai praktik pelanggaran hukum yang populer dengan sebutan *money politics*. Dalam banyak kasus, elite tidak dapat mengelak untuk mengikatkan diri dalam relasi patronase yang mewujud dengan pemberian uang, barang, dan jasa tersebut. Memang batas antara keperluan untuk menjaga harmoni sosial melalui

49 Amzulian Rifai, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 91-109.

pelaksanaan peran patronase dengan eksplorasi kultur lokal ditentukan manakala elite yang bersangkutan memang berambisi dan dengan sadar mengeksplorasi peran patronase itu untuk kemenangan dirinya sebagai pejabat publik.

Secara global kita bisa melihat adanya persaingan sengit antarelite lokal dalam berebut kekuasaan pemerintah. Di satu sisi, elite berada di aras normatif/idealis dengan memerankan diri sebagai seorang yang demokrat, agar mendapat simpati masyarakat dalam Pilkada. Namun, di sisi lain, dia dituntut harus memenangkan persaingan dengan cara apapun. Artinya, elite dalam hal ini memasuki aras pragmatis yang menuntut strategi kontekstual.

Akhirnya, terjawablah sudah pertanyaan-pertanyaan menarik yang tertulis di awal bab ini. Dari pemaparan jejak rekam dan interaksi politik AFI, tampak bahwa ada dua aras yang secara bergantian dimanfaatkan oleh elite, yakni aras patronase dan aras aktivis. Dalam aras patronase, relasi patron-klien ini mewarnai jejak rekam AFI sejak dia merintis karir sebagai PNS di kantor gubernur sampai keterlibatannya dalam memajukan Universitas Mulawarman. Dalam hal ini, peran sang patron (elite Kutai dan Gubernur) sangat dominan memengaruhi karir AFI. Puncak dari relasi patron-klien ini mentransformasi AFI menjadi anggota DPR selama dua periode.

Sedangkan dalam aras aktivis, AFI muda aktif berorganisasi dan menjadi seorang idealis. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika Soeharto lengser oleh desakan masyarakat Indonesia yang dipelopori mahasiswa, dia juga memerankan diri sebagai seorang pro-demokrasi. Gerakan mahasiswa tersebut menyebabkan Soeharto lengser pada tahun 1998. Lengsernya Soeharto juga diikuti dengan kembalinya AFI ke Kaltim. Upaya konkret yang dilakukan oleh AFI untuk

mendapat kekuasaan ialah mentaati regulasi. Namun, AFI dihadapkan dengan dilema *money politics* yang harus disikapinya dengan arif. Jadi, dalam diri AFI terkristal adanya dua nalar, yakni politisi dan aktivis.

BAB III

NALAR POLITIK SANG BANGSAWAN: MENELISIK DUA PILKADA KUTIM (1999-2005)

Pada Bab II, telah dipaparkan jejak rekam AFI dan interaksi politiknya semenjak Orde Baru hingga Reformasi. Dalam interaksi politik AFI dihadapkan pada dua perspektif yang menjadikannya harus memerankan diri sebagai seorang politisi sekaligus sebagai seorang demokrat.

Selanjutnya, pada Bab III ini dipaparkan cara kerja nalar politisi secara kontekstual,¹ yakni seputar latar sosio-kultural yang melingkupi AFI. Dengan pemahaman tentang nalar tersebut, kiranya dapat dimengerti mengapa elite niscaya memanfaatkan pemberian-penerimaan dan relasi patronase baik lokal maupun nasional sebagai strategi politik dalam rangka merengkuh kekuasaan.

Untuk memahami interaksi politik AFI yang berkaitan dengan perannya sebagai klien elite Kutai, ada baiknya kita

¹ Dalam Bab III ini, elite politik yang dimaksud oleh penulis adalah AFI, sosok yang menjadi fokus pembicaraan dalam buku ini. Sedangkan yang dimaksud dengan elite Kutai oleh penulis adalah Sultan Kutai atau keturunan langsung dari Sultan. Sumber informasi, lih. *Lampiran I*.

pahami stratifikasi sosial masyarakat Kutai terlebih dahulu.² Dengan demikian, kita dapat menganalisis interaksi AFI secara obyektif dan mendalam. Menurut Badaranie Abbas, stratifikasi sosial masyarakat Kutai terdiri dari tiga strata,³ yakni strata atas, tengah, dan bawah. Yang termasuk dalam strata atas ini ialah para bangsawan yang ditandai dengan pemakaian gelar Aji, misalnya Aji Mohammad Parikesit. Golongan ini terkait langsung dengan keturunan Sultan Kutai. Sementara itu, strata tengah terdiri dari golongan yang dekat dengan strata pertama. Strata ini ditandai dengan gelar Awang atau Encik, misalnya Awang Farouk Ishak. Selanjutnya, yang termasuk strata bawah ialah rakyat biasa yang tidak terkait dengan strata atas (lapis pertama) maupun strata tengah (lapis kedua).

A. Pemberian Gelar Kebangsawanan

Pemberian gelar Awang merupakan penghargaan dan peristiwa luar biasa bagi rakyat jelata. Pemberian gelar tersebut bermakna kenaikan strata sosial dari rakyat jelata ke lapis kedua (Awang). Biasanya, tokoh masyarakat yang menunjukkan loyalitas tinggi terhadap Sultan dan terbukti dalam karya nyata setia terhadap Sultan berpotensi diberi gelar Awang. Menurut Abbas, implikasi dari adanya perbedaan strata sosial tersebut tampak dalam pemilihan pegawai. Perekrutan pegawai yang dilakukan Sultan tidak berdasarkan keahlian atau keterampilan, tetapi berdasarkan patronase atau nepotisme.⁴ Hanya mereka yang berasal dari keluarga strata

2 Istilah Kutai mengacu pada wilayah kekuasaan Kesultanan Kutai sebelum bergabung ke Republik Indonesia. Setelah bergabung dengan RI, wilayah ini disebut dengan Kaltim. Dalam buku ini, istilah Kutai identik dengan Kaltim.

3 Badaranie Abbas, "Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Aspek-aspek Tradisional dalam Birokrasi Kesultanan Kutai di Tenggarong" dalam Anwar Soetoen, *Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai* (Tenggarong: Pemda Kutai, 1975), hlm. 137-138

4 *Ibid.*, *Pengaruh Faktor Lingkungan*, hlm.155-161. Mereka yang diberikan gelar Awang dan diberi posisi strategis tersebut disumpah untuk setia terhadap Sultan Kutai. Sumpah

atas dan menengah serta telah terbukti setia yang layak diangkat sebagai pegawai kesultanan. Pengangkatan tersebut melalui beberapa tahap dan seleksi. Apabila mereka lolos di tahap pertama, mereka diwajibkan magang dua hingga tiga tahun untuk diangkat sebagai pegawai tetap. Sebagai contoh, kakek AFI dipercaya menjadi juru tulis keraton. Itulah mengapa kakek AFI benar-benar memahami seluk beluk kebijakan keraton dan keinginan Sultan.⁵ Lantaran kedekatan kakek dan nenek AFI terhadap Sultan, ayahnya mendapat kepercayaan sebagai petinggi dengan tugas utama mengumpulkan pajak dan menjaga keamanan masyarakat.⁶

Dalam sistem monarki konstitusional, Sultan memiliki hak penuh dan boleh berinisiatif memberikan gelar bangsawan kepada mereka yang setia (berjasa) dan terbukti dapat dipercaya. Selain itu, Sultan juga memberi fasilitas, kedudukan, dan pendidikan (beasiswa) kepada para Awang. Dengan kata lain, relasi patronase antara keluarga AFI dengan Sultan tersebut berimplikasi pada bidang pendidikan yang menyebabkan keluarga AFI mendapatkan beasiswa sekolah pamong praja di Makassar.⁷ Dalam wawancara, AFI menjelaskan bahwa seluruh keluarganya diberi beasiswa oleh Sultan untuk sekolah pamong praja di Makassar. *“Ayah saya disekolahkan oleh Sultan untuk menjadi pamong di Makassar. Tidak semua orang bisa Sekolah Pamong, karena syarat untuk masuk sekolah harus dari*

setia ini menjadi bukti adanya relasi patron-klien. Sang patron memberikan jabatan/gelar, sedangkan si klien sebagai pelaksana tugas yang harus setia kepada Sultan.

5 Wawancara dengan AFI, tanggal 11 Agustus 2009 di Samarinda.

6 *Ibid.*

7 *Ibid.*, Sultan Kutai mengader pamong praja dengan cara menyekolahkan mereka di Makassar. Setelah tamat, mereka menjadi pejabat di Kaltim yang wajib setia kepada Sultan Kutai. Hal ini terlihat jelas sebagaimana dalam keluarga AFI yang sangat setia terhadap Kesultanan Kutai. Sekalipun Kesultanan Kutai sudah bubar tahun 1960, semangat untuk membangkitkan kejayaan Kutai ada dalam diri AFI.

kalangan keluarga raja atau bangsawan.”⁸ Dari pernyataan ini, tampak bahwa ayah AFI bisa bersekolah pamong praja karena mendapatkan beasiswa dari Sultan. Artinya, tanpa bantuan Sultan, keluarga AFI tidak akan menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Tampaknya, relasi patronase antara kakek AFI dengan Sultan tersebut mewaris ke dalam dirinya sehingga dia mengemban amanah untuk memperjuangkan otonomi khusus bagi Sultan.

Memang, dilihat dari perspektif pemerintahan kesultanan, posisi ayah AFI sebagai petinggi berada dalam posisi rendah, tetapi perannya sangat penting dalam masyarakat. Para petinggi tersebut merupakan tokoh masyarakat yang merupakan tangan kanan atau ‘penyambung lidah’ Sultan. Mereka memiliki tugas utama menerapkan kebijakan dan keputusan Sultan agar mudah dipahami dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Selain itu, mereka juga bertugas untuk memungut pajak dari masyarakat atau memberikan rasa aman bagi mereka. Mereka merupakan orang yang setia, karena telah disumpah setia sampai mati terhadap Sultan. Apa yang mereka kerjakan berdampak pada ketaatan masyarakat terhadap Sultan, khususnya dalam hal membayar pajak (upeti). Oleh karena jasa mereka, Sultan memberikan penghargaan kepada mereka berupa gelar Awang.⁹ Dengan demikian, keluarga AFI

8 *Loc.cit*, *Wawancara AFI*. Sekolah pamong praja di Makassar hanya untuk kelompok lapis atas dan menengah, sedangkan lapis bawah terkesan tidak diperhitungkan. Kebijakan Sultan Kutai dalam hal perekrutan kader pamong praja didasarkan pada nepotisme atau patronase. Sultan Kutai merekomendasikan keluarga bangsawan yang setia terhadapnya. Oleh karena kebijakan Sultan cenderung menafikan masyarakat, maka pada saat keruntuhan kesultanan Kutai (1960), masyarakat cenderung mendukung untuk bergabung ke Republik Indonesia. Saat ini, Kesultanan Kutai hanya dipahami sebagai simbol tanpa pengaruh dalam masyarakat.

9 Nenny Wirakusumah, *From Kutai to Dayak* (Samarinda: Pemda Kabupaten Kutai, 1977), hlm. 9-32. Masyarakat Kutai Kartanegara mengenal adanya tiga lapisan masyarakat (kasta). *Pertama*, Sultan dan keluarganya yang terdiri dari Aji Pangeran (anak laki-laki Sultan), Aji Puteri (anak perempuan Sultan), Aji Raden, Aji Bambang, dan Aji. Gelar

termasuk dalam kategori Awang (strata kedua) yang dipercaya dan memiliki relasi patron-klien terhadap Sultan.

Budaya pemberian yang terjadi di Kutai tersebut selaras dengan pandangan Scott. Menurut Scott munculnya budaya pemberian dilatarbelakangi oleh adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat.¹⁰ Scott mendefinisikan patronase sebagai hubungan dua orang yang berbeda status dengan kedudukan patron (orang kaya) memengaruhi klien dengan cara memberikan uang, barang, dan proteksi.¹¹ Scott berpendapat bahwa patronase terjadi apabila orang yang tinggi status ekonominya memberi perlindungan atau keuntungan kepada orang yang lebih rendah statusnya (klien). Dalam konteks apa yang dibahas dalam buku ini, Sultan berperan sebagai patron, sedangkan AFI sebagai klien. Unsur-unsur patronase tampak di sini. Pertama, Sultan selaku patron memberikan kepada AFI gelar bangsawan, beasiswa, dan posisi dalam pemerintahan.¹² Tujuan pemberian tersebut dilakukan dalam rangka kaderisasi politik.

Unsur kedua, AFI selaku klien menganggap pemberian Sultan tersebut sangat berharga baginya sehingga pemberian tersebut diterima sebagai kehormatan dan kepedulian kepada Sultan. Dengan adanya pemberian tersebut, AFI berkewajiban untuk membalasnya di kemudian hari. Fenomena relasi patron-klien ini disebut dengan investasi politik. Dalam hal ini, Sultan memberikan gelar bangsawan, beasiswa, dan posisi

Aji diberikan kepada kerabat Sultan, sedangkan gelar Raden dan Bambang diberikan dengan upacara. *Kedua*, aristokrat yang terdiri dari Awang (gelar diberikan oleh Sultan kepada tokoh masyarakat laki-laki) dan Dayang (gelar untuk perempuan), Aji keturunan Arab: Aji Sayid (laki-laki) dan Aji Saripah (perempuan). *Ketiga*, rakyat biasa.

10 *Loc.cit*, *The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia*

11 James Scott, "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia" in *The American Political Science Review*, Vol. 66, No. 1 (Mar, 1972), hlm. 91.

12 *Ibid.*, hlm. 92-97.

dalam birokrasi dengan motif memanfaatkan AFI sebagai kliennya.

Pemberian gelar bangsawan sepenuhnya merupakan hak raja. Sedangkan masyarakat biasa dalam posisi pasif tidak berhak menuntut. Kemungkinan, pemberian gelar Awang hanya diberikan kepada masyarakat lapis kedua, yakni keluarga bangsawan yang terbukti setia terhadap Sultan. Hal ini terindikasi dengan gelar bangsawan AFI yang diwariskan dari ayahnya—yakni Awang Ishak— yang merupakan mantan wakil Kepala Kepolisian di Tenggara dan camat di Sangasanga.¹³ Posisi Awang Ishak menjadi wakil Kepala Kepolisian merupakan pemberian jabatan yang istimewa, karena hal tersebut memiliki arti bahwa dia adalah orang kepercayaan Sultan dalam hal penegakan hukum dan keamanan. Gelar bangsawan yang diterima oleh AFI tidak pernah bisa dilepaskan dari kesetiaan dan karya ayahnya terhadap Sultan. Hal ini terindikasi dari karir Awang Ishak selama menjabat sebagai petinggi Kutai.

Selain itu, Awang Ishak pernah menjabat sebagai Camat Sangasanga—sebuah daerah penghasil minyak terbesar kedua setelah Balikpapan. Posisi Awang Ishak sebagai camat di daerah minyak merupakan bukti kepercayaan Sultan kepada Awang Ishak. Sultan tidak akan memberikan jabatan tersebut kepada sembarang orang, karena penempatan Awang Ishak memiliki tujuan tertentu. Sultan menginginkan Awang Ishak menjaga keamanan Sangasanga karena daerah ini memberikan makna ekonomi baginya. Dengan adanya minyak yang dieksplorasi setiap hari oleh Belanda, royalti yang diterima Sultan akan lancar diberikan setiap bulan. Di daerah penghasil

¹³ *Rekam Jejak AFI* dalam www.awangfaroekishak.com/ diakses pada 19 Maret 2012.

minyak seperti Balikpapan, Semboja, dan Sangasanga, perlu ditempatkan orang yang dapat dipercaya oleh Sultan.

Kepercayaan Sultan terhadap Awang Ishak tidak lepas dari peran kakeknya yang telah dipercaya sebagai juru tulis Sultan.¹⁴ Tugas utama kakeknya ialah mencatat, mendokumentasikan, dan menyampaikan informasi kepada para petinggi istana. Posisi tersebut sangat penting, karena dia harus bisa menerjemahkan keinginan dan kehendak Sultan tanpa mengurangi atau menambahi. Sang juru tulis tidak boleh menafsirkan menurut pengertian dirinya, tetapi dia harus mencatat dan menyampaikan sama persis seperti yang dikehendaki oleh Sultan.

Posisi kakeknya menjadi juru tulis berimbas pada keluarga AFI sehingga mereka pun berpotensi menjadi orang kepercayaan Sultan. Kesetiaan kakek dan ayahnya mewaris ke dalam diri AFI. Oleh karena itu, dia diberi gelar *Awang Ngebei Setia Negara* yang bermakna kesetiaan sampai mati terhadap Sultan.¹⁵ Gelar *Awang Ngebei Setia Negara* tersebut paralel dengan 'sumpah' atau komitmen yang melekat dalam diri AFI. Gelar Awang diberikan kepadanya karena dia dianggap setia dan patuh terhadap kebijakan kesultanan. Pada mulanya, keluarga AFI dari kalangan rakyat jelata, tetapi karena kesetiaan mereka terhadap Sultan, mereka menerima gelar Awang.¹⁶ Relasi patron-klien yang turun temurun tersirat dalam pemberian gelar *Awang Ngebei Setia Negara*; selaku klien, keluarga AFI harus taat dan memerjuangkan kepentingan Sultan.

14 Wawancara dengan AFI, tanggal 11 Agustus 2009 di Samarinda.

15 H. Achmad Bahrah, *Kamus Bahasa Kutai Umum-Indonesia* (Tenggarong: Lembaga Pembinaan Kebudayaan Kutai, 2000), hlm. 14. Gelar Awang ditujukan kepada masyarakat Kutai yang berasal dari tanah Melayu. Hal ini bisa dimaknai bahwa keluarga AFI bukan dari keluarga Kesultanan Kutai secara langsung (darah ningrat), tetapi dari rakyat jelata yang menerima gelar Awang karena kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Kesultanan.

16 *Ibid.*

B. Elite dan Momentum Pemekaran Wilayah

Ketika elite tidak lagi memiliki jabatan strategis di pemerintahan dan kembali ke daerah, dia memanfaatkan momentum otonomi daerah. Dengan adanya perubahan rezim Orde Baru ke Orde Reformasi, peluang pemekaran suatu daerah terbuka lebar. Ide pemekaran wilayah selaras dengan keinginan elite Kutai yang menghendaki agar 'putera daerah' memimpin di Kaltim. Keinginan tersebut disambut oleh AFI sebagai klien. Oleh karena itu, AFI meminta restu elite Kutai agar mereka mendukung pemekaran wilayah Kutai menjadi Kutai Timur (Kutim). Tujuan pemekaran ialah menyejahterakan dan mengefektifkan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan AFI ialah memanfaatkan persoalan tanah *pawatasan* (tanah ulayat) Sultan yang masih bermasalah dengan PT. KPC. Persoalan tanah *pawatasan* atau tumpang tindih tanah dengan perusahaan tambang menjadi isu yang krusial di Kaltim.

Sejak Kesultanan Kutai melebur ke dalam Republik Indonesia tahun 1950, sebagian tanah milik Kesultanan telah dihibahkan kepada masyarakat. Namun, masih ada sebagian tanah *pawatasan* yang menjadi milik keluarga Sultan Kutai yang belum terurus secara administratif. Dengan adanya otonomi daerah, masalah tanah *pawatasan* mencuat ke permukaan. Sebagian tanah ini ada di Kutai Timur yang kaya dengan batubara, gas, dan minyak dan sebagian besar dari tanah ini berada di areal tambang PT. KPC (milik Aburizal Bakrie) yang merupakan salah satu perusahaan batubara terbesar di dunia. Namun, pihak PT. KPC mengklaim memiliki sertifikat dan bukti-bukti autentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebaliknya, pihak elite Kutai juga bersikukuh bahwa sebagian tanah yang diklaim PT. KPC tersebut adalah

tanah *pawatasan*. Konflik kepemilikan tanah oleh PT. KPC sampai hari ini masih dalam proses pengadilan.

Untuk merebut tanah *pawatasan*, diperlukan suatu kekuatan besar secara hukum, politik, dan ekonomi. Keinginan merebut kembali tanah tersebut sangat dimungkinkan, karena adanya otonomi daerah memberi ruang bagi Pemda untuk mengelola SDA. Dengan restu elite Kutai, Awang memanfaatkan permasalahan tanah *pawatasan* sebagai sarana untuk merengkuh kekuasaan. Sementara itu, pihak PT. KPC dianggap telah mengeruk batubara¹⁷ di lahan milik Sultan, tetapi perusahaan tidak memberikan royalti kepadanya. Masalah sengketa tanah tersebut sampai hari ini belum tuntas. Oleh karena itu, Awang sebagai mantan Ketua DPD Golkar yang memiliki relasi dengan Aburizal Bakrie ditunjuk oleh Sultan untuk menangani masalah ini.¹⁸

Menyikapi amanah elite Kutai tersebut, AFI menghadapi tiga realitas. *Pertama*, Syaukani selaku Bupati Kutai tidak menyetujui rencana pemekaran wilayah Kutai menjadi Kutai Timur (Kutim), sebab pemekaran ini akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai secara drastis. Penurunan PAD akan menghambat pembangunan Kutai dan pemasukan

17 Diperkirakan, tahun 2010 PT. KPC memproduksi 50 juta *metric* ton batubara dari Kutim, tetapi dari hasil batubara tersebut tidak ada royalti untuk Sultan Salehuddin II selaku pemilik tanah seluas 33.385 hektar. Dengan produksi 50 juta *metric* ton per tahun, pendapatan kotor PT. Bumi sekitar Rp. 35 trilyun per tahun. Lihat “Kaki Tangan KPC” dalam www.bongkar.com, diakses pada 23 September 2011. Sementara itu, setiap pemegang izin PKP2B memang diwajibkan membayar royalti kepada pemerintah sebesar 13,5% dari nilai produksi. Secara rinci, dari 13,5 % itu, pembagian royalti diatur sebagai berikut: 40% untuk pusat, 20% untuk pemerintah provinsi, dan 40% lainnya daerah penghasil. Namun, kewajiban PKP2B itu terbentur PP (Peraturan Pemerintah) No. 144/2000 tentang barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak penambahan nilai (PPN). Batubara sendiri tidak dikenai PPN. Lihat “Rp. 4,5 trilyun Royalti Tambang Macet” dalam www.bongkar.com, di akses pada 4 Maret 2009.

18 *Ibid.* Saham terbesar pemilik PT. KPC telah dibeli oleh PT. Bumi Resources pada tahun 2003. Di dalamnya tercantum nama Aburizal Bakrie sebagai pemilik PT. Bumi Resources.

dana, baik bagi Pemda maupun bagi diri Syaukani. Oleh karena itu, bagi Syaukani, pemekaran wilayah menjadi ancaman.

Kedua, masyarakat mengharapkan AFI sebagai ‘putra daerah’ memimpin Kaltim.¹⁹ Sekembalinya ke Kaltim, AFI tidak memiliki posisi strategis dalam pemerintahan. Namun, citra AFI sebagai bangsawan yang telah berhasil merengkuh kekuasaan melalui DPR tidak pudar. Ketika AFI tidak lagi memiliki jabatan politik di DPR dan kembali ke Kaltim, masyarakat masih berharap AFI memajukan Kaltim. Mereka merindukan ‘putra daerah’ yang telah berhasil dalam pentas nasional mampu meningkatkan kesejahteraan dan memberantas kebodohan.

Ketiga, AFI dituntut untuk mampu mengolah kebangsawannya. Harapan masyarakat yang tinggi agar AFI mengatasi masalah kemiskinan dan kebodohan, serta amanah Sultan membuat AFI dihadapkan pada keniscayaan untuk mengolah kebangsawannya. Harapan dan amanah tersebut harus dipenuhi, kalau AFI ingin tetap eksis dan dihormati. Oleh karena itu, dia harus menginstrumentasi adat, budaya, dan agama sebagai modal sosial dan kultural.

Untuk mewujudkan harapan masyarakat tersebut, AFI menginisiasi kelompok masyarakat pro-pemekaran Kutai Timur. Masyarakat pendukung pemekaran itu menamakan diri Kerukunan Warga Kutai Timur (KWKT). Sebagian besar anggota KWKT ialah loyalis terhadap elite Kutai. Dukungan masyarakat semakin banyak dan mereka mendukung AFI agar dia mau memimpin pemekaran wilayah Kutim. Sebenarnya, motif utama pemekaran wilayah Kutim bagi elite politik lokal adalah penguasaan hasil sumber daya alam. Selama ini, hasil

19 Tokoh adat di Kutim dan Kubar sangat setia kepada Sultan Kutai sehingga AFI tidak mengalami kesulitan untuk memobilisasi mereka.

kekayaan alam Kutim sebagian besar disetor ke pemerintah pusat, dan yang kembali ke daerah tidak lebih dari 10%.

Hal ini terbukti dengan minimnya pembangunan sarana dan prasarana di Kutim: belum ada jembatan penghubung antardesa, belum ada jalan raya penghubung antardaerah, banyak gedung sekolah rusak, belum ada rumah sakit, listrik belum masuk kampung, sarana telekomunikasi belum ada, dan lain-lain.²⁰ Selain faktor minimnya pembangunan sarana dan prasarana tersebut, tidak bisa disangkal adanya kepentingan elite lokal memanfaatkan momen pemekaran wilayah sebagai ajang untuk merebut posisi strategis dalam pemerintahan. Biasanya, mereka terdiri dari elite lokal yang tidak mendapatkan posisi yang penting dalam pemerintahan atau DPRD sehingga kecewa dan memobilisasi massa, dan akhirnya mendesak pemerintah pusat untuk memekarkan wilayah.

Sebenarnya, pemekaran Kutai menjadi Kabupaten Kutim sarat dengan pergulatan antarelite lokal dalam rangka menguasai sumber daya alam. Hal ini bisa dimaklumi, sebab secara faktual kekayaan alam wilayah ini sangat besar. Luas areal minyak bumi di Sangatta mencapai 6.000 ha dan di Sangkulirang 12.000 ha. Selain itu, kekayaan alam Kutai Timur berupa sumber gas bumi terdapat di Bengalon (20.000 ha), di Teluk Golok Sangkulirang (11.000 ha), dan di Pulau Miang Besar (8.000 ha).²¹ Sebagian besar kekayaan alam tersebut ada di atas tanah *pawatasan* Sultan Kutai. Selain itu, di Kutim beroperasi perusahaan batubara terbesar di Indonesia, yakni PT. KPC yang memiliki aset triliunan rupiah.

20 *Membangun Kutai Timur* dalam www.awangfaroeekishak.com/diakses pada 8 Februari 2012.

21 *Ibid.*

Semua SDA tersebut merupakan modal bagi elite yang akan berkontestasi dalam Pilkada. Secara khusus, PT. KPC sudah mengeksplorasi batubara bertahun-tahun, tetapi kontribusi untuk pembangunan daerah masih kurang. Oleh karena itu, dengan adanya pemekaran daerah, maka elite dapat menekan perusahaan-perusahaan besar untuk memberikan kontribusi konkret baginya.

C. Implikasi Penetapan AFI sebagai Bupati Kutim

Dengan ditetapkannya AFI sebagai Bupati Kutim oleh Mendagri, maka dia memiliki kuasa atas SDA Kutim yang kaya dengan batubara, gas bumi, dan minyak. Secara faktual, dia membutuhkan modal ekonomi yang sangat besar untuk menjadi bupati. Oleh karena itu, dia melakukan manuver politik dengan memanfaatkan patronase nasional dan lokal. Manuver tersebut sangat menonjol sehingga berdampak pada munculnya konflik antarelite lokal.

Pasca-pemekaran Kutim, setidaknya ada dua kelompok yang saling bersaing untuk berebut kekuasaan. *Pertama*, kelompok pro AFI. Kelompok ini menamakan diri Kerukunan Warga Kutai Timur (KWKT). Anggota kelompok ini terdiri dari tokoh masyarakat Kutai dan Banjar yang merupakan penduduk asli Kaltim. Selain itu, AFI juga mendapat dukungan dari elite Kutai. Memang, secara legal formal, AFI telah ditunjuk Mendagri sebagai Pejabat Bupati Kutim secara definitif. Penunjukan ini ditindaklanjuti dengan pelantikannya sebagai bupati oleh Gubernur Suwarna. Artinya, posisi AFI sebagai bupati sudah sah secara hukum dan diakui oleh pemerintah. Namun, Kutim belum memiliki anggota DPRD yang dipilih oleh masyarakat secara langsung melalui Pemilu. Padahal, pemerintahan yang demokratis tidak cukup hanya

dijalankan oleh bupati selaku eksekutif. Tanpa dukungan DPRD dalam pemerintahan, stabilitas akan terganggu.

Kedua, kelompok Mahyudin. Mahyudin selaku Ketua DPD Golkar Kutai mengklaim dirinya dipilih oleh masyarakat secara langsung melalui Pemilu 1999. Mahyudin mengklaim memiliki legitimasi yang sah untuk menjadi kepala daerah dibanding AFI yang ditunjuk oleh Mendagri. Mengapa Mahyudin *ngotot* untuk menjabat sebagai bupati? Tampaknya, hal ini bertumpu pada bujukan Syaukani yang sama-sama menolak pemekaran wilayah Kutim. Hubungan keduanya sangat dekat sehingga sangat memungkinkan Syaukani untuk memengaruhi Mahyudin agar merebut tampuk kekuasaan di Kutim. Kepentingan elite tersebut berdampak pada konflik vertikal antara AFI dengan Mahyudin yang memunculkan dualisme kepemimpinan.

Menyikapi realitas tersebut, AFI melakukan kompromi politik: dia rela berbagi kekuasaan. Mahyudin menghendaki adanya pembagian kekuasaan dengan tujuan menguasai hasil SDA di Kutim. Kompromi (kesepakatan) politik antara AFI dengan Mahyudin tersebut disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD. Tampaknya, dalam pergulatan antarelite politik tersebut, tersirat adanya *deal* khusus antara keduanya yang berujung pada pemberlakuan praktik transaksi politik. Hal ini kelak terkuak dengan adanya kasus divestasi saham PT. KPC: AFI dan Mahyudin terlibat dalam proses penjualan saham Pemda.

Konflik kepentingan antarelite tersebut menjadikan AFI menyadari adanya elite lain yang berupaya untuk merebut tampuk pimpinan di Kutim. Konspirasi antara Mahyudin dan Syaukani yang memiliki dukungan kuat dalam parlemen dan masyarakat membuat AFI berhadapan dengan kekuatan Partai Golkar yang mengakar dalam masyarakat. Untuk

menyikapi adanya konflik dengan Mahyudin tersebut, AFI mencitrakan diri sebagai ‘bapak pembangunan’ melalui media internet. Hal ini didukung oleh faktor harapan masyarakat (KWKT) yang sangat besar, khususnya dukungan terhadap AFI sebagai ‘putera daerah’ untuk memimpin Kutim. AFI menghadapi realita adanya penentangan dan dukungan, yang mau tidak mau akan memengaruhi sikap politiknya. Dengan posisinya sebagai klien elite Kutai dan elite Orde Baru, AFI sangat memahami bagaimana Soeharto mempertahankan kekuasaannya. Tampaknya, strategi politik yang diterapkan Soeharto tersebut ditiru oleh AFI. Hal ini terindikasi dalam paparan AFI melalui websitenya yang mencitrakan dirinya sebagai ‘bapak pembangunan’ untuk mengeliminasi adanya tentangan lawan politik terhadapnya.

Melalui media internet, AFI memaparkan betapa beratnya dulu ketika pertama kali dia diserahi tugas sebagai Pejabat Bupati Kutai Timur.²² AFI menegaskan bahwa dia berjuang membangun Kutim tanpa bantuan Mahyudin dan Syaukani. Dia mampu membangun kantor pemerintahan yang modern dan maju di Kutim. Pada mulanya, AFI harus berkantor di kecamatan, karena kantor Pemda belum ada. Begitu juga dengan gedung DPRD, saat itu belum dibangun. Selanjutnya, kutipan di bawah ini menggambarkan bagaimana keadaan Kecamatan Sangatta sebagai cikal bakal Kabupaten Kutim pada awal AFI sebagai bupati:

“Karena keterbatasan sarana dan prasarana, Sangatta sebenarnya belum mampu menunjukkan diri sebagai ibu kota kabupaten yang representatif. Maklum saja, sebagai kabupaten baru, infrastruktur Kutim masih terbatas. Kantor bupati saja masih menumpang di Balai Desa Sangatta Utara. Demikian pula dengan kantor-kantor

22 *Sang Entrepreneur yang Visioner* dalam www.awangfaroekishak.com/ diakses pada 31 Januari 2012.

*dinas dan badan, yang umumnya masih menumpang di bangunan milik warga maupun sekolah. Termasuk ruang tempat kalangan pejabat legislatif (DPRD) berkantor dan bersidang adalah bekas gedung bioskop yang sudah tidak beroperasi lagi.*²³

Kutipan tersebut di atas adalah cerita versi AFI ketika mulai bekerja sebagai pejabat bupati dengan fasilitas yang sederhana dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dikarenakan tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Demikian juga kantor Pemda dan DPRD belum ada, padahal kantor merupakan representasi atau simbol dari kewibawaan pemerintahan. Dalam hal ini, peran Mahyudin sebagai wakil bupati tidak disebutkan sehingga menimbulkan kesan bahwa seolah-olah yang berjasa membangun Kutim adalah AFI. Tampaknya, AFI ingin mencitrakan dirinya sebagai 'bapak pembangunan' yang tidak mudah putus asa, sekalipun ada keterbatasan sarana dan prasarana dalam menjalankan aktivitas pemerintahan sehari-hari. Selain itu, kondisi jalan antardaerah yang belum terbangun atau rusak parah memerlukan perhatian secara serius dari pemerintah pusat karena sarana dan prasarana yang rusak berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kutim.²⁴

AFI mengisahkan betapa sulitnya masyarakat pada waktu itu untuk membawa hasil panen ke pusat Kecamatan Bontang: setiap penduduk Kutim harus naik perahu kecil (*ketinting*) dan menempuh perjalanan lewat sungai selama dua jam.²⁵ Hal ini mengindikasikan sarana jalan darat belum ada atau tidak memungkinkan untuk dilalui. Kalau tidak teratasi, hal itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Kutim dan masyarakat akan terisolir dari modernisasi. Padahal, kecamatan terdekat

23 *Ibid.*

24 *Ibid.*, *Prospek Pusat Pengembangan Kawasan Industri Maloy.*

25 *Ibid.*

dari Kutim—yakni Bontang—sudah maju. Wilayah ini merupakan daerah industri gas. Dengan dijadikannya Bontang sebagai kota industri dan sentra ekonomi, kemajuan sarana dan prasarana hadir di daerah tersebut.

Gambaran tentang terisolirnya Sangatta pada waktu itu dipaparkan oleh AFI melalui websitenya sebagai berikut, “*Bila masyarakat hendak bepergian ke Samarinda (ibukota Propinsi Kaltim), mereka harus melalui hutan Taman Nasional Kutai (TNK) dan memerlukan waktu sekitar dua hari.*”²⁶ Ketika musim hujan datang, sering terjadi tanah longsor yang menutupi jalan sehingga jalan licin dan tidak bisa dilalui kendaraan. Sebaliknya, pada waktu musim kemarau, sering terjadi kebakaran hutan di TNK yang mengakibatkan penduduk Sangatta tidak bisa pergi ke Samarinda.²⁷ Hambatan lain bagi masyarakat Sangatta yang akan ke Samarinda ialah gangguan orang utan dari TNK yang sering mencegat mereka yang melewati hutan untuk meminta makanan.”

Kondisi Sangatta yang terisolir tersebut menjadi peluang bagi AFI untuk mencitrakan dirinya sebagai ‘bapak pembangunan’ yang mampu menjadikan Sangatta menjadi kota yang modern setara dengan Bontang, Balikpapan, dan Samarinda. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, AFI mulai memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana, seperti jalan antarkabupaten, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan sarana umum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kutim.²⁸

Harapan masyarakat terhadap AFI sangat tinggi, khususnya dalam memajukan Kutim. Oleh karena itu, tidaklah cukup baginya mencitrakan diri sebagai kepala daerah yang maju

26 *Ibid.*

27 *Ibid.*, *Sang Entrepreneur yang Visioner*.

28 *Ibid.*, *Prospek Pusat Pengembangan Kawasan Industri*.

dengan membangun kantor modern di Bukit Pelangi. Sebagai ‘bapak pembangunan’, dia harus berinovasi dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang informasi teknologi. Oleh karena itu, dia mencanangkan Kutim sebagai *cyber city*. Dia berargumen bahwa untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan terhadap masyarakat, Pemda Kutim perlu menerapkan sistem *electronic government (e-gov)*. Pusat kantor Bukit Pelangi dilengkapi dengan *hot spot* dan dijadikan *cyber city* yang berbasis informasi dan teknologi. Kantor bupati dilengkapi perpustakaan dengan fasilitas komputer *online* dengan *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten (Simpekab)* atau yang disebut juga dengan *Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (Simtap)*. Hal ini guna memberikan pelayanan masyarakat secara lebih cepat, murah, transparan, dan akurat.²⁹

Selain itu, AFI juga mencitrakan diri sebagai figur modernis, inovatif, dan ‘melek teknologi’. Hal ini terbukti dengan inovasi teknologi dalam bidang administrasi publik, khususnya dalam pengurusan dokumen pribadi dan perusahaan yang merupakan suatu prestasi unggul dibandingkan dengan kabupaten lain di Kaltim.³⁰ Pelayanan pengurusan dokumen bagi investor paling lama hanya 36 menit—sebuah terobosan luar biasa. Oleh karena prestasi pelayanan yang cepat dan efisien tersebut, AFI mendapatkan penghargaan dari pemerintah.³¹ Keberhasilan AFI dalam mengubah citra Kutim dari daerah

29 *Ibid.*

30 AFI mendapatkan penghargaan MURI, sebagai bupati tercepat di Indonesia dalam pelayanan kepada investor (36 menit). Selain itu, AFI juga mendapat penghargaan sebagai pelopor implementasi *e-government* peringkat pertama (majalah Pilar Bisnis) dan penghargaan sebagai pelopor *e-government/ one stop service (OSS)* peringkat kedua dari majalah Warta Ekonomi.

31 Penghargaan sebagai pelopor *e-government* dalam layanan satu atap (*Simtap*) *one stop service (OSS)* diberikan oleh Kantor Menteri Negara Komunikasi & Informasi RI.

tertinggal menjadi kabupaten yang modern dan maju diakui oleh Hamzah Haz sehingga dia menyampaikan:

“Berbagai pemikiran serta program yang sudah dijalankan Awang Faroek benar-benar mampu merubah daerah ini. Dia adalah sahabat saya saat menjadi anggota DPR, dia telah berhasil melaksanakan tugas dan membangun Kutim sehingga layak kita hormati.”³²

Hamzah Haz merupakan kolega AFI yang mengajak masyarakat Kutim untuk mendukungnya melakukan program pembangunan. Pembangunan pusat pemerintahan di Bukit Pelangi dirancang dengan matang oleh para ahli yang sudah direncanakan sedemikian rupa dan disesuaikan dengan tata ruang pengembangan Sangatta sebagai pusat kabupaten/kota yang modern.³³ Perancangan melibatkan para ahli tata kota dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia yang meliputi penataan infrastruktur yang dibangun secara terpadu yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan kecamatan atau desa di Kutim sehingga transportasi menuju ke Sangatta dapat diakses masyarakat dengan mudah.

Semua itu dilakukan AFI untuk memenuhi dambaan masyarakat. Di balik upaya memodernkan Kutim, tersimpan nalar politik AFI yang ingin mencengkeram kekuasaan

32 *Ibid.*, peresmian Pusat Perkantoran Pemda Kutim di Bukit Pelangi diresmikan oleh Wapres yang merupakan Pimpinan PPP. Hal ini bisa dimaknai bahwa AFI memiliki kedekatan dengan pimpinan PPP. Patut dicatat di sini bahwa sebagian masyarakat Kutim menjadi anggota partai tersebut. Kehadiran Wapres untuk meresmikan perkantoran Pemda tersebut menunjukkan adanya jejaring patronase AFI pada ranah nasional. Hal ini membenarkan argumen penulis bahwa pemekaran Kutim merupakan upaya AFI dalam rangka menginstrumentasi patronase politik yang sudah dirajut sejak dia menjabat sebagai anggota DPR selama dua periode. Jaringan patronase tersebut sudah terbentuk sehingga pada saat AFI membutuhkannya pemekaran dan legitimasi politik, mereka yang berada dalam jaringan itu siap membantunya.

33 Pembangunan Kantor Pemerintahan di Bukit Pelangi melibatkan tenaga ahli dari UGM, ITB, IPB, dan Unmul.

dalam birokrasi dan masyarakat. Namun, AFI mengemasnya dengan bahasa teknologi sehingga terkesan maju, canggih, dan modern. *Simtap* tersebut meliputi 11 sistem informasi yang dikelola secara terpadu dengan teknologi canggih. Sistem informasi tersebut meliputi manajemen satu atap, manajemen statistik, perlengkapan daerah, kepegawaian, pariwisata, keuangan daerah, geografi, agrobisnis, penanaman modal daerah, tenaga kerja, dan manajemen lingkungan daerah. Dengan adanya penerapan *Simtap* di Kutim, AFI dengan mudah mengendalikan masyarakat, birokrasi, ekonomi daerah, dan SDA (lingkungan) Kutim.

Adapun pelayanan administrasi dengan *Simtap* secara cepat yang dapat diberikan kepada masyarakat meliputi pembuatan KTP, akta kelahiran, akta kematian, surat izin usaha, tanda daftar perusahaan, tanda daftar industri, dan akta koperasi. Selain surat-surat penting tersebut, *Simtap* juga memberikan pelayanan cepat pengurusan dokumen pembuatan surat izin tempat usaha, izin reklame, pajak bumi dan bangunan, izin mendirikan bangunan, sertifikat tanah, izin lokasi dan pembuatan kartu kuning.³⁴ Masyarakat diuntungkan dengan adanya *Simtap* yang membantu mereka dalam mengurus dokumen-dokumen penting dengan mudah, cepat, dan gratis.

Bagi para pengusaha atau investor, hal ini sangat menguntungkan, karena Pemda kooperatif dalam pengurusan izin dan memberikan kepastian hukum. Manfaat dari adanya *Simtap* tersebut adalah timbulnya gairah para pengusaha untuk menginvestasikan modalnya ke Kutim. Dengan demikian, perekonomian Kutim berkembang. Selain itu, dengan adanya

34 *Ibid.*

kemudahan pengurusan izin usaha, ribuan tenaga kerja masyarakat menjadi terserap.

Di balik inovasi teknologi tersebut, selain memenuhi harapan masyarakat dalam kecepatan pengurusan dokumen penting—AFI memanfaatkan kerja sama dengan para pengusaha baik yang bergerak di bidang telekomunikasi, batubara, minyak, maupun agro industri. Para pengusaha yang menginvestasikan modalnya ke Kutim tersebut tidak luput dari kewajiban memberikan *fee* kepada elite politik. Hal ini sudah menjadi rahasia umum agar pemilik bisnis usahanya lancar dan aman. Mereka harus memberikan dukungan dana kepada elite politik yang mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah. Dukungan modal para investor kepada elite lokal tersebut sebagai wujud balas budi, karena mereka pernah ditolong mengurus ijin usaha. Ada kalanya mereka menyumbang dana dalam proses kontestasi dengan harapan akan mendapatkan proyek pembangunan jika kontestan menang dalam Pilkada.

Akan tetapi, dalam rangka memenuhi harapan masyarakat untuk memajukan Kutim setara dengan kabupaten lain, AFI membutuhkan modal besar. Yang menjadi kendala AFI untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut adalah tidak ada dana dari Pemda untuk pembangunan kantor pemerintahan. Oleh karena itu, AFI mengajukan usulan pinjaman dana ke BPD Kaltim. Rencana peminjaman Pemda ke BPD Kaltim sebesar Rp. 270 miliar. Melalui dana APBD peminjaman Pemda tersebut diangsur setiap bulan dalam kurun waktu lima tahun. Jadi, bisa dikatakan bahwa jaminan pinjaman Pemda tersebut adalah APBD Kutim.

Dalam usaha memperoleh pinjaman dana melalui BPD Kaltim tersebut, Awang menginstrumentasi relasi jaringan birokrasi lokal yang sudah dirajut ketika dia menjadi staf ahli gubernur. AFI melobi pimpinan BPD Kaltim yang dia

kenal. Sementara itu, Mahyudin selaku wakil bupati dan ketua DPD Golkar mengadakan komunikasi dengan anggota dan pimpinan DPRD Kutim. Tampaknya, anggota DPRD juga membutuhkan kantor yang representatif untuk menjalankan tugas sehari-hari. Namun, kenyataannya DPRD belum memiliki tempat yang representatif sehingga dengan ironis mereka mesti berkantor di bekas gedung bioskop yang sudah tutup. Adanya kebutuhan yang sama antara Pemda dan DPRD atas kantor yang berfungsi membantu mengefektifkan pemerintahan. Maka terjadilah relasi simbiosis mutualisme.

Di satu pihak, AFI selaku bupati mengajukan rencana pinjaman kepada BPD Kaltim. Sementara itu, di pihak lain, Mahyudin melakukan lobi-lobi politik terhadap pimpinan DPRD. Peran Mahyudin sebagai ketua DPD Golkar Kutim sangat besar dalam memengaruhi keputusan DPRD. Oleh karena anggota fraksi Golkar dalam DPRD cukup berpengaruh, maka rapat yang membahas usulan pemerintah tersebut berjalan lancar. Hasil rapat DPRD Kutim menyetujui usulan Bupati mengajukan peminjaman dana ke BPD Kaltim. Dengan adanya dana segar sebesar RP. 270 miliar tersebut, AFI mulai melakukan pembangunan perkantoran Pemda dan gedung DPRD di Bukit Pelangi.

"Kita bisa lihat Bukit Pelangi ini. Ini adalah [hal] yang paling monumental. Lahan seluas 600 hektar di Gunung Tim yang dahulunya hutan, diubah menjadi pusat kompleks perkantoran dan pemerintahan. Sebanyak 42 gedung dibangun. Ada kantor Bupati, DPRD, Gedung Serbaguna, Lanal, Kodim, Polres, Kejaksaan, Pengadilan, kantor-kantor badan ada lima, kantor dinas ada 15, perumahan DPRD, rumah jabatan bupati dan lainnya."³⁵

35 *Membangun Kutai Timur.*

Apa yang dipaparkan AFI di atas merupakan suatu ungkapan kebanggaan atas keberhasilannya dalam membangun Kutim menjadi kabupaten yang maju dan modern. Ungkapan tersebut juga menjadi ekspresi AFI dalam menginstrumentasi simbol-simbol kekuasaan untuk melegitimasi dirinya yang mewujudkan secara fisik dalam bentuk kantor Pemda dan DPRD. Pembangunan perkantoran di Bukit Pelangi tersebut mampu mengubah hutan belantara menjadi pusat pemerintahan yang modern dan maju. Hal ini pun diakui oleh Hamzah Haz selaku Wakil Presiden (Wapres) yang meresmikan Bukit Pelangi pada tahun 2003, sebagai berikut “*Pembangunan pusat pemerintahan ini benar-benar bagus untuk menciptakan pelayanan yang terpadu serta mendorong dan menciptakan good government sehingga bisa menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia.*”

Hal ini disampaikan mantan Wapres ketika meresmikan pusat pemerintahan di Bukit Pelangi.³⁶ Pembangunan kantor pemerintah yang modern di Bukit Pelangi tersebut menghabiskan dana sekitar Rp. 578 miliar. Pembangunan kantor Bukit Pelangi selesai dalam kurun waktu sekitar tiga tahun. Dengan selesainya pembangunan perkantoran tersebut, efektivitas pelayanan terhadap masyarakat menjadi nyata.

Namun demikian, tampaknya ada keganjilan dalam hal ini. AFI mengajukan dana pinjaman pembangunan kantor Bukit Pelangi kepada BPD Kaltim sebesar Rp. 270 miliar, tetapi dana pembangunan membengkak menjadi Rp. 578 miliar sehingga kekurangan dana sebesar Rp. 308 miliar. Pertanyaan pun muncul: dari mana AFI mendapatkan dana untuk menutupi kekurangan tersebut?

36 *Ibid.*

Di sisi lain, pembangunan perkantoran Bukit Pelangi tidak melalui tender terbuka, tetapi AFI menunjuk langsung rekanan perusahaan pelaksana. Dengan demikian, terindikasi adanya ketidakberesan dalam proses tender dan pembangunan. Ada kemungkinan investor yang mendapatkan proyek Bukit Pelangi memberikan *fee* kepada elite politik.³⁷ Namun, hal ini tidak bisa dibuktikan karena tidak ada tanda terima tertulis atau saksi mata. Pada umumnya, pemberian *fee* pembangunan tersebut dilakukan di ranah yang tersembunyi. Ada kemungkinan uang *fee* dari para investor tersebut dimanfaatkan oleh elite lokal dalam mengakhiri konflik kepentingan di Kutim. Konkretnya uang tersebut dibagi secara proporsional ke semua elite lokal, agar mereka tidak melaporkan ke KPK.

Tampaknya, kekurangan dana pembangunan kantor Pemda di Bukit Pelangi tersebut diambilkan dari penjualan divestasi saham milik Pemda Kutim yang ada di PT. KPC. AFI tidak bisa mengelak untuk mengupayakan dana tambahan agar citranya tidak pudar. Dia sudah terlanjur mengikuti keinginan masyarakat. Oleh karena itu, dirinya mengupayakan untuk menutupi kekurangan dana tersebut lewat kerja sama dengan Suwarna untuk mendapatkan saham PT. KPC sebesar 51%.³⁸ PT. KPC merupakan perusahaan batu bara terbesar di Indonesia dengan produksi sekitar 40 juta m³ per tahun.³⁹ Namun, hasil penjualan saham PT. KPC tersebut tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kutim. Padahal, lahan PT. KPC adalah milik Pemda Kutim dan sebagian tanah

37 Dengan asumsi *fee* yang diterima elite politik sebesar 10%, maka dia menerima dana segar minimal Rp. 50 miliar.

38 “Bagaimana Kronologi Penjualan Saham PT. KPC?” dalam www.kaltim.go.id/diakses pada tanggal 15 Juli 2010.

39 Informasi dari HM Ketua Teknik Tambang batubara di Sangasanga Kutai Kartanegara dalam diskusi kelompok tanggal 19 Desember 2011 di Yogyakarta.

pawatasan Sultan. Oleh karena itu, AFI dan Suwarna bertekad memperjuangkan saham yang menjadi milik Pemda Kutim.

“Perjuangan dilaksanakan bersama-sama Gubernur Kaltim saat itu (H. Suwarna AF) dan Ketua DPRD Kaltim. Inti perjuangan adalah mendapatkan divestasi saham KPC sebesar 51% sebagai wujud komitmen dan kepedulian pimpinan daerah saat itu untuk memperjuangkan hak rakyat Kaltim.”⁴⁰

Tampaknya, perjuangan AFI dan Suwarna tersebut disambut oleh kebijakan pemerintah. Dalam Sidang Kabinet Terbatas tanggal 31 Juli 2002, pemerintah memutuskan saham 51% PT. KPC, dengan calon pembeli 20% saham ialah PT. Tambang Batubara Bukit Asam. Sedangkan yang 31% saham dibagi menjadi 12,4% untuk pemerintah provinsi Kaltim melalui Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dan 18,6% jatah pemerintah kabupaten Kutim melalui Perusda Pertambangan dan Energi Kutim (Perusda PEKT). AFI memperjuangkan saham Pemda Kutim dalam kapasitasnya sebagai bupati pada periode 12 Oktober 2002-21 Mei 2003.⁴¹

Upaya AFI berhasil. Pemda Kutim mendapatkan saham PT. KPC sebesar 18,6%. Namun, Pemda tidak memiliki dana untuk membeli saham tersebut. Sementara itu, AFI non-aktif sebagai bupati karena sedang mengikuti proses kontestasi dalam pemilihan Gubernur Kaltim (2003). Mahyudin selaku wakil bupati menggantikannya dan menandatangani surat jual beli saham sebesar 18,6% tanggal 13 Oktober 2003.⁴² Surat ditandatangani oleh Mahyudin dari pihak Pemda Kutim, dan oleh Ari S. Hudaya dari pihak PT. Bumi Resources. Pihak PT. Bumi Resources menjual kembali saham sebesar 13,6%

40 *Ibid.*, *Bagaimana Kronologi Penjualan Saham PT. KPC.*

41 *Ibid.*

42 *Ibid.*

dan Pemda Kutim mendapatkan *golden share* saham sebesar 5%. Untuk mengelola saham PT. KPC sebesar 5% tersebut, Mahyudin mendirikan PT. Kutai Timur Energi (KTE).⁴³ Mahyudin tidak menyerahkan hasil uang penjualan saham 5% PT. KPC tersebut ke Bendahara Kas Daerah Kutim dan hal ini di kemudian hari dipermasalahkan.⁴⁴

D. Bapak Pembangunan yang Dermawan

Oleh karena proses pemekaran Kutim sarat dengan perburuan hasil SDA dan pergulatan antarelite lokal, maka AFI memanfaatkan kekuasaan yang direngkuhnya untuk membangun citra dirinya sebagai bangsawan yang dermawan. Dia sudah terlanjur terjebak dalam citra diri tersebut. Sementara itu, tuntutan elite Kutai dan masyarakat ialah kepemilikan tanah dan kesejahteraan yang meningkat. Oleh karena itu, ketika elite berkuasa, dia memanfaatkan program *Gerakan Berbasis Pada Pembangunan Agrobisnis* (Gerdabangagri) untuk melegitimasi dirinya sebagai bangsawan yang dermawan. Melalui Gerdabangagri, terimplisit elite ingin memenuhi harapan masyarakat dengan menempatkan dirinya sebagai bangsawan yang dermawan. Untuk mengonkretkan citra diri tersebut dalam masyarakat, maka kebijakan yang

43 *Ibid.*

44 *Ibid.*, penjualan saham PT. KPC sebesar 5% yang dikelola PT. KTE dan bukan oleh Pemda Kutim tersebut semakin meruncingkan konflik antara AFI dengan Mahyudin. Karena hal ini terjadi ketika AFI menjabat bupati, maka kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab AFI. Isu yang beredar melalui media massa, dana tersebut dimanfaatkan oleh AFI sebagai dana kontestasi dalam Pilkada 2003. Namun, isu ini dibantah oleh AFI, karena pendirian PT. KTE sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mahyudin. Hal ini juga semakin mempertegas jawaban AFI ketika dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan dia mengundurkan diri sebagai bupati. Namun, di lain kesempatan AFI berbicara melalui media massa bahwa dia tidak mengundurkan diri sebagai Bupati Kutim ketika mencalonkan diri sebagai gubernur.

dilakukannya ialah revitalisasi pertanian, pemberian pinjaman modal usaha,⁴⁵ dan rekayasa modal sosial.

E. Revitalisasi Pertanian

Mengingat lahan di Kutim sedemikian luas dan tuntutan masyarakat atas kepemilikan tanah tinggi, maka AFI mengambil kebijakan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui revitalisasi pertanian. “*Kalau kita merasa bagian dari masyarakat, maka segala upaya yang kita lakukan akan mengarah kepada masyarakat dan demi kebaikan masyarakat,*” kata AFI.⁴⁶ Bidang pertanian merupakan fokus dari kebijakan AFI dalam arti luas yang meliputi revitalisasi perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Salah satu bentuk regulasi radikal yang dilakukan oleh AFI adalah memberikan tanah gratis seluas 5 ha kepada setiap kepala keluarga. Kebijakan pemberian tanah gratis kepada masyarakat ini diambil, untuk memenuhi tuntutan mereka. Dalam hal ini, AFI memerankan dirinya sebagai bangsawan yang dermawan. Dalam pandangan masyarakat, seorang bangsawan harus memberikan tanah, barang, dan jasa agar mereka setia kepadanya. Semakin besar pemberian bangsawan kepada masyarakat, maka citra dirinya semakin naik.

Hal ini ditunjukkan AFI dengan mengambil kebijakan pemberian sertifikat tanah secara gratis. Kebijakan pemberian tanah dan sertifikat gratis tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan bagi para petani. Hal ini menjawab kebutuhan masyarakat atas status tanah mereka yang selama ini tidak jelas.⁴⁷ Selain itu, ada sebagian tanah masyarakat yang ditambang oleh perusahaan

45 AFI, *Prospek Pengembangan Kawasan Industri Maloy, Power Point*. Tidak diterbitkan

46 *Ibid.*

47 *Loc.cit, Patron-Client Politics and Poitical Change in Southeast Asia*, hlm. 109.

tanpa ganti rugi yang layak. Dengan kejelasan status hukum atas kepemilikan tanah, diharapkan masyarakat menjadi giat dalam mengelola lahan secara mandiri. Dalam hal ini, AFI sepertinya ingin menunjukkan komitmennya terhadap perekonomian rakyat kecil. Dia mencitrakan diri sebagai elite yang pro-rakyat. AFI mengemas kebijakan ini sebagai *grand strategy* masa depan Kutim yang berfokus pada agrobisnis.

Kebijakan AFI tentang regulasi pertanian tersebut berimplikasi dua hal: *pertama*, terjadinya relasi patron-klein. Untuk memenuhi harapan masyarakat, AFI selaku bangsawan Kutai menginstrumentasi sistem nilai budaya yang dikemas dengan bahasa pembangunan. AFI menempatkan dirinya sebagai patron yang dermawan dengan memberikan tanah dan sertifikat kepada masyarakat. Sementara itu, masyarakat ditempatkan sebagai klien yang hanya pasif menerima bantuan dari sang patron.

Kedua, tumbuhnya rasa utang budi masyarakat. Tampaknya, kebijakan regulasi pertanian berimplikasi pada munculnya utang budi masyarakat kepada AFI. Apabila kelak AFI membutuhkan dukungan politik dalam Pilkada, mereka yang telah berutang budi tersebut—mau tidak mau harus siap untuk mendukungnya. Dengan demikian, kebijakan tersebut menumbuhkan kebergantungan dan loyalitas (kesetiaan).

Rasa kebergantungan dan loyalitas tersebut harus dijaga dengan cara memberikan rasa aman bagi mereka. Ini berarti mencukupi kebutuhan dasar yang meliputi sandang, papan, pangan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, AFI yang didambakan sebagai 'putra daerah' harus mampu mencukupi kebutuhan mereka. AFI dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Oleh karena itu, AFI meniru apa yang telah dilakukan Soeharto. Pada era Orde Baru, Soeharto menerapkan kebijakan swasembada pangan dengan fokus perhatian pembangunan diarahkan pada

tercukupinya pangan bagi masyarakat. Regulasi pertanian tersebut didasarkan pada realita bahwa Kutim memiliki 1,3 juta ha lahan pertanian potensial yang siap digarap oleh masyarakat dan investor.⁴⁸ Lahan tersebut harus dikelola secara arif agar mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Di luar itu, secara kultural AFI mengetahui bahwa hak memberikan tanah adalah hak prerogatif elite Kutai. Oleh karena itu, AFI memaknai pemberian tanah sebagai amanah elite Kutai dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Dalam tradisi adat Kutai, yang berhak memberikan tanah adalah Sultan, tetapi AFI telah mendapatkan mandat dari elite Kutai.⁴⁹

Tampaknya, dampak kebijakan revitalisasi pertanian tersebut menarik para investor untuk menanamkan modalnya ke Kutim, karena adanya kemudahan pengurusan pembebasan tanah, kepastian hukum, dan keamanan terjamin.

“Tiga komponen penting untuk pembangunan: sektor swasta, masyarakat dan pemerintah. Pemerintah hanya perlu bertindak sebagai fasilitator yang menciptakan kemudahan kepada dunia swasta untuk berinvestasi dan sekaligus menciptakan tantangan kepada masyarakatnya untuk mengembangkan diri mengikuti tuntutan kehidupan masa depan.”⁵⁰

Kebijakan revitalisasi pertanian diinstrumentasi oleh bupati yang juga bangsawan tersebut dalam rangka mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebagai seorang bangsawan, ia harus mampu mengentaskan kemiskinan masyarakat. Jika

48 *Ibid.*, *Membangun Kutai Timur*.

49 Menurut Undang-Undang Panji Selaten, kepemilikan tanah di wilayah Kesultanan Kutai semua dikuasai oleh Sultan Kutai. Namun, pasca-bergabungnya Kesultanan Kutai dengan Republik Indonesia, kepemilikan tanah sebagian diberikan kepada masyarakat dan sebagian dimiliki oleh keluarga kesultanan. Sebagian tanah di Kutim adalah tanah milik kesultanan, tetapi dieksplorasi oleh PT. KPC tanpa ganti rugi. Upaya AFI memberikan tanah kepada masyarakat adalah hak dari seorang bangsawan dan hal ini mungkin terjadi kalau AFI mendapatkan amanah dari Sultan Kutai (Salehuddin II).

50 *Ibid.*

tidak, mereka akan kehilangan wibawa dan tidak dipercaya masyarakat. Apabila AFI tidak membantu masyarakat, maka masyarakat akan mencari bangsawan lain yang dianggap mau membantu mengentaskan kemiskinan. Di satu sisi, AFI benar-benar menyadari bahwa sebagai seorang bangsawan, dia bertanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi di sisi lain dia harus taat regulasi dan mencitrakan diri sebagai seorang yang demokrat.

F. Pemberian Pinjaman Modal

Walaupun para petani sudah diberikan tanah 5 ha dan sertifikat oleh pemerintah, tetapi mereka belum memiliki modal untuk membeli bibit dan pupuk. Jika hal ini dibiarkan oleh pemerintah, maka para petani akan datang kepada tengkulak atau pengijon untuk meminjam uang. Program pemberian tanah kepada masyarakat ini akan sia-sia jika mereka tidak memiliki modal usaha. Oleh karena itu, AFI membuat kebijakan peminjaman (pemberian) modal usaha tanpa bunga kepada para petani melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pendirian BPR dan lembaga keuangan mikro tersebut meliputi 18 kecamatan yang mencakup 136 desa. Harapannya, dengan kemudahan pinjaman modal tanpa bunga, para petani dapat memanfaatkannya untuk memulai usaha. Di satu sisi masyarakat membutuhkan modal usaha, tetapi di sisi lain AFI membutuhkan legitimasi masyarakat. Pemberian tanah, sertifikat, dan modal usaha kepada setiap kepala keluarga di Kutim merupakan investasi bagi AFI dalam rangka merekayasa relasi patron-klien. Salah satu kelemahan para petani adalah mereka belum mampu mengelola atau menjual hasil panen. Hasil panen sering dibeli oleh tengkulak dengan harga rendah sehingga para petani hanya mendapatkan keuntungan kecil. Selain itu, para tengkulak ini sering menawari mereka modal untuk beli pupuk dan bibit

dengan syarat hasil panen dibeli olehnya. Dengan adanya sistem *ijon*, maka yang banyak diuntungkan adalah sang tengkulak. Petani tetap hidup miskin karena mereka tidak menikmati keuntungan maksimal dari hasil panen.

Oleh karena itu, AFI membuat kebijakan mengatur sistem produksi yang memroteksi hasil panen, agar para petani bebas dari jeratan utang. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan mereka dapat menikmati hasil keuntungan panen lebih banyak. Tujuan AFI mengatur sistem produksi, agar masyarakat dapat bercocok tanam, berkebun atau melaut dan hasil dari produksi tani dikelola oleh koperasi. AFI membuat kebijakan yang tampaknya populis dan hal ini diwujudkan dengan memroteksi dan memperluas pasar, agar para petani tidak bergantung pada tengkulak atau pengijon. Implikasi adanya sistem produksi yang diterapkan oleh AFI tersebut, maka para petani mudah mendapatkan bibit dan pupuk dengan harga terjangkau. Sistem produksi yang diterapkan oleh AFI tersebut membuat para petani merasa nyaman dan terlindungi. Selain itu, mereka mendapatkan untung yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga.

G. Rekayasa Modal Sosial

AFI berupaya memperkokoh gotong-royong masyarakat dengan menempatkan kader Gerdabangagri di desa-desa. Semua masalah masyarakat (petani) dicari solusinya melalui kelompok Gerdabangagri yang dibentuk oleh AFI. Tampaknya, ide ini diinspirasi oleh Soeharto dengan model Kelompencapir. AFI menirunya dengan membuat kelompok Gerdabangagri di setiap desa dengan menempatkan fasilitator/ penyuluh yang digaji khusus dengan tugas mendampingi para petani atau masyarakat. Fasilitator Gerdabangagri yang ada di desa inilah yang menjadi ujung tombak AFI dalam rangka

menginstrumentasi modal sosial. Tugas utama mereka adalah mendampingi dan mencari solusi bersama atas masalah yang dihadapi para petani.

Implikasi kebijakan AFI dalam menginstrumentasi kelompok Gerdabangagri adalah terbentuknya relasi patron-klien. Tampaknya, AFI ingin menandingi apa yang dilakukan oleh Syaukani di Kabupaten Kutai yang berhasil mengikat masyarakat dengan cara memberikan dana pembangunan Rp. 1 miliar ke desa-desa.⁵¹ Tampaknya, kebiasaan masyarakat menerima uang dari pemerintah (bupati) ini sudah menjadi budaya pemberian di Kaltim sehingga AFI niscaya melakukan hal yang sama. Tampaknya, pemberian AFI lebih kreatif, karena memberdayakan masyarakat bekerja dengan bercocok tanam atau berbisnis. Bukan hanya itu, AFI juga menerjunkan tim pendamping (penyuluh) untuk memroteksi petani, khususnya penjualan hasil panen agar tidak dikuasai para tengkulak.

Oleh karena budaya pemberian (patronase) adalah keniscayaan dalam masyarakat, maka AFI mau tidak mau mengikuti kebiasaan itu. Masyarakat sangat mendambakan adanya 'putra daerah' yang mampu mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Oleh karena itu, AFI menerapkan kebijakan memberikan uang insentif kepada para penyuluh Gerdabangagri. Tenaga penyuluh ini diambil dari alumni Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian yang didirikan oleh Pemda.

Selain itu, AFI juga merekrut para *dai* yang ditugaskan ke desa-desa. Tugas para *dai* yang utama ialah memberikan pencerahan rohani dan moral kepada masyarakat di pedesaan. Mereka mendapatkan gaji yang dialokasikan dari APBD. Mereka bertugas ke desa-desa dan mendapatkan fasilitas

51 *Wawancara* dengan Sri Wahyuni (lurah), tanggal 13 April 2012 di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga-Kaltim.

sepeda motor dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, bagi masyarakat yang mengalami kesulitan modal, AFI juga mempersiapkan kader koperasi yang siap memberikan bantuan penyuluhan dan pinjaman modal usaha. Bantuan sosial biasanya disalurkan melalui para kader yang digunakan untuk pembangunan jalan, sekolah, rumah ibadah, kantor kelurahan, Puskesmas, dan Posyandu .

AFI memahami bahwa masalah yang dihadapi keluarga dalam menyekolahkan anak ialah mahalnya biaya dan kualitas pendidikan. Selain itu, AFI juga dihadapkan pada masalah umum di Kaltim, yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah sehingga mereka kalah bersaing terhadap kelompok pendatang dalam dunia kerja. Sebagai bangsawan, AFI harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan tantangan tersebut. Kalau dia tidak memenuhinya, maka status kebangsawanannya bisa pudar. Selanjutnya, dia mengatakan sebagai berikut, *“Ini tugas kita. Bagaimana sebisa mungkin berperan membenahi dunia pendidikan di Kaltim. Mumpung kita diberi kekuasaan, maka sudah sepatutnya kekuasaan itu digunakan untuk membela masa depan anak-anak kita.”*⁵²

Oleh karena itu, AFI bertekad menyejahterakan masyarakat Kaltim melalui pendidikan gratis 12 tahun yang diterapkan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. *“Diterapkannya Wajib Belajar 12 tahun, karena Kutim merasa mampu untuk itu. Ini juga untuk meningkatkan daya saing kita dengan daerah lain, baik di dalam maupun di luar Kaltim”* kata AFI.⁵³ Dia bertekad mewujudkan pendidikan

52 *Pendidikan untuk semua* dalam www.awangfarokishak.com/ diakses pada tanggal 31 Januari 2012. Istilah ‘mumpung kita diberi kekuasaan’ menunjukkan sikap AFI yang menginstrumentasi kekuasaan dalam rangka mengikat masyarakat dengan program pendidikan. Agenda di balik sikap politik AFI tersebut, dia ingin menciptakan relasi patronase yang mengikat masyarakat.

53 *Ibid.*

gratis bagi semua siswa/siswi sesuai amanat UUD 1945 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Langkah-langkah kebijakan konkret yang diambil oleh AFI ialah mengalokasikan dana pendidikan 20% dari APBD. Pada tahun 2006 dialokasikan dana sebesar Rp. 202 miliar dan tahun 2007 sebesar Rp. 262 miliar.⁵⁴

Ternyata beasiswa tidak hanya diberikan kepada siswa saja, tetapi juga kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa dimaksudkan untuk menunjang tersedianya tenaga ahli yang terampil di bidang agrobisnis. Tampaknya, AFI mempersiapkan kader orang-orang yang setia dengannya yang kelak menjadi ujung tombak Gerdabangagri. Beasiswa kepada mahasiswa diberikan sampai mereka lulus sarjana, dan mereka siap ditempatkan kerja oleh Pemda sebagai tenaga penyuluh pertanian di desa-desa. Selain itu, AFI juga menerapkan kebijakan pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan kurang mampu ke jenjang S1, S2, dan S3 sebanyak 2.222 orang.⁵⁵ Tindakan AFI memberikan beasiswa kepada mahasiswa mengindikasikan adanya budaya pemberian yang dialokasikan melalui APBD.

Selain memberikan beasiswa kepada para siswa dan mahasiswa, AFI juga memberikan insentif kepada para guru dan dosen. AFI menerapkan kebijakan tersebut kepada semua guru Sekolah Dasar di Kutim dengan kriteria sarjana. Kepada guru yang belum lulus sarjana, diberikan beasiswa melanjutkan studi sarjana. Sedangkan bagi mereka yang sudah sarjana, diterapkan kebijakan agar mereka bisa mengikuti sertifikasi. Sementara itu, dosen S1 yang mengajar di STIPER, diwajibkan mengambil gelar S2 sebagai persyaratan mengajar. Mereka yang mengambil studi S2 tersebut dibiayai sepenuhnya oleh

54 *Prospek Pengembangan Kawasan Industri Maloy.*

55 *Ibid.*

Pemda Kutim. Guru dan dosen yang sudah lulus sertifikasi dan berprestasi selain menerima gaji pokok sebagai PNS, juga diberi insentif sebesar Rp. 700 ribu sampai Rp. 1,2 juta per bulan. Hal ini dilakukan AFI dalam rangka memotivasi mereka agar mengajar dengan baik dan berkualitas.⁵⁶ Di balik pemberian insentif tersebut, tersirat keinginan AFI untuk mengikat relasi patronase terhadap para guru dan dosen. AFI merekayasa utang budi terhadap guru dan dosen sebagai investasi yang kelak dimanfaatkannya dalam Pilkada.

Selain memberikan beasiswa dan insentif kepada guru dan dosen, AFI juga memberikan mobil kepada setiap kepala sekolah. Sedangkan untuk guru dan dosen, disediakan kendaraan bermotor. Bagi mereka yang menjadi penyuluh pertanian, AFI memberikan motor dalam rangka melancarkan tugas penyuluhan dan pendampingan kepada petani.⁵⁷ Pemberian mobil dan motor untuk guru, dosen, dan tenaga penyuluh mengindikasikan adanya budaya pemberian yang dikemas dalam program pendidikan. Dalam hal ini AFI, ingin mencitrakan dirinya sebagai bangsawan yang dermawan sehingga terwujud ikatan relasi patronase antara AFI dengan para guru dan dosen.

Pemberian beasiswa, insentif, dan kendaraan bermotor bagi para guru, dosen, dan siswa tidak bisa menjadikan mereka pandai tanpa sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan infrastruktur pendidikan, AFI menjalankan program pembangunan sekolah baru di desa-desa. Sekolah-sekolah baru dibangun secara terpadu, mulai dari SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi. Selain

56 *Ibid.* Apa yang dilakukan oleh AFI tampaknya legal dan sesuai dengan peraturan, tetapi di balik hal tersebut terselubung adanya ikatan 'utang budi' yang direkayasa oleh AFI. Kelak AFI akan menggunakan 'utang budi' ini sebagai bagian dari strategi politik dalam rangka pemenangan Pilkada.

57 *Ibid.*

itu, sekolah yang rusak direnovasi agar layak dijadikan tempat belajar untuk anak-anak. Selain itu, AFI juga membangun Sekolah Menengah Atas Unggulan (berasrama) berstandar nasional/internasional.⁵⁸

Untuk memajukan pendidikan tinggi, AFI membangun kampus STIPER sebagai tempat kaderisasi para penyuluh pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Lulusan STIPER diharapkan menjadi penyuluh atau pegawai Pemda dengan tugas khusus mendampingi masyarakat dalam bertani, beternak, budi daya ikan, dan berkebun. Mereka diharapkan kelak menjadi mediator antara AFI dengan masyarakat dalam mengimplementasikan program Gerdabangagri. Selain itu, AFI juga membangun Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) dengan tujuan untuk mendidik para sarjana agama. Lulusan dari STAIS ini diharapkan kelak juga menjadi penyuluh moral (*dai*) masyarakat di desa-desa. Mereka diharapkan menjadi juru bicara AFI dan memengaruhi masyarakat agar setia kepadanya.

AFI juga memberikan bantuan dana pembangunan kepada sekolah swasta. Di antaranya melalui Yayasan Perguruan Swasta: SDIT Darussalam, Yayasan Muhammadiyah, dan Yayasan Al Ma'arif.⁵⁹ Dana bantuan tersebut dialokasikan dari APBD. Dalam hal ini, AFI mencitrakan dirinya sebagai figur dermawan yang menyantuni masyarakat. Melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana tersebut, AFI menginvestasikan hutang budi kepada masyarakat.

Pasca kekalahan elite (AFI) dalam pemilihan gubernur (tidak langsung), tampaknya, dia mulai mengoreksi diri bahwa untuk berkompetisi dalam pemilihan gubernur

58 *Ibid.*

59 *Ibid.*

2003 modal finansialnya belum cukup. Selain itu, AFI juga kehilangan posisinya sebagai Bupati Kutim. Mahyudin menganggapnya mengundurkan diri sebagai bupati ketika mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur. Namun, AFI menyanggah anggapan bahwa dia maju sebagai kontestan dalam pemilihan gubernur berarti mengundurkan diri sebagai bupati. Selanjutnya, AFI mengatakan, sebagai berikut, *“Saya luruskan dan tegaskan, saya tidak pernah memundurkan diri dari jabatan Bupati Kutim.”*⁶⁰ Memang menurut ketentuan Mendagri, seorang bupati harus mengundurkan diri, bila mencalonkan diri sebagai gubernur (kepala daerah). Oleh karena itu, AFI menerapkan strategi untuk merebut kembali jabatan Bupati Kutim, sebagai berikut:

H. Merajut Patronase

AFI membutuhkan dukungan dari masyarakat Kutim sebagai bentuk legitimasi terhadap dirinya pasca-kekalahan dalam pemilihan gubernur 2003. Untuk mendapatkan dukungan masyarakat Kutim tidaklah sulit baginya karena rajutan patronase yang terbentuk sudah mengakar sampai ke desa-desa. Hal ini terbukti, dalam waktu relatif singkat AFI berhasil mendapatkan dukungan ribuan orang. Langkah awal yang diambil oleh AFI dalam rangka merebut kekuasaan ialah dengan mengaktifkan kembali relasi patron-klien yang sudah dirajut di desa-desa. Selain itu, AFI merekayasa relasi patron-klien lokal dengan sebutan Kerukunan Warga Kutim Pro-Pembaharuan (KWKPP).

“Terbentuknya KWKPP sebenarnya jauh hari sebelum Pilkada digelar, yakni kurang lebih satu setengah tahun. Selama itu, KWKPP menghimpun aspirasi dari masyarakat

60 *Sang Entrepreneur yang Visioner* dalam www.awangfarokishak.com/ diakses pada tanggal 31 Januari 2012.

bawah dan berhasil menarik puluhan ribu anggota. Lembaga swadaya masyarakat ini juga menghimpun aspirasi di Kutim, apakah Awang Faroek masih dikehendaki memimpin Kutim. Ternyata mayoritas masyarakat, mulai dari kota sampai ke pelosok, mendukung kepemimpinan Awang Faroek dan siap memperjuangkannya.”⁶¹

Anggota KWKPP terdiri dari tokoh masyarakat, adat, agama, dan kader Gerdabangagri. KWKPP dibentuk satu setengah tahun sebelum Pilkada Kuti. Mereka mendesak AFI untuk bersedia dicalonkan sebagai Bupati Kutim. AFI mengatakan sebagai berikut:

“Ini bentuk tanggung jawab saya, karena setelah Kutim saya tinggalkan selama dua tahun, ternyata pembangunan tidak terlaksana dengan baik dan grand strategy Gerdabangagri yang merupakan pijakan pembangunan di Kutim tidak dijalankan. Itulah yang mendorong saya untuk kembali dan menerima permintaan masyarakat Kutim untuk memimpin daerah ini lagi.”⁶²

I. Menggalang Dukungan Parpol

Belajar dari kegagalan dalam pemilihan gubernur (2003), maka AFI mulai menggalang dukungan parpol besar. Sebab, tanpa dukungan parpol, maka dia akan mengalami kesulitan untuk menang dalam Pilkada (langsung). Oleh karena itu, langkah politik AFI berikutnya ialah melobi parpol besar sebagai pengusungnya dalam Pilkada. Sebab, syarat kontes-tansi kepala daerah diatur berdasar UU No. 32 tahun 2004 pasal 59 ayat 2, AFI membutuhkan dukungan minimal 15%

61 *Langkah yang Tertunda* dalam www.awangfaroekishak.com/ diakses pada tanggal 19 April 2012.

62 *Ibid.*, *Sang Entrepreneur yang Visioner*.

suara anggota DPRD untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Kutim.⁶³

Oleh karena itu, tim sukses mengadakan pendekatan kepada sembilan partai politik dalam rangka pencalonan AFI sebagai Bupati Kutim. Partai pendukung AFI dalam Pilkada 2005 antara lain PDI-P, PKB, PAN, PPP, PDS, PNBK, PIB, PKPB, dan Partai Pelopor. AFI berpasangan dengan Isran Noor (etnis Banjar). Tampaknya, AFI hanya diusung oleh gabungan partai kecil, maka strategi politik tim sukses untuk memenangkan kontestasi Pilkada Kutim dengan cara menginstrumentasi jaringan patronase.

J. Safari (*Blusukan*) dari Desa ke Desa

Tim sukses mengaktifkan jaringan patronase dalam masyarakat dengan cara safari dari desa ke desa. Empat bulan sebelum Pilkada dimulai, tim sukses sudah mengaktifkan jaringan patronase di 11 kecamatan Kutim yang terdiri dari 76 desa.

“Sejauh ini telah berdiri sekitar 17 posko AFI di seluruh kecamatan di Kutim. Pembagiannya, terdapat minimal satu posko dukungan untuk setiap pedesaan sampai ke tingkat RT. Bahkan untuk lebih mengefektifkan kinerja bagian humasnya, tim ini membekali anggotanya dengan kamera digital, laptop, dan fasilitas pendukung lainnya. Posko-posko itu belum termasuk posko pekerja, perusahaan dan multietnis secara spontan yang juga menyebar di seluruh Kutim,” tambah Hendrik, Ketua Kesekretariatan G-Centre.⁶⁴

63 UU No. 12 tahun 2008 pasal 59 ayat 2: “Partai politik atau gabungan parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.”

64 *Menengok Kesibukan Tim Sukses Calon Bupati Kutim*, dalam www.kaltimpost.web.id/ diakses pada tanggal 20 Juni 2011.

Kutipan dari *Kaltimpost* di atas menunjukkan dengan jelas bahwa jaringan patronase yang dirajut oleh AFI masih mengakar kuat sampai ke tingkat RT. AFI membutuhkan dukungan suara minimal 31% untuk menang dalam Pilkada Kutim 2005. Oleh karena itu, dia membentuk posko untuk memobilisasi dukungan kelompok multietnis.⁶⁵ Pendekatan multietnis berperan penting dalam rangka memobilisasi kelompok pendatang, seperti etnis Jawa, Batak, Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, dan Tionghoa.

Dengan kata lain, tim sukses memanfaatkan strategi mobilisasi etnis untuk menunjang kemenangan AFI. Tim sukses bersafari dari desa ke desa untuk bertemu dengan ketua adat, lurah, camat dan tokoh masyarakat yang merupakan klien AFI. Mereka sudah mengenal AFI melalui kebijakan revitalisasi pertanian dan sekolah gratis yang sudah mereka nikmati. Selain itu, AFI adalah bangsawan Kutai yang sudah berdedikasi membangun Kutim sehingga masyarakat sangat mendukungnya.

Untuk meyakinkan masyarakat agar memilihnya dalam Pilkada 2005, AFI mengaktifkan jaringan patronase yang sudah dirajut. Dia bersafari dari desa ke desa untuk bersilaturahmi dengan tokoh adat dan agama, sebelum kontestan lain berkampanye dalam Pilkada. Isu yang ditawarkan oleh AFI dalam kunjungan ke desa-desa tersebut ialah pengentasan kemiskinan dan pendidikan gratis dengan alokasi dana APBD sebesar 20%. Program pendidikan gratis dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas akan dilanjutkan. Selain itu, untuk menyejahterakan masyarakat, program AFI berfokus pada agrobisnis dengan mengaktifkan Gerdabangagri yang macet selama dua tahun.

65 Wawancara dengan AFI pada tanggal 11 Agustus 2009 di Samarinda.

Hasil Pilkada Kutim 2005 sudah dapat diprediksi bahwa AFI yang berpasangan dengan Isran Noor (etnis Banjar) akan unggul, karena dia sudah menguasai lebih dari 50% daerah pemilihan sebelum Pilkada dilangsungkan. Upaya tim sukses mengaktifkan patronase (memobilisasi massa) dengan cara memberikan bantuan sosial dan bersafari dari desa ke desa berdampak pada peningkatan dukungan suara terhadapnya. Hasil akhir perolehan suara Pilkada Kutim 2005, sebagai berikut AFI-Isran Noor memperoleh 66.192 suara atau sekitar 63%, disusul pasangan Mahyudin-Ardiansyah dengan perolehan 31.706 suara atau sekitar 30%, Abdal Nanang-Mujiono memperoleh 4.247 suara atau 4% dan Irysadi-Siti Nur Aeni memperoleh 1.416 suara atau sekitar 1%.⁶⁶

Dengan demikian, pasangan AFI-Isran Noor menang secara mutlak (63%). Hal tersebut menunjukkan bahwa dia masih memiliki basis massa yang kuat pada tataran pedesaan. Dalam sistem *one man, one vote, one value*, mobilisasi massa dengan cara mengaktifkan relasi patron-klien terbukti sangat efektif untuk memengaruhi pemilih yang masih terikat pada tradisi atau adat. Pengaruh ketua adat atau tokoh masyarakat masih kuat, anggota masyarakat akan memilih kontestan sesuai yang dipilih oleh ketua adat atau tokoh masyarakat.

66 Hasil Pilkada Kutim 2005, dalam www.suarakaryaonline.com/ diakses pada tanggal 21 Juni 2011. Kemenangan AFI secara mutlak (63%) membuktikan kuatnya jaringan patronase yang telah dibangun oleh tim sukses pada ranah massa. Selain itu, untuk menguatkan jaringan tersebut, AFI 'memupuknya' dengan bantuan sosial yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini—khususnya instrumentasi etnis Kutai dan Banjar yang merupakan penduduk asli Kaltim— tampaknya kurang diperhatikan oleh kandidat lain. Kandidat pesaing AFI sebagai kelompok pendatang merasa yakin akan menang, karena jumlah mereka mayoritas. Namun, dalam politik segala sesuatu bisa berubah sesuai kepentingan elite politik. Pesaing terkuat AFI, Mahyudin, memang pimpinan DPD Golkar Kutim dan petahana. Namun, dia lupa bahwa AFI adalah seniornya dan arsitek pemekaran Kutim. Masyarakat lebih dekat dengan AFI, karena dia telah berkarya nyata membangun Kutim.

Akhirnya, AFI dilantik kembali sebagai Bupati Kutim untuk kedua kalinya pada tanggal 13 Februari 2006.

BAB IV

AMBIVALENSI NALAR POLITIK: STUDI DUA PILKADA KALTIM (2003 dan 2008)

Pada Bab III, penulis telah memaparkan bagaimana seorang elite politik dihadapkan dengan dua kondisi yang tidak bisa dihindarinya. *Pertama*, penetapan sebagai bupati oleh Mendagri, dan *kedua*, Pilkada langsung. Implikasi AFI ditetapkan sebagai Bupati Kutim adalah timbulnya konflik antarelite. Namun, ketika ia mencalonkan diri dalam Pilkada langsung (bupati), konflik bisa diredam. Ia mencitrakan diri sebagai seorang demokrat yang menaati regulasi Undang-Undang Pilkada yang mengharuskan adanya dukungan parpol dan pemilihan dari masyarakat secara langsung. Namun, ia juga memanfaatkan nalar kebangsawannya dalam rangka mengikat batin masyarakat (dengan cara patronase). Menyikapi dua kondisi tersebut, ia memadukan dua nalar, yakni nalar politisi dan nalar aktivis/demokrat.

Pada Bab IV ini penulis akan memaparkan cara dua nalar di balik kemenangan elite dalam Pilkada Gubernur 2008 di Kaltim secara bersamaan. Pencampuran dua nalar ini mewujudkan dalam pemberian-penerimaan yang divonis sebagai tindakan *money politics*.

A. Fenomena Empiris tentang Praktik *Money Politics* dan Patronase

Selama dua tahun AFI merajut jalinan patronase dengan memberikan materi dan non-materi kepada masyarakat Kutim. Dia menganggap dirinya telah memiliki modal sosial yang kuat. Oleh karena itu, dia pun percaya diri untuk mengikuti kontestasi dalam pemilihan gubernur 2003 (tidak langsung). Dia juga mengandalkan pengalamannya selama 10 tahun sebagai anggota DPR dan lobi-lobi elite politik di ranah nasional. Oleh karena jaringan AFI secara nasional luas, maka dia yakin akan memenangkan pemilihan gubernur. Hal ini juga ditopang dengan kepemilikan modal finansialnya yang cukup untuk berkompetisi dalam kontestasi tersebut.

Namun, kalkulasi politik AFI tersebut meleset. Hal ini ditengarai dengan belum adanya dukungan parpol besar seperti Golkar atau PDI-P dalam parlemen. Dukungan parpol besar tersebut menentukan kemenangan, karena pemilihan gubernur berdasarkan Sidang Paripurna DPRD. Artinya, AFI memerlukan dukungan konkret anggota parlemen, karena tanpa mereka dia tidak akan terpilih sebagai kepala daerah. Tampaknya, dia hanya mengandalkan dukungan parpol kecil. Sementara itu, Syaukani selaku Ketua DPD Golkar Kaltim tidak memberikan dukungan terhadapnya. Demikian juga dengan PDI-P yang sudah memiliki kontestan tersendiri. Pesaing terberat AFI ialah pasangan Suwarna dan Yurnalis Ngayoh yang merupakan petahana yang didukung oleh Golkar dan Fraksi TNI. Menghadapi realita tersebut, AFI membentuk tim sukses dalam rangka pemenangan pemilihan Gubernur Kaltim. Tim sukses mendapat tugas utama melobi anggota DPRD agar mereka memberikan dukungan kepada AFI. Mereka berhasil melobi anggota PAN dan PKB, agar suara mereka tidak 'terjual' ke kontestan lain. Dukungan PAN dan

PKB terhadap AFI tidak gratis, tetapi berdasarkan transaksi politik.¹ Dalam hal ini AFI ‘membeli dukungan’ PKB dan PAN agar mencalonkan dirinya. Akhirnya, AFI berpasangan dengan Abu Thalib Chair yang didukung oleh PAN dan PKB memantapkan diri maju dalam Pilkada 2003.² Namun, upaya yang dilakukan oleh tim sukses terhadap anggota Golkar dan PDI-P kurang maksimal. “*Saya kalah dalam pemilihan gubernur 2003, karena kurang gizi,*” katanya.³

Istilah ‘kurang gizi’ yang disampaikan AFI menunjukkan bahwa dia kalah bersaing terhadap Suwarna karena faktor kurangnya ‘mahar politik’ yang diberikan kepada anggota DPRD. Suwarna selaku petahana memiliki relasi yang kuat terhadap anggota DPRD (Golkar dan PDI-P) dan memiliki modal yang besar. “*Semua kandidat dalam pemilihan Gubernur Kaltim 2003 melakukan tindakan money politics, hanya Awang kurang besar memberikan uang kepada anggota DPRD sehingga kalah terhadap Suwarna.*”⁴ kata salah satu anggota tim sukses.

Tampaknya, indikasi *money politics* dalam pemilihan Gubernur Kaltim 2003 semakin terkuak ketika tim sukses Suwarna memberikan uang kepada anggota DPP PDI-P, agar mereka mewajibkan kadernya mendukung Suwarna. Hal ini yang menyebabkan Theo Syafei mengajukan pengunduran diri, tetapi pengunduran diri Theo ditolak oleh pimpinan PDI-P. Kutipan di bawah ini memberikan gambaran tentang adanya praktik *money politics* di balik kemenangan Suwarna:

-
- 1 Menurut RTK (anggota tim sukses AFI), semua kontestan melakukan *money politics* dengan cara ‘membeli suara’ anggota DPRD.
 - 2 *Sang Entrepreneur yang Visioner* dalam www.awangfarokishak.com/ diakses pada tanggal 19 April 2012. Tidak terungkap jelas berapa jumlah uang yang diberikan tim sukses AFI kepada elite PKB dan PAN.
 - 3 *Wawancara* dengan AFI tanggal 11 Agustus 2009 di kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.
 - 4 *Wawancara* dengan RTK, anggota tim sukses AFI, pada Juni 2009 di Yogyakarta.

“Salah satu penyebab kekalahan Imam Mundjiat (PDI-P) diduga karena kedatangan Theo dan Agnita ke Surabaya, bertemu sebagian anggota F-PDI-P Kaltim. Keduanya mengaku diutus ketua umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputeri dengan menyampaikan bahwa F-PDI-P Kaltim harus mendukung Suwarna. Pasca-terpilihnya Suwarna sebagai Gubernur Kaltim, beredar foto copy tanda terima [yang] ditandatangani ketua DPRD yang juga Sekretaris DPD PDI-P Kaltim, Sukardi Jarwo Putro, yang menyebutkan menerima Rp 6 miliar dari Suwarna untuk dana operasional Theo-Agnita. Dan selanjutnya, kasus itu bergulir ke Mabes Polri.”⁵

Dari paparan koran Tempo di atas, tampak jelas adanya tindakan *money politics* yang dilakukan oleh tim sukses Suwarna untuk membeli dukungan anggota DPRD (PDI-P). Dukungan PDI-P terhadap Suwarna menentukan kemenangan dalam pemilihan gubernur sebab, semua suara anggota DPRD Golkar sudah dikuasai oleh Syaukani. Oleh karena itu, semua anggota DPRD Golkar dikarantina oleh Syaukani di Pulau Kemala dengan tujuan agar suara mereka tidak ‘terjual’ ke kontestan lain.⁶ Dalam menyikapi situasi seperti ini, sangat sulit bagi Awang dan tim sukses untuk mendapatkan suara 50% plus 1 untuk menang dalam pemilihan Gubernur Kaltim. Akhirnya, Sidang Paripurna DPRD Kaltim tanggal 2 Juni 2003 memutuskan pemilihan gubernur/wakil gubernur, dengan hasil sebagai berikut:

Suwarna Abdul Fatah dan Yurnalis Ngayoh mendapat 24 suara. AFI dan Abu Thalib Chair (PAN dan PKB) mendapat

5 “PDI Perjuangan Tolak Pengunduran Diri Theo Syafei” dalam www.korantempo.com/23 Juli 2003.

6 Wawancara dengan RTK, Juni 2009 di Yogyakarta.

14 suara. Imam Mundjiat dan Hifnie Syarkawie (PDI-P) mendapat 7 suara.⁷

Dengan adanya keputusan hasil Sidang Paripurna DPRD tersebut, maka Suwarna dan Yurnalis terpilih kembali sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2003-2008, karena telah memenuhi aturan pemilihan kepala daerah. Prediksi teoretis, pasangan AFI-Abu akan menang dalam pemilihan gubernur tersebut jika didukung Golkar. Meskipun dia berpengalaman dalam berpolitik dan hal ini dibuktikan dengan 10 tahun menjadi anggota DPR (1987-1992 dan 1992-1997) serta merupakan kader senior Golkar Kaltim, akan tetapi, pengalaman politik dan patronase yang sudah dirajutnya baik secara lokal maupun nasional belum mampu menandingi kekuatan Suwarna selaku petahana.

Lobi-lobi tim sukses Suwarna efektif, dan hal ini terwujud ketika para anggota DPRD Golkar dikarantina di pulau Kemala (Tenggarong). Syaukani selaku Ketua DPD Golkar memimpin langsung karantina anggota DPRD Golkar. Tindakan Syaukani tersebut sepertinya balas dendam terhadap AFI, karena AFI menginisiasi pemekaran Kutim yang dianggap merugikan. Selain itu, pertemuan antara tim sukses dengan anggota DPRD PDI-P di Batu-Malang sangat memengaruhi perolehan suara Suwarna. Para anggota DPRD tersebut diberi uang muka sebagai jaminan untuk memberikan dukungan terhadap Suwarna. Pertemuan tersebut jelas mengindikasikan adanya *money politics* sehingga menimbulkan polemik yang berkepanjangan.⁸

Untuk menelisik strategi pemenangan AFI pasca-kegagalan dalam pemilihan gubernur 2003, perlu kita pahami nalar elite

7 Suwarna Terpilih Jadi Gubernur Kaltim 2003-2008 dalam www.kaltim.go.id/2 Juni 2003.

8 "Theo Syafei dan Korupsi" dalam www.suarapembaruan.com/19 Juni 2003.

dalam memengaruhi perilaku masyarakat. Tampaknya, AFI telah belajar dari kegagalan pemilihan gubernur 2003 yang dilaksanakan berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD. Oleh karena itu, AFI mulai mempersiapkan diri dengan matang untuk berkontestasi dalam Pilkada (2008) yang dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung oleh masyarakat. Strategi yang ditempuh AFI dalam memengaruhi masyarakat pedalaman atau pesisir adalah dengan memanfaatkan nalar kebangsawannya. Sebab, pada umumnya masyarakat pedalaman dan pesisir masih sangat menghormati seorang bangsawan.

Agar kebangsawanan AFI berkharia di mata mereka, dia menggulirkan program sekolah gratis 12 tahun. AFI sebagai bangsawan ingin menjawab kebutuhan masyarakat. Program sekolah gratis 12 tahun ini membidik segmen kelompok menengah ke bawah, sebab jumlah mereka lebih dari 50%⁹ penduduk Kaltim. Program sekolah gratis 12 tahun ini hanya sebagai stimuli untuk memengaruhi masyarakat agar mereka tertarik pada AFI. Langkah konkret yang diterapkan AFI dalam memengaruhi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mengikat Patronase dengan Masyarakat Pedalaman dan Pesisir

Citra AFI agak pudar pasca-kekalahannya dalam pemilihan gubernur 2003. Dia menebusnya dengan tebar pesona melalui pemberian bantuan sosial ke masyarakat. Ketika AFI menjabat sebagai Bupati Kutim (2005), dia memanfaatkan fasilitas Pemda Kutim dan dana APBD dengan argumen menyejahterakan masyarakat. Sasaran patronase AFI adalah masyarakat pedalaman dan pesisir yang bermukim di 14 Kabupaten/Kota. AFI berupaya menguasai massa

9 BPS, *Kalimantan Timur dalam Angka 2007*.

melalui ormas yang didirikannya—KALIMA—dengan isu utama membebaskan masyarakat dari masalah kemiskinan, kebodohan, pengangguran, perusakan lingkungan, dan kesehatan.

AFI berupaya menguasai 50% suara penduduk yang berdiam di kabupaten. Untuk itu, ia memulai *blusukan* (bersafari) lebih awal satu tahun dibanding kandidat lain.¹⁰ Sebagian besar masyarakat Kaltim berdomisili di Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara, dan ia memulai penerapan sekolah gratis 12 tahun di Kutim. Setelah program ini berhasil, AFI *blusukan* ke Bontang dan Berau. Selanjutnya, dia bersafari dan memberikan dana bantuan sosial ke Tarakan, Nunukan, Bulungan, dan Malinau. Secara formal, AFI melakukan safari-safarinya itu selaku Ketua Dewan Pendidikan Kaltim. Namun, agenda sesungguhnya ialah merajut relasi patron-klien dengan cara bertemu langsung tokoh adat, agama, dan masyarakat. Dalam kesempatan-kesempatan itu, ia tidak hanya menyosialisasikan sekolah gratis 12 tahun¹¹, tetapi juga memberikan bantuan sosial berupa materi dan non-materi.

Tampaknya, strategi *blusukan* tersebut secara eksplisit bertujuan untuk menarik simpati masyarakat pedalaman dan pesisir dengan memanfaatkan pemberian materi dan isu sekolah gratis 12 tahun. Strategi ini tampaknya sangat cerdas karena dikemas dengan label pembangunan dan pemberian materi yang menjawab kebutuhan nyata. Hasil yang diharapkan dari *blusukan* ke desa-desa tersebut, mewujudnya citra AFI sebagai ‘putra daerah’ yang mampu membebaskan masyarakat Kaltim dari kemiskinan dan kebodohan. Tentu masyarakat tanpa curiga menerima kedatangan AFI sebagai

10 Wawancara dengan AFI di Samarinda.

11 Wawancara dengan AFI, tanggal 11 Agustus 2009 di Samarinda.

Ketua Dewan Pendidikan Kaltim yang menawarkan solusi dan bantuan nyata.

Blusukan AFI ke desa-desa tersebut dimaksudkan sebagai langkah awal sosialisasi pra-kampanye Pilkada Kaltim.¹² Dengan *blusukan* ke desa-desa, dapat diketahui kebutuhan nyata dan penerimaan masyarakat terhadapnya. Tampaknya, 80% masyarakat yang dikunjunginya merespons positif program sekolah gratis 12 tahun tersebut, seperti yang telah dilakukan di Kutim. Tidak ada kesulitan bagi AFI untuk memengaruhi masyarakat dengan isu sekolah gratis dan bantuan sosial.

2. Patronase dengan Ketua Adat

Oleh karena masyarakat pedalaman/pesisir masih terikat kuat dengan adat dan agama, maka AFI merajut relasi patron-klien dengan para tokoh tersebut. Pada umumnya, masyarakat masih menjunjung tinggi kekerabatan (komunal) dan nilai-nilai adat, yang bertentangan dengan Pilkada dengan sistem *one man, one vote, one value* yang mengedepankan pilihan individual. Norma yang berlaku dalam masyarakat ialah bahwa apa yang menjadi pilihan ketua adat atau agama, maka itulah yang akan menjadi pilihan mereka. Pilihan berbeda dengan pilihan ketua adat akan mendatangkan konflik atau sanksi pengucilan. Dengan pendekatan kekerabatan, AFI selaku bangsawan merajut relasi patron-klien terhadap ketua adat dan agama.

Tentunya dalam safari ke desa-desa tersebut, AFI didampingi tim KALIMA untuk bertemu tokoh adat, agama, atau masyarakat selama kurun waktu satu tahun.¹³ Tampaknya, apa yang dilakukan oleh AFI tersebut selaras dengan pandangan

12 *Ibid.*

13 *Wawancara* dengan AFI pada 11 Agustus 2009 di Samarinda.

Scott. Menurut Scott, untuk menginisiasi dan memelihara relasi patron-klien diperlukan tatap muka secara intensif. Tujuan dari pertemuan tatap muka tersebut ialah untuk mengenal lebih dekat elite kontestan dan sosialisasi program yang ditawarkan.¹⁴ Hal ini diterapkan dalam strategi pemenangan AFI. Dalam setiap safari ke desa-desa, diharapkan terjalin ikatan batin antara AFI dengan tokoh masyarakat. Symbolisasi adanya ikatan batin diwujudkan melalui pemberian bantuan sosial berupa uang dan barang sebagai tanda silaturahmi.

Ada empat sasaran yang dikunjungi oleh AFI dalam rangka menjalin relasi dengan tokoh adat atau agama. *Pertama*, safari ke kabupaten Berau dan kota Bontang. Kedua kabupaten tersebut merupakan daerah yang terdekat dengan Kutim. Berau terletak di sebelah utara Kutim dan Bontang di sebelah selatan Kutim. Oleh karena AFI bersafari atas nama Ketua Dewan Pendidikan Kaltim, maka langkah pertama dalam setiap kunjungannya adalah mendatangi kantor DPRD, bupati, Dewan Pendidikan Kabupaten, dan tokoh adat. Pada kunjungan ke DPRD, AFI memberikan himbauan agar DPRD membuat kebijakan mengalokasikan anggaran dana APBD sebesar 20% untuk pendidikan gratis bagi masyarakat. Sedangkan kunjungan ke bupati dan tokoh adat, isu yang disampaikan adalah pentingnya sekolah gratis selama 12 tahun bagi anak-anak. Hal ini hanya mungkin dilaksanakan bila AFI menjadi kepala daerah. AFI memohon dukungan tokoh adat dan para pemimpin daerah atas rencana pencalonannya sebagai Gubernur Kaltim. Untuk mengikat relasi antara tokoh adat dan agama dengan AFI, maka KALIMA memberikan materi. Dalam hal ini, AFI menginvestasikan 'hutang budi' kepada masyarakat. Ketika AFI mencalonkan diri dalam

¹⁴ *Op. cit.*, *Patron-Client Politics*, hlm. 91.

Pilkada, relasi patron-klien tersebut berubah menjadi dukungan suara baginya.

Kedua, safari ke Tarakan. Di kota inilah AFI dibesarkan. Dalam hal ini, AFI memanfaatkan relasi pertemanan sebagai modal sosial. Selain itu, banyak kerabat dan relasinya, juga kolega ayahnya bermukim di Tarakan sehingga kedatangannya dengan membawa misi pendidikan gratis disambut dengan tangan terbuka. Dari Tarakan, rombongan melanjutkan safari ke Nunukan, Bulungan, dan Malinau untuk menyosialisasikan sekolah gratis 12 tahun. Ketiga daerah tersebut merupakan daerah tertinggal dari segi pendidikan, ekonomi, sarana, dan prasarana. Tampaknya, kedatangan tim safari AFI membawa harapan baru, khususnya bantuan sosial dan pendidikan gratis. Seperti yang terjadi di Tarakan, rombongan juga disambut dengan ramah, karena apa yang mereka sampaikan merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Dalam setiap safari ke daerah AFI mengatakan, “*Kalau saya terpilih sebagai Gubernur Kaltim, maka saya akan menggratiskan biaya sekolah selama 12 tahun.*”¹⁵ Masyarakat Nunukan, Bulungan, dan Malinau merupakan basis masyarakat Dayak yang masih menjunjung tinggi kekerabatan dan pentingnya pendidikan. Oleh karena itu, AFI memanfaatkan budaya pemberian (uang, barang, dan jasa) dalam rangka mengikat batin Ketua Adat Dayak. Dalam sebuah upacara adat, AFI ‘diadati’. Konsekuensinya, seluruh masyarakat Dayak akan mendukungnya, dan dia harus konsisten memenuhi janjinya mewujudkan sekolah gratis 12 tahun serta membangun sarana dan prasarana.

Ketiga, safari ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Kutai Kartanegara merupakan tempat basis pendukung Syaukani (Golkar) yang menentang pemekaran Kutim.

15 *Ibid.*

Masyarakat Kutai Kartanegara sangat setia kepada Syaukani, sekalipun dia ditahan karena kasus korupsi. Mereka masih tetap setia dan menghendaki Syaukani tetap menjabat sebagai bupati. Kedatangan tim AFI tidak bisa dilakukan secara terbuka, karena AFI rival Syaukani. Kroni Syaukani tidak menghendaki upaya tim safari memengaruhi masyarakat Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, langkah yang ditempuh oleh AFI ialah mendatangi elite Kutai selaku patron untuk silaturahmi dan menyampaikan program yang telah diterapkan di Kutim (sekolah gratis dan Gerdabangagri). Selain itu, AFI juga mendatangi tokoh adat dan agama untuk silaturahmi dan sosialisasi program sekolah gratis.

Sebaliknya, safari AFI di Kabupaten Kutai Barat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tangan terbuka. Sebagian besar masyarakat Kutai Barat beretnis Dayak yang menghendaki adanya kemajuan daerahnya. Mereka sangat mendambakan adanya sekolah gratis 12 tahun di daerah. Mereka menginginkan program tersebut diterapkan secepatnya di Kabupaten Kutai Barat. Mereka ingin merasakan kemajuan pendidikan dan fasilitas pendidikan yang memadai, sehingga anak-anak dapat menempuh pendidikan tanpa kendala biaya. Pada silaturahmi kepada tokoh adat dan agama, tim KALIMA menyampaikan bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang dan barang dimaksudkan untuk mengikat batin mereka agar mendukung AFI dalam Pilkada.

Keempat, safari ke daerah Pasir, Penajam Paser Utara, dan Balikpapan. Di ketiga daerah tersebut, AFI menyosialisasikan kepada tokoh adat Pasir, Bugis, dan kelompok pendatang, bila dia terpilih sebagai Gubernur Kaltim, maka sekolah gratis 12 tahun akan diterapkan di seluruh Kaltim seperti yang dia lakukan di Kutim. AFI, selaku Ketua DPPKT, menghimbau DPRD agar menganggarkan dana APBD sebesar 20% untuk

pendidikan masyarakat Kaltim. “Diterapkannya Wajib Belajar 12 tahun, karena Kutim merasa mampu untuk itu. Ini juga untuk meningkatkan daya saing kita dengan daerah lain, baik di dalam maupun di luar Kaltim,”¹⁶ katanya ketika ditanya wartawan tentang pentingnya Wajib Belajar 12 tahun bagi masyarakat.

Ternyata, safari-safari yang dilakukan AFI ke kabupaten/kota tersebut berdampak positif: DPRD Kaltim merespons dan mengalokasikan anggaran APBD sebesar 20% atau sekitar Rp. 700 miliar (2007), yang totalnya mencapai Rp. 3,9 triliun.¹⁷ Dengan adanya inisiatif yang positif dari DPRD, maka pelaksanaan sekolah gratis 12 tahun di Kaltim bisa dilaksanakan.

Argumen yang sering diajukan AFI ialah, kalau semua kabupaten telah menerapkan wajib belajar 12 tahun dan mengalokasikan dana 20% dari APBD, maka sumber daya manusia Kaltim mampu bersaing terhadap kelompok pendatang. Masyarakat akan cerdas dan sejahtera bila pendidikan mereka tinggi. AFI menceritakan kepada wartawan sebagai berikut “*Karena memang cukup ironis, daerah kaya sumber daya alam, tapi tak bisa mengelola sumber daya manusia dengan baik.*”¹⁸ Di balik pernyataan ini, terkandung maksud bahwa dialah ‘putera daerah’ yang memahami dunia pendidikan dan layak untuk dipilih sebagai kepala daerah.

Sebenarnya, *blusukan* ke masyarakat pedalaman/pesisir tersebut dalam rangka inisiasi relasi patron-klien. AFI menawarkan solusi mengatasi kebodohan dengan sekolah gratis 12 tahun. Selain itu, secara konkret ia memberi bantuan sosial

16 *Pendidikan untuk Semua* dalam www.awangfaroekishak.com/ diakses pada tanggal 31 Januari 2012.

17 *Ibid.*

18 *Ibid.*

berupa pembangunan rumah ibadah, sarana, dan prasarana di desa. Simbolisasi ikatan batin dalam wujud pemberian bantuan tersebut merupakan investasi politik yang kelak dimanfaatkannya untuk memobilisasi massa dalam Pilkada.

3. Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Kendala terbesar yang dihadapi oleh AFI ialah adanya isolasi geografis masyarakat Kaltim. Hal ini mengingat kondisi geografis Kaltim sangat unik, yakni bahwa sebagian besar daerahnya dipenuhi hutan. Sebagian daerah di Kaltim berupa perbukitan dengan pusat pemerintahan di pinggiriran Sungai Mahakam. Pada umumnya, penduduk Kaltim tinggal di perkotaan, tetapi masih banyak yang menetap di pedalaman atau perbatasan dan sulit dijangkau melalui transportasi darat. Dengan memahami komposisi penduduk secara geografis tersebut, AFI dapat memahami keragaman kebutuhan masyarakat. Dengan memahami kebutuhan masing-masing daerah, maka AFI dapat menawarkan program yang sesuai kebutuhan masyarakat. Dari paparan kondisi geografis tersebut, tampaknya masyarakat Kaltim terbagi menjadi tiga kelompok, *pertama*, masyarakat petani atau peladang. Masyarakat petani atau peladang banyak bermukim di Nunukan, Bulungan, Berau, dan daerah transmigrasi di Kutai Kartanegara. Masyarakat petani atau peladang masih menjunjung tinggi tradisi dan kekerabatan. Dengan adanya budaya kekerabatan, budaya patronase (pemberian) mendapat lahan subur untuk berkembang.

Kebutuhan utama para petani atau peladang ialah terpenuhinya bibit, pupuk, modal usaha, dan penjualan hasil panen. Selain itu, mereka membutuhkan perbaikan ekonomi keluarga, khususnya untuk menyekolahkan anak. Pada umumnya, anak-anak yang tinggal di pedalaman tidak berpendidikan,

karena kurangnya tenaga guru dan sarana pendidikan.¹⁹ Masyarakat petani, peladang atau nelayan sangat terbuka terhadap pemberian bantuan. Siapa saja yang memberikan bantuan konkret untuk perbaikan ekonomi akan diterima dan didukung. Oleh karena itu, fokus pertama AFI untuk memengaruhi massa daerah pinggiran ialah dengan cara memberikan tanah, sertifikat, benih, kemudahan mendapatkan modal, dan proteksi hasil panen.

Kedua, masyarakat perkotaan. Pada umumnya, masyarakat kota berprofesi sebagai pekerja tambang, PNS, atau wiraswasta. Mereka tinggal di kota (industri) seperti Tarakan, Bontang, Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Mereka cenderung berpikir rasional, individualistis, dan menginginkan pemimpin yang mampu membawa perubahan ekonomi secara konkret. Pada umumnya, penduduk kota kurang memperhatikan faktor etnisitas dan agama kontestan. Oleh karena masyarakat kota berpendidikan tinggi, mereka cenderung berpikir rasional dan kritis. Dalam menentukan sikap terhadap kontestan, mereka lebih banyak dipengaruhi opini media elektronik dan cetak. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan AFI untuk memengaruhi masyarakat kota ialah dengan merekayasa adanya ‘musuh bersama’. Dengan adanya isu ‘musuh bersama’ diharapkan akan muncul kebutuhan ‘rasa kekitaan’, dengan penawaran diri AFI sebagai *problem solver* atas masalah mereka.

19 Masyarakat yang tinggal di pedalaman pada umumnya kekurangan guru, buku, dan gedung sekolah yang layak. Dalam mengajar, guru sering merangkap lebih dari satu kelas. Selain itu, kesejahteraan mereka juga kurang diperhatikan. Untuk menafkahi hidup sehari-hari seorang guru harus bercocok tanam dengan hasil panen untuk makan sehari-hari. Biasanya, murid-murid sepulang sekolah diminta membantu guru di sawah.

Gambar 4.1. Peta Kalimantan Timur



Ketiga, masyarakat pendatang. Mereka pada umumnya tinggal di daerah tambang, seperti Kutai Kartanegara, Bontang, Balikpapan, Tarakan, dan Samarinda. Secara sosial, mereka tersekat-sekat dalam berbagai paguyuban kelompok etnis dan cenderung kurang menyatu dengan masyarakat lokal. Mereka membawa nilai-nilai budaya asal ke dalam masyarakat. Hal ini ditengarai dengan hadirnya warung makan khas daerah, kesenian daerah, perkumpulan daerah, dan acara budaya. Kelompok pendatang pada umumnya memiliki pendidikan dan keterampilan yang lebih dibanding penduduk asli. Dalam menyikapi kontestan, mereka cenderung memperhatikan apakah kontestan mampu mendukung keragaman etnis dan memperbaiki ekonomi secara konkret ataukah tidak. Mereka menghendaki perubahan nyata, bukan janji-janji. Oleh karena itu, jejak rekam kontestan sangat memengaruhi keputusan mereka. AFI rajin *blusukan* menemui ketua paguyuban dan

memberikan bantuan berupa uang dan barang. Tawaran program konkret AFI terhadap masyarakat pendatang berupa jaminan atas kelancaran bisnis dan rasa nyaman tinggal di Kaltim.²⁰

B. Nalar Aktivistis: Dilema Mahar Politik

Untuk mencalonkan diri dalam Pilkada, seorang kontestan harus mendapatkan dukungan minimal 15% anggota DPRD. Dukungan sebesar itu dapat diperoleh dengan mudah apabila seseorang menjadi calon dari parpol besar. Karena AFI tidak dicalonkan parpol besar seperti Golkar atau PDI-P, maka dia dihadapkan dengan realita yang sama pada Pilkada 2003. Di satu sisi, dia membutuhkan dukungan minimal sehingga harus membayar ‘mahar politik’, dan di sisi lain dia sadar bahwa pemberian ‘mahar politik’ melanggar undang-undang yang berlaku.

Sementara itu, hasil Pemilu 2004 di Kaltim menempatkan kader Golkar pada posisi pertama dengan 13 kursi di DPRD. Pada posisi kedua ditempati kader PDI-P dengan tujuh kursi, PPP memperoleh enam kursi, PAN memperoleh lima kursi, dan PKS memperoleh empat kursi. Hasil Pemilu anggota DPRD periode 2004-2009 selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Kekuatan Partai Politik di DPRD Kaltim 2004-2009

No.	Partai Politik	Periode 2004-2009	Ketua Fraksi
1.	Golkar	13 kursi	Hatta Zainal
2.	Demokrat	2 kursi	Wibowo Handoko
3.	PDI-P	7 kursi	Sudarno
4.	PKS	4 kursi	Zainal Haq
5.	PPP	6 kursi	Kasriyah

²⁰ Wawancara dengan AFI di Samarinda.

No.	Partai Politik	Periode 2004-2009	Ketua Fraksi
6.	PAN	5 kursi	Darlis Pattalongi (PAN-Hanura)
7.	Patriot	2 kursi	Andi Harun (Patriot-PDK-PBB)
8.	PDS	1 kursi	Syaifuddin (PDS-Gerindra)
9.	PDK	1 kursi	
10.	PBB	1 kursi	
11.	Gerindra	Belum ikut Pemilu	
12.	Hanura	Belum ikut Pemilu	
13.	PKB	3 kursi	
TOTAL		45 kursi	

Sumber: KPUD Kalimantan Timur, 2004

Dari paparan Tabel 4.1. di atas, tampak bahwa peluang AFI dalam kontestasi tergantung dukungan gabungan parpol kecil, di antaranya PPP, PAN, PDS, Demokrat, PDK, PBB, dan PKB, karena Golkar, PDI-P, dan PKS sudah memiliki kontestan tersendiri. Untuk mendapatkan dukungan gabungan parpol tersebut, tim sukses mengadakan 'transaksi politik'.²¹ Memang tidak terungkap ke ranah publik berapa uang yang diberikan tim sukses kepada elite partai pendukung karena transaksi tersebut berlangsung secara tersembunyi.

21 Menurut Rinakit, dana yang dibutuhkan untuk menjadi gubernur berkisar Rp. 50-100 miliar, dengan asumsi tersebut 'pembelian' dukungan parpol menurut penulis berkisar antara Rp.1-5 miliar. Pertanyaan kritis yang patut diajukan: dari mana sumber dana AFI dalam Pilkada 2008? Tim sukses AFI yang kecewa terhadapnya membocorkan bahwa salah satu sumber dana berasal dari para pengusaha yang memiliki investasi di Kaltim. Hal ini terindikasi pasca AFI terpilih sebagai gubernur, dia menerapkan mega proyek pembangunan, yakni jalan tol Samarinda-Balikpapan, pelabuhan Internasional Maloy, Kaltim Airline, pembangunan Bandara Sepinggan, dan lain-lain.

Setelah satu tahun bersafari ke daerah-daerah, tiba saatnya AFI menguasai masyarakat Samarinda. AFI mencari waktu yang tepat untuk merekayasa opini masyarakat Samarinda dan sekitarnya. Diperlukan persiapan yang matang, karena persaingan antarelite lokal sangat ketat. Pesaing terberat Awang dalam Pilkada 2008 adalah pasangan Amins-Hadi. Amins sebagai Walikota Samarinda memiliki jaringan birokrasi dan basis massa pendukung yang kuat. Selain itu, Amins didukung oleh kelompok Bugis yang menguasai sentra ekonomi dan transportasi di Samarinda. Sedangkan Hadi merupakan figur tokoh PKS yang juga memiliki basis massa yang kuat di Samarinda.

Selain pasangan Amins-Hadi, kuda hitam bagi Awang adalah Nusyirwan yang merupakan koleganya dalam KALIMA, tetapi dia keluar dan mencalonkan diri sebagai kontestan Gubernur dengan dukungan PDI-P, komunitas Banjar, dan Jawa. Untuk menginisiasi adanya 'musuh bersama', Awang merekayasa opini publik melalui media cetak dan elektronik dengan memunculkan isu kemiskinan, kebodohan, dan penjarahan sumber daya alam (SDA). AFI ingin menginisiasi adanya 'musuh bersama', agar terwujud 'rasa kekitaan' atau senasib sepenanggungan. Kondisi masyarakat kota direkayasa seolah-olah tidak berdaya menghadapi kemiskinan, kebodohan, dan penjarahan hasil SDA oleh kelompok pendatang. Masyarakat membutuhkan solusi yang tepat dan AFI sebagai 'putra daerah' menawarkan program konkret beasiswa sekolah 12 tahun seperti yang telah dilakukannya di Kutim.

AFI prihatin atas kebodohan dan kemiskinan yang masih banyak dialami masyarakat Kaltim. Menurutnya, penduduk miskin di Kaltim mencapai 300 ribu jiwa lebih pada tahun

2004. Kalau hal ini tidak segera diatasi,²² maka kemiskinan akan meningkat setiap tahun. Ironinya penduduk miskin banyak bermukim di daerah yang kaya SDA, seperti kabupaten Kutai Kartanegara jumlah penduduk miskin mencapai 20%.²³ Hal ini mengindikasikan bahwa daerah ini kaya SDA, akan tetapi kekayaan alam dieksplorasi oleh para pengusaha dari luar Kaltim tanpa disertai pemberdayaan masyarakat, sehingga menimbulkan kemiskinan.

Memperhatikan data BPS 2007 tentang tingkat kemiskinan di Kaltim tersebut, tampaknya ada tiga Kabupaten/Kota yang menduduki peringkat tiga teratas, yakni: Kutai Kartanegara, Pasir, dan Samarinda. Oleh karena itu, strategi AFI dalam memengaruhi massa di tiga daerah tersebut dengan cara membagi-bagikan materi dan non-materi. Pemberian materi dan non-materi dikemas melalui dana bantuan sosial, sehingga terkesan kehadiran AFI sebagai bangsawan yang dermawan dan ‘putra daerah’ yang peduli terhadap masyarakat. Selain itu, AFI juga menjalin relasi patron-klien terhadap tokoh adat dan agama yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat.

Untuk memobilisasi massa perkotaan, AFI memerlukan adanya ‘musuh bersama’ yang jelas dan dirumuskan secara konkret. Dengan adanya ‘musuh bersama’ yang direkayasa sedemikian rupa, maka AFI dengan mudah memanfaatkan pemberian. Selain itu, dengan dimunculkannya isu penjarahan SDA oleh kelompok pendatang—mereka seperti telah menemukan *niche* (rasa kekitaan) yang senasib sepenanggungan. Masyarakat sudah mulai resah dengan semakin maraknya dekadensi moral, kemiskinan, kebodohan, dan menurunnya kesejahteraan sebagai dampak ekspansi kelompok pendatang.

22 Awang Faroek Ishak, *Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kalimantan Timur 2008-2013*.

23 *Ibid.*; BPS, *Kalimantan Timur dalam Angka 2007*.

Pemahaman masyarakat terhadap kelompok pendatang yang diidentikkan ‘penjarah’ penulis temukan melalui wawancara dengan wartawan, aktivis LSM dan pekerja tambang yang semuanya penduduk asli atau mereka yang sudah lahir dan menetap di Kaltim. Ungkapan yang sering dilontarkan oleh masyarakat yang penulis temui ialah, “Orang Jawa (*militer*) telah menjarah kekayaan alam Kaltim” dan “Orang Jakarta mengeruk kekayaan alam Kaltim.”²⁴ Ungkapan seperti ini sudah terbiasa terdengar dalam percakapan sehari-hari, tetapi mereka mengendapkannya dalam memori dan alam bawah sadar. Temuan penulis tentang citra kelompok pendatang yang diidentifikasi dengan ‘penjarah’ bertendensi negatif.

Dengan adanya isu ‘penjarah’ dalam memori masyarakat, maka tim sukses mengolah isu ini menjadi ‘musuh bersama’. Sebenarnya, isu adanya ‘musuh bersama’ tersebut merupakan rekayasa opini Dewan Pakar yang dibentuk AFI. Anggota Dewan Pakar terdiri dari para cendekiawan dengan tugas utama merancang suatu konsep gerakan Kaltim Bangkit.²⁵ Embrio gerakan Kaltim Bangkit ini sudah dirintis dari Kutim dengan program unggulan sekolah gratis 12 tahun dan AFI mencitrakan diri sebagai *problem solver*.

Esensi dari gerakan Kaltim bangkit ialah bangkitnya ‘putra daerah’ untuk merengkuh kekuasaan yang selama ini didominasi oleh militer (etnis Jawa). Untuk mengokohkan posisi AFI sebagai calon gubernur, diperlukan kepeloporannya dalam mengentaskan kemiskinan dan keterpurukan secara konkret. Selain itu, Dewan Pakar merancang suatu ormas yang dinamakan KALIMA. Sebenarnya embrio KALIMA

24 *Loc.cit.*, Wawancara dengan Rudy Koesnandar. Diskusi kelompok aktivis LSM Perempuan tanggal 13 Agustus 2009 di Samarinda Seberang. Diskusi kelompok dengan mahasiswa Kutai 26 Agustus 2009 di Yogyakarta.

25 *Op.cit.*, wawancara dengan AFI dan Arifin.

sudah dibentuk sejak AFI merintis karir sebagai Bupati Kutim. Adapun visi KALIMA adalah “*Kalimantan Timur Sejahtera 2015, dengan terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kaltim yang bertumpu pada pengembangan sumber daya terbarukan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana.*”²⁶

Dari kutipan visi KALIMA tersebut tampak jelas bahwa AFI menargetkan masyarakat Kaltim akan sejahtera pada tahun 2015. Visi tersebut menjawab permasalahan kemiskinan, kebodohan, penjarahan SDA, dan kesehatan. Namun, AFI menyadari SDA yang berbasis fosil tumbuhan tidak dapat diperbaharui, sehingga dia memfokuskan pada sumber daya yang terbarukan (pertanian).

Pada mulanya KALIMA hanya bersifat elitis, tetapi dalam perkembangannya KALIMA menjadi ormas yang menjabarkan program AFI.²⁷ KALIMA adalah ormas yang berfokus pada lima hal, yakni meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, memberantas kemiskinan, memberantas kobodohan, memberi kesempatan kerja, dan kesehatan. Yang menarik dalam pendirian KALIMA ini, ditampilkannya isu krusial yang menjawab kebutuhan masyarakat²⁸ perkotaan. Kelima isu yang ditawarkan oleh KALIMA tersebut mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat kota.

Tampaknya, Dewan Pakar yang merancang KALIMA tersebut ingin mencitrakan AFI senasib dan sepenenderitaan dengan masyarakat, karena dizalimi oleh kelompok pendatang yang ‘menjarah’ kekayaan alam Kaltim. Dalam konteks ini,

26 *Visi dan Misi KALIMA* dalam www.awangfaroekishak.com.

27 Indikasi perubahan dari KALIMA yang bersifat elitis menjadi kekuatan ormas dapat dibaca dengan lengkap dalam www.awangfaroekishak.com

28 Ormas KALIMA dalam www.awangfaroekishak.com/diakses pada tanggal 18 Februari 2012. Hal ini semakin menguatkan argumen penulis bahwa strategi AFI untuk menduduki kota berbeda dengan strategi memengaruhi daerah pingiran.

AFI diposisikan sebagai figur yang mampu mengatasi masalah moral, kemiskinan, kebodohan, menciptakan lapangan kerja, dan kesehatan. Dengan kata lain, AFI direkayasa sebagai *problem solver* atas permasalahan yang dihadapi masyarakat kota.

Ormas KALIMA dideklarasikan pada tanggal 24 Maret 2007 oleh 34 orang yang terdiri dari pendiri dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah. Pendiri KALIMA terdiri dari enam orang, yakni Awang Farouk Ishak, Prof. Dr. H. Daddy Ruchiyati, Prof. Dr. H. Siti Muri'ah, Ronald Lolang, H. Sapari, dan Anjar Wantara.²⁹ Dari keenam pendiri tersebut, pengaruh AFI dan kelompok cendekiawan Unmul sangat menonjol, sebagaimana penulis paparkan dalam Bab II bahwa Awang dirinya memiliki relasi patron-klien yang kuat terhadap cendekiawan Unmul dan Untag, karena dia pernah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi.³⁰ Relasi patron-klien antara AFI dengan para cendekiawan Unmul yang telah dirajut sejak muda diinstrumentasinya dalam rangka merengkuh kekuasaan.

Untuk menindaklanjuti rajutan patronase yang telah dibentuk AFI di pedalaman dan pesisir, maka dibentuklah kepengurusan KALIMA. Agar kepengurusan KALIMA efektif bekerja, maka mereka diberikan dana, barang, dan fasilitas kantor. Ada sinyalemen bahwa bantuan yang digunakan oleh KALIMA menggunakan fasilitas Pemda dan dana para pengusaha yang tidak dilaporkan ke KPUD. Hal ini terungkap melalui aksi demonstrasi pasca terpilihnya AFI sebagai gubernur; salah satu tokoh demonstran yang tidak mendapatkan proyek pembangunan yang dijanjikan oleh AFI.

29 *Ibid.*

30 *Op. cit.*, Bab III Jejak Rekam AFI.

Mereka kecewa kepada AFI yang dinilai lebih memprioritaskan pengusaha dari luar Kaltim daripada pengusaha lokal.³¹

Dengan demikian, KALIMA bukan sekadar gerakan sosial, tetapi lebih cenderung sebagai 'kendaraan politik' AFI dalam rangka pemenangan Pilkada 2008.³² Praktik pemberian yang diterapkan oleh AFI dilakukan bersamaan dengan inisiasi relasi patron-klien yang diorganisir secara struktural melalui ormas KALIMA. Setelah sosialisasi KALIMA sebulan berlangsung melalui media massa, maka masyarakat mulai mengenal AFI secara dekat. Praktik pemberian dilakukan oleh tim KALIMA, khususnya untuk membiayai operasional kantor dari tingkat provinsi sampai ke desa-desa. Bentuk pemberian uang dimaksudkan untuk mengganti uang lelah atau transport para relawan. Selain itu, untuk menarik simpati masyarakat, KALIMA mengadakan bakti sosial dan membagi-bagikan pengobatan gratis, sembako, dan kaus.

Untuk mendapatkan legitimasi masyarakat, AFI memerlukan dukungan semua kelompok etnis dan agama di Kaltim. Yang menjadi permasalahannya, AFI hanya didukung oleh etnis Kutai dan Banjar yang bermukim di Kutim, Kubar, dan Kutai Kartanegara. Kalau AFI hanya mengandalkan modal sosial di Kutim saja, maka peluang untuk memenangkan

31 *Dana Kampanye AFI* dalam www.jawapos.com/ diakses pada tanggal 20 Juni 2011. Dari temuan penulis di lapangan tampaknya dana kampanye AFI masih 'misterius'. Hal ini terbukti dengan laporan kekayaan AFI kepada KPK yang tidak mencapai Rp. 15 miliar, tetapi biaya kampanye mencapai puluhan miliar rupiah. Dari mana datangnya dana bantuan sosial kepada masyarakat? Pada waktu AFI menjabat Bupati Kutim dana bansos berasal dari APBD. Namun, pada saat AFI kampanye Pilkada 2008, darimana dananya? Menurut pengakuan anggota tim suksesnya AFI mendapatkan dana dari pengusaha, tetapi tidak dilaporkan ke KPUD Kaltim. Lih. *Awang Faroek di demo Timesnya* dalam www.korankaltim.com/ diakses pada tanggal 20 Juni 2011. Pasca kemenangan AFI dalam Pilkada salah satu anggota tim sukses tidak mendapatkan proyek pembangunan, mereka yang tidak mendapat proyek dari AFI mengadakan demonstrasi menuntut janji AFI pada saat kampanye.

32 *Ibid.*, *Organisasi KALIMA*.

kontestasi dalam Pilkada 2008 sangatlah kecil, karena mayoritas penduduk Kaltim bermukim di Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Bontang, dan Tarakan. Oleh karena itu, dimanfaatkannya isu etnis dan agama agar dia tampil sebagai figur pemersatu yang membawa kebangkitan Kaltim.

Tim sukses berupaya mencari dukungan dari semua elemen kelompok pendatang yang mayoritas berdomisili di kota. Praktik pemberian dilakukan dengan cara memberikan bantuan dana pembangunan dan sejumlah uang untuk kegiatan organisasi paguyuban etnis. Menurut pengakuan AFI hampir semua kelompok pendatang memberikan dukungan kepadanya.³³ Tentunya dukungan kelompok pendatang seperti etnis Jawa dan Bugis/Makassar terhadapnya tidak gratis. Mereka mau memberikan dukungan kepada AFI, kalau ada 'transaksi politik' yang konkret. Kelompok etnis Jawa membutuhkan rasa aman dan kemudahan dalam bisnis di Kaltim. Posisi orang Jawa di perusahaan agak terganggu dengan munculnya isu sentimen 'anti Jawa' yang disebut sebagai 'penjarah' SDA.

Sementara itu kelompok Bugis/Makassar membutuhkan jaminan kelancaran bisnis mereka di Kaltim. Oleh karena pesaing pasangan AFI-Amins dari etnis Bugis, maka tim sukses berupaya merebut simpati dengan memberikan bantuan dana sosial kepada kelompok Bugis/Makassar. Hal yang tampak ke permukaan adalah bahwa tim sukses memberikan bantuan sosial dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, acara keagamaan, dan pembiayaan paguyuban Bugis/Makassar. Tampaknya, pendekatan terhadap kelompok etnis dalam rangka memperoleh dukungan massa baik melalui tokoh adat maupun agama efektif dimanfaatkan oleh AFI.

33 *Wawancara* dengan AFI tanggal 11 Agustus 2001 di Samarinda.

Sebenarnya AFI memanfaatkan kelompok etnis dengan cara mobilisasi paguyuban-paguyuban yang tersebar di seluruh Kaltim.³⁴ Paguyuban etnis biasanya menjadi tempat yang nyaman bagi pendatang, karena mereka merasa nyaman (*niche*) hidup sesuai dengan budaya, adat, dan agama yang sama di perantauan. Pemanfaatan isu etnis sebagai bagian dari strategi politik untuk memobilisasi massa dalam mendukung kontesannya tampaknya efektif.³⁵ Berikut penyebaran penduduk Kaltim berdasarkan etnis dipaparkan melalui Tabel 1.5:

Tabel 4.2. Komposisi Penduduk Kaltim Berdasarkan Kelompok Etnis

No.	Kabupaten/ Kota	Jawa	Dayak	Banjar	Bugis	Kutai	Total
1.	Pasir	82.021	7.262	32.323	54.953	860	177.419
2.	Kutai Barat	14.424	78.681	6.658	5.242	22.297	127.302
3.	Kutai	122.105	19.026	57.506	68.459	118.328	385.424
4.	Kutai Timur	37.503	14.593	11.380	24.192	36.934	124.603
5.	Berau	26.031	15.059	9.659	26.210	979	77.938
6.	Malinau	1.327	26.081	490	1.207	20	29.125
7.	Bulungan	16.873	27.499	3.315	10.839	188	58.714
8.	Nunukan	5.131	29.783	1.124	34.574	55	70.667
9.	Balikpapan	163.281	1.866	63.010	83.613	2.759	314.529
10.	Samarinda	183.195	10.725	140.761	68.536	39.315	442.532
11.	Tarakan	29.881	10.690	8.766	39.264	334	88.935
12.	Bontang	36.428	599	5.328	28.677	2.760	73.792
Jumlah Total		718.200 (36%)	241.864 (12%)	340.320 (17%)	445.766 (22%)	244.829 (12%)	1.990.979 (99%)

Sumber: Biro Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2003³⁶

34 Wawancara dengan AFI, tanggal 11 Agustus 2009 di Samarinda. Menurut AFI, dia mendekati 24 paguyuban etnis yang ada di Kaltim. Semua anggota paguyuban tersebut mendukung AFI dalam Pilkada 2008. Tentu dukungan mereka terhadap AFI tidak gratis; tim sukses AFI memberikan dana sosial dan bantuan bagi paguyuban tersebut.

35 *Ibid.*, AFI memanfaatkan budaya pemberian dengan cara memberikan sekolah gratis 12 tahun, bantuan sosial, dan pembangunan.

36 Penulis telah melacak data Kaltim dalam angka 2014 yang diterbitkan Bapeda Kaltim, tetapi tidak terdapat komposisi penduduk berdasar etnis. Pertumbuhan penduduk Kaltim

Tabel 4.2. di atas memaparkan kelompok etnis Jawa berjumlah 718.200 jiwa, mereka pada umumnya bermukim di Samarinda (183.195 jiwa), Balikpapan (163.281 jiwa), dan Kutai (122.105 jiwa). Selain menjangkau kelompok pendatang, AFI berupaya memanfaatkan ketermarginalan etnis Dayak di era Orde Baru. Tim sukses berupaya mencitrakan AFI sebagai figur yang terbuka terhadap semua kelompok etnis, baik penduduk asli maupun pendatang. “*Kaltim untuk Semua*” menjadi jargon AFI dalam rangka merangkul semua kelompok etnis.

Mencermati keragaman suku dan sebaran geografis tersebut, AFI menyikapinya dengan cara *blusukan* ke desa-desa. Dalam setiap *blusukan* tersebut, AFI memberikan bantuan berupa barang sebagai tanda silaturahmi, agar terjadi ‘ikatan batin’. Selain itu, AFI menyosialisasikan sekolah gratis 12 tahun yang akan terealisasi kalau dia terpilih sebagai gubernur. Oleh karena pesaing AFI memanfaatkan agama, maka dia memilih Farid Wadjdy sebagai calon wakil gubernur. Figur Farid sangat dikenal sebagai tokoh agama di Kaltim dan tidak diragukan integritasnya. Selain itu, Farid berasal dari keluarga NU yang sangat berpengaruh di Kaltim. Tim AFI merekayasa figur Farid, untuk menandingi Hadi tokoh PKS dari keluarga tokoh Jawa yang dikenal luas oleh masyarakat Kaltim.

Tampaknya, massa NU banyak yang mendukung AFI-Farid, dibanding pasangan Amins-Hadi (AHAD). Sebaliknya, kelompok Muhammadiyah cenderung mendukung pasangan AHAD, karena Hadi adalah ketua PKS di Samarinda.

setiap tahun berjumlah 100 ribu jiwa (2011-2013).

Sementara itu, kelompok Katholik dan Kristen cenderung memberikan suaranya kepada AFI daripada ke AHAD.³⁷

Setelah KALIMA merekayasa isu ‘musuh bersama’ dan melakukan silaturahmi ke tokoh agama dan adat, maka langkah berikutnya ialah menumbuhkan ‘rasa kekitaan’. Rasa kekitaan ini perlu direkayasa, agar selaras dengan pencitraan AFI sebagai ‘bapak pembangunan’ yang dermawan dan terbuka untuk semua kelompok etnis (masyarakat). Rasa kekitaan dibutuhkan oleh AFI sebagai modal sosial untuk melegitimasi dirinya. Rasa kekitaan tampak dalam alinea pertama naskah terbentuknya KALIMA yang dimulai dengan kalimat, sebagai berikut:

“Pembangunan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, harus sejalan dengan upaya memelihara kelestarian sumber daya alam. Inilah paradigma pembangunan yang harus kita kembangkan. Kalimantan Timur merupakan salah satu bagian dari wilayah Indonesia dengan kepemilikan sumber daya alam yang melimpah ruah, namun ironisnya angka kemiskinan di wilayah ini masih tinggi seiring dengan merosotnya nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang ditandai dengan semakin maraknya dekadensi moral di tengah masyarakat. Rendahnya kualitas kesehatan rakyat mengiringi rendahnya peringkat dan kualitas pendidikan merupakan ciri khas gambaran kemiskinan yang terjadi. Hal semacam ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama berkepanjangan maka harus segera diatasi.”³⁸

37 Isu kampanye AHAD cenderung sektarian dan hanya mementingkan kelompok tertentu. Maka, banyak orang Kristen dan Katholik mendukung AFI yang mengayomi dan menerima berbagai suku dan agama.

38 Deklarasi KALIMA dalam www.awangfarokishak.com/diakses pada tanggal 18 Juni 2011. Untuk menyosialisasikan visi dan misi AFI kepada masyarakat, dibuatlah website, agar masyarakat dapat mengetahui program yang dilakukan oleh tim sukses dan AFI. Selain itu, AFI juga menerima dan menanggapi saran dan kritik dari masyarakat. Dengan

Dari alinea pertama deklarasi berdirinya KALIMA tersebut, secara eksplisit ada lima permasalahan pokok yang disampaikan AFI yang memicu kebutuhan ‘rasa kekitaan’, yakni perlunya paradigma pembangunan yang berkelanjutan, kemiskinan, merosotnya nilai keimanan dan ketakwaan, rendahnya kualitas kesehatan, dan rendahnya kualitas pendidikan. Oleh karena itu, AFI melakukan langkah strategis dalam rangka mewujudkan ‘rasa kekitaan’ sebagai berikut:

Pertama, menginisiasi jejaring patronase. Pelibatan wakil masyarakat sebagai pengurus KALIMA mengindikasikan adanya relasi patron-klien yang dirajut oleh AFI. Anggota KALIMA terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat, seperti Paser (Sardani Usman dan Harly), Penajem Paser Utara (Willis Tanjung dan Malisa), Balikpapan (Jainuddin dan Sismono), Samarinda (Nusyirwan Ismail, Jamiran dan Aras Jaga), Kutai Kartanegara (Syahril Setia dan Sarbini), Kutai Barat (Mathius dan Adnan), Bontang (Gunawan Wirutomo dan Raking), Kutai Timur (Sukarni Joyo, Sholeh Kongbeng dan Alex Rohmanu), Berau (Dody dan A.Faizal), Bulungan (Sufirmanto dan Suhardi), Tarakan (Syafrudin dan Hamid), Malinau (Sitorus dan Ahmad Jais), dan Nunukan (Baslan dan Saparudin).

Anggota tim KALIMA tersebut merupakan representasi dari perwakilan masyarakat kabupaten/kota yang menjadi korban eksplorasi SDA. Mereka terdiri dari berbagai suku yang mewakili keberagaman masyarakat, seperti Jawa, Bugis, Banjar, Batak, Kutai, Dayak, Paser, Nunukan, Tarakan, dan lain-lain. Pelibatan berbagai etnis dalam KALIMA ini

demikian, relasi patron-klien antara AFI dan masyarakat terjalin. Namun, setelah tiga tahun AFI memimpin Kaltim banyak protes dari masyarakat, karena program yang dijanjikan tidak diwujudkan, khususnya pembangunan sarana dan prasarana di Kaltim.

dimaksudkan untuk mencitrakan bahwa AFI didukung oleh semua kelompok masyarakat di Kaltim.

Kedua, pengentasan kemiskinan. Untuk rekayasa sosial agar tumbuh ‘rasa kekitaan’ di antara masyarakat Kaltim, maka tim sukses memunculkan isu kemiskinan sebagai ‘musuh bersama’. Pada kenyataannya, yang menikmati hasil kekayaan alam Kaltim adalah kelompok pendatang. Adanya isu kemiskinan didasari pada kenyataan bahwa banyak masyarakat di sekitar tambang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, pengusaha tambang yang mayoritas didominasi kelompok pendatang menikmati kesejahteraan yang berlebih. Oleh karena itu, KALIMA merumuskan langkahnya sebagai *problem solvers* untuk mengatasi kemiskinan, sebagai berikut:

“Otonomi daerah memberi ruang dan peluang emas kepada masyarakat di daerah untuk melakukan inovasi-inovasi strategis dan kompetitif dalam membangun daerahnya yang berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kunci menuju kemakmuran adalah ketika masyarakat setempat benar-benar memperoleh prioritas dalam menikmati kekayaan alamnya. Memegang kunci tersebut bukan berarti bebas menjarah kekayaan alam, melainkan lahirnya kesadaran akan sebuah tanggung jawab untuk mengelolanya melalui seperangkat regulasi dan kebijakan daerah yang pro-rakyat.”³⁹

Solusi yang ditawarkan KALIMA dalam mengatasi kemiskinan ada dua hal, yakni inovasi pemberdayaan masyarakat dan regulasi yang pro-rakyat. *Pertama*, inovasi pemberdayaan masyarakat diperlukan dalam rangka menyejahterakan rakyat. Tawaran program KALIMA tampaknya menarik bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Seperti tertulis dalam deklarasi KALIMA bahwa salah satu

39 *Ibid.*

kunci kemakmuran ketika masyarakat setempat benar-benar memperoleh prioritas dalam menikmati kekayaan alam. Artinya, selama ini masyarakat Kaltim belum memperoleh prioritas menikmati kekayaan alam yang dimilikinya.

Hal ini tampak dalam kalimat berikutnya yang menekankan pada “*memegang kunci bukan berarti bebas menjarah kekayaan alam*”. Istilah ‘menjarah kekayaan alam’ berkonotasi negatif dan hal ini tampaknya ditujukan kepada kelompok pendatang (etnis Jawa).⁴⁰ Tim sukses merekayasa opini publik seolah-olah masyarakat hidup dalam kemiskinan karena ulah kelompok pendatang yang menguasai SDA. Tujuan rekayasa sosial tersebut untuk menimbulkan *niche* atau rasa nyaman yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan dimunculkannya isu kemiskinan yang sangat efektif memengaruhi dukungan masyarakat Kaltim terhadapnya dalam Pilkada 2008.

Kedua, regulasi pro-rakyat. Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan mewujudkan program-program pro-rakyat. AFI telah membuat regulasi pertanian dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kutim. Dia memberikan tanah, sertifikat, pinjaman modal kepada masyarakat, pendampingan kepada petani, serta beasiswa dan insentif kepada guru atau dosen.⁴¹ Dengan kata lain, dia sudah berkarya nyata dalam mengentaskan kemiskinan bukan hanya sekedar janji-janji politik. Regulasi yang pro-rakyat tersebut dikemas secara rapi dengan kemasan pembangunan dan bantuan sosial

40 Wawancara dengan MT dan AM pada tanggal 8 Juni 2011 di Yogyakarta. Hal ini juga dibenarkan oleh CS dalam wawancara melalui telpon bulan Juni 2011, dia memaparkan bahwa kelompok pendatang identik dengan ‘penjarah’ atau ‘penjajah’ SDA Kaltim. Pada masa kini ada gerakan di antara para aktivis untuk ‘mengevaluasi kembali’ eksplorasi SDA Kaltim oleh perusahaan nasional atau asing. Mereka menghendaki adanya pembagian SDA yang fair dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kaltim.

41 *Op.cit*, Bab III Nalar Politik Sang Bangsaawan.

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya program pro-rakyat tersebut diharapkan terjadi 'ikatan batin' antara masyarakat dengannya.

Selain itu, lewat ormas KALIMA Awang melakukan rekayasa sosial dengan menumbuhkan harapan baru. Melalui KALIMA akan terjadi perubahan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Perubahan yang dimaksud ialah terjadinya kebijakan Pemda yang pro-rakyat. Isu ini sengaja dimunculkan AFI, karena selama ini Pemda mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena kebijakan pengolahan SDA mengacu pada pemerintah pusat, maka kepentingan daerah cenderung terabaikan. Dengan kata lain, KALIMA ingin memosisikan dirinya sebagai ormas yang mewakili kepentingan masyarakat.

Secara implisit pernyataan KALIMA tersebut menunjukkan peran elite politik lokal gagal mengadakan *bargaining* terhadap pemerintah pusat, khususnya dalam perimbangan bagi hasil pengelolaan SDA. AFI merasa berpengalaman sebagai klien elite Kutai dan dia tahu tentang seluk-beluk pemberian kepada elite politik (Orde Baru). Oleh karena itu, dia mencitrakan diri identik dengan masyarakat yang termarginal dan dia mau menjadi fasilitator bagi semua lapisan dalam rangka menumbuhkan 'rasa kekitaan'.

Rasa kekitaan yang direkayasa tersebut mewujudkan dalam bentuk ormas KALIMA dengan relasi patron-klien dan pemberian sebagai pelumas yang diwujudkannyatakan. Tanpa adanya relasi patron-klien yang mengakar ke desa-desa, maka politik pemberian tidak efektif memobilisasi massa. Oleh karena itu, tim sukses merekayasa adanya 'musuh bersama' yang harus dilawan secara bersama. Untuk melawan 'musuh bersama' tersebut diperlukan figur pemimpin yang berpengalaman dan dapat mempersatukan seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, AFI mencitrakan diri sebagai

'bapak pembangunan' yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Pemanfaatan dua nalar politik tidak bisa terhindarkan AFI dalam menghadapi ketatnya persaingan antar kontestan. Nalar aktivis dimanfaatkan oleh AFI dalam menyikapi regulasi Pilkada dan proses demokrasi prosedural. Sementara itu, nalar politisi bekerja pada ranah praktis yang dijabarkan oleh elite dalam merajut relasi patron-klien. Secara teoretis, tidak mungkin AFI hanya mengandalkan dukungan gabungan partai kecil untuk menang dalam Pilkada. Pengalaman kegagalannya dalam pemilihan gubernur 2003 menjadi pembelajaran yang berarti. Oleh karena itu, dia memanfaatkan relasi patron-klien menjadi pilihan utama untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, khususnya terhadap tokoh adat dan atau masyarakat. Sebab, dalam Pilkada langsung, peran tokoh adat atau masyarakat sangat menentukan pilihan pemilih. Artinya, suara pemilih dalam masyarakat sangat bergantung pada pilihan tokoh adat atau masyarakat. Oleh karena itu, kedekatan elite dengan tokoh adat atau masyarakat menjadi kunci perolehan suara sebanyak-banyaknya.

Di samping itu, AFI juga dihadapkan dengan realita apatisme masyarakat kota terhadap elite yang mencalonkan diri dalam Pilkada. Oleh karena itu, dia harus merekayasa opini publik agar mendapat simpati dan legitimasi yang besar dari masyarakat. Simpati publik dibutuhkan dalam rangka mengonversi suara sebanyak-banyaknya. Tanpa adanya simpati dan pengenalan terhadap kontestan, maka publik tidak akan menentukan pilihan terhadapnya. AFI mencampur-adukkan dua nalar tersebut dalam rangka memperoleh dukungan suara dari masyarakat pedalaman, pesisir, dan perkotaan.

Persaingan ketat antarelite dalam Pilkada ditandai dengan saling menyerang dan terjadi *black campaign* dan *money politics* di beberapa daerah.⁴² Untuk kali pertama, masyarakat Kaltim memilih kepala daerah secara langsung yang diadakan tanggal 26 Mei 2008. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada putaran pertama mencapai 67% dan jumlah mereka yang Golput mencapai 33%. Mereka yang Golput sebagian besar berasal dari kelompok aktivis lingkungan (LSM), cendekiawan, dan masyarakat yang rasional. Alasan mereka Golput, karena kecewa terhadap jejak rekam semua kontestan yang tidak berpihak pada kemandirian ekonomi kerakyatan, di samping bahwa para pemilih Golput itu menolak eksplorasi tambang yang berdampak merusak lingkungan alam. Mereka berasumsi dana kampanye kontestan berasal dari para investor tambang dan perkebunan yang merusak hutan dan lingkungan di Kaltim.⁴³

Pemilihan Gubernur Kaltim diikuti oleh empat pasang calon, yakni Achmad Amins-Hadi Mulyadi (PKS, Patriot, PP, dan PDK),⁴⁴ Awang Faroek Ishak-Farid Wadjdy (PDS,

42 Wawancara dengan Arifin di Samarinda; Wawancara melalui telpon dengan Charles Siahaan. Menurut kedua narasumber ini, untuk menarik massa, kontestan berkampanye dengan cara 'menyerang' kandidat lain. Isu yang diangkat biasanya seputar etnis, agama, dan premanisme. Semua kandidat dalam kampanye melakukan tindakan *money politics*, misalnya memberi uang bensin, kaus, *door prize*, memberi sembako, memberi *hand phone* dan lain-lain.

43 *Op.cit*, AFI *Didemo Times*. WALHI Kaltim memprotes kepala daerah, karena adanya masalah tumpang tindih tanah lebih dari 740 kasus yang diindikasikan melibatkan permainan antarpejabat dan investor dalam memberikan perizinan. WALHI menuntut penutupan lahan penambangan batu bara yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

44 Achmad Amins dan Awang Faroek Ishak adalah kader Golkar senior, tetapi Syaukani selaku ketua DPD Golkar Kaltim merekomendasi Jusuf Serang Kasim (mantan Bupati Tarakan). Amins dan Jusuf keturunan Bugis, sementara Faroek keturunan Kutai. Tampaknya, Syaukani kecewa terhadap AFI, karena pemekaran Kutim yang diprakarsainya. Oleh karena itu, Amins pasca-pemilihan gubernur 2008 memutuskan pindah ke Demokrat, karena kecewa dengan Golkar. Sementara itu, Faroek yang memenangi pemilihan gubernur masih tetap di Golkar. Tampaknya, Syaukani pun berambisi menjadi Gubernur Kaltim. Oleh karena itu, dia dicalonkan secara aklamasi

PD, PPP, PB, PM, PBR, dan PAN), Nusyirwan Ismail-Heru Bambang (PDI-P), dan Jusuf Serang Kasim-Luther Kombong (Partai Golkar). Pasangan Amins-Hadi yang diusung oleh PKS dan Patriot merupakan representasi etnis Bugis-Jawa yang merupakan penduduk mayoritas di Samarinda. Sedangkan Awang-Farid merepresentasikan etnis Kutai-Banjar yang merupakan penduduk asli Kaltim. Nusyirwan-Bambang merepresentasikan pemimpin muda Jawa, sedangkan Jusuf-Kombong beretnis Bugis-Toraja yang merupakan kelompok pendatang di Kaltim yang didukung oleh Syaukani (Golkar). Kontestan yang diusung Golkar dan PDI-P merasa percaya diri akan menang dalam Pilkada 2008 sehingga mereka tidak memerlukan koalisi dengan parpol lain. Sementara itu, dukungan Golkar tidak diberikan kepada kader senior (AFI) yang sudah berpengalaman politik. Demikian juga PDI-P tidak mendukung Yurnalis Ngayoh (etnis Dayak) sebagai kontestan. Oleh karena etnis Dayak tidak terakomodasi dalam pemilihan gubernur tersebut, maka suara orang Dayak dan orang Jawa cenderung diberikan ke AFI daripada ke Nusyirwan-Bambang atau Amins-Hadi.

Kemenangan AFI dalam Pilkada 2008 rupanya ditentukan dengan strategi pemanfaatan kearifan lokal yang dikemas dalam bentuk relasi patron-klien di desa-desa. Relasi patron-klien di Kutim telah dirajut AFI ketika dia menjabat sebagai Bupati Kutim. Selain itu, sebagai bangsawan, dia telah disumpah setia terhadap elite Kutai, maka dalam dirinya telah terikat sebagai klien yang loyal.⁴⁵ Dia memanfaatkan relasi patron-klien tersebut dalam rangka mengemban amanah elite Kutai. Oleh karena itu, kebijakannya membuat regulasi

oleh Golkar. Lihat [www.kutaikartenegro.com/12 September 2006](http://www.kutaikartenegro.com/12%20September%202006), *Golkar Kukar Dukung Syaukani Calon Tunggal Gubernur Kaltim*.

45 *Op. cit.*, Bab II Rekam Jejak AFI.

pertanian terkesan populis, tetapi sebenarnya hal ini dilakukan dalam rangka mengikat batin masyarakat sebagai klien.⁴⁶ Hal ini dilakukan dalam rangka investasi politik; dia mengikat masyarakat dengan relasi patron-klien yang dimanfaatkannya untuk memobilisasi massa ketika Pilkada.

AFI sebagai kontestan dalam Pilkada harus menaati regulasi yang diatur dalam undang-undang, seperti prosedur pencalonan, kampanye dan rekap, dan penentuan pemenang. Prosedur demokrasi tersebut harus diikutinya dalam proses kontestasi. Selain itu, dia juga harus mengolah prosedur demokrasi tersebut agar dapat mengungguli kontestan lain. AFI juga mengetahui bahwa pemberian materi dan non-materi dalam kampanye melanggar undang-undang. Oleh karena itu, dia memberikan materi dan non-materi jauh hari sebelum kampanye.

Adapun strategi AFI memengaruhi masyarakat kota adalah dengan melakukan rekayasa sosial dengan membentuk ormas KALIMA. Melalui KALIMA, dia merekayasa relasi patron-klien dengan masyarakat lewat isu 'rasa kekitaan' dan 'musuh bersama'. Dengan adanya rekayasa sosial tersebut, dia memosisikan diri sebagai patron (putra daerah) yang mampu mengatasi permasalahan kemiskinan dan kebodohan yang dialami masyarakat. Segmentasi yang dibidik AFI berfokus pada kelompok menengah ke bawah. Oleh karena itu, isu program konkret seperti sekolah gratis 12 tahun menjadi daya tarik bagi masyarakat.

Selain itu, AFI juga memanfaatkan relasi pertemanan dengan elite politik (nasional). Hal ini terindikasi ketika elite politik PDS, PD, PPP, PKB, PM, PBR, dan PAN ikut aktif mendukung kampanyenya. Hadirnya tokoh politik

⁴⁶ *Op. cit.*, Bab III Nalar Politik Sang Bangsawan.

nasional dalam kampanye Pilkada menaikkan popularitasnya yang berdampak pada simpati masyarakat terhadapnya. Tampaknya, dia telah belajar dari kegagalan dalam pemilihan gubernur 2003. Oleh karena itu, dia mempersiapkan strategi politik dengan matang.⁴⁷ Dia sadar bahwa dukungan parpol sangat penting dalam proses kontestasi, tetapi hal ini tidak menentukan perolehan suara. Dengan demikian, dia memanfaatkan patronase lokal dalam rangka meraih dukungan masyarakat.⁴⁸ Hasil pemilihan Gubernur Kaltim putaran pertama, sebagai berikut :

Tabel 4.3. Hasil Pilkada 2008 Kaltim Putaran I

No.	Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1.	Amins-Hadi (AHAD)	PKS, Patriot, PP, dan PDK	396.784 (26,9%)
2.	Awang-Farid (AFI)	PDS, PD, PPP, PKB, PM, PBR, dan PAN	426.325 (28,9%)
3.	Nusyriwan-Heru	PDI-P	280.949 (19,04%)
4.	Jusuf-Kombong	Golkar	371.229 (25,16%)

Sumber: KPUD Kalimantan Timur, 2008

Hasil Pilkada putaran pertama tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil survei LSI (2007) yang memprediksi popularitas dan elektabilitas AFI 27,3%. Sementara itu, hasil Pilkada putaran pertama AFI memperoleh suara 426.325 (28,9%). Namun, kemenangan AFI pada putaran I tersebut menimbulkan gugatan terhadap KPUD, karena tim AFI menilai KPUD tidak konsisten dalam menetapkan pemenang Pilkada. KPUD awalnya mengacu UU No.32 Tahun 2004 pasal 107 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemenang Pilkada minimal memperoleh 25%. Dengan mengacu undang-undang

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

tersebut, maka hasil Pilkada tersebut telah dimenangkan oleh AFI.⁴⁹ Namun, KPUD ternyata menggunakan dasar UU No. 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pemenang Pilkada harus memperoleh 30% plus 1. Oleh karena tidak ada pemenang yang memperoleh suara 3% plus 1, KPUD menetapkan Pilkada putaran kedua yang akan diikuti oleh Amins-Hadi dan AFI-Farid.

Tim Awang tetap bersikukuh dan menggugat KPUD-Kaltim ke Mahkamah Konstitusi. Hasil persidangan Mahkamah Konstitusi memutuskan, KPUD diwajibkan menyelenggarakan Pilkada putaran kedua, karena belum ada kontestan yang meraih suara 30% plus 1. Dengan demikian, tim sukses AFI kalah dalam gugatannya terhadap KPUD dan Pilkada putaran kedua harus dilaksanakan. Akhirnya, putaran Pilkada kedua dilaksanakan tanggal 23 Oktober 2008 dan hasilnya diumumkan tanggal 7 November 2008. Pada Pilkada putaran kedua ini, terjadi penurunan 7% partisipasi masyarakat: dari 67% menjadi 60%. Golput mencapai 40% dan hal ini mengindikasikan adanya kejenuhan masyarakat terhadap proses Pilkada yang lama (lima bulan). Menurut SH, pada putaran kedua ini masing-masing pasangan bersaing ketat dan tampaknya dana mereka semakin menipis, sehingga putaran ini bisa disebut sebagai persaingan antarkontestan murni;⁵⁰ faktor *money politics* hanya sedikit mewarnai, tidak

49 “Pihak Awang Faroek menggugat KPUD Kaltim sebesar Rp 2 miliar, karena penyelenggara Pilkada itu dianggap tidak konsisten dalam menggunakan dasar hukum penyelenggaraan Pilkada. Awalnya KPU menggunakan UU No 32 Tahun 2004, tetapi saat penghitungan hasil suara, KPU menggunakan UU No. 12 Tahun 2008. Menurut sumber yang dapat dipercaya, ada dugaan ‘permainan’ antara ketua KPUD dengan pasangan Amins-Hadi; Ketua KPUD dan Amins berasal dari etnis Bugis. Dalam UU No 32 Tahun 2004, pemenang Pilkada harus memperoleh pemilih minimal 25%, sementara pada UU No.12 Tahun 2008 pemenang Pilkada minimal memperoleh suara 30% plus 1” dalam [www.okezone.com/15 Oktober 2008, Sidang Gugatan Pilkada Kaltim Memasuki Tahap Putusan](http://www.okezone.com/15_Oktober_2008_Sidang_Gugatan_Pilkada_Kaltim_Memasuki_Tahap_Putusan).

50 Wawancara dengan Charles Siahaan melalui telepon di Samarinda-Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2011.

sebanyak pada putaran pertama. Adapun hasil Pilkada Kaltim putaran kedua selengkapnya, sebagai berikut:

Tabel 4.4. Hasil Pilkada 2008 Kaltim Putaran II

Kabupaten/Kota	AWANG FAROEK ISHAK FARID WADJDY	ACHMAD AMINS HADI MULYADI
1. Kab Pasir	44.001	29.795
2. Kab Kutai Barat	41.775	16.035
3. Kab Kutai Kartanegara	143.572	82.239
4. Kab Kutai Timur	68.814	24.374
5. Kab Berau	29.906	26.799
6. Kab Malinau	17.551	4.408
7. Kab Bulungan	21.639	15.307
8. Kab Nunukan	25.282	24.490
9. Kab Penajam Paser Utara	25.505	23.962
10. Kota Balikpapan	102.267	83.112
11. Kota Samarinda	158.189	140.451
12. Kota Tarakan	34.906	40.065
13. Kota Bontang	27.317	26.643
Total Suara	740.724 (57,94%)	537.680 (42,06%)

Sumber: KPUD Kalimantan Timur, 2008

Memperhatikan perolehan suara AFI pada putaran Pilkada kedua tersebut, tampaknya AHAD hanya menang di kota Tarakan. Hal ini mengindikasikan pemberian yang dikemas oleh elite dengan rajutan patronase pada tataran akar rumput telah mengakar di seluruh kabupaten/kota, kecuali di Kota Tarakan. Tampaknya, pendukung Jusuf-Kombong (Golkar) mengalihkan suara kepada Amins yang merupakan

kader Golkar. Pasangan AHAD memperoleh 40.065 suara, sedangkan Awang memperoleh 34.906 suara.

Perolehan suara AHAD di Tarakan unggul, karena dukungan konstituen Jusuf-Kombong (Golkar). Namun, dukungan Jusuf-Kombong ke AHAD tidak gratis, tentu ada 'transaksi politik' yang tidak terungkap ke media massa. Persaingan ketat terjadi di Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara yang merupakan basis Golkar, Demokrat, dan PDI-P. Tampaknya, basis massa AHAD berdomisili di Samarinda, sebab Amins menjabat sebagai walikota, sedangkan Hadi adalah tokoh PKS yang populer.

Hasil perolehan suara AHAD di Samarinda berjumlah 140.451, sedangkan AFI memperoleh 158.189. Di kota Balikpapan dan Kutai Kartanegara, antara perolehan AFI dan AHAD terdapat selisih lebih dari 20.000 jumlah suara. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh patronase yang dimanfaatkan oleh AFI, khususnya terhadap kelompok pendatang dan etnis Kutai.⁵¹ Tampaknya, basis massa PDI-P dan kelompok Jawa cenderung memberikan suaranya kepada AFI. Dukungan kelompok Jawa kepada AFI juga terindikasi dengan adanya pemanfaatan patronase yang melibatkan tim suksesnya melobi pasangan Nusyirwan-Bambang agar memberikan dukungan suara kepadanya.⁵²

Memperhatikan hasil Pilkada putaran kedua tersebut, tampaknya patronase sebagai pelumas yang dikemas melalui

51 AHAD menguasai Samarinda dan daerah sekitar sungai Mahakam, karena komunitas Bugis, Banjar, dan Jawa. Sementara itu, AFI menguasai daerah pedalaman Kutai dan kelompok komunitas Jawa serta massa PDI-P dan massa Golkar baik di desa maupun di kota.

52 Nusyirwan adalah tokoh muda nasionalis yang sangat dekat dengan AFI pada waktu perintisan ormas KALIMA. Oleh karena dia tidak dicalonkan sebagai wakil gubernur, padahal dia memiliki pendukung yang banyak, maka dia maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur yang didukung PDI-P.

ormas KALIMA yang telah bekerja di seluruh kabupaten/kota. Demikian juga pemanfaatan adat dan agama efektif dilakukan oleh AFI melalui relasi patron-klien.⁵³ Sementara itu, di Kutai Kartanegara yang merupakan basis massa Golkar, terbukti mayoritas pemilih memberikan suara mereka kepada AFI. Hal ini merupakan implikasi dari inisiasi relasi patron-klien antara AFI dengan elite Kutai.⁵⁴ Pada tataran komunitas orang Kutai, kampanye AFI menonjolkan isu politik tentang pentingnya 'putra daerah' memimpin Kaltim. Sementara itu, di kota besar seperti Balikpapan, isu kampanye AFI bersifat umum dan terbuka untuk kelompok pendatang dengan isu politik perbaikan ekonomi dan 'Kaltim Untuk Semua'.⁵⁵

Kampanye dengan menggunakan isu etnis pun dilakukan oleh AHAD, khususnya di komunitas Bugis atau Makassar yang sangat fanatik mendukung Amins.⁵⁶ Walaupun dalam Undang-Undang Pemilu, kampanye dengan isu etnis dilarang, tetapi pada tataran praktis bagi masyarakat yang bermukim di pedalaman, ternyata isu etnis dan agama sangat efektif memengaruhi perilaku pemilih. Namun, AHAD kalah dalam hal pengambilan waktu memulai kampanye, sebab AFI telah merajut relasi patron-klien satu tahun sebelum kampanye dimulai. AFI telah merajut jejaring patronase dan memanfaatkan bantuan sosial di desa-desa. Selain itu, efektivitas kerja tim sukses dengan memanfaatkan bantuan sosial yang dikemas patronase tersebut berhasil menghantarkan AFI menang di 12 kabupaten/kota. Dalam Pilkada Gubernur 2008 putaran kedua tersebut, dia memperoleh suara 57,94%, sedangkan AHAD memperoleh 42,06%. Dengan demikian,

53 *Loc.cit*, Wawancara dengan AFI.

54 *Ibid*.

55 *Loc.cit*, Wawancara dengan Mohammad Arifin.

56 Wawancara dengan Mohammad Arifin, tanggal 11 Agustus 2009 di Unmul-Samarinda.

AFI (Kutai) dan Farid Wajdy (Banjar) menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2008-2013.

BAB V

REFLEKSI TEORETIS: KONSEPTUALISASI POLITIK AMBIVALENSI

Kajian Bab II hingga Bab IV memungkinkan kita memahami secara kritis penalaran di balik gejala yang populer dengan sebutan nalar aktivis dan nalar politisi. Ada dua perspektif yang berjalan secara ambivalen tetapi sepertinya dibiarkan begitu saja dan dianggap tidak serius. Puncaknya, maraknya *money politics* dalam setiap Pilkada menjadi kambing hitam. Penyelenggaraan Pilkada divonis sebagai tidak efektif dan memboroskan biaya. Pilkada tidak menghasilkan kepala daerah yang berkualitas dan mampu membawa perubahan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, anggota DPR hasil Pemilu 2014 memperhatikan celah-celah ini sebagai batu loncatan untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD. Dengan kata lain, Pilkada bukanlah rezim Pemilu (demokrasi) seperti yang dipersepsi Dahl, Diamond, Lipset, dan Linz.¹ Bila usaha mengembalikan Pilkada kepada DPRD itu berhasil, kontestasi antarelite politik melalui parpol akan direduksi menjadi sidang paripurna DPRD yang rawan juga dengan transaksi politik. Yang lebih parah lagi

1 Berdasarkan Putusan MK No.97/PUU-XI/2013 dan UUD 1945 Pasal 18, ayat 3-4.

ialah hak dan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung dihapuskan. Oleh karena itu, dua perspektif yang ambivalen tersebut krusial untuk diformulasikan, agar Pilkada di Indonesia dilaksanakan efektif dan efisien.

Untuk melacak konsep politik ambivalensi tersebut, ada baiknya kita mencari titik temu dari dua perspektif yang terlibat di dalamnya. Tampaknya, titik temu bekerjanya dua perspektif tersebut dalam Pilkada terletak pada pemberian materi dan non-materi, yang dimaknai oleh kelompok aktivis sebagai *money politics*. Tidaklah adil bila gejala pemberian tersebut dibaca secara hitam-putih.

Dalam bagian *pertama* Bab V ini, penulis mengkritisi teori patronase Scott dan Schroder. Kemudian pada bagian *kedua*, penulis menormalisasi cara pandang *money politics* yang kurang tepat dalam memvonis tindakan para politisi memberikan materi dan non-materi. Sedangkan pada bagian *ketiga*, penulis menegaskan bahwa pemberian-penerimaan sudah menjadi budaya dalam masyarakat. Pada bagian *keempat*, penulis memaparkan rekonstruksi konsep politik ambivalensi. Kesediaan untuk melihat di balik dua perspektif tersebut dari sudut pandang elite justru membukakan tabir dilema yang pada gilirannya membantu memetakan konseptualisasi politik ambivalensi yang dikehendaki dalam studi ini.

A. Kritik Terhadap Teori Patronase

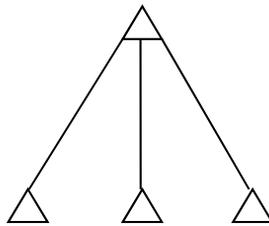
Studi ini dipicu dari permasalahan bagaimana elite (AFI) menyikapi regulasi dalam Pilkada dan mengelola patronase. Ketika elite diperhadapkan pada regulasi, niscaya dia akan menggunakan nalar aktivis (demokrasi). Kalau hal ini diterapkan secara konsisten, akan dihasilkan masyarakat yang demokratis. Namun, para aktivis lupa bahwa pada aras praktis, para politisi dihadapkan pada tuntutan untuk menang

dalam kontestasi di Pilkada. Bagi mereka, regulasi diperlukan agar dia dapat ikut Pilkada, tetapi untuk menang, regulasi bisa dilanggar. Oleh karena munculnya permasalahan bermuara pada inisiasi elite merajut jejaring patronase, ada baiknya kita mengkritisi teori patronase dan kontestasi antar elite.

Dengan memperhatikan temuan lapangan di Kaltim tersebut, maka teori patronase yang dipaparkan oleh Scott dalam konteks politik di Asia Tenggara tidak sepenuhnya dapat menjawab permasalahan studi ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis atas teori patronase, agar kita menemukan teori politik yang dapat membingkai studi ini. Kajian kritis penulis terhadap teori Scott, khususnya tentang patronase kluster dan patronase piramida, sebagai berikut:

Pertama, patronase bukan keharusan dua orang yang berbeda status dan berbentuk kluster. Scott menggambarkan relasi patron-klien sebagai relasi antara dua orang yang berbeda status sebagaimana terilustrasi pada Gambar 5.1. berikut:²

Gambar 5.1. Kluster Patron-Klien versi Scott



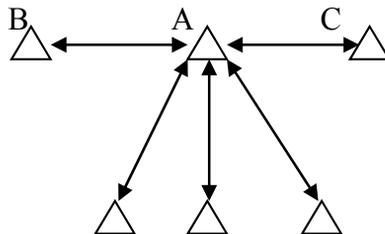
Scott berasumsi bahwa patron memiliki relasi vertikal dan terbatas hanya pada tiga orang klien (kelompok) di bawahnya. Asumsi di balik pemikiran Scott tersebut, patronase terjadi karena klien membutuhkan patron. Namun, asumsi Scott tersebut tidak bisa menjelaskan tentang bekerjanya nalar

2 *Ibid*, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia*, hlm. 96.

klien ganda. Dalam politik lokal Kaltim, si klien memiliki potensi untuk mandiri dari patron dengan alasan tidak lagi memerlukan jasa baiknya. Dengan demikian, relasi patron-klien tidaklah harus berlaku sama, karena masing-masing daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda.

Tampaknya, relasi patronase bisa saja dilakukan terhadap orang yang sama statusnya dan tidak dimulai dengan adanya kesenjangan sosial. Prinsip ‘investasi kebaikan’ terhadap sesama patron bisa saja terjadi, karena sang patron memiliki kepentingan politik. Selain itu, relasi tidak harus bersifat satu arah (*bottom up*) dengan kondisi klien yang lemah tanpa kekuatan penyeimbang. Temuan penulis menunjukkan adanya varian lain dalam perspektif patronase (politik lokal), sebagai berikut:

Gambar 5.2. Kluster Patron-Klien versi Guno



Kedua, patronase bisa terjadi karena sang patron membutuhkan legitimasi si klien. Pada Gambar 5.2. di atas, tampak jelas bahwa relasi patron-klien bisa datang dari patron A. Artinya, patron A menjalin relasi dengan klien di bawahnya. Oleh karena itu, dia memberikan materi dan non-materi. Pemberian sang patron dipersepsi sebagai kehormatan, dan si klien membalas dengan pemberian materi atau non-materi. Dalam hal ini ada ‘kesetaraan’ pemberian, sekalipun mereka berbeda status. Ketika si klien sudah memberikan hasil

panenan kepada patron, maka tanggung jawabnya dianggap sudah selesai.

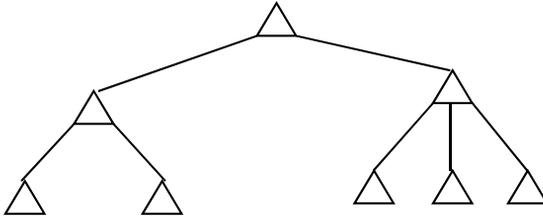
Dengan kata lain, relasi patronase tersebut bisa temporer atau terus menerus. Itu sebabnya, pemberian patron diupayakan lebih besar dari si klien, agar klien tidak bisa memberikan yang setara. Dengan adanya pemberian yang tidak setara tersebut, makna *money politics* menjadi kurang tepat untuk dipraktikkan sebab dalam perspektif *money politics*, pemberian sang patron bisa dipahami sebagai tindakan yang melanggar hukum. Sebaliknya, dalam perspektif patronase, pemberian adalah sah secara kultural dan tidak melanggar hukum. Dalam konteks ini, pendapat penulis berbeda dengan pendapat Scott; menurut penulis, si klien memiliki kemampuan penyeimbang. Artinya, si klien pun mampu menjadi penyeimbang dalam menentukan relasi, bahkan dia pun dapat memutuskan relasi terhadap patron.

Ketiga, relasi patronase bisa terjadi antarpatron. Artinya, patron A bisa menjalin relasi dengan patron B dan C, tetapi relasi ini tidak secara otomatis berpengaruh terhadap klien A. Demikian sebaliknya, patron B juga tidak memiliki pengaruh terhadap klien C. Dalam hal ini, relasi antarpatron A, B, dan C bermotifkan 'pertemanan' dan cenderung tidak berkaitan langsung dengan si klien, meskipun relasi dapat dimanfaatkan oleh masing-masing patron. Jadi, relasi antarpatron lebih bersifat 'investasi kebaikan' yang kelak dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dari mereka. Oleh karena relasi ini berdasarkan 'suka sama suka' dan menguntungkan, mereka cenderung mempertahankan patronase untuk kepentingan jangka panjang.

Keempat, patronase multipiramida. Scott berfokus pada relasi patron-klien dengan memperluas jangkauan sang patron terhadap klien. Artinya, dalam relasi patron-klien, sang patron

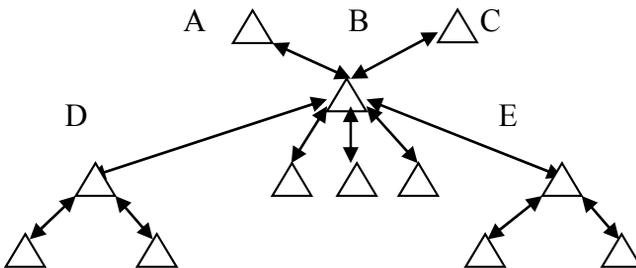
berhubungan langsung dengan si klien yang di bawahnya ia memiliki pengikut atau jaringan. Scott menggambarkan relasi patron-klien tersebut dalam skema piramida sebagai berikut:

Gambar 5.3. Skema Piramida Patron-Klien versi Scott



Gambar 5.3. menampilkan relasi patron-klien yang cenderung bersifat satu arah (vertikalis) dan sang patron menghegemoni klien. Pemberian materi dan non-materi cenderung untuk mengukuhkan posisi patron atas ketergantungan klien terhadapnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis buku ini menunjukkan hal yang tidak demikian: sang klien bisa berperan ganda, yakni bahwa dia bisa menjadi klien dua patron sekaligus.

Gambar 5.4. Piramida Dinamika Patron-Klien versi Guno



Gambar 5.4. di atas menunjukkan adanya relasi dua arah yang saling bersinergi. Posisi B dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa dia bisa menjadi klien bagi A dan C. Dengan kata lain, B bisa menjadi patron dan sekaligus menjadi

klien. Dalam hal ini, posisi B bisa disebut berwajah ganda. Terhadap patron A dan C, si B sebagai klien. Sedangkan terhadap D dan E, dia sebagai patron. Logika patronase ini saya gunakan untuk menganalisis nalar elite dalam studi ini. Artinya, B sudah terbiasa mencampuradukkan nalar ganda; dia bisa menjadi patron dan klien sekaligus. Oleh karena itu, ketika dia berpolitik praktis, nalar ganda tersebut dimanfaatkannya dalam rangka memengaruhi perilaku dan memobilisasi massa.

B. Kritik Terhadap Teori Strategi Politik

Teori Dahl, Lary, Diamond, Linz, dan Lipset tentang demokrasi dijabarkan secara praktis dalam strategi kontestasi antarelite oleh Schroder. Teori strategi politik yang dipaparkan oleh Schroder tampak jelas bernalar aktivis, karena semangatnya dilatarbelakangi idealisme demokrasi. Menurut Schroder, untuk memenangkan kontestasi dalam Pilkada, elite harus memengaruhi masyarakat dengan dua pendekatan strategi, yakni *ofensif* dan *defensif*. Strategi *ofensif* diperlukan dalam rangka menembus basis massa lawan politik atau memperluas jangkauan. Sedangkan strategi *defensif* diperlukan dalam rangka mempertahankan basis massa agar mereka tidak membelot ke lawan politik. Selain itu, strategi *defensif* juga diperlukan dalam rangka ‘melepas’ massa untuk berkoalisi dengan elite politik yang lain.

Teori Schroder tentang kontestasi antarelite ini hanya cocok untuk elite yang terikat kuat dengan konstituennya. Artinya, teori ini hanya cocok diterapkan terhadap elite politik yang memiliki dukungan massa yang kuat. Selain itu, dukungan partai politik mesti efektif berfungsi—mesin politik bekerja menggerakkan basis massa pendukung yang setia. Pada kenyataannya, elite politik yang berkompetisi dalam Pilkada tidak semua didukung oleh parpol. Artinya, elite politik bisa

jadi mencalonkan diri karena dukungan masyarakat yang tidak berafiliasi dengan parpol.

Selain itu, pada kenyataannya, parpol kurang efektif mewujudkan aspirasi masyarakat. Ada kesan, elite politik hanya memanfaatkan parpol menjelang Pilkada/Pemilu karena kontestan harus memberikan mahar. Tidak mengherankan, masyarakat tidak terikat kuat terhadap parpol. Oleh karena itu, mereka cenderung apolitis. Strategi *ofensif* lebih disenangi elite politik dalam kontestasi Pilkada, khususnya untuk membangun citra diri sebagai elite yang kapabel, elektabel, dan populer. Bagaimanapun, strategi *ofensif* hanya efektif dilakukan terhadap masyarakat kota. Adapun masyarakat pedalaman atau pesisir tidak membutuhkan pencitraan elite politik. Artinya, strategi *ofensif* ini tidak bisa diterapkan di semua lapisan masyarakat.

Untuk masyarakat pedalaman atau pesisir yang masih terikat kuat pada kekerabatan dan keterbatasan akses informasi, strategi *ofensif* dengan pencitraan tidak relevan. Mereka lebih membutuhkan uang, barang, jasa, dan ikatan kekeluargaan. Oleh karena itu, patronase tepat diterapkan dengan mengikatkan diri elite sebagai kerabat ketua adat atau tokoh masyarakat. Ikatan batin antara elite dengan tokoh adat atau masyarakat menjadi kunci keberhasilan elite tersebut dalam memenangkan pilihan masyarakat. Elite yang menjalin relasi patron-klien dengan tokoh adat atau masyarakat merupakan bukti adanya ikatan batin yang kelak dapat dikonversi menjadi mobilisasi massa dan dukungan suara dalam Pilkada.

Realitanya, elite tidak hanya menggunakan strategi *ofensif* dan *defensif*, tetapi juga memanfaatkan nalar politisi (patronase) dalam rangka mengikat batin masyarakat. Tampak bahwa teori ini mengabaikan kultur masyarakat lokal yang

heterogen. Dengan demikian, teori Schroder tidak cocok diterapkan dalam masyarakat heterogen dengan sebagian besar mereka masih menghormati nilai-nilai adat dan budaya kekerabatan (komunal) seperti Katim. Secara khusus, teori ini hanya relevan diterapkan dalam masyarakat yang homogen, rasional, dan individual.

C. Normalisasi Cara Pandang terhadap Money Politics

Uraian di atas berinti pada kesimpulan bahwa percampuran nalar aktivis dan politisi berimplikasi pada perolehan suara yang signifikan terhadap elite. Pada mulanya, elite memberi dalam rangka mencari celah-celah politik yang kemudian berkembang menjadi relasi patron-klien. Rajutan patronase tersebut mengakarkan ikatan batin antara elite dengan masyarakat yang dirawat secara kontinyu.

Dalam perspektif Scott, pemberian uang, barang, atau jasa cenderung mengakibatkan 'penguasaan' sang patron terhadap klien. Artinya, pemberian-pemberian tersebut menjadi sarana untuk mengikat klien, agar setia atau taat kepadanya.

Sebaliknya, pandangan Ahimsa menekankan bahwa klien memiliki posisi tawar dan bisa berganti patron. Artinya, klien bisa menolak pemberian sang patron, kalau pemberian tersebut dianggap tidak memenuhi kriteria yang mereka harapkan. Dengan kata lain, relasi *inequality* tersebut terjadi karena adanya 'pemaksaan' otoritas terhadap si klien. Selain itu, patronase bisa terjadi tidak hanya pada orang yang berbeda status, tetapi orang dengan status yang sama pun bisa saling terikat dalam relasi 'pertemanan'. Dengan kata lain, patronase bisa terjadi antara elite lokal dengan elite nasional atau antarelite lokal. Patronase sesama elite tersebut sering penulis sebut dengan istilah 'pertemanan' atau '*perkoncoan*'. Motif elite lokal (patron) memberikan uang, barang, dan jasa

kepada elite nasional ialah, pemberian itu sebagai ‘investasi politik’.

Mengacu pandangan Scott tersebut di atas, minimal ada tujuh perbedaan mendasar antara konsep patronase yang dimanfaatkan oleh para elite dengan konsep *money politics*.

Pertama, relasi patron-klien terbentuk dengan adanya perbedaan status atau persamaan status. Sang patron memberikan uang, barang, dan jasa “berdasarkan kebutuhan dan permintaan si klien”. Dalam hal ini, relasi bersifat pribadi dan dilakukan tidak dalam rangka merengkuh kekuasaan politik. Selain itu, relasi membutuhkan pengenalan pribadi, rasa saling percaya, dan interaksi dalam rentang waktu yang lama. Dalam konteks AFI, dia sebagai patron menjalin relasi demikian terhadap tokoh masyarakat secara kontinyu.³

Kedua, tindakan *money politics* dilakukan dengan motif untuk merengkuh kekuasaan. Biasanya, praktik *money politics* terjadi menjelang Pilkada/Pemilu dengan sistem *one man, one vote, one value*—suara individual pemilih sangat menentukan kemenangan kontestan. Oleh karena itu, kontestan ‘membeli suara’ masyarakat dengan cara membagikan uang, sembako, ternak, bantuan sosial, dan alat elektronik. Sebaliknya, dalam patronase, tidak dikenal adanya usaha merengkuh kekuasaan melalui pemberian. Sebab, sang patron sudah memiliki kekuasaan (dengan posisinya sebagai bangsawan). Karena itu, motif utama pemberian ialah terwujudnya legitimasi serta kharisma dari masyarakat kepada sang patron sehingga mereka—sebagai klien—setia kepadanya. Semakin besar pemberian, semakin besar pula legitimasi dan kharisma sang bangsawan, serta kesetiaan masyarakat terhadapnya.

3 *Op.cit*, Wawancara dengan AFI.

Ketiga, elite yang ingin menang dalam Pilkada dihadapkan pada keniscayaan pemanfaatan patronase yang sudah mengakar dalam masyarakat. Pada umumnya, masyarakat agraris masih menjunjung tinggi kekerabatan dan adat istiadat. Dalam budaya masyarakat agraris, pemberian elite selaku patron dimaknai sebagai amanah budaya dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyejahteraan masyarakat. Karena amanah, praktik pemberian ini harus dilaksanakan. Semakin banyak dan besar pemberiannya kepada masyarakat, semakin besar penghormatan masyarakat kepadanya sebagai bangsawan (patron) yang berkharisma. Ada kecenderungan masyarakat (klien) selaku penerima uang, barang, dan jasa untuk tidak menganggap pemberian tersebut sebagai tindakan *money politics*. Dalam pemikiran mereka, sudah tertanam suatu sistem nilai budaya bahwa menerima pemberian dari seorang bangsawan (patron) menjadi suatu kehormatan atau anugerah bagi mereka. Sebagai balasan atas pemberian patron tersebut, si klien taat dan setia.

Keempat, adanya ambivalensi antara nalar politisi dan nalar aktivis. Dalam konteks nalar aktivis yang mengacu pada tradisi demokrasi (Barat), peran individu sebagai pemegang kedaulatan rakyat sangat dihargai. Artinya, individulah yang akan memilih kontestan dalam Pemilu atau Pilkada. Ironinya, tindakan *money politics* terjadi di era demokrasi, dengan sistem *one man, one vote, one value* diberlakukan. Dalam budaya demokrasi, pemberian uang, barang, dan jasa dianggap sebagai tindakan *money politics* yang melanggar undang-undang. Para pakar politik menilai pemberian-pemberian tersebut identik dengan tindakan *money politics*, karena hal ini sering dimanfaatkan oleh elite dalam rangka merengkuh kekuasaan.

Bagaimanapun, fenomena itu bisa dibaca dengan cara lain: justru adanya nalar politisi yang masih memberlakukan

patronase di era demokrasi mengindikasikan terjadinya ketidaksesuaian (*incompatibility*) antara sistem nilai budaya Barat dan Timur. Dalam hal ini, terjadi ‘pemaksaan’ nilai-nilai Barat ke dalam masyarakat tradisional (budaya Timur). Tampaknya, kelompok *patologis* dan *legalis* lebih cenderung menganut cara pandang Barat yang menganggap pemberian dalam patronase identik dengan *money politics* yang merusak tatanan dan proses demokratisasi di Indonesia.

Kelima, loyalitas klien cenderung kontinyu. Perbedaan mendasar antara pemberian (patronase) dengan *money politics* terdapat pada sifat kesetiaan: pada patronase, kesetiaan bersifat terus menerus, dan pada *money politics*, kesetiaan bersifat temporer. Selain itu, masyarakat sudah mampu melakukan tindakan tandingan: menyikapi pemberian-pemberian dari beragam kontestan, mereka hanya memberikan suara kepada kontestan dengan pemberian paling besar. Kalau pemberian yang diterima sedikit, si klien akan beralih ke kontestan lain yang memberikan lebih banyak uang. Tampaknya, ada kecenderungan masyarakat mulai ‘melek politik’ dan tidak mau dimanfaatkan oleh elite. Sebaliknya, mereka melakukan aksi menuntut banyak hal yang semua kontestan harus memberikan uang dan barang. Tindakan ini dilakukan dalam rangka memberikan pelajaran kepada kontestan yang ingkar janji ketika Pilkada atau Pemilu sebelumnya. Artinya, praktik *money politics* memunculkan ‘loyalitas semu’ yang menempatkan klien bisa saja menerima pemberian semua kontestan, tetapi dia tidak terikat secara batin terhadap sang kontestan. Dia menerima uangnya, tetapi pada hari pencoblosan, dia bisa tidak memilih kontestan tersebut.

Dengan demikian, dalam konteks *money politics*, kesetiaan klien hanya berlangsung temporer pada saat Pilkada (Pemilu). Setelah Pilkada usai, klien tidak lagi terikat relasi terhadap

elite politik (kontestan), karena sasaran utama *money politics* berfokus merengkuh kekuasaan dalam Pilkada. Sebaliknya, relasi patron-klien mewujudkan rajutan ikatan batin dan cenderung berlangsung terus menerus, kecuali si klien sudah merasa tidak membutuhkan lagi sang patron, karena sudah merasa membalas hutang budi. Si klien bisa memutuskan relasi terhadap sang patron, kalau dia menganggap sudah tidak memerlukannya lagi.

Keenam, tujuan akhir pemberian dalam patronase berbeda dengan tujuan dalam *money politics*. Dalam pemberian (patronase) bisa terjadi proses saling memberi (*reproksitas*): seorang klien tidak hanya menerima, tetapi juga memberikan barang atau hasil panen kepada sang patron. Sementara itu, sang klien dalam *money politics*, hanya pasif menerima uang dari sang kontestan. Dia tidak memberikan barang atau hasil panen kepada sang kontestan. Dalam konteks *money politics*, motif elite politik memberikan uang atau barang dalam rangka ‘membeli’ suara pemilih. Tujuan akhir elite melakukan tindakan *money politics* ialah memperoleh kekuasaan.

Sebaliknya, dalam konteks patronase (pemberian) motif sang patron memberikan bukan ‘membeli suara’, tetapi ‘mendapatkan *legitimasi* dan *loyalitas*’. Bila klien yang sudah loyal terhadap patron, akan terjadi ikatan batin. Ikatan batin atau kedekatan tersebut merupakan modal sosial yang dapat dikonversikan menjadi dukungan suara bagi elite dalam Pilkada.⁴ Namun, sang patron yang sudah memiliki kekuasaan

4 *Ibid*; Bandingkan Fredrik Barth, *Political Leadership among Swat Pathans* (New York: Humanities Press, 1965); Andre Beteille, *Caste, Class and Power* (Berkeley: University of Californis Press, 1965); Bandingkan D. W. Atwood, “Patrons and Mobilizers: Political Entrepreneurs in an Agrarian State” dalam *Journal of Anthropological Research*, Vol. 30, No. 4 (Winter, 1974), hlm. 225-241/diakses dari <http://www.jstor.org/stable/3629715>, tanggal 9 Mei 2012 jam 06:49; Jeremy Boissevain, *Friends of Friends: Networks, Manipulators and Coalitions* (Oxford: Basil Blackwell, 1974; *Bandingkan* Jacqueline Vel,”Kampanye

cenderung tidak memanfaatkan patronase tersebut untuk merengkuh kekuasaan.

Ketujuh, dalam patronase, terjadi ikatan batin dan utang budi. Hal ini berbeda dengan praktik *money politics* yang hanya sesaat dilakukan menjelang Pilkada sehingga tidak berdampak pada tumbuhnya utang budi; relasi antara kontestan dengan pemilih hanya bersifat transaksional dan temporer. Setelah Pilkada, relasi keduanya tidak berlanjut. Artinya, kontestan hanya berkepentingan ‘membeli’ suara pemilih. Setelah ‘harga’ disetujui, nilai pemberian dibayarkan dan dukungan diberikan. Dengan kata lain, sang kontestan tidak memiliki ikatan emosi terhadap pemilih. Tanpa ikatan batin (emosi) antara elite dengan pemilih, dia tidak mengenal mereka. Dalam praktik *money politics*, yang penting bagi elite adalah perolehan suara sebanyak-banyaknya, bukan utang budi antara kontestan dengan masyarakat.

Sebaliknya, apa yang dilakukan elite dalam konteks patronase bermotif mengikat batin yang dilakukan jauh hari sebelum Pilkada. Pada awalnya, motif elite memberi ialah dalam rangka mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kebodohan. Dalam konteks AFI, bisa dikatakan bahwa ia bersafari ke desa-desa memberikan bantuan sosial dalam rangka memerluas rajutan patronase ke seluruh lapisan masyarakat.⁵ Dia memberikan bantuan dalam kapasitas sebagai bangsawan

Pemekaran di Sumba Barat” dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (editor), *Politik Lokal di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm.116-153. Vel memaparkan, elite politik Sumba Barat memanfaatkan agama dan etnis untuk memengaruhi masyarakat, agar pro-pemekaran Sumba Tengah.

5 Berdasarkan laporan tim sukses AFI, Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) ke KPU Kaltim, dana kampanye Rp 3,3 miliar masing-masing berasal dari AFI sendiri Rp 833 juta, perusahaan atau badan usaha Rp 2,15 miliar, dan sumbangan perorangan Rp 335 juta. Informasi diakses dari www.kaltimpost.co.id, Sabtu, 01 November 2008, jam 10:55:00. Dana Rp. 3,3 miliar tersebut yang dilaporkan resmi kepada KPUD Kaltim. Tentu saja, masih ada dana lain yang tidak dilaporkan oleh tim sukses AFI.

yang memiliki amanah untuk menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian, pada mulanya, dia mempraktikkan pemberian bukan untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, melainkan untuk memenuhi amanah budaya yang diembannya.

Dampak dari inisiasi relasi patron-klien yang telah dirajutnya selama waktu bertahun-tahun itu memunculkan ikatan batin antara dirinya dengan masyarakat. Pada saat dia memerlukan dukungan masyarakat dalam Pilkada, relasi patron-klien tersebut dimanfaatkannya sebagai modal sosial dalam rangka merengkuh kekuasaan. Dalam hal ini, dia memadukan dua nalar politik yang memanfaatkan nalar politisi (patronase) dan nalar aktivis (demokrasi) untuk memengaruhi perilaku masyarakat agar terjadi konversi suara terhadapnya.

D. Pemberian-Penerimaan sebagai Budaya

Pasca-rezim Orde Baru runtuh, bermunculan parpol baru yang saling bersaing ketat dalam setiap Pemilu maupun Pilkada. Adapun salah satu tujuan utama pendirian parpol adalah mendudukkan orang dalam pemerintahan. Dengan kata lain, parpol merupakan sarana yang dimanfaatkan oleh elite untuk merengkuh kekuasaan. Logika pemanfaatan parpol sebagai sarana mendudukkan seseorang dalam pemerintahan merupakan hal normatif. Konsepsi ini selaras dengan nalar aktivis yang memerjuangkan tegaknya nilai-nilai demokrasi.

Namun, apa yang terjadi pasca-Reformasi? Parpol hanya dimanfaatkan oleh sekelompok elite sehingga memunculkan oligarki dalam parlemen. Elite cenderung bernalar pragmatis dan kontekstual dalam menyikapi persaingan dalam Pilkada. Oleh karena itu, implikasinya muncul oligarki dalam pemerintahan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara elite dengan masyarakat. Hal ini dapat kita tengarai

dalam perkembangan selanjutnya: seorang elite memanfaatkan parpol hanya sebagai ritual lima tahunan (Pemilu/Pilkada) untuk merengkuh kekuasaan. Sebaliknya, masyarakat yang sudah merasa 'dibohongi' oleh elite dengan janji-janji yang tidak ditepati cenderung antipati terhadap partai dan elitnya. Hal ini terindikasi semakin menguat dan hal ini mewujud pada gejala peningkatan golput dalam Pemilu atau Pilkada.

Hal demikian sangat dipahami AFI. Menghadapi realita tersebut, dia cenderung memenuhi kebutuhan masyarakat. Agar pemberian tersebut tidak terkesan sebagai tindakan *money politics* yang melanggar undang-undang, dia mengolahnya dalam kemasan bantuan sosial, program beasiswa 12 tahun, pengobatan gratis, pembangunan sarana dan pra-sarana, dan lain-lain. Dalam konteks ini, batasan antara patronase dan *money politics* sangat tipis dan tampaknya sulit dibuktikan dengan saksi-saksi yang kuat. Dalam konteks nalar aktivis, jelas pemberian-pemberian semacam itu merupakan pelanggaran undang-undang dan harus dikenakan sanksi pidana atau pembatalan sebagai peserta Pilkada.

Sebaliknya, dalam konteks nalar politisi, saling memberi adalah kebiasaan yang sudah ada di masyarakat. Artinya, pemberian-penerimaan sudah menjadi budaya dalam masyarakat. Praktik pemberian tidaklah dimaknai sebagai tindakan melanggar hukum. Sebaliknya, praktik-praktik ini malah dianjurkan untuk dilakukan sebagai kebiasaan yang baik. Dalam hal ini, pemberian-penerimaan dilakukan dengan tulus ikhlas untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa maksud tersembunyi.

Tidak bisa disangkal bahwa dalam negara dengan latar belakang monarki dan masyarakat agraris, pengaruh adat, budaya, dan agama sangat kuat. Adat dan budaya dalam masyarakat berperan sebagai pengarah sekaligus pengatur

perilaku masyarakat. Kristalisasi adat dan budaya yang mengakar dalam masyarakat mewujudkan sistem nilai budaya. Sistem nilai budaya itulah yang memengaruhi cara pikir, perilaku, dan sikap masyarakat, termasuk para elite politik. Sistem nilai budaya yang sudah tumbuh subur dalam masyarakat inilah yang merawat interaksi antara elite dan masyarakat. Adapun patronase merupakan salah satu wujud dari sistem nilai budaya yang memengaruhi cara pandang dan perilaku bangsawan (patron).

Oleh karena itu, untuk merawat relasi dengan masyarakat yang diposisikan sebagai klien, maka elite memberikan materi dan non-materi. Pemberian tersebut dimaksudkan untuk memelihara relasi dan kesetiaan klien terhadapnya. Selain itu, secara substansial pemberian tersebut mengindikasikan kebesaran kharismanya. Semakin besar pemberian, semakin besar kharisma dan pengaruhnya. Jadi, ada korelasi antara pemberian yang dilakukan elite dengan kharismanya. Pemberian tersebut dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa ada paksaan. Masyarakat selaku pihak penerima memaknai pemberian tersebut sebagai suatu kehormatan atau anugerah. Dengan demikian, pada mulanya, tidak ada aspek politisasi dalam pemberian tersebut.

Meskipun zaman berubah dan rezim berganti, budaya patronase tersebut tidak punah. Sebaliknya, budaya tersebut semakin menguat seiring dengan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap elite di era Reformasi. Oleh karena itu, pemanfaatan budaya patronase tersebut tidak terhindarkan bagi elite yang berkompetisi dalam Pilkada. Elite memanfaatkan budaya patronase, karena dia ingin menampilkan diri sebagai bangsawan yang berkharisma. Dengan nalar ini, dia berupaya untuk memengaruhi masyarakat agar setia kepadanya. Elite sebagai bangsawan memosisikan dirinya sebagai patron,

sedangkan masyarakat diposisikan sebagai klien yang pasif dan taat. Sebagai patron, elite merawat relasi terhadap klien tersebut secara kontinyu, bahkan sampai keturunan yang ketiga. Oleh karena itu, klien merasa berhutang budi dan harus taat. Untuk melegitimasi ketaatan tersebut, adat dan agama dimanfaatkan. Melalui sumpah adat atau agama, klien dikondisikan setia sampai mati terhadap patron (bangsawan).

Selain itu, untuk tetap menjaga kharisma sang bangsawan, direkayalah memori sosial masyarakat melalui mitos agar mewujudkan dua hal. *Pertama*, raja dicitrakan sebagai titisan dewa. Oleh karena masyarakat agraris masih percaya dengan hal-hal yang bersifat mistis, maka raja menempatkan dirinya dalam ranah mistis. Seorang raja dimitoskan sebagai keturunan Dewa yang Maha Sakti. Artinya, seorang raja memiliki kesaktian yang tidak terbatas, karena dia titisan dewa. Untuk mengidentifikasi kesaktian seorang raja, diperlukan ritual *erau* sebagai pengikat rasa takjub masyarakat kepadanya.

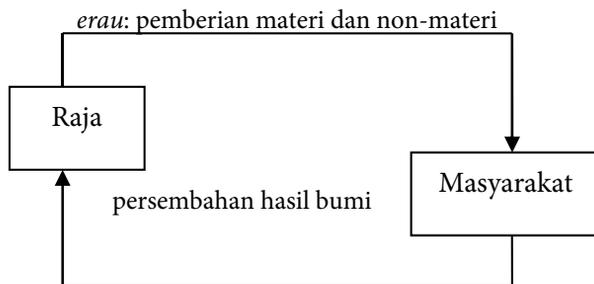
Pada mulanya, ritual *erau* digelar dalam rangka penobatan seorang raja. Ritual ini dilangsungkan selama 40 hari dan disertai persembahan korban. Mitos raja sebagai titisan dewa mengindikasikan adanya nalar hegemoni terhadap masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat diposisikan sebagai klien yang tidak memiliki hak untuk tawar-menawar. Selain itu, kehadiran raja atau bangsawan juga ditandai dengan kepemilikan pusaka dalam bentuk tombak, keris, dan perisai. Kepemilikan pusaka tersebut mengindikasikan kesaktian yang dimiliki bangsawan sehingga menimbulkan rasa takjub dan ketaatan bagi masyarakat. Raja yang sakti tersebut memberikan tanah, barang, dan jasa kepada masyarakat agar mewujudkan kebesaran kharismanya.

Kedua, pemberian dimaknai sebagai kehormatan atau anugerah. Respons masyarakat terhadap pemberian raja tersebut

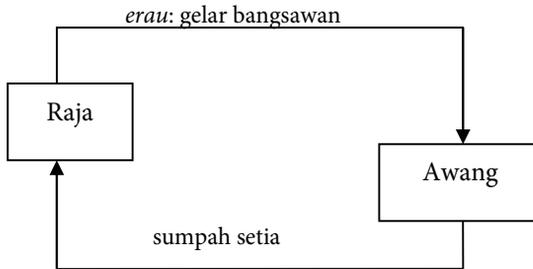
ialah memberikan persembahan hasil bumi dalam ritual *erau*. Mereka sangat bersyukur karena telah diberi tanah, barang, dan jasa oleh raja sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Artinya, mereka menyadari bahwa saling memberi adalah suatu kehormatan, dan bukan tindakan tercela. Bagi mereka, pemberian seperti ini mengindikasikan martabat dan harga diri mereka. Kalau mereka bisa memberikan kepada raja hasil bumi, maka harga diri mereka akan terangkat.

Ketiga, raja memberikan gelar Awang (bangsawan) kepada tokoh masyarakat. Gelar ini diberikan kepada tokoh masyarakat yang dianggap berjasa kepada raja dengan tujuan agar masyarakat terus setia. Artinya, tidak semua masyarakat bisa memperoleh gelar Awang. Hanya mereka yang telah terbukti berjasa, setia, dan layak mengabdikan kepada raja yang diberi gelar bangsawan. Bagi masyarakat (rakyat jelata), menerima gelar bangsawan berarti 'kenaikan derajat' mereka. Namun, konsekuensi bagi Awang ialah, mereka harus setia sampai mati kepada raja. Para Awang inilah yang menjadi klien elite Kutai di Orde Baru sampai sekarang. Gambar 5.5. dan Gambar 5.6. berikut menjelaskan nalar politisi tersebut:

Gambar 5.5. Patronase dalam Tradisi Erau (Pemberian sebagai pewujudan kharisma)



**Gambar 5.6. Patronase dalam Tradisi Erau
(Pemberian gelar menaikkan martabat)**



Dari gambar di atas, tampak jelas bahwa dalam tradisi *erau*, peran patronase sangat penting. Ada tiga peran strategis patronase dalam masyarakat. *Pertama*, pemberian materi dan non-materi mewujudkan kharisma seorang raja (patron). Artinya, raja yang mengklaim dirinya sebagai titisan dewa mengidentifikasi diri sebagai dermawan yang diwujudkan dengan memberi materi dan non-materi kepada masyarakat. Namun, pemberian tersebut dimaksudkan untuk melegitimasi diri (sehingga dia berkharisma).

Kedua, pemberian masyarakat kepada raja berupa hasil panen merupakan ucapan syukur atau penghormatan. Dalam konsep demikian, pemberian tersebut tidak memuat tendensi politis, karena raja memberikan tanah, uang, barang, dan jasa dalam rangka memperbesar kharismanya. Maka, pemberian tersebut tidak ditujukan untuk mendapatkan kekuasaan. Sebaliknya, masyarakat memersepsikan pemberian raja sebagai bentuk kehormatan, dan mereka membalasnya dengan mempersembahkan hasil panen sebagai bentuk ketaatan atau kesetiaan.

Ketiga, pemberian gelar bangsawan kepada tokoh masyarakat dimaknai sebagai 'kenaikan martabat' seseorang. Namun, implikasi pemberian gelar tersebut mengandung

konsekuensi kepatuhan atau ketaatan terhadap raja. Artinya, seorang rakyat jelata yang menyandang gelar bangsawan niscaya untuk taat dan melaksanakan kepentingan raja. Saya menyebut ketaatan bangsawan tersebut dengan istilah klien; dia harus menjadi abdi raja baik untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat.

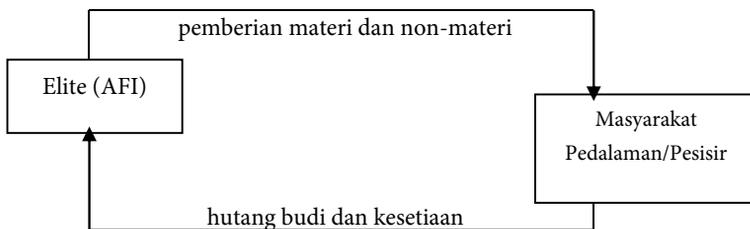
Di era Reformasi yang menganut sistem demokrasi, penerapan tata nilai demikian menghadapi masalah. Untuk menjadi kepala daerah (bupati/gubernur), bangsawan tersebut harus melalui tahapan Pemilu/Pilkada yang dipilih oleh rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Dia harus memerankan diri sebagai seorang yang demokrat yang taat terhadap regulasi. Dia harus bersih dari pelanggaran HAM dan KKN. Sebaliknya, dalam konteks pragmatis, seorang kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat secara langsung harus mampu memenuhi kebutuhan mereka, dan pemenuhan ini mesti diwujudkan melalui pemberian materi dan non-materi.

Di sini tampak ambivalensi politik yang banyak dinafikan oleh para pakar. Ambivalensi ini juga tampak jelas pada pengalaman AFI sebagai elite Kaltim ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Di satu sisi, dia seharusnya menegakkan nilai-nilai demokrasi, tetapi di sisi lain dia dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang pragmatis. Masyarakat seolah-olah menghukumnya dengan mengajukan banyak tuntutan dan menetapkan harga per satu suara. Mereka terang-terangan meminta uang kepadanya sebagai prasyarat agar mereka memberikan dukungan dan suara mereka kepadanya. Tentunya, fenomena ini tidak muncul dengan sendirinya. Sebenarnya apa yang mereka lakukan merupakan bentuk balas dendam atau sekadar mencari untung. Dalam Pilkada atau Pemilu sebelumnya, bisa jadi mereka merasa dikecewakan oleh

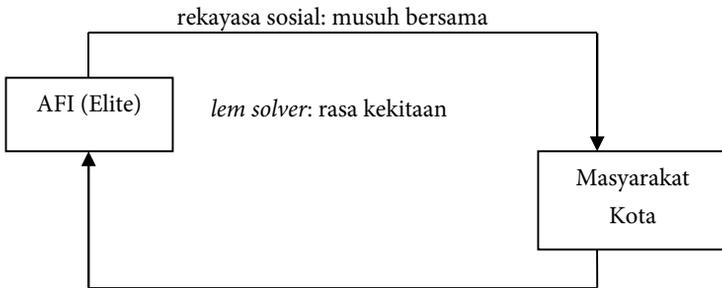
elite yang ingkar janji. Oleh karena itu, ketika elite tersebut mencalonkan diri lagi dalam Pilkada, dia mendapat sanksi masyarakat yang mewujudkan melalui berbagai tuntutan.

Konsekuensi logisnya, AFI berpijak pada dua penalaran yang berbeda yang memosisikan tradisi pemberian sebagai bentuk kehormatan untuk menaikkan kharisma seseorang. Sementara itu, dalam tradisi demokrasi, pemberian dianggap sebagai tindakan *money politics*. Dalam perspektif patologis maupun legalis, pemberian uang atau barang di atas satu juta rupiah dianggap gratifikasi. Tindakan pemberian tersebut bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi yang diancam dengan sanksi pidana. Hal ini benar-benar disadarinya. Oleh karena itu, dia merekayasa pencampuran dua nalar tersebut dalam rangka memengaruhi perilaku dan memobilisasi pemilih. Pencampuran dua nalar yang ambivalen tersebut dikelola dalam pemberian yang dikemas melalui relasi patron-klien dan rekayasa sosial. Selanjutnya, dia juga mencitrakan diri sebagai *problem solver*. Percampuran dua nalar itu disebut dengan istilah politik ambivalen. Gambar-gambar berikut menjelaskan istilah ini:

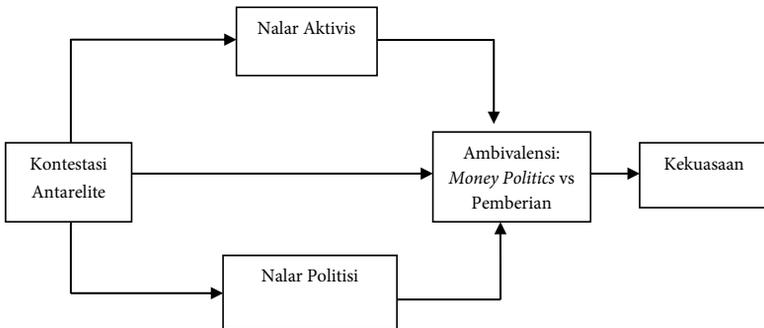
**Gambar 5.7. Nalar Politisi
Pemberian sebagai kebiasaan/budaya**



Gambar 5.8. Nalar Aktivistis Strategi Politik



Gambar 5.9. Nalar Politik Ambivalensi



Dari paparan gambar-gambar di atas, tampak jelas bahwa politik ambivalensi mewujud dalam percampuran dua nalar, politisi dan aktivis. *Pertama*, nalar politisi. AFI memahami bahwa masyarakat pedalaman dan pesisir masih terikat kuat dengan adat, agama, dan budaya. Mereka juga masih menaati ketua adat dan agama. Memperhatikan realita tersebut, maka dia merajut relasi patronase melalui pendekatan budaya dan adat. Implikasi dari relasi patronase tersebut, terjadi ikatan batin antara elite dan ketua adat. Ikatan batin antara dirinya dengan ketua adat tersebut ditandai dengan pemberian materi dan non-materi. Jadi pemberian itu menjadi ‘perekat’ yang berimplikasi pada munculnya ‘utang budi’. Ketika dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah, rajutan patronase

tersebut dimanfaatkannya untuk memengaruhi ketua adat agar massa mendukungnya. Oleh karena ketua adat telah percaya bahwa dia akan memberikan bantuan, maka relasi patron-klien terkonversi menjadi dukungan suara terhadapnya.

Kedua, nalar aktivis. Bersamaan pemanfaatan nalar patronase tersebut, AFI merekayasa sebuah fenomena sosial dengan memunculkan isu ‘musuh bersama’ di antara masyarakat kota. Implikasi dari rekayasa ini ialah munculnya rasa kekitaan di tengah masyarakat. Dengan adanya rasa kekitaan, maka dia mencitrakan diri sebagai ‘bapak pembangunan’ untuk semua kelompok dan menginisiasi rajutan patron-klien terhadap masyarakat kota. Semangat rasa kekitaan tersebut juga dimanfaatkannya dalam rangka memobilisasi massa.

Sementara itu, Gambar 2.3. memaparkan bagaimana AFI mengelola dua nalar tersebut dan mewujudkannya dalam bentuk strategi politik. Percampuran antara nalar politisi dengan nalar aktivis terjadi ketika dia mencalonkan diri dalam Pilkada. Hal ini dilakukan dalam rangka memengaruhi perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan. Bagi masyarakat pedalaman/pesisir yang sudah menerima bantuan, dapat diprediksi, minimal 80% mereka akan memilihnya.

Sementara itu, bagi masyarakat kota yang tidak menerima bantuan secara langsung, maka mereka membutuhkan bukti konkret jejak rekam kapabilitas dan elektabilitas elite. Oleh karena itu, AFI mengelola nalar aktivis dengan menjawab kesangsihan masyarakat kota. Dia mengampanyekan karya konkretnya dalam rangka mengentaskan kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan perusakan sumber daya alam. Dengan memosisikan diri sebagai ‘bapak pembangunan’ dan terbuka untuk semua kelompok masyarakat, dia berharap akan muncul kepercayaan mereka terhadapnya. Kepercayaan masyarakat ini dimanfaatkannya dalam rangka

memengaruhi perilaku pemilih. Artinya, dia memanfaatkan kepercayaan masyarakat dan mentransformasikannya ke dalam konversi suara terhadapnya. Dengan demikian, nalar politisi dimanfaatkan melalui pemberian yang mengikat batin masyarakat. Sementara itu, nalar aktivis mewujudkan melalui strategi politik dalam rangka memengaruhi, memobilisasi, dan konversi suara pemilih.

Kajian ini menjawab permasalahan tentang nalar seperti apa yang dikembangkan oleh elite—yang dalam hal ini diwakili oleh AFI—dalam menyikapi dua perspektif tersebut? Yang perlu dikritisi ialah apakah politik ambivalen yang dimanfaatkan oleh elite dalam Pilkada tersebut dibiarkan saja sehingga merusak penegakan demokrasi di Indonesia? Ataukah sebaliknya: apakah diperlukan penghapusan patronase dari budaya Indonesia sehingga nilai-nilai demokrasi dapat berkembang dengan efektif dan efisien. Setelah ditemukan adanya nalar ambivalensi dalam Pilkada? Lalu apa langkah selanjutnya untuk mengatasinya? Bukankah substansi politik praktis ialah ambivalen? Ada dua hal yang penulis formulasikan sebagai konsep, sebagai berikut:

Pertama, pemberlakuan regulasi yang ketat terhadap kontestan dan parpol. Secara normatif atau idealis, diperlukan adanya pengaturan regulasi yang mengontrol perilaku kontestan yang bersaing. Selain itu, perlu diberlakukan sanksi yang tegas terhadap kontestan dan parpol. Terhadap kontestan yang akan bersaing dalam Pilkada sudah ditegaskan bahwa pelanggaran regulasi berakibat pada pembatalan pencalonannya. Demikian juga dengan parpol, berlaku aturan yang sama: kalau terbukti bahwa elite parpol menerima 'mahar politik', maka parpol tersebut mendapat sanksi hukum yang berat dan pembatalan sebagai peserta Pilkada. Sanksi berat tersebut dimaksudkan untuk membersihkan elite dari tindakan pelanggaran.

Selain itu, perlu juga diadakan kontrol terhadap penggunaan dana kampanye kontestan, agar tertib dan efektif. Idealnya, semua kegiatan dana kampanye ditanggung oleh pemerintah melalui APBN. Dengan adanya kontrol terhadap dana kampanye, maka transaksi politik berupa *money politics* akan diminimalisir. Diharapkan semua kontestan yang berkontestasi akan bersaing secara jujur dan terbuka. Semua aktivitas kampanye dilaporkan dan diaudit oleh para profesional dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kedua, kedewasaan berpolitik. Bersamaan dengan penegakan hukum yang tegas, diperlukan kedewasaan berpolitik. Yang dimaksud dengan kedewasaan berpolitik di sini ialah terbuktinya integritas kontestan melalui suatu mekanisme pengujian. Atau dengan kata lain, masyarakat mengenal dan mengetahui bahwa kontestan dapat dipercaya dan memiliki kemampuan untuk memajukan daerah.

Menurut hemat penulis, patronase tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku asal dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Rajutan patronase bisa diinisiasi jauh hari sebelum Pilkada dilangsungkan sehingga yang bersangkutan tidak melanggar regulasi dan terkena sanksi. Dengan diberlakukan inisiasi patronase jauh hari sebelum Pilkada, maka elite diberi kesempatan berkarya nyata dalam pengentasan kemiskinan dan memajukan masyarakat.

Dengan demikian, ada baiknya kontestan yang akan berkontestasi diwajibkan untuk membuktikan terlebih dahulu dengan karya nyata dalam masyarakat, khususnya dalam pengentasan kemiskinan minimal dua tahun. Adanya kewajiban ini dimaksudkan untuk menguji integritas kontestan secara efektif. Artinya, diperlukan suatu pembuktian terbalik: seorang kontestan yang akan berkontestasi dalam Pilkada bukan adu program saja. Sebaliknya, mereka juga berkontestasi secara

nyata bekerja memajukan masyarakat. Hendaknya, kontestan yang akan mendaftar dalam Pilkada sudah membuktikan dirinya dengan jejak rekam yang konkret: bebas KKN dan pelanggaran HAM, serta memajukan masyarakat.

Dengan adanya kontestasi karya nyata antar kontestan, diharapkan akan muncul pemimpin yang berkualitas karena materi penilaian masyarakat ialah kualitas kontestan dalam bekerja. Dengan demikian, masyarakat disodori jejak rekam kontestan. Jika ini terlaksana, akan terjadi perubahan dari yang berlaku selama ini: masyarakat hanya disodori nama-nama kontestan tanpa kejelasan akan karya mereka dalam memajukan masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN

Menyikapi skema regulasi yang diberlakukan dalam Pilkada dan pengelolaan patronase, elite (AFI) merujuk pada politik ambivalensi. Di satu sisi, dia harus memerankan diri sebagai seorang yang demokrat yang taat terhadap regulasi yang berlaku. Namun, di sisi lain dia dihadapkan pada persaingan yang sengit baik secara internal dalam parpol maupun eksternal dengan kontestan lainnya. Persaingan ketat tersebut memacu para kontestan untuk melakukan apa saja untuk meraih kemenangan. Dalam konteks ini, AFI niscaya menggunakan dua nalar supaya menjadi pemenang dalam Pilkada.

A. Perspektif Normatif/Idealis

Sikap AFI terhadap skema regulasi Pilkada cenderung normatif dan prosedural. Artinya, dia berupaya untuk menaati aturan main dalam tahapan Pilkada yang ditentukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Melalui parpol sebagai pengusung, dia mendaftarkan diri ke KPUD untuk dapat ikut dalam kontestasi Pilkada. Dia pun memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti berbagai tahapan yang ditetapkan oleh KPUD. Hal ini dilakukannya dalam rangka memerankan diri sebagai seorang yang demokrat agar muncul simpati

masyarakat terhadapnya. Selain itu, dia juga mencitrakan diri bersih dari pelanggaran HAM dan KKN, serta berintegritas sehingga layak untuk dipilih. Selain itu, untuk merebut kekuasaan, dia harus bersaing dengan elite lain secara bebas dan jujur. Persaingan antarelite tersebut diatur dalam regulasi yang diwujudkan melalui Pilkada/Pemilu secara berkala.

B. Perspektif Pragmatis

Dalam konteks nalar politisi, orientasi dan strategi politik, AFI cenderung pragmatis dan kontekstual. Dia berorientasi untuk merebut kekuasaan dengan pendekatan kultural (patronase). Artinya, dia mengikatkan diri dalam relasi patron-klien dengan tokoh adat, masyarakat, dan agama agar terjadi ikatan batin. Untuk memelihara relasi tersebut, dia memberikan berbagai bantuan, baik materi maupun non-materi. Baginya, pemberian bukanlah suatu tindakan yang melanggar hukum karena dilakukan dalam konteks membantu dan mengatasi kemiskinan. Hal ini bisa dimaklumi karena kebiasaan saling memberi sudah menjadi budaya masyarakat di Kaltim. Peran seorang bangsawan (elite) dalam masyarakat adalah mengemban amanah mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat. Kalau seorang bangsawan tidak memberikan bantuan, hilanglah kharismanya. Masyarakat tidak mau lagi menjadi kliennya dan mereka akan beralih ke patron lain (elite) yang mau memberikan bantuan dalam berbagai bentuk.

Orientasi AFI dalam memperebutkan kekuasaan sebagai kepala daerah (bupati) hanyalah merupakan sasaran politik. Baginya, yang terpenting adalah mengumpulkan modal finansial sebanyak-banyaknya untuk merengkuh jabatan Kaltim-1 (gubernur). Untuk itu, dia memanfaatkan nalar kebangsawanannya yang mewujud melalui relasi patronase. Dia juga memanfaatkan birokrasi, regulasi, dan rekayasa

sosial untuk menegaskan dirinya sebagai ‘putera daerah’ yang mampu mengatasi persoalan kemiskinan, kebodohan, perusakan moral, dan perusakan alam. Melalui berbagai pemberian, dia berupaya untuk menginvestasikan hutang budi kepada masyarakat sehingga mereka akan setia kepadanya.

C. Politik Ambivalensi

Penalaran adalah cara berpikir sistematis atau kondisi mental yang diwujudkan dalam prinsip-prinsip. Pemahaman penalaran adalah cara berpikir sistematis yang bermuara pada mental. Sementara itu, dalam konteks AFI, dalam rangka pemenangan Pilkada baik secara langsung maupun tidak langsung, dikembangkan dua penalaran, yakni nalar aktivis dan nalar politisi. Kedua nalar tersebut saling bertentangan dalam hal orientasi dan strategi politik, tetapi bekerja secara bersama-sama. Perbedaan kedua penalaran tersebut tampak dalam menyikapi pemberian materi dan non-materi.

Para aktivis tegas menolak praktik pemberian materi dan non-materi yang diidentikkan sebagai praktik *money politics* dalam Pemilu/Pilkada. Mereka beranggapan pemberian dalam bentuk materi dan non-materi identik dengan praktik *money politics*. Elite yang melakukan praktik pemberian materi dan non-materi tidak pantas dipilih oleh rakyat, karena dianggap telah mengkhianati penegakan nilai-nilai demokrasi. Elite yang merengkuh kekuasaan dengan tidak jujur dan mengandalkan pemberian materi dianggap telah melanggar undang-undang dan patut dijatuhi sanksi pidana. Oleh sebab itu, sikap para aktivis terhadap elite yang melakukan *money politics* dalam Pilkada/Pemilu jelas dan tegas. Elite dianggap melanggar hukum dan layak dibatalkan pencalonannya sesuai undang-undang yang berlaku.

Sebaliknya, nalar politisi cenderung pragmatis dan kontekstual, khususnya dalam hal pemberian materi dan non-materi. Dengan asumsi para politisi, memberikan materi kepada masyarakat yang miskin dan menyejahterakan tidak bertentangan dengan hukum—apalagi bagi seorang bangsawan yang memiliki amanah untuk menyejahterakan masyarakat yang miskin. Selain itu, masyarakat juga menganggap bahwa pemberian seorang bangsawan merupakan suatu kehormatan atau anugerah. Artinya, mereka tidak mempermasalahkan pemberian elite tersebut sebagai tindakan *money politics*.

Dalam hal Pilkada Kaltim, AFI menyadari bahwa pemanfaatan pemberian materi dan non-materi dalam ranah nalar aktivis divonis sebagai tindakan *money politics* yang melanggar hukum. Oleh karena itu, dia mengelolanya dalam strategi politik, khususnya untuk memengaruhi perilaku masyarakat kota dengan rekayasa sosial. Dia menggaungkan isu musuh bersama agar mewujudkan rasa kekitaan. Pemberian materi dikemas dan dilabeli bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan pembangunan. Dia juga mengelola pemberian tersebut secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai biaya politik.

Motif di balik patronase ialah investasi hutang budi. AFI mengakarkan pengaruhnya terhadap ketua adat dan tokoh masyarakat agar terwujud ikatan batin. Pencampuradukkan dua nalar politik tersebut, penulis sebut sebagai nalar politik ambivalensi. Tampaknya, nalar politik ambivalensi tersebut efektif dimanfaatkannya. Hal ini terbukti dengan perolehan suara yang dimenangkannya di daerah pedalaman dan pesisir sangat signifikan. Artinya, dia telah berhasil memengaruhi masyarakat pedalaman dan pesisir melalui relasi patron-klien. Sementara itu, perolehan suara yang dimenangkannya di kota-kota besar terpaut tipis dengan kontestan lain. Hal ini

mengindikasikan persaingan ketat terjadi di kota-kota besar dengan adanya kontestan lain yang memiliki basis massa cukup kuat, dan mengindikasikan adanya *money politics* yang ditebarkan oleh masing-masing kontestan. Hampir semua kontestan dalam Pilkada melakukan tindakan *money politics* untuk memengaruhi massa. Permasalahannya, tindakan *money politics* tersebut berlangsung di ranah yang tersembunyi sehingga tidak cukup bukti untuk diungkap ke ranah publik untuk ditindaklanjuti secara hukum.

D. Redefinisi Konsep *Money Politics*

Berdasarkan uraian di atas, perlu kita kaji ulang secara kritis tentang makna pemberian materi dan non-materi yang dimaknai oleh para aktivis sebagai *money politics*. Dalam konteks kultural, pemberian materi dan non-materi sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Sebaliknya, dalam konteks nalar aktivis, pemberian materi dan non-materi melanggar undang-undang. Oleh karena itu, perlu dicari titik temu, yang menempatkan pemberian materi dan non materi tidak melanggar undang-undang dan sebaliknya.

Batasan antara pemberian dan *money politics* sangat tipis, dan hal ini bergantung pada tiga hal. *Pertama*, motif elite memberikan materi dan non-materi. Bagi para politisi, pemberian dimaknai sebagai amanah moral untuk menyejahterakan. Artinya, elite (bangsawan) memiliki tanggung jawab moral dan secara konkret menyantuni mereka dengan pemberian-pemberian tersebut. Namun, bagi para aktivis, pemberian materi dan non-materi adalah pelanggaran regulasi, karena didasarkan atas motif membeli dukungan pemilih. Di sini, tampak adanya dua perbedaan motif. Motif elite memberi jelas bukan untuk membeli suara, melainkan melaksanakan amanah budaya-menyehahterakan masyarakat.

Dengan demikian, vonis terhadap para politisi tidak tepat, karena dia menjalankan amanah budaya. Jadi, dapat ditarik suatu kesimpulan, jika motif elite memberikan materi dan non-materi dalam rangka membeli suara pemilih, maka tindakan tersebut melanggar regulasi. Sebaliknya, bila melalui pemberian tersebut dia berupaya menyejahterakan masyarakat, dia tidak bisa divonis melanggar regulasi.

Kedua, waktu pemberian. Bila elite memberikan materi dan non-materi pada tahapan kampanye, maka tindakannya termasuk dalam kategori *money politics* dan bisa divonis melanggar regulasi. Dia bisa dikenai sanksi pembatalan pencalonannya atau sanksi pidana. Sebaliknya, bila dia memberikan bantuan-bantuan itu di luar tahapan kampanye dan jauh hari sebelum dia mencalonkan diri sebagai kontestan, maka tindakan elite tersebut tidak bisa dikategorikan *money politics*.

Ketiga, tujuan pemberian. Elite memberikan materi dan non-materi tentu memiliki maksud dan tujuan. Jika tujuannya untuk membeli suara pemilih dalam Pilkada, maka tindakan tersebut jelas melanggar regulasi. Sebaliknya, bila tujuannya menyejahterakan masyarakat, maka apa yang dilakukannya tidak melanggar regulasi.

E. Konstruksi Politik Ambivalensi

Di balik bekerjanya nalar politisi, ada amanah budaya yang memosisikan seorang bangsawan harus bertanggung jawab atas problema masyarakat. Sementara itu, para aktivis berasumsi pemberian materi dan non-materi adalah tindakan *money politics*, karena elite membeli suara untuk kemenangan dalam Pilkada. Praktiknya, para politisi mewujudkan pemberian melalui relasi patron-klien. Dalam hal ini, elite ingin mendekatkan diri dengan tokoh adat, agama atau

masyarakat. Sedangkan dalam praktik *money politics*, elite melakukannya di ranah yang tersembunyi.

Selain itu, nalar politisi bermuara dalam tradisi atau adat istiadat yang sudah menjadi sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, konsep *money politics* berakar dalam budaya modern (demokrasi) yang dimanfaatkan oleh elite dalam rangka membeli suara pemilih. Nalar politisi mewujud dengan adanya relasi patron-klien yang cenderung mengikat batin dan berlangsung secara terus menerus, sedangkan *money politics* bersifat temporer dan tidak mengikat batin antara elite dengan masyarakat.

Dengan demikian, nalar politisi (patronase) tidak identik dengan *money politics*, karena motif dan cara kerja yang berbeda. Patronase berkonotasi positif, karena bermotif menyejahterakan masyarakat. Adapun *money politics* cenderung berkonotasi negatif, karena bermotif membeli suara pemilih dalam Pilkada. Namun, penulis menyadari keduanya sulit dibedakan pada tataran praktiknya, karena batasannya sangat tipis.

Realitasnya, patronase sudah diketahui secara umum dalam masyarakat dan mewujud dalam perilaku sehari-hari. Adanya perbedaan nalar dan cara kerja antara patronase dengan *money politics* tersebut mengisyaratkan adanya dua pola pikir yang berbeda. Menurut penulis patronase sudah menjadi sistem nilai budaya dalam masyarakat di Kaltim. Oleh karena itu, gejala ini tidak bisa divonis sebagai penyakit demokrasi. Memberantas budaya patronase dalam masyarakat berarti menghapus budaya yang sudah mengakar berabad-abad lamanya dalam masyarakat Indonesia.

Patronase sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, dan berakar dalam sistem nilai budaya. Oleh karena itu, pemberian dalam konteks relasi patron-klien cenderung

berlangsung terus menerus dan bertahun-tahun. Sebaliknya, *money politics* dilakukan oleh elite politik dalam rangka transaksi politik sesaat untuk merengkuh kekuasaan. Oleh karena itu, tindakan *money politics* bersifat transaksional dan tidak mengikat batin antara elite dengan masyarakat.

Seperti dua sisi mata uang, antara patronase dan *money politics* berbatasan tipis. Oleh karena itu, elite menginstrumentasi keduanya dalam rangka memenangkan kontestasi dalam Pilkada. Elite menginstrumentasi patronase dalam rangka menginvestasikan hutang budi. Bisa jadi elite juga melakukan tindakan *money politics* di ranah yang tersembunyi sehingga tidak diketahui orang lain.

F. Paradigma Baru: Sebuah Tawaran

Sebagai penutup, buku ini menawarkan paradigma baru untuk menjelaskan politik ambivalensi yang bekerja di balik kemenangan Pilkada. Studi terdahulu dalam konteks politik di Asia Tenggara yang dilakukan Scott (1972) menawarkan tesis bahwa relasi patron-klien terindikasi dari tiga hal, yakni adanya relasi yang berbeda status (jenjang), pertemuan *face to face* (pertemanan), dan relasi luwes dan meluas. Teori patronase yang ditawarkan Scott tersebut hanya berlaku untuk dua orang yang memiliki status sosial yang berbeda. Hal ini selaras dengan tesis yang diajukan Kerkvliet (1995) dan Wolf (1966) bahwa relasi patron-klien di Filipina, Amerika Latin, Rusia, dan Jawa dimulai dari relasi pribadi (pertemanan) yang kemudian berlanjut ke ranah politik.

Bagaimanapun, teori Scott ini mengandung kelemahan. *Pertama*, teori ini hanya berfokus pada relasi patron-klien antara dua orang yang berbeda status. Sementara itu, kajian ini membuktikan bahwa relasi patron-klien terjadi bukan hanya antara dua orang yang berbeda status, melainkan juga sesama

patron yang berstatus sama. Selain itu, secara vertikal, elite berperan sebagai klien ganda terhadap elite Kutai dan elite Orde Baru. Sebaliknya, secara horisontal, elite berperan sebagai patron bagi masyarakat pedalaman/pesisir dan perkotaan.

Kedua, Scott tidak menyentuh sama sekali penalaran aktor politik dalam usaha memenangkan kontestasi. Buku ini membuktikan, ada kaitan kuat antara penalaran dengan praktik politik dan kaitan ini melahirkan politik ambivalensi.

Ketiga, teori Scott tentang patronase tidak menyinggung adanya pemanfaatan sistem nilai budaya, khususnya dalam instrumentasi oleh elite untuk merengkuh kekuasaan. Padahal, sistem nilai budaya pemberian tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap cara pandang dan perilaku masyarakat. Elite memanfaatkan patronase untuk menghegemoni masyarakat pedalaman dan pesisir. Sedangkan untuk memengaruhi masyarakat kota, elite merekayasa adanya isu ‘musuh bersama’ dan ‘rasa kekitaan’.

Tujuan utama penerapan nalar politisi dan nalar aktivis (pencitraan) ialah dalam rangka menciptakan ketergantungan (utang budi) masyarakat terhadap elite. Ketika elite mencalonkan diri dalam Pilkada, maka patronase tersebut dikonversikan menjadi dukungan suara. Demikian juga dengan rekayasa opini publik (pencitraan) yang mengkristal menjadi popularitas dan elektabilitas. Masyarakat kota yang rasional akan cenderung menentukan pilihan kepada elite yang populer (dikenal) dan terbukti telah berkarya nyata mengentaskan kemiskinan masyarakat. Nalar di balik pemanfaatan patronase dan pencitraan ialah bahwa elite membutuhkan legitimasi dan kesetiaan. Dia ingin dipercaya dan terlegitimasi sehingga dia melakukan inisiasi patron-klien dan rekayasa opini publik.

Hal lain yang terungkap dalam kajian ini ialah adanya indikasi pudarnya peran parpol dalam Pilkada. Peran parpol

bertendensi hanya sebagai lokus perburuan rente. Hal ini bisa ditelisik pada fenomena yang menunjukkan bahwa di satu sisi, elite parpol merasa dibutuhkan oleh kontestan dalam Pilkada, tetapi di sisi lain parpol membutuhkan dana operasional. Oleh karena itu, elite akan mematok 'mahar politik' bagi kontestan yang mendaftar ke parpol dalam proses kontestasi di Pilkada. Maka, yang sesungguhnya terjadi ialah kecenderungan menguatnya politik lokal elite yang mencampur-adukkan patronase dan demokrasi prosedural untuk merengkuh kekuasaan. Elite memosisikan dirinya sebagai patron untuk menghegemoni masyarakat melalui pemberian, serta menaati regulasi dan prosedur demokrasi yang diatur oleh pemerintah.

Transaksi politik berupa 'mahar politik' (*money politics*) sudah menjadi wacana umum. Bahkan, independensi penyelenggara Pilkada seperti KPUD pun sempat disangsikan oleh kontestan. Tidak menutup kemungkinan, anggota KPUD pun menerima 'mahar politik' dari elite lokal dengan tujuan untuk memengaruhi hasil Pilkada. Maraknya *money politics* dalam Pilkada merupakan cerminan kurangnya independensi, profesionalitas, integritas, dan ketegasan sikap anggota KPUD. Kurangnya independensi penyelenggara Pilkada memicu konflik horisontal antarpendingung kontestan. Penggugatan keputusan KPUD dilakukan massa jika ada kontestan yang mereka dukung dirugikan. Sebaliknya, kontestan yang diuntungkan akan mempertahankan keputusan KPUD. Adanya pengerahan massa dalam jumlah yang besar sangat rawan terhadap konflik horisontal, seperti yang terjadi pada Pilkada di berbagai wilayah: Jayapura, Papua Barat, Sumatera Utara, Palembang, Palopo, Makassar, Mojokerto, dan lain-lain.

Kajian ini juga mengungkap bahwa politik ambivalensi relatif otonom terhadap sistem politik nasional. Artinya, elite mencampur-adukkan politik lokal (patronase) dengan politik

nasional (demokrasi) sebagai basis memperoleh dukungan massa. Oleh karena elite memanfaatkan adat, budaya, dan agama, maka pemberian materi dan non-materi sebagai perekat relasi patron-klien dianggap hal yang wajar. Pada awalnya, motif elite memberi ialah dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Jadi, tindakan elite dinilai positif oleh ketua adat, karena memberikan solusi yang konkret. Kemudian terjadilah relasi patron-klien antara elite dengan ketua adat. Patronase tersebut dipupuk dan dipelihara bertahun-tahun hingga melahirkan kesetiaan kepada elite. Ketika elite mencalonkan diri dalam Pilkada, relasi patron-klien tersebut dikonversi menjadi dukungan suara baginya. Hal ini sah-sah saja, karena elite sudah berjasa membantu masyarakat. Artinya, elite telah berkarya nyata mengentaskan kemiskinan.

Semestinya, parpol menjadi cerminan agregasi aspirasi masyarakat, yang menempatkan seorang elite politik menjalankan tugasnya mengembangkan nilai-nilai demokrasi dengan tujuan akhir menyejahterakan masyarakat lahir dan batin. Namun, yang terjadi sebagaimana terungkap dalam kajian ini, justru aktor-aktor pemegang kuasa parpol melakukan ‘transaksi politik’ dengan kontestan di Pilkada. Aktor-aktor tersebut lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat. Dengan demikian, mereka mengingkari visi dan misi partai yang mereka rumuskan sendiri. Sebaliknya, orientasi elite politik peserta kontestasi hanya berorientasi pada perburuan rente melalui Pilkada. Tidak bisa disangkal bahwa fenomena ini lazim terjadi di berbagai daerah yang kaya minyak, gas, dan batubara, seperti Pekanbaru, Sumut, Sumsel, Kalteng, Kalsel, Papua, dan Kaltim.

Tampaknya, sudah bukan rahasia lagi bahwa seorang kontestan mesti memberikan ‘mahar politik’ kepada pimpinan partai untuk mendapat dukungan. Kontestan yang tidak

memiliki modal besar akan meminjam dana kepada para pengusaha (investor). Pasca-Pilkada dan dia menjabat sebagai kepala daerah, dia mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membayar utang kepada para investor yang telah membiayainya. Hal itu dilakukannya bisa dengan cara mencairkan mega proyek pembangunan sebagai cara mencari *fee*, atau dengan cara lain, yakni dia memberikan mega proyek tersebut kepada investor. Tender terbuka dilakukan, tetapi pemenang tender sudah ditentukan sebelumnya. Yang memenangkan tender proyek tersebut ialah mereka yang menginvestasikan uang terhadap elite dalam Pilkada. Dalam hal ini, praktik *money politics* juga dilakukan oleh para pengusaha (investor), khususnya dalam pembiayaan kampanye Pilkada. Orientasi investor melakukan tindakan *money politics* dengan tujuan untuk memenangkan tender proyek pembangunan. Dengan demikian, uang yang diinvestasikan tidak gratis, tetapi kelak menjadi mega proyek yang mendatangkan keuntungan baginya.

Kajian ini juga memotret buramnya peran elite dan parpol, khususnya dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia. Kecenderungan sikap elite politik yang pragmatis berdampak peniadaan ideologi partai sebagai pengawal tegaknya nilai-nilai demokrasi. Parpol tanpa ideologi ibarat orang berjalan tanpa dua kaki. Artinya, esensi parpol cenderung menjauhi tujuan yang diharapkan, yakni terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin. Dengan kata lain, ideologi parpol tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tetapi ideologi partai digantikan dengan perburuan rente. Dengan demikian, ada kecenderungan bahwa parpol gagal menjalankan amanah rakyat untuk menyejahterakan masyarakat lahir dan batin.

Munculnya fenomena politik ambivalensi menunjukkan penguatan politik lokal yang berbeda dengan nalar aktivis

(demokrasi). Nalar politik lokal ini dimanfaatkan oleh elite dalam rangka memengaruhi perilaku pemilih. Sementara itu, para pakar politik memaksakan penerapan sistem demokrasi Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Adanya nalar politisi yang tidak sesuai dengan sistem politik nasional tersebut menjadi masalah yang krusial dan perlu solusi secepatnya. Kalau masalah ini tidak segera diatasi, maka Pilkada dengan biaya miliaran rupiah akan terus menghasilkan kepala daerah yang korup dan rawan konflik horisontal.

G. Urgensi Rekonstruksi Teori Demokrasi

Selain kesimpulan-kesimpulan di atas, kajian ini juga mengungkapkan bahwa terjadi *incompatibility* dalam penerapan sistem demokrasi di Indonesia, tetapi para pakar politik alpa dan kurang berani mengkritisnya. Oleh karena itu, menjadi hal yang penting agar dalam ranah akademik, dirancang agenda penelitian politik lokal yang terfokus pada pencarian kearifan lokal atau demokrasi yang berbasis budaya di Indonesia. Teori demokrasi yang diajarkan di Perguruan Tinggi didominasi oleh teori Barat yang berbeda dengan budaya Indonesia. Teori demokrasi Barat tidak bisa terlepas dengan sistem nilai yang memengaruhinya, yakni individualisme, sedangkan budaya yang berlaku di Indonesia mengedepankan kebersamaan (komunal), kekerabatan dan gotong royong. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian kritis, apakah sistem *one man, one vote, one value* selaras dengan budaya Indonesia?

Sistem nilai budaya yang ada dalam masyarakat itulah yang memengaruhi cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat. Memang diperlukan suatu penelitian yang komprehensif untuk membuat sistematisasi teori demokrasi di Indonesia yang berbasis pada kearifan lokal. Maka, urgen

untuk mengupayakan riset bersama antar-Perguruan Tinggi di Indonesia yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah dalam rangka merekonstruksi teori demokrasi Barat. Tentu saja, saran ini tidak mengindikasikan penolakan teori demokrasi Barat, tetapi sebuah bangsa sudah semestinya menerapkan sistem yang cocok untuk dirinya. Oleh karena itu, sudah saatnya para peneliti dan pakar politik Indonesia berani merekonstruksi dan merumuskan teori demokrasi yang berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan kearifan lokal yang berlaku di Indonesia, menurut penulis, tidak salah sistem demokrasi menggunakan perspektif komunal yang menempatkan musyawarah sebagai pilar utama dalam memecahkan masalah. Artinya, untuk masyarakat yang hidup di pedalaman dan perbatasan seperti Kalimantan, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera yang nomaden dan tidak mengenal baca tulis tentu akan kesulitan dengan sistem *one man, one vote, one value*. Bukankah mereka yang hidup di pedalaman juga warga negara Indonesia? Mereka tidak memahami tata cara mencoblos parpol atau nama caleg yang tidak pernah dikenalnya. Tentu saja, ini merupakan paksaan sistem nilai yang tidak dipahami oleh masyarakat lokal.

Dalam perspektif komunal yang sangat lekat dengan kekerabatan, pilihan seseorang ditentukan oleh ketua adat atau tokoh masyarakat. Pilihan individu untuk menentukan partai atau caleg dapat memicu kerawanan konflik horisontal, karena bisa berbeda dengan pilihan ketua adat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam berdemokrasi di Indonesia, karena keragaman budaya yang berbeda-beda. Sistem *one man, one vote, one value* nampaknya demokratis, tetapi tidak memberikan solusi terhadap masyarakat yang masih terikat

dengan adat yang memiliki pola pikir dan perilaku individu yang sangat dipengaruhi oleh ketua adat (komunitas).

Menurut penulis, dengan adanya pengaruh adat terhadap individu, maka budaya pemberian sebagai pengikat relasi patron-klien suatu keniscayaan. Dalam hal ini, elite tidak salah melakukan pemberian materi dan non-materi dengan motif mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Sebaliknya, dia juga dapat mewakili kepentingan adat atau komunitas yang disantuninya untuk menyuarakan aspirasi mereka terhadap pemerintah. Namun, elite salah dan melanggar undang-undang apabila dia memberikan bantuan dengan maksud untuk membeli suara pemilih.

Memperhatikan adanya kesenjangan budaya antara masyarakat kota dengan pedalaman atau pesisir, mungkin penerapan alternatif perpaduan sistem proporsional terbuka dan sistem distrik perlu dikaji serius. Sistem proporsional terbuka diterapkan untuk masyarakat kota, sedangkan sistem distrik untuk masyarakat pedalaman dan pesisir. Permasalahan yang muncul adalah adanya dua sistem Pilkada yang diterapkan sekaligus akan mengalami kesulitan dalam implementasinya. Sistem distrik selama ini diterapkan untuk memilih anggota DPD yang tampaknya juga kurang efektif menyuarakan aspirasi masyarakat pedalaman atau pesisir, karena mereka yang mencalonkan diri belum tentu dikenal dan mewakili distrik. Hal ini dapat ditengarai dengan jejak rekam calon anggota DPD yang belum berkarya nyata bagi masyarakat. Idealnya, syarat calon anggota DPD sudah berkarya nyata dalam masyarakat yang dibuktikan dengan program-program konkret pengentasan kemiskinan minimal tiga tahun. Dalam hal ini, revisi terhadap Undang-Undang Pemilu penting dilakukan, agar peran calon DPD diutamakan bagi mereka yang sudah berkarya nyata mengentaskan

kemiskinan dalam masyarakat. Namun, sistem distrik juga memiliki kelebihan. Sistem ini memaksa elite untuk berlomba-lomba berkarya nyata dalam pengentasan kemiskinan dan kebodohan. Elite akan dikenal dekat oleh masyarakat, karena dia merajut patronase jauh hari sebelum Pilkada. Masyarakat akan menikmati pembangunan secara konkret, karena dia harus berkarya nyata dahulu sebelum dipilih.

H. Rekomendasi Penulis terhadap Penelitian Sejenis di Tanah Air

Penulis menyadari penelitian yang dikemas dalam buku ini memiliki keterbatasan dalam hal metodologi, karena hanya berdasarkan studi kasus Pilkada di Kaltim (2003-2008). Namun, penulis telah menemukan dan meletakkan argumen dasar bahwa politik ambivalensi relatif otonom terhadap demokrasi prosedural. Tidak efektifnya peran parpol dalam mengagregasi kepentingan masyarakat menyebabkan menguatnya nalar politisi dalam Pilkada.

Oleh karena itu, untuk para peneliti selanjutnya, penulis menyarankan dua hal. *Pertama*, perlunya penelitian nalar politisi dan nalar aktivis di balik kemenangan Pilkada di daerah lain, seperti Sumatera dan Papua. Daerah Sumatera yang kaya sumber daya alam (SDA) dan keberagaman etnis serta agama menarik untuk diteliti. Demikian juga dengan Papua yang kaya SDA dan multietnis. Kesamaan kedua daerah yang kaya SDA tersebut menarik untuk diteliti, khususnya pemanfaatan elite terhadap adat dan politik modern dalam rangka merengkuh kekuasaan. Sasaran utama mereka dalam perebutan kekuasaan ini tak lain adalah untuk menguasai hasil SDA. Secara faktual, kekayaan SDA menjadi magnet bagi para investor untuk menginvestasikan modalnya. Oleh karena

itu, peran investor terhadap elite lokal, khususnya dalam pembiayaan Pilkada menarik juga untuk diteliti.

Kedua, perlunya penelitian studi banding tentang nalar aktivis (demokrasi) dalam merengkuh kekuasaan antara India, Filipina, Thailand, dan Indonesia. Kondisi sosial budaya di India, Filipina, dan Thailand hampir sama dengan Indonesia, khususnya dalam hal menguatnya pengaruh adat, kekerabatan, dan agama. Maraknya parpol dan proses demokratisasi di India, Filipina, Thailand, dan Indonesia memiliki kemiripan. Dengan adanya studi komparasi yang mendalam tersebut diharapkan argumen dasar penelitian ini dapat diuji kebenarannya. Apakah ada pencampuradukan nalar politisi dan nalar aktivis (demokrasi) dalam merengkuh kekuasaan? Sebaliknya, untuk menguji argumen dalam penelitian ini dapat diajukan pertanyaan terbalik, “Mengapa perilaku pemilih mudah dipengaruhi oleh elite melalui pemberian dan rekayasa sosial?”

Indeks

O

otonomi daerah 24, 37, 82, 83

P

partai politik 16, 27, 112, 163

Golkar 16, 17, 23, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
53, 54, 55, 56, 59, 61, 83,
87, 95, 114, 117, 118, 119,
120, 125, 131, 132, 149,
152, 154, 155

Masyumi 42

MERDEKA 49, 50, 51, 52

PAN 16, 42, 43, 45, 46, 48, 49,
51, 52, 53, 112, 118, 119,
131, 132, 149, 151, 152

Partai Demokrat 45, 48, 66

Partai Pelopor 48, 112

Patriot 51, 52, 132, 149, 151

PBB 50, 51, 52, 53, 132

PBR 49, 50, 51, 52, 53, 149, 151,
152

PDI-P 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 50, 51, 52,
53, 54, 112, 117, 118, 119,
120, 131, 132, 133, 149,
152, 154, 155

PDK 50, 51, 52, 53, 132, 149, 151

PDS 48, 49, 50, 51, 52, 53, 112,
132, 149, 151, 152

PIB 48, 49, 50, 51, 52, 53, 112,

132, 149, 151, 152

PKB 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51,
52, 53, 112, 118, 119, 132,
151, 152

PKPB 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51,
52, 53, 112, 118, 119, 132,
151, 152

PKS 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51,
52, 53, 112, 118, 119, 132,
151, 152

PNBK 49, 50, 51, 52, 112

PP 52, 71, 83, 149, 151

PPDK 52, 71, 83, 149, 151

PPP 52, 71, 83, 149, 151

patron 52, 71, 83, 149, 151

bangsawan 2, 3, 6, 10, 11, 13, 31,
35, 46, 55, 56, 57, 72, 76,
77, 78, 79, 80, 84, 99, 100,
101, 102, 103, 106, 108,
113, 121, 123, 134, 150,
166, 167, 170, 173, 174,
175, 176, 177, 185, 187,
188, 189

tuan tanah 10, 11

patronase 6, 7, 9, 10, 11, 13, 22, 31,
33, 54, 57, 72, 73, 75, 76,
77, 78, 79, 86, 92, 105, 106,
108, 110, 112, 113, 114,
116, 117, 120, 121, 128,
137, 143, 151, 154, 155,
156, 158, 159, 160, 161,
163, 164, 165, 166, 167,

168, 169, 170, 171, 172,
 173, 176, 179, 180, 181,
 182, 184, 185, 187, 190,
 191, 192, 193, 199
 Pejabat Bupati Kutim 86
 pejabat publik 73
 Pemda 34, 37, 59, 76, 78, 83, 84,
 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94,
 95, 96, 97, 98, 99, 105, 107,
 108, 109, 121, 137, 146
 pemekaran wilayah 37, 48, 82, 83,
 84, 85, 87
 Pemilihan Kepala Daerah 37, 48,
 82, 83, 84, 85, 87
 Pemilu 37, 48, 82, 83, 84, 85, 87
 pencitraan 9, 17, 21, 23, 29, 59, 68,
 69, 142, 164, 192
 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 71, 83
 Pendapatan Domestik Regional
 Bruto (PDRB) 60
 Perusda Pertambangan dan Energi
 Kutim (Perusda PEKT) 98
 petahana 17, 23, 48, 114, 117, 118,
 120
 Pilkada 17, 23, 48, 114, 117, 118,
 120
 PKPU 17, 23, 48, 114, 117, 118,
 120
 poliarkhi 25, 28
 political marketing 16, 17, 18
 positioning 17
 segmenting 17
 targeting 17
 politik
 Ferdian Hidayat 46, 50
 politik dagang sapi 4, 17
 politik lokal 34, 35, 44, 84, 146,
 160, 193, 195, 196
 politisi 14, 15, 24, 33, 34, 35, 36,
 54, 74, 75, 116, 147, 157,
 158, 164, 165, 167, 171,
 172, 175, 179, 180, 181,
 185, 186, 187, 188, 189,
 190, 192, 196, 199, 200
 Abdal Nanang 51, 114
 Abu Thalib Chair 51, 114
 Achmad Amins 51, 114
 Aji Sofyan 51, 114
 Amins 51, 114
 Ardiansyah 51, 114
 Asia 51, 114
 Awang Faroeq Ishak, AFI 14, 15,
 24, 33, 34, 35, 36, 54, 74,
 75, 116, 147, 157, 158, 164,
 165, 167, 171, 172, 175,
 179, 180, 181, 185, 186,
 187, 188, 189, 190, 192,
 196, 199, 200
 Awang Ishak 51, 114
 Didik Effendi 48, 52
 Diran 20, 51, 114
 Djaang 46, 50
 Effendi 47, 48, 52
 Encik 48, 52, 76
 Farid Wadjdy 142, 149, 156
 Gunawarman 47, 52
 Hadi Mulyadi 149
 Hamid 47, 52, 144
 Hamzah Haz 92, 96
 Heru Bambang 149
 Hifnie Syarkawie 120
 H. M. Irkham 46, 49
 Imam Mundjiat 119, 120
 Irysadi 114
 Ismael Thomas 48, 52
 Isran Noor 47, 112, 114
 Jusuf Serang Kasim 149
 Kasmiruddin 46, 50
 Luther Kombong 149
 Mahyudin 48, 51, 87, 88, 89, 95,
 98, 99, 110, 114
 Masykur 46, 50
 Mujiono 51, 114
 Narang 20
 Nusyirwan Ismail 144, 149

Otto Ihalauw 22
 Pabotingi 47, 52
 Rustriningsih 17
 Samsuri 45, 46, 49
 Samsuri Aspar 45, 49
 Siti Nur Aeni 51, 114
 Sjachranie 55, 56, 57, 58, 59, 60,
 61
 Soeharto 38, 39, 42, 45, 55, 59,
 60, 61, 62, 73, 88, 101, 104
 Sofyan Hasdam 48, 51
 Sulaiman 48, 50, 51
 Sultan Kutai 46, 57, 75, 76, 77,
 78, 82, 84, 85, 102
 Suwarna 44, 86, 97, 98, 117, 118,
 119, 120
 Syahid Daroini 48, 51
 Syaokani 45, 46, 48, 49, 83, 84,
 87, 88, 105, 117, 119, 120,
 125, 126, 149
 Thamrin AD 48
 Theo Syafei 118, 119, 120
 Yurnalis Ngayoh 117, 119, 149
 Yusuf Serang Kasim 48
 pro-demokrasi 12, 73
 elite dissident groups and intel-
 lectuals 12
 student activist 12
 the new generation of pro de-
 mocracy and human rights
 NGO 12
 the old generation of NGOs 12
 program pemerintah 62
 Gerakan Berbasis Pada Peman-
 gunaan Agrobisnis 59, 99
 Wajib Belajar 12 tahun 106, 127
 proses kandidasi 18
 PT. KPC 82, 83, 85, 86, 87, 97, 98,
 99, 102
 putera daerah 20, 23, 48, 56, 58,
 61, 82, 84, 88, 101, 105,
 122, 127, 133, 134, 135,
 151, 155, 186

R

rational choice 21, 22, 30, 65, 67
 rationality in action 11
 real politics 11
 real rationality 11
 regulasi 7, 8, 15, 23, 62, 63, 64,
 74, 100, 101, 103, 116, 145,
 146, 147, 150, 158, 159,
 177, 181, 182, 184, 185,
 188, 189, 193
 rekayasa sosial 9, 32, 144, 145,
 146, 151, 178, 185, 187, 200
 relasi patron-klien 2, 10, 14, 57,
 73, 77, 79, 103, 105, 110,
 114, 122, 123, 124, 125,
 127, 134, 137, 138, 143,
 147, 150, 151, 155, 159,
 160, 161, 162, 164, 165,
 166, 169, 171, 178, 180,
 185, 187, 189, 190, 191,
 194, 198
 Republik Indonesia 36, 76, 78, 82,
 102

S

saksi penghitungan suara 39
 Sidang Paripurna DPRD 87, 117,
 119, 120
 sistem budaya 1, 27
 kekerabatan 1, 10, 11, 14, 17, 19,
 22, 123, 125, 128, 164, 165,
 167, 196, 197, 200
 kolektivitas 1
 sistem demokrasi 1, 5, 27, 28, 29,
 30, 177, 196, 197
 sistem monarki konstitusional 77
 solidaritas etnis 1, 19
 strategi kampanye 20, 32
 strategi pemenangan 24, 31, 62,
 120, 124
 defensif 8, 9, 16, 17, 18, 42, 163,
 164

ofensif 8, 9, 16, 17, 18, 163, 164
musuh bersama 9, 129, 133,
134, 135, 142, 144, 147,
151, 180, 187, 192
rasa kekitaan 9, 129, 133, 134,
142, 143, 144, 147, 151,
180, 187, 192
suara 3, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 28, 39,
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 63,
65, 67, 112, 113, 114, 118,
119, 120, 122, 125, 147,
148, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 164, 165,
166, 168, 169, 170, 171,
177, 180, 181, 187, 188,
189, 190, 192, 194, 198
sumber daya alam (SDA) 36, 133,
199
surat suara 39

T

tanah pawatasan (tanah ulayat) 82
teoritikus
Alkostar 70
Angus Campbell 67
Anthony Downs 30, 67
Aristoteles 26
Azis 20, 52
Badaranie Abbas 76
Berelson 66, 67
Cunningham 29
Dahl 7, 12, 13, 25, 27, 28, 157,
163
Diamond 7, 13, 26, 27, 30, 157,
163
Downs 8, 30, 67
Flyvbjerg 11, 24, 25
Gaudet 66, 67
Gould 28, 29
Haboddin 71
Hartati 18
Haryanto 22, 23

Ismail 16, 144, 149
Ismardi 17
Kacung Maridjan 70
Kerkvliet 191
Kocu 21, 22
Lazarsfeld 66
Lijphart 7, 29
Linz 7, 30, 157, 163
Lipset 7, 30, 157, 163
Mukhlis 16
Mulyana W. Kusumah 70
Nugraheni 17
Paskarina 18
Ramadlan 19, 20
Rasyid 18
Robert Kahn 67
Sahdan 71
Saldi Isra 70
Sartori 7, 13, 28
Schroder 8, 158, 163, 165
Schumpeter 26, 27
Scott 2, 8, 9, 10, 11, 79, 124, 158,
159, 161, 162, 165, 166,
191, 192
Syarkawi 19, 20, 50
Umasugi 19
Wolf 8, 9, 10, 11, 191

U

utang budi 10, 11, 13, 14, 22, 23,
108

KEPUSTAKAAN

- Abbas, Badaranie, "Pengaruh Lingkungan terhadap Aspek-aspek Tradisionil dalam Birokrasi Kesultanan Kutai di Tenggarong" dalam Soetoen, Anwar (ed.), 1975. *Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai*. Tenggarong: Pemda Kutai.
- Ackerman, Susan Rose, 2006. *Korupsi Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Adas, M., 1979. *Prophets of Rebellion: Millenarian Protest Movements against the European Colonial Order*. Chapel Hill: The University of North Caroline Press.
- Adriani, Awang, 1996. *Wujud Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli di Kaltim*. Samarinda: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ahimsa Putra, Heddy, Shri, 1988. *Minawang : Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, "Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan" dalam *PRISMA*, No.6 Th. XXV, Juni 1996.
- _____, 1993. *The Politics of Agrarian Change and Clientelism in Indonesia: Bantaeng, South Sulawesi, 1983 to 1990. Dissertation*. Columbia University.
- Alatas, S.H., 1987. *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.

- Alkostar, Artidjo, 2008. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Antlov, Hans, "Not Enough Politics! Power, Participation and the New Democratic Polity in Indonesia" dalam Aspinal, Edward and Greg Fealey (ed.), 2003. *Local Power and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Antlov, Hans dan Pujio Semedi, 2002. *Politik Negara dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal*. Yogyakarta: Lempera Pustaka Utama.
- Antlov, Hand dan Sven Cederroth (ed.), 2001. *Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus Pemerintahan Otoriter*. Jakarta : Yayasan Obor.
- Ardans, H.M., 1992. *Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa ke Masa*. Samarinda: Pemda Kaltim.
- Arghiros, Daniel, 2001. *Democracy Development and Decentralization in Provincial Thailand*. Surrrey: Suzon.
- Attwood, D.W., "Patrons and Mobilizers: Political Entrepreneurs in an Agrarian State' dalam *Journal of Anthropological Research*, Vol. 30, No.4. Winter, 1974.
- Aspinal, Edward and Greg Fealey (ed.), 2003. *Local Power and Politics in Indonesia* Singapore: ISEAS.
- Aziz, Abdul, 1986. *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Kalimantan Timur*. Samarinda: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahrah, Achmad, 2000. *Kamus Bahasa Kutai Umum-Indonesia*. Tenggarong: Lembaga Pembinaan Kebudayaan Kutai.
- Barth, Frederik, 1965. *Political Leadership among Swat Pathans*. New York: Humanities Prsss.
- Barth, Frederik, 1969. *Ethnic Groups and Boundaries*. Boston: Little Brown.

- Bell, Daniel, 1975. "Ethnicity and Social Change" dalam N. Glazer and D.P. Moynihan (ed.), *Ethnicity*. Cambridge: Harvard University Press.
- Berghe, van den Piere, 1995 "Does Race Matter?" dalam *Nations and Nationalism*, 1:3.
- Beteille, Andre, 1965. *Caste, Class and Power*. Berkeley: University of California Press.
- Biro Pusat Statistik, 2002. *Kalimantan Timur*. Jakarta: BPS.
- Biro Pusat Statistik, 2008. *Kalimantan Timur dalam Angka 2007*. Samarinda: BPS.
- Blau, Peter M., 1964. *Exchange and Power in Social Life*. New York: Wiley.
- Boissevain, Jeremy, "Patronage in Sicily" dalam *Man, New Series*, Vol.1, No.1, March, 1966.
- _____, 1974. *Friends of Friends: Networks, Manipulators and Coalitions*. Oxford: Basil Blackwell.
- Brass, Paul R., 1991. *Ethnicity and Nationalism*. New Delhi-London: Sage Publication
- Brown, David, 1994. *The State and Ethnic Politics in Southeast Asia*. London : Routledge
- Budhisantoso, S., 1992. *Salasila Kutai*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Campbell, J.K., 1974. *Honour, Family, and Patronage*. Oxford: Oxford University Press.
- Cohen, Abner, 1969. *Customs and Politics in Urban Africa: A Study of Hausa Migrants in a Yoruba Town*. Berkeley: University of California Press.
- Cohen, R., 1966. *African History*. Boston: Boston University.
- Cohen, J. L. and J. Rogers, 1983. *On Democracy*. New York: Penguin.

- Dachlan, Oemar, 2000. *Kalimantan Timur dengan Aneka Ragam Permasalahannya*. Jakarta: Yayasan Bina Ruhui Rahayu.
- _____, 2002. *Sekelumit Sejarah Kalimantan Timur dalam Bidang Pemerintahan*. Samarinda: Biro Hubungan Masyarakat Propinsi Kalimantan Timur.
- Danandjaja, J. dan Koentjaraningrat, 2004. "Penduduk Kepulauan Sebelah Barat Sumatra" dalam *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Dharma, Aji Surya, 2001. *Erau Kutai-Kalimantan Timur*. Tenggarong: Dinas Pariwisata Kabupaten Tingkat II-Kutai.
- Diamond, Larry, 1999. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press.
- Duverger, Maurice, 2003. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Eller, Jack and Reed Coughlan, 1993. "The Poverty of Primordialism: The Demystification of Ethnic Attachments" dalam *Ethnic and Racial Studies*, 16:2.
- Erb, Maribeth, "Kebangkitan Adat di Flores Barat: Budaya, Agama dan Tanah" dalam Davidson, Jamie S., David Henley dan Sandra Moniaga (ed.), 2010. *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Feith, Herbert, 1971. *The Indonesian Election of 1955*. Ithaca-New York: Cornell University.
- Fenny. D., "The Moral or rational Peasant? Competing Hypotheses of Collective Action" dalam *Journal of Asian Studies* Vol. 42, No. 4, Th. 1983.
- Fitzpatrick, Daniel, "Tanah, Adat dan Negara di Indonesia Pasca Soeharto: Perspektif Seorang Ahli Hukum Asing" dalam Davidson, Jamie S., David Henley dan Sandra

- Moniaga (ed.), 2010. *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Foster, George, "The Dyadic Contract in Tzintzuntzan, II: Patron-Client Relationship" dalam *American Anthropologist*, New Series, Vol. 65, No.6. December, 1963.
- _____ "The Dyadic Contract: A Model for the Social Structure of a Mexican Peasant Village" dalam *American Anthropologist*, New Series, Vol. 63, No.6. December, 1961.
- Husserl, Edmund, 1970. *Logical Investigation*. New York: Humanities Press.
- Geiger, W., 1960. *Culture of Ceylon in Medieval Times*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
- Gamson, A. William, 1968. *Power and Discontent*. Homewood-Illinois: Dorsey.
- Geiger, W., 1960. *Culture of Ceylon in Medieval Times*. Weisbaden: Otto Harrassowitz.
- Geertz, Clifford (ed.), 1963. *Old Societies and New States*. New York: Free Press.
- _____ "Afterword: The Politics of Meaning" dalam Claire Holt (ed.), 1972. *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca-London: Cornell University Press
- Gie, Kwik Kian, 2006. *Kebijakan Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Girling, John, 1997. *Corruption, Capitalism, and Democracy*. London and New York: Routledge.
- Gouldne, A., "The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement" dalam S.W. Schimdt *et al.*, 1977. *Friends, Followers, and Factions*. Berkeley: University of California Press.

- Gunawan, I Ketut, 2004. *A Rise of Forest Conflict in East Kalimantan during Indonesia' Early Stage of Democratization*. Gottingen: Cuvilier Verlag Gottingen.
- Hadiz, Vedi R., "Reorganizing Political Power in Indonesia: A Reconsideration of So- Called Democratic Transitions" in M. Erb, P. Sulistiyanto and C. Fucher (ed.), 2005. *Regionalism in post Suharto Indonesia*. London: Routledge-Curzon.
- Harrison, Selig, 1986. "Ethnicity and Political Stalemate" dalam Ali Banuazizi and Myron Weiner (eds), *The State, Religion, and Ethnic Politics: Afghanistan, Iran and Pakistan*. New York: Syracuse University Press.
- Hecter, Michael, 1986. "A Rational Choice Approach to Race and Ethnic Relations" dalam D. Mason and J. Rex (eds.), *Theories of Race and Ethnic Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Held, David, 1987. *Models of Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Held, David and J. Keane, "Socialism and The Limits of State Action" dalam J. Curran (ed.), 1984. *The Future of the Left*. Cambridge: Polity Press.
- Hidayat, Syarif. "Pilkada, Money Politics and the Dangers of Informal Governance Practice" dalam Maribert Erb dan Priyambudi Sulistiyanto (ed.), 2009. *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Election for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: ISEAS.
- Hollnsteiner, Mary R., 1963. *The Dynamic of Power in a Philippine Municipality*. Quezon City-Philippines: Community Development Research Center.

- Hornby, AS, 1986. *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English*. New York-Toronto: Oxford University Press.
- Horowitz, Donald L., 1985. *Ethnic Groups in Conflict*. Barkeley: University of California Press.
- Huberman, Michael A., and Matthew B. Miles, “Data Management and Analysis Methods” dalam Denzin, K.Norman and Yvonna S. Lincoln, 1994. *Handbook of Qualitative Research*. London : Sage Publications
- Hutchinson, John dan Anthony D. Smith, 1996. *Ethnicity*. Oxford-NewYork: Oxford University Press.
- Hyland, James. L., 1995. *Democratic Theory: The Philosophical Foundations*. Oxford Road, Manchester: Manchester University Press.
- Ishak, Awang Faroek, tt. *Prospek Pengembangan Kawasan Industri Maloy dan Pelabuhan Maloy dalam Menyongsong Era Globalisasi*. Bahan presentasi profil Kutim. Tidak diterbitkan.
- Ishak, Awang Faroek, tt. *Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kalimantan Timur 2008-2013*. Bahan presentasi, tidak diterbitkan.
- Janowitz, Morris, 1985. *Hubungan-hubungan Sipil Militer*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____, 1964. *The Military in the Political Development of New Nations*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Johnston, Michael, 2005. *Syndromes of Corruption*. UK: Cambridge University Press.
- KPK, 2006. *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK.

- Karim, Abdul Gafar (ed.), 2006. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Jurusan Ilmu Pemerintahan-Fisipol UGM.
- Kahn, Joel S., 1988. *Southeast Asian Identities: Culture and the Politics of Representation in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand*. Singapore-London: Institute of Southeast Asian Studies.
- Kaufman, Robert R., "The Patron-Client Concept and Macro-Politics: Prospects and Problems" dalam *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 16, No.3, June 1974.
- Kellas, James G. 1991. *The Politics of Nationalism and Ethnicity*. New York: St.Martin's Press Inc.
- Kitschelt, Herbert dan Steven I. Wilkinson (ed.), 2007. *Patrons, Clients and Politics: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kerkvliet, Benedict J. Tria, "Toward a More Comprehensive Analysis of Philippine Politics: Beyond the Patron-Client" dalam *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 26, No.2, September 1995.
- Koentjaraningrat, 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: UI Press.
- _____, 2004. "Kebudayaan Penduduk Pantai Utara Irian Jaya" dalam *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Kuncoro, Mudrajad, 2008. *Visi, Misi dan Strategi AFI untuk Kaltim Bangkit 2013*. Yogyakarta: tp.
- Lande, Carl, 1964. *Leaders, Factions and Parties: The Structure of Philippine Politics*. New Haven: Yale Southeast Asia Studies.

- _____ “Networks and Groups in Southeast Asia : Some Observations on the Group Theory of Politics” dalam S. W. Schmidt dkk. (eds.), 1977. *Friends, Followers and Factions*. Berkeley : University of California Press.
- Lane, Jan-Erik dan Svante Ersson, 2003. *Democracy: A Comparative Approach*, London-New York: Routledge.
- Lazarfeld, Paul, Bernard Berelson dan Hazel Gaudet, 1948. *The People Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign*. New York: Columbia University Press.
- Lemarchand, Rene dan Shmuel Noah E., 1972. *Political Clientelism, Patronage and Development*. London: Sage Publishing.
- Liddle, William R., 1970. *Ethnicity, Party, and National Integration*. New York-London: Yale University.
- Magenda, Burhan, 1991. *East Kalimantan: The Decline of Commercial Aristocracy*. Ithaca-New York: Cornell Modern Indonesian Project.
- Marijan, Kacung, 2006. *Demokrasi di Daerah Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*. Surabaya: Eureka.
- Mas'od, Mohtar, 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Maunati, Yekti, 2004. *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKIS.
- Mauss, Marcel, 1954. *The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies*. Glencoe-Illinois: The Free Press of Glencoe.
- Mees, C.A., 1935. *De Kroniek van Koetei*. Leiden-NV Uitgev: Santport.

- Michie, Barry H., "The Transformation of Agrarian Patron-Client Relations: Illustration from India" dalam *American Ethnologist*, Vol.8, No.1. February, 1981.
- Moedjanto, G., 1993. *The Concept of Power in Javanese Culture*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Morse, Richard M., "Latin American Cities: Aspects of Function and Structure" dalam *Comparative Studies in Society and History*, Vol. IV, No.4. July, 1962.
- Myrdal, Gunnar, 1957. *Rich Lands and Poor*. New York: Harper & Row.
- Nash, Manning, 1965. *The Golden Road to Modernity*. New York: Wiley.
- Neuman, Lawrence W., 1997. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research Approaches*. Third Edition. Boston: Allyn and Bacon.
- Nordholt, Henk Schult dan Gerry van Klinken, 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- O'Donnell, Guillermo, Philipe C. Schmitter dan Laurence Whitehead (eds.), 1986. *Transition from Authoritarian Rule: Comparative Perspective*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Pelras, Christian, "Patron-Client ties among the Bugis and Makassarese of South Sulawesi" dalam *Bijdragen tot de Taal, Land en Volkenkunde*, Vol.156, No.3, Authority and Enterprise among the peoples of South Sulawesi, 2000.
- _____ "Hubungan Patron-Klien pada Masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan" dalam Tol, Roger, Kess van Dijk dan Greg Acciaioli (ed.), 2009. *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*. Jakarta: Ininnawa-KITLV.

- Philips, Herbert, 1965. *Thai Peasant Personality*. Berkeley: University of California.
- Popkin, S. L., 1979. *The Rational Peasant*. Berkeley: University of California Press.
- Powell, John Duncan, "Peasant Society and Clientelist Politics" dalam *American Political Science Review*, 64. June, 1970.
- Pratikno, "Political Parties in Pilkada: Some Problems for Democratic Consolidation" in Maribeth Erb and Priyambudi Sulistiyanto, 2009. *Deepening Democracy in Indonesia?*. Singapore: ISEAS.
- Ranawidjaja, Usep, 1955. *Swapraja Dahulu dan di Hari Kemudian*. Jakarta: Djambatan.
- Rasyid, M. Ryass, "Regional and Local Politic in Indonesia" Aspinal, Edward and Greg Fealey (eds.), 2003. *Local Power and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Rifai, Amzulian, 2003. *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rothschild, Joseph, 1981. *Ethnopolitics*. New York: Columbia University Press.
- Rousseau, Jerome, 1990. *Central Borneo: Ethnic Identity and Social Life in Stratified Society*. Oxford: Clarendon Press.
- _____ "Ethnicity Identity and Social Relations in Central Borneo" dalam Judith A. Nagata (ed.), , 1974. *Pluralism in Malaysia: Myth and Reality*. Contribution to Asian Studies, Vol. 7. Leiden: Brill.
- Sahdan, Gregorius dan Muhtar Haboddin (ed.), 2009. *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*. Yogyakarta: IPD.
- Sartori, Giovanni, 1987. *The Theory of Democracy Revisited*. New Jersey: Chatham House Publishers.

- Schimpp, Michele dan Gene Ward, 2003. *Money in Politics Handbook: A Guide to Increasing Transparency in Emerging Democracies*. Washington: USAID, November.
- Schmitter, Phillipe C., "Still the Century of Corporation" dalam F.B. Pike dan T.Stritch (eds.), 1974. *The New Corporation*. World Dame: University of Nitre Dame Press.
- Schutz, A., 1970. *On Phenomenology and Social Relations*. Chicago: University Chicago Press.
- Scott, James C., "Patron-Client Polities and Political Change in Southeast Asia" dalam *The American Political Science Review*, Vol. 66, No.1, March, 1972.
- _____ "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia" dalam *The Journal of Asian Studies*, Vol. 32, No.1, November, 1972.
- Schiller, James W., 1978. *Development Ideology in New Order the Soeharto Regime and Its Critique*. Thesis. Ohio: Ohio University.
- Schroder, Peter, 2004. *Strategi Politik*. Jakarta: Fridrich Nauman Stiftung.
- Seaton, S. Lee and Henri J.M. Claessen (ed.), 1979. *Political Anthropology: The State of The Art*. The Hague: Mouton.
- Smith, Anthony D., 1992. *Ethnic and Racial Studies*, Vol. 15. No.3. London: Routledge.
- Smith, B. C., 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. London: Asia Publishing House.
- Skinner, G. William, 1959. *Local, Ethnic and National Loyalties in Village Indonesia: A Symposium*. New Haven-Conn: Yale University Southeast Asia Studies.
- Spradley, James, P., 1979. *The Ethnographic Interview*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

- Suksamran, Somboon, 1981. *Political Patronage and Control Over the Sanga*. Singapore: ISEAS.
- Soemargono (ed.), 1992. *Profil Propinsi Republik Indonesia: Kalimantan Timur*. Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.
- Soetoen, Anwar (ed.), 1975. *Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai*. Tenggarong: Pemda Kutai.
- Stack, John F. (ed.), 1986. *The Primordial Challenge*. Westport: Greenwood Press.
- Strauss, Anselm, 1987. *Qualitative Analysis for Social Scientists*, New York: Cambridge University Press.
- Strickon, Arnold dan S. M. Greenfield (eds.), 1972. *Structure and Process in Latin America: Patronage, Clientage and Power Systems*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Sulistyo, Hermawan dan A. Kadar, 2000, *Uang dan Politik dalam Pemilu 1999*. Jakarta: KIPP.
- Sumartini. L., dan Syaiful Watni, 2005. *Money Politics dalam Pemilu*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Suwondo, Bambang, 1978. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Timur*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Silverman, Sydel F., "Patronage and Community-Nation Relationship in Central Italy" dalam *Ethnology*, No.4.
- Swift, M.G., 1965. *Malay Peasant Society in Jelebu*. London: Athlone Press.
- Tri Ratnawati, "Desentralisasi dalam Konsep dan Implementasinya di Indonesia di Masa Transisi: Kasus UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah" dalam Karim, Abdul Gafar (ed.), 2006. *Kompleksitas Persoalan Otonomi*

Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Jurusan Ilmu Pemerintahan-Fisipol UGM.

- Tri Tjahjoko, Guno, 2005. *"The Story of Erau: Analisis Strukturalisme Levi-Strauss. Makalah*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM.
- van de Walle, Nicolas, "Meet The New Boss, Same As The Old Boss? The Evolution of Political Clientelism in Africa" dalam Herbert Kitschelt dan Steven I. Wilkinson (eds.), 2007. *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- van Klinken, Gerry, "Kembalinya para Sultan:Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik Lokal" dalam Davidson, Jamie S., David Henley dan Sandra Moniaga (ed.), 2010. *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Vel, Jacqueline, "Kampanye Pemekaran di Sumba Barat" dalam Davidson, Jamie S., David Henley, dan Sandra Moniaga (ed.), 2010. *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur, 1991. *Visualisasi Kegiatan Minyak dan Gas Bumi di Kalimantan Timur*, Samarinda : Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur.
- Ward, Gene, Michael Pinto Duschinsky dan Herbert Alexander, 2003. *Money in Politics Handbook: A Guide to Increasing Transparency in Emerging Democracies*, Washington: USAID, November.
- Weber, Max, "Ethnic Groups" in G. Roth and C. Wittich (eds.), 1978. *Economy and Society*. Vol 1., Berkeley-Los Angeles: University of California Press.

Weingrod, Alex dan Emma Morin, "Post Peasant", *The Character of Contemporary Sardinian Society: Comparative Studies in Society and History*, Vol. 13.

_____ "Patron, Patronage and Political Parties" dalam *Comparative Studies in Societies and History*, Vol. 10, 1968.

Wilson, Monica dan Godfrey, 1945. *The Analysis of Social Change: Based on Observation in Central Africa*. Cambridge: The University Press.

Wirakusumah, Nenny, 1977. *From Kutai to Dayak*. Samarinda: Pemda Kabupaten Kutai.

Wolhoff, G. J., 1955. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Timun Mas.

Wolf, Eric, "Kinship, Friendship and Patron-Client Relationships in Complex Societies" dalam Banton, Michael, 1966. *The Social Anthropology of Complex Societies*. New York: Praeger.

_____, 1966, *Peasant*. Englewood Clieffs: Prentice Hall.

SITUS INTERNET DAN KORAN

Suwarna Terpilih Kembali Jadi Gubernur Kalimantan Timur, www.tempointeraktif.com/2 Juni 2003

Suwarna Terpilih Jadi Gubernur Kaltim 2003-2008, www.kaltim.go.id/2 Juni 2003

Theo Syafei dan Korupsi, www.suarapembaruan.com/19 Juni 2003

PDI Perjuangan Tolak Pengunduran Diri Theo Syafei, www.korantempo.com/23 Juli 2003

Mencari Solusi dari Konflik di Kutai Kartanegara, www.jawapos.co.id/27 Januari 2005

Golkar Kukar dukung Syaukani Calon Tunggal Gubernur Kaltim, www.kutaikartenegro.com/ 12 September 2006

Isra, Saldi, “Perahu Pukat Harimau” dalam *Kompas*, 25 Juli 2007

Syaukani Paling Fenomenal, www.detik.com/ 21 September 2007

Bupati Kutim Siap Diperiksa Terkait dugaan Korupsi Bukit Pelangi, www.merdeka.com/ diakses 27 November 2007

Korupsi, Syaukani Dihukum 2,5 Tahun, www.kompas.com/ 15 Desember 2007

Syaukani: Ya.. Mau Apa Lagi, www.kompas.com/ 15 Februari 2008

Sidang Gugatan Pilkada Kaltim Memasuki Tahap Putusan, www.okezone.com/ 15 Oktober 2008

Dinamika Banjar dan Kutai, www.kompas.com/ 17 Februari 2009

Rp.4,5 Trilyun Royalti Tambang Macet, www.bongkar.com/ 4 Maret 2009

Terjun Bebasnya Golkar, www.bongkar.co.id/ 29 Agustus 2009

Amunisi Baru Demokrat, www.bongkar.co.id/ 31 Agustus 2009

Golkar Sepi Peminat, www.bongkar.co.id/ 19 September 2009

Multi Etnis Warnai Pertarungan Politik di Dapil Kaltim, www.harianpelita.com/ diakses 29 Januari 2010

Pesona Natal Ismael Thomas, www.bongkar.co.id/ 19 Januari 2010

Mogok Massa di Kukar, www.kaltimpost.co.id/ diakses 1 Februari 2010

Bagaimana Kronologi Penjualan Saham PT KPC?, www.kaltim.go.id/ 15 Juli 2010

Awang Faroek Siap Mental, www.tribunkaltim.co.id/diunduh tanggal 29 Juli 2010,

Taring media massa di ranah politik, www.kompas.com/diakses 7 Februari 2011

Suwarna Turut terima Keuntungan Proyek Damkar, www.hukumonline.com/diakses 18 Juni 2011

Sogok Miliaran Rupiah Ulah Siapa ?, 18 Juni 2011

Warga Hancurkan Kantor Golkar dan PDI-P Kaltim, www.gatra.com/diakses 18 Juni 2011

Rahasiakan Kegiatan, Siapkan Waktu TemuiKonstituen, www.kaltimpost.web.id/diakses 18 Juni 2011

Kunjungi 76 Desa, Awang pun Bisa Tertawa, www.kaltimpost.co.id/diakses 18 Juni 2011

Awang Faroek dari Kasus Bukit Pelangi ke Saham KPC, www.tribunnews.com/diakses 19 Juni 2011

Menengok Kesibukan Tim Sukses Calon Bupati Kutim, www.kaltimpost.web.id/diakses 20 Juni 2011

Abdal Resmi Dicapot dari PDIP Kutim, www.suarakaryaonline.com/diakses 20 Juni 2011

Syaukani Menyesal Mengangkat Suwarna, www.dprdkutaikartanegara.go.id/diakses 20 Juni 2011

Korupsi Bansos Kutim 2007, www.bongkaronline.com/diakses 20 Juni 2011

Dana Kampanye AFI, www.jawapos.com/diakses 20 Juni 2011

KPK Umumkan Kekayaan Para Pejabat di Kaltim, www.kpk.go.id/diakses 20 Juni 2011

Hasil Pilkada Kaltim, www.kpudkaltim.go.id/diakses 20 Juni 2011

Awang Faroek di demo Timsesnya, www.korankaltim.com/diakses 20 Juni 2011

Saya Siap Mundur Kalau Terbukti Korupsi, www.awangfaroukishak.com/diakses 20 Juni 2011

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia/ No.380K/Pid Sus/2007, www.mahkamahagung.go.id/diakses 20 Juni 2011

Proyek Ratusan Miliar Rupiah di Kaltim diduga di Mark Up, www.eramuslim.com/diakses 21 Juni 2011

Mayoritas Fraksi DPRD Kaltim Setuju Menonaktifkan Suwarna, www.suarakaryaonline.com/diakses 22 Juni 2011

Hasil Pemilu 2004, www.elshinta.com/diakses 29 Juni 2011

Hasil Pemilu 2004, www.kpu.go.id/diakses 29 Juni 2011

Hasil Pemilu 2004, www.kpu.go.id/Kalimantan Timur/diakses 29 Juni 2011

Korupsi Divestasi KPC, www.infokorupsi.com/diakses 21 Juli 2011

Kaki Tangan KPC, www.bongkar.com/diakses 23 September 2011

155 Kepala Daerah Jadi Terangka Korupsi, www.vivanews.com/diakses 24 Nov.2011

Sang entrepreneur yang visioner, www.awangfaroeekishak.com/diakses 31 Januari 2012

Pendidikan untuk semua, www.awangfaroeekishak.com/diakses 31 Januari 2012

Membangun Kutai Timur, www.awangfaroeekishak.com/diakses 8 Februari 2012

Ormas KALIMA, www.awangfaroeekishak.com/diakses 18 Februari 2012

Jejak Rekam AFI 1, www.awangfaroeekishak.com/diakses 19 Maret 2012

Jejak Rekam AFI 2, www.awangfaroekishak.com/diakses 19 Maret 2012

Curriculum Vitae AFI, www.awangfaroekishak.com/diakses 19 Maret 2012

Jejak Tanah Kesultanan Kutai, Blog Charles Siahaan Cyndicate/
diakses 2 April 2012

Rekam Jejak AFI 4: Membangun Kutai Timur, www.awangfaroekishak.com/diakses 19 April 2012

Langkah yang tertunda, www.awangfaroekishak.com/diakses 19 April 2012

PKS Dituding Minta Rp. 50 milyar untuk dukung Jokowi, dalam www.tempo.co.id/diakses 17 Agustus 2012

Jangan Biarkan Koruptor Menjabat Kembali Sebagai Kepala Daerah, www.antikorupsi.org/diakses 21 Agustus 2012

TESIS DAN DISERTASI

Andi, Abdul Azis, 2007. *Kepemimpinan Akomodatif dalam Keberagaman Etnis: Studi Kasus Model Kepemimpinan Gubernur Provinsi Sulteng Pasca Pilkada 2005*. Tesis. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Bangsawan, Anugra, 2007. *Perilaku Memilih dalam Pilkada Langsung: Studi Kasus terhadap Kemenangan Ahok di Kabupaten Belitung Timur*. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM.

Hartati, Andi, 2009. *Comparasi Political Marketing Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Bantaeng Propinsi Sulsel 2008*. Tesis. Yogyakarta: PLOD-Fisipol UGM.

Haryanto, 2013. *Politik Kain Timur: Memahami Kekuasaan dan Mobilisasi Dukungan (Studi Kasus Pemanfaatan Tradisi untuk Meraih Kekuasaan dalam Pilkada di*

Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, 2010). Naskah Disertasi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

- Ismail, Bakri, 2010. *Strategi Politik dalam Memobilisasi Dukungan Pemilih (Kasus Pilkada Kota Tidore Kepulauan 2005)*. Tesis. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Ismardi, 2009. *Strategi Politik Kandidat di Daerah Pasca-Bencana: Studi tentang Strategi Politik Kandidat Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh pada Pilkada Langsung Kota Banda Aceh 2006*. Tesis. Yogyakarta: PLOD-Fisipol UGM.
- Kaya, N., Dominggus, 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam Sistem Kepartaian Pluralis (Studi Identifikasi Strategi Koalisi PKS, PKPB dan PKBI dalam Pilkada 2005 di Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku)*. Tesis. Yogyakarta: PLOD Fisipol UGM.
- Kocu, Edward M., 2007. *Prisoner's Dilema: Studi Kasus tentang Rivalitas Etnis terhadap Perilaku Memilih dalam Pilkada Sorong Selatan, Papua Barat*. Tesis. Yogyakarta: PLOD Fisipol UGM.
- Lubis, Zulkifli, 2008. *Strategi Kampanye dalam Pilkada: Studi kasus tentang Strategi Kampanye dalam Pilkada Walikota Magelang 2005*. Tesis. Yogyakarta: PLOD Fisipol UGM.
- Muklis, 2009. *Strategi Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah: Kemenangan Pasangan Munawar L. Zainal dan Islamuddin di Kota Sabang 2006*. Tesis. Yogyakarta: PLOD Fisipol UGM.
- Namba, Seiko, 2007. *Political Marketing dalam Pilkada Langsung (Studi Kasus Kemenangan Herry Zudianto dan Haryadi Suyuti dalam Pilkada Langsung di Kota Yogyakarta)*. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM.

- Nugraheni, Cici, 2009. *Strategi Incumbent Mempertahankan Kursi Kepala Daerah (Studi Kemenangan Rustriningsih pada Pilkada Kebumen 2005)*. Tesis. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Paskarina, Caroline, 2004. *Ruang Publik dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi terhadap Pemilihan Walikota Bandung 2003*. Tesis. Yogyakarta: PLOD Fisipol UGM.
- Pratomo, Joko, 2006. *Strategi Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Kemenangan Ratna Ani Lestari pada Pilkada Banyuwangi 2005)*. Tesis. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Rasyid, Abdul, 2010. *Modalitas dan Kontestasi Politik (Studi tentang Modalitas dan Strategi Pemenangan Pilkada pada pasangan Kandidat Yusriansyah Syarkawi dan Azhar Baharudin dalam Pilkada 2010 di Kabupaten Paser-Kaltim)*. Tesis. Yogyakarta: PLOD Fisipol UGM.
- Ramadhan, Mohammad, 2008. *Strategi Memenangkan Pilkada di Tanah Dayak*. Tesis. Yogyakarta: PLOD Fisipol UGM.
- Syafruddin, 2006. *Demokrasi di Bantul: Studi Kasus tentang Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul 2005*. Tesis. Yogyakarta: PLOD Fisipol UGM.
- Syarkawi, 2007. *Fisibilitas Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Kalteng)*. Tesis. Yogyakarta: PLOD Fisipol UGM.
- Umasugi, S., Achdjan, 2009. *Instrumentasi Etnis dalam Pilkada Langsung (Studi tentang Peran Etnis dalam Kontestasi Politik di Pilkada Langsung Kabupaten Buru, Provinsi Maluku 2006)*. Tesis. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Umasugi, M., Isa, 2007. *Perilaku Memilih Birokrat Kasus Pilkada Langsung di Kabupaten Sula 2005*. Tesis. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

LAMPIRAN I

NARA SUMBER WAWANCARA/DISKUSI

No.	NAMA	PROFESI
1.	Awang Farouk Ishak	Gubernur
2.	Rudy T. Koesnandar	Tim Sukses AFI/Dewan Pakar
3.	Mohammad Arifin	Tim Sukses AFI
4.	H. Sudiaja MS	Tim Sukses AFI
5.	Awang Dharma Bhakti	Mantan Plt. Bupati Kukar/ Kolega AFI
6.	Diah Purwanti	Aktivis LSM Perempuan/ Demokrasi
7.	Wardhana	Aktivis LSM Lingkungan/ Demokrasi
8.	David Antony	Aktivis LSM Kebudayaan/ Demokrasi
9.	Charles Siahaan	Jurnalis/Aktivis Demokrasi
10.	Bukhori	Tokoh Masyarakat /Penyuluh
11.	B.Nazarudin	Tokoh Masyarakat/Ketua LPM
12.	Sukarji	Tokoh Masyarakat/Lurah
13.	Junaidi	Tokoh Masyarakat/Lurah
14.	Sunaryo	Tokoh Masyarakat/Lurah
15.	Sri Wahyuni	Tokoh Masyarakat/Lurah
16.	Bagus PS	Mahasiswa Kaltim/MIPA UGM

17.	Fajar Hariyanto	Mahasiswa Kaltim/Geologi UGM
18.	M.Lutfi Pratama	Mahasiswa Kaltim/ F.A.UGM
19.	Agus Aryandi	Mahasiswa Kaltim/ Geologi UGM
20.	Dika Harmadi	Mahasiswa Kaltim/Teknologi Industri UGM
21.	Achmad Baghaoy	Mahasiswa Kaltim/ Farmasi UGM
22.	Dwi Waluyo Nugroho	Mahasiswa Kaltim/Teknik Sipil UII
23.	Sigit Aditomo	Mahasiswa Kaltim/ Teknologi Informasi Akakom
24.	Agus Berata Wijaya	Mahasiswa Kaltim/Perikanan UGM
25.	Hary Kurniawan	Mahasiswa Kaltim/STIMIK Akakom
26.	Bernard	Mahasiswa Unmul
27.	Gandhy Irawan	Mahasiswa Kaltim/Kedokteran UGM
28.	Syarifudin	Sekdes/PNS
29.	Sunaryo	PNS/Staf Kelurahan
30.	Urip	Tokoh Masyarakat/Swasta
31.	Alimudin	Tokoh Masyarakat/Swasta
32.	Abdul Wahab	Tokoh Masyarakat/Swasta
33.	Arief Marsudi	Tokoh Masyarakat/Swasta
34.	Margaretha	Tokoh Masyarakat/Swasta

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :.....
Umur :.....
Tanggal Lahir :.....
Alamat :.....
Pekerjaan :.....
Telpon /HP :.....

1. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ialah mencari data tentang pemanfaatan budaya pemberian dan *money politics* dalam Pemenangan Pilkada Kaltim. Semua data responden akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan prosedur penelitian ilmiah. Penelitian ini ingin mendeskripsikan tentang mobilisasi jejaring etnisitas kaitannya dengan politik pencitraan.

2. PENGENALAN TERHADAP KANDIDAT

- a. Apakah Anda mengenal Awang Farouk Ishak dan Farid Wadjdy (AFI)? Secara pribadi atau lewat media?
- b. Sudah berapa lama Anda mengenal beliau (AFI)?
- c. Dalam kapasitas apa Anda mengenal atau mengetahui AFI?
- d. Berapa anak Awang dan Farid? Awang dari etnis apa? Farid dari etnis apa?

- e. Apakah masyarakat Kaltim sudah mengenal AFI?
- f. Apa profesi Awang dan Farid?
- g. Apakah AFI pernah berperan konkret dalam masyarakat? (pendidikan, kesehatan, agama, ekonomi, dll.)

3. JEJARING KEKERABATAN

- a. Berapa saudara Awang dan Farid? Apakah mereka juga aktif dalam politik/pemerintahan?
- b. Apakah Awang dan Farid masih ada hubungan dengan keluarga Sultan Kutai dan Banjar?
- c. Sejauh yang Anda tahu dari mana asal istri Awang dan Farid?
- d. Apakah AFI memiliki jejaring dengan kesultanan Kutai?
- e. Apakah AFI memiliki jejaring dengan komunitas/bangsawan Banjar?
- f. Menurut Anda apakah komunitas Kutai dan Banjar sangat kuat di Kaltim dan menentukan pemenangan Pilkada Kaltim? Mengapa?
- g. Apakah paguyuban etnis Kutai dan Banjar lebih cenderung mendukung AFI dibanding pasangan yang lain?
- h. Apakah etnis Jawa, Bugis, Makasar, Toraja, dan etnis lain juga mendukung AFI? Mengapa? Apa nama paguyuban etnis tersebut?
- i. Apakah ada organisasi masyarakat (agama, sosial dan budaya) yang mendukung AFI? Mengapa mereka mendukung?
- j. Apakah AFI dalam berkampanye juga menggunakan simbol-simbol agama dan budaya? Dalam bentuk seperti apa?
- k. Menurut Anda mengapa Awang memilih Farid (Banjar) dan bukannya etnis Jawa yang mayoritas?

- l. Apakah jejaring etnisitas merupakan faktor yang penting dalam pemenangan Pilkada? Bagaimana cara kerjanya? apakah faktor kekerabatan juga menjadi faktor penentu pemenangan Pilkada?
- m. Dalam proses kampanye Pilkada ada 'janji-janji' yang diberikan AFI kepada kelompok etnis atau paguyuban. Apa janji-janji AFI yang menonjol, sehingga menarik kelompok etnis lain memilih AFI?

4. PERAN KELUARGA AFI

- a. Apakah ada peran istri AFI dalam Pilkada? Dalam hal apa mereka berperan?
- b. Apakah anak-anak AFI juga ikut berkampanye? Dalam bentuk apa mereka berkampanye?
- c. Apakah saudara-saudara AFI juga mendukung?

5. JEJARING TIM SUKSES

- a. Apakah AFI memiliki tim sukses? Apa program mereka dalam Pilkada? Bagaimana kerja mereka?
- b. Apakah tim sukses AFI terdiri dari multietnis, multiagama? (segmen, program, kendali)
- c. Menurut Anda faktor-faktor apa yang menyebabkan AFI menang? (*product, promote, price, position*)
- d. AFI didukung oleh gabungan partai kecil, mengapa AFI menang? Bagaimana cara mengalahkan partai besar?

6. POLITIK PENCITRAAN

- a. Apa yang tema dicitrakan AFI dalam media untuk menang?
- b. Apakah AFI dalam pencitraannya menargetkan kelompok etnis tertentu?

- c. Apakah AFI menunjukkan merangkul semua kelompok etnis di Kaltim?
- d. Bagaimana strategi pencitraan AFI merangkul kemajemukan etnis dan agama di Kaltim?
- e. Menurut Anda mengapa AFI mencitrakan dirinya seperti itu?
- f. Apakah strategi pencitraan AFI melalui media efektif di masyarakat? Buktinya apa?

7. STRATEGI POLITIK

- a. Apakah AFI pernah menyerang lawannya dalam kampanye? (isu putra daerah)
- b. Apa tema utama kampanye AFI?
- c. Siapa segmen yang dibidik AFI?
- d. Apa keunggulan AFI dibanding dengan kandidat yang lain?
- e. Apakah AFI dapat diterima oleh komunitas Jawa, Bugis, Banjar, Makasar, dan Toraja?
- f. Apa saja program AFI dalam memberdayakan komunitas etnis?
- g. Apakah AFI memberikan bantuan kepada paguyuban/kelompok etnis dalam meraih simpati masyarakat? Bentuknya barang atau uang? Apakah efektif mendulang suara dengan bantuan tersebut?
- h. Menurut Anda bagaimana cara kerja tim sukses dalam memberdayakan jejaring etnisitas untuk memenangkan Pilkada?

8. MODAL EKONOMI

- a. Apakah Anda tahu jumlah kekayaan AFI? Berapa? Dalam bentuk uang atau aset?

- b. Apakah Anda tahu berapa biaya kampanye AFI?
- c. Apakah AFI mendapat bantuan dari pemerintah dalam kampanye? Pengusaha, atau partai politik?
- d. Menurut Anda apakah AFI menggunakan dana dari hasil penjualan saham sewaktu dia menjabat sebagai Bupati Kutim?

LAMPIRAN III

DAFTAR GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

No.	Foto	Nama	Dari	Sampai
1.		A.P.T. Pranoto (etnis Kutai/birokrat)	1956	1962
2.		I.A. Moeis (etnis Banjar/ politikus)	1959	1959
3.		Moeis Hasan (etnis Jawa/militer)	10 Agustus 1962	14 September 1966

No.	Foto	Nama	Dari	Sampai
4.		Soekadio (etnis Jawa/militer)	1966	1967
5.		Abdoel Wahab Sjahranie (etnis Banjar/militer)	1967	1978
6.		Ery Soepardjan (etnis Jawa/militer)	1978	1983
7.		H. Soewandi (etnis Jawa/militer)	1983	1988
8.		H.M. Ardans, SH (etnis Banjar/birokrat)	1988	1998

No.	Foto	Nama	Dari	Sampai
9.		Suwarna A.F. (etnis Sunda/militer)	1998	2006
10.		Drs. Yurnalis Ngayoh (etnis Dayak/birokrat)	8 Desember 2006	3 Juli 2008
		Tarmizi Abdul Karim (etnis Aceh/birokrat)	3 Juli 2008	17 Desember 2008
11.		Awang Faroek Ishak (etnis Kutai/politikus)	17 Desember 2008	Desember 2013